



## **BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

### **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Neraca; (d) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL); (e) Laporan Perubahan Ekuitas; (f) Laporan Arus Kas; dan (g) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kandangan, Mei 2022

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN



**ACHMAD FIKRY**



## **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Laporan keuangan SKPD tersebut kemudian dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP memberikan dua pilihan basis akuntansi, yakni (1) Basis Akrua, atau (2) Basis Kas Menuju Akrua. Basis Kas Menuju Akrua boleh diterapkan paling lambat sampai dengan tahun anggaran 2014 sedangkan Basis Akrua wajib diterapkan mulai tahun anggaran 2015. Pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mulai menerapkan SAP Berbasis Akrua.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2021 pada hakikatnya merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

##### **1. Akuntabilitas**

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

##### **2. Manajemen**

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

##### **3. Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam



pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan antar generasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2021 yang disusun berdasarkan SAP Berbasis AkruaI terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca, yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional (LO), yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas (LAK), yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pada periode tertentu.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang berisi penjelasan naratif atas informasi kuantitatif yang bersifat moneter yang disajikan pada LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. LKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Melalui LKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, para pengguna laporan diharapkan dapat memperoleh informasi untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. LKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan memuat informasi mengenai:



1. informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. informasi mengenai informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
- c. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
- d. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022).
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027).



- g. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028).
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693).
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5).
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2021.
- n. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Persetujuan Penyempurnaan dan Penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Perubahan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2021, berdasarkan atas Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0623/KUM/2021.
- o. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 91 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- p. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 0176 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- q. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- r. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Masa Manfaat dan Penyusunan Barang Milik Daerah.



- s. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 50 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan TA 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I** Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Bab II** Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD, menjelaskan tentang Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan.
- Bab III** Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Bab IV** Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- Bab V** Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
- Bab VI** Penjelasan atas Informasi Non Keuangan, menjelaskan informasi mengenai kinerja perusahaan daerah, pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari non APBD, dan kewajiban kontinjensi.
- Bab VII** Penutup.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

#### **2.1 Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

##### **2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang ada di dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai daerah otonom secara nyata terbentuk pada tanggal 2 Desember 1950 yakni saat dilantiknya Pejabat Bupati Kepala Daerah Pertama dan dibentuknya DPRDS, maka pada tanggal 2 Desember 1950 inilah menjadi pancangan tonggak sejarah berdiri Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kemudian dikukuhkan dengan ketetapan DPRD Tingkat II Hulu Sungai Selatan pada tanggal 26 Maret 1987 Nomor 06/KPTS/DPRD-HSS/1987 tentang Persetujuan Ketetapan Hari Jadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

##### **2.1.2 Letak Geografis dan Topografi**

Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak antara 114°51'19" BT – 115°36'19" BT dan antara 02°29'58" LS – 02°56'10" LS. Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah salah satu Kabupaten dari 13 (tiga belas) kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak ke arah Utara ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dengan jarak tempuh 135 Km. Wilayahnya berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Hulu Sungai Tengah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapin.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar, Tanah Bumbu dan Kota Baru.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin.

Kabupaten yang beribukota di Kandangan ini memiliki 11 (sebelas) Kecamatan yaitu: Kecamatan Padang Batung, Loksado, Telaga Langsat, Angkinang, Kandangan, Sungai Raya, Simpur, Kalumpang, Daha Selatan, Daha Utara dan Daha Barat.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki luas wilayah 1.804,92 km<sup>2</sup> atau 180.494 hektar. Lebih dari separuh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada di kelas ketinggian 0-7 meter dan di kemiringan 0-2 persen. Menurut kelas ketinggian dari permukaan laut 58,3 persen wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada pada ketinggian 0-7 meter dan hanya 0,9 persen berada pada ketinggian di atas 1.000 meter. Berdasarkan kemiringannya 70,95 persen wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada pada kelas kemiringan 0-2 persen. Sedangkan 6,99 persen wilayah





berada pada kemiringan lebih dari 40 persen. Pemerintah Kabupaten HSS didirikan pada 4 Juli 1959 berdasarkan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang – undang dengan ibukota Kandangan.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan tahun 2021, jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebanyak 240.020 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 120.633 jiwa dan perempuan 119.387 jiwa. Daerah ini merupakan daerah rawa, sebagian besar penduduk bermata-pencaharian sebagai petani dan nelayan.

### **2.1.3 Visi dan Misi**

Visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2023 adalah “Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat” dengan Misi:

1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar.
2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal (daya saing).
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian (kesejahteraan).
4. Mengoptimalkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan (pemberdayaan).
5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis (kelembagaan, keagamaan).

### **2.1.4 Organisasi dan Personalia**

Organisasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditetapkan dengan beberapa Peraturan Daerah:

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten HSS.
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten HSS;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.





4. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Pembentukan dan susunan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 terbagi menjadi 3 fungsi yaitu:

1. Fungsi pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Inspektorat Daerah.
2. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
  - d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - f. Dinas Sosial;
  - g. Dinas Ketahanan Pangan;
  - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - j. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
  - k. Dinas Perhubungan;
  - l. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - o. Dinas Perikanan;
  - p. Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata;



- q. Dinas Pertanian;
  - r. Dinas Perdagangan; dan
  - s. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian.
3. Fungsi penunjang pemerintahan daerah dengan susunan sebagai berikut:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
  - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
  - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pembentukan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016 terdiri atas 11 Kecamatan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Kandangan;
- b. Kecamatan Sungai Raya;
- c. Kecamatan Simpur;
- d. Kecamatan Kalumpang;
- e. Kecamatan Angkinang;
- f. Kecamatan Telaga Langsat;
- g. Kecamatan Padang Batung;
- h. Kecamatan Loksado;
- i. Kecamatan Daha Utara;
- j. Kecamatan Daha Selatan; dan
- k. Kecamatan Daha Barat.

Kecamatan Kandangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016 terdiri atas 4 kelurahan sebagai berikut:

- a. Kelurahan Kandangan Kota;
- b. Kelurahan Kandangan Utara;
- c. Kelurahan Kandangan Barat;
- d. Kelurahan Jambu Hilir.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati periode 2020-2023 dijabat oleh Drs. H. Achmad Fikry, M. AP dan Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, S.AP.



### **2.1.5 Ekonomi Makro**

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 mengacu pada indikator sosial ekonomi pada tahun 2021 atau tahun sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan Ekonomi Makro meliputi:

- a. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021 sebesar 4,84 persen.
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021 sebesar 2,44 persen.
- c. Gini Ratio Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021 sebesar 0,275.
- d. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021 sebesar 69,21.
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021 sebesar 4,18 persen.
- f. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021 sebesar 7.013.108,28 (Juta Rupiah).

#### **2.1.5.1 Tingkat Kemiskinan**

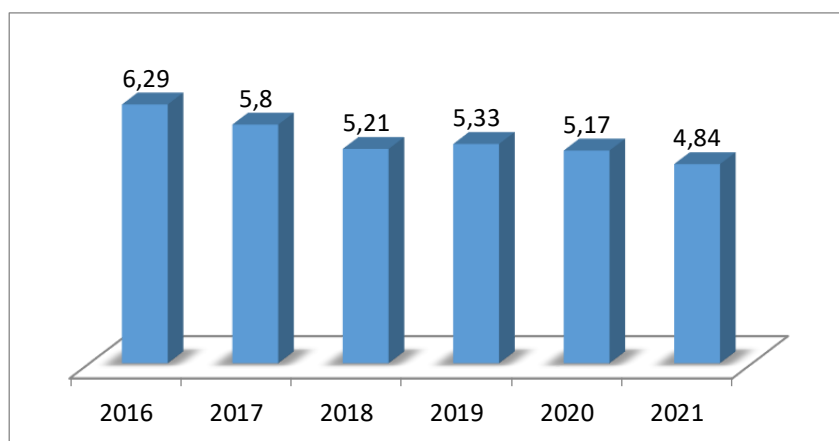
Kemiskinan suatu wilayah ditentukan oleh beberapa indikator antara lain persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Penduduk miskin ditentukan berdasarkan garis kemiskinan pada suatu wilayah. Nilai garis kemiskinan setiap wilayah dan periode waktu berbeda. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin pada suatu daerah dan periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh perbedaan pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan



keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Penduduk miskin Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 11,47 ribu orang atau sekitar 4,84 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibandingkan tahun 2020 sebesar 12,39 ribu orang atau 5,17 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kondisi tahun 2021 ini merupakan gambaran kemiskinan dengan data yang dikumpulkan pada Maret 2021. Pada kondisi pandemi covid-19, tingkat kemiskinan masih bisa mengalami penurunan, hal ini terjadi karena adanya antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Program dari pusat maupun daerah dengan sasaran penduduk miskin ini, sangat membantu dalam penanggulangan kemiskinan di tengah adanya pandemi. Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan di antaranya Program Rumah Sejahtera (Bedah Rumah), Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Program Subsidi Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin/Ranstra), dan program-program pendukung penanggulangan Kemiskinan lainnya. Selain itu, adanya pandemi ini menurunkan kebiasaan masyarakat yang makan di warung, sehingga pengeluaran untuk makanan jadi berkurang dan beralih untuk memasak sendiri. Hal ini mengakibatkan adanya penurunan pengeluaran penduduk terutama pada makanan dan minuman jadi.

**Grafik 2.1 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016-2021 (persen)**



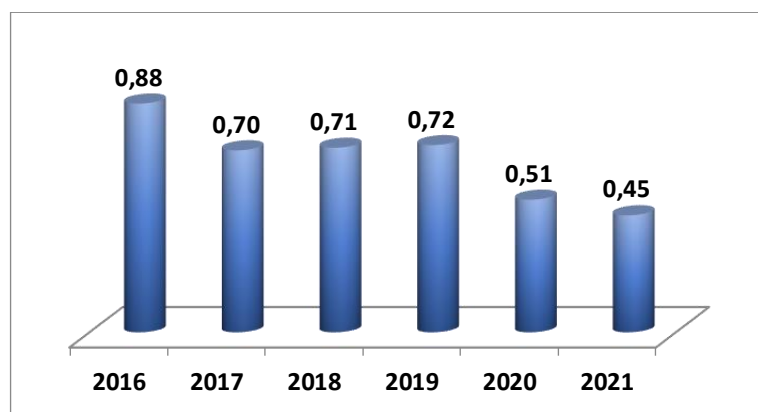
Sumber: BPS Kab. HSS

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Pada tahun 2021, indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,45. Perubahan indeks kedalaman antar tahun memiliki kecenderungan menurun. Jika dibandingkan tahun 2019, indeks kedalaman kemiskinan



mengalami penurunan yaitu 0,51. Nilai P1 yang semakin rendah menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat. Diharapkan dengan nilai P1 yang semakin kecil, penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi miskin.

**Grafik 2.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016-2021**



Sumber : BPS Kab. HSS

Indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami penurunan pada dua tahun terakhir. Pada tahun 2021 nilai indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,06. Hal ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,03 dibandingkan tahun 2020. Keadaan ini menggambarkan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin pada tahun 2021 dibanding tahun sebelumnya berkurang walaupun masih ada ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**Grafik 2.3 Indeks Keparahhan Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016-2021**



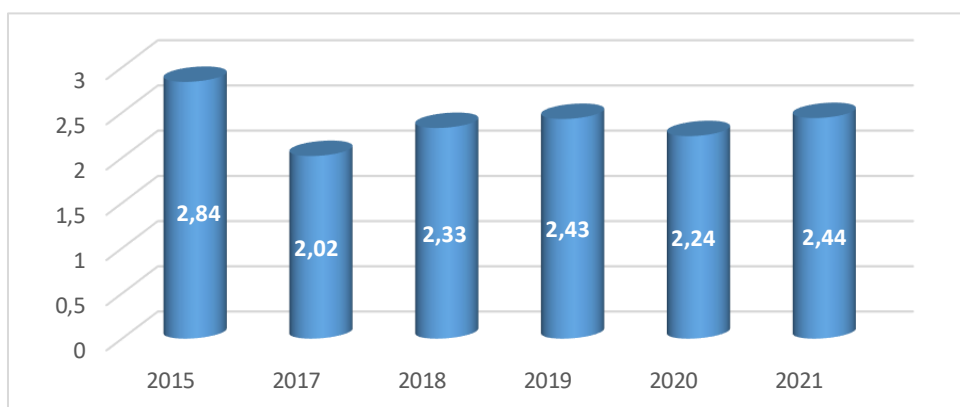
Sumber : BPS Kab. HSS



#### 2.1.5.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada indikator makro tentang ketenagakerjaan dapat dilihat dari indikator TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka). TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

**Grafik 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015, 2017-2021 (persen)**



Sumber : BPS Kab. HSS

Tingkat pengangguran di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun 2015 hingga 2021 mengalami fluktuatif dengan range antara 2,02 – 2,84 persen. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yaitu 2,44 persen pada tahun 2021 dan 2,24 persen pada 2020. Terjadi peningkatan sebesar 0,2 persen. Pada kurun waktu dua tahun ini terdapat pandemi covid-19 yang mengakibatkan adanya kehilangan pekerjaan. Pada akhir tahun 2021, keadaan pandemi mulai tumbuh kembali, sehingga adanya peningkatan yang mencari pekerjaan ataupun memulai usaha sehingga penduduk dikategorikan kedalam angkatan kerja yang menyumbang nilai di pengangguran terbuka.

**Tabel.2.1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2021**

| No | Uraian                                             | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Naik/Turun (persen) |
|----|----------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|
| 1. | Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (persen) HSS | 2,24       | 2,44       | 8,93                |
| 2  | Tingkat Pengangguran Provinsi (persen) Kalsel      | 4,74       | 4,95       | 4,43                |
| 3  | Tingkat Pengangguran Nasional (persen)             | 7,07       | 6,49       | (8,20)              |

Sumber Dokumen: BPS Kab. HSS



Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Hulu Sungai Selatan jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Kalimantan Selatan dan TPT Nasional, memiliki nilai yang lebih kecil. Akan tetapi, perubahan TPT dari 2020 ke 2021 memiliki persentase perubahan tertinggi yaitu 8,93 persen, sementara di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan 4,43 persen dan Tingkat Nasional mengalami penurunan sebesar 8,20 persen.

#### **2.1.5.3 Indeks Gini (Gini Ratio)**

Indeks Gini atau Gini Ratio merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Penghitungan Indeks Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

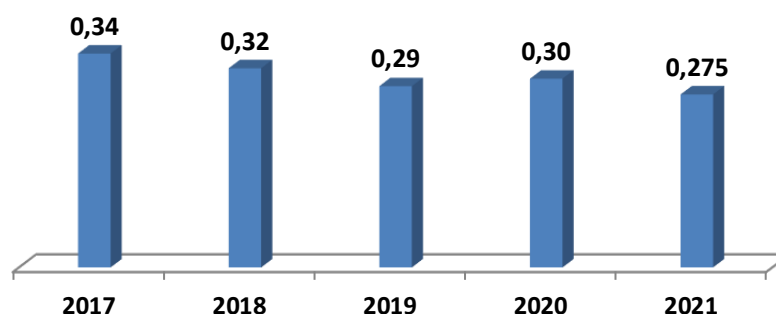
- a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
- b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin rendah, sebaliknya mendekati 1 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin tinggi. Jika rasio lebih dari 0,5, maka terjadi ketimpangan yang cukup tajam dan serius, dan jika rasio berkisar 0,30 – 0,49 maka distribusi pendapatan relatif merata. Pengolahan data SUSENAS Maret 2021 menunjukkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2021 nilai Indeks Gini sebesar 0,275. Hal ini berarti bahwa distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan relatif merata. Nilai Indeks Gini dari tahun 2016-2021 memiliki tren yang relatif menurun. Hal ini menggambarkan semakin merata distribusi pendapatan penduduk. Dibandingkan gini ratio tahun 2018 sebesar 0,320 terjadi penurunan angka Gini Ratio sebesar 0,045 poin. Artinya ketimpangan/ketidakmerataan pengeluaran antar penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan semakin mengecil.





**Grafik 2.5 Gini Ratio Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2021**



Sumber : Diolah dari Susenas 2017-2020, BPS Kab. HSS

#### 2.1.5.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah ( $< 60$ )
- Sedang ( $60 \leq \text{IPM} < 70$ )
- Tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ )
- Sangat Tinggi ( $> 80$ )

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 adalah sebesar 69,21 poin dengan kategori sangat sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel.2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia**

| No | IPM (Tingkat)      | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Naik/turun (%) |
|----|--------------------|------------|------------|----------------|
| 1  | Kabupaten/Kota HSS | 68,85      | 69,21      | 0,52           |
| 2  | Provinsi Kal-Sel   | 70,91      | 71,28      | 0,51           |
| 3  | Indonesia/Nasional | 71,94      | 72,29      | 0,49           |

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 adalah sebesar 69,21 poin. Jika dibandingkan dengan IPM tahun 2020 sebesar 68,85, sehingga mengalami peningkatan sebesar 0,36 poin (0,52 persen). Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya keempat komponen pembentuk IPM yaitu (i) umur harapan hidup saat lahir (AHH), (ii) harapan lama sekolah (HLS),



(iii) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan (iv) Pengeluaran perkapita. Umur harapan hidup bayi yang lahir tahun 2021 diharapkan mencapai 66,12 tahun, hal ini terjadi peningkatan harapan umur lebih lama 0,15 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 7,76 tahun dengan harapan lama sekolah 12,38 tahun. Sementara, pada sisi standar hidup yang didekati oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan per tahun sebesar Rp12.736.000,00 atau meningkat Rp 64.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya.

#### 2.1.5.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

**Tabel 2.1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

| No | Uraian                           | Kabupaten/Kota HSS<br>( juta rupiah) |              |              | Provinsi<br>(juta rupiah) | Nasional<br>(Milyar<br>Rupiah) |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------------------------|
|    |                                  | Tahun 2019                           | Tahun 2020   | Tahun 2021   | Tahun 2021                | Tahun 2021                     |
| 1  | PDRB (harga konstan 2010)        | 4.706.463,28                         | 4.650.222,36 | 4.844.531,82 | 135.412.851,11            | 11.118.868,50                  |
| 2  | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) HSS | 5,28                                 | -1,19        | 4,18         | 3,48                      | 3,69                           |

Sumber: BPS Kab. HSS

Selama kurun waktu Tahun 2019-2021 perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami peningkatan/ rata-rata sebesar 6,14%. Pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar -1,19% mengalami penurunan pertumbuhan dibanding tahun 2019. Akan tetapi pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,18%. Tahun 2020 dalam skala Provinsi laju pertumbuhan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menempati urutan 4 kota atau kabupaten lain tertinggi dalam wilayah Provinsi Kalsel.

#### 2.1.5.6 Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan



harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*). Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Menurut data dari BPS, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak ada mengeluarkan angka tingkat inflasi. Inflasi yang dapat digunakan sebagai acuan adalah inflasi Kota Banjarmasin. Pada Desember 2021 inflasi (y on y) yang terjadi sebesar 2,54 persen. Komoditas yang memiliki andil dalam inflasi Kota Banjarmasin antara lain angkutan udara, pepaya, cabai rawit, minyak goreng dan bahan bakar rumah tangga.

Inflasi bulan Desember 2021 terjadi karena adanya kenaikan harga yang pada delapan dari sebelas kelompok pengeluaran yang ditunjukkan oleh naiknya Indeks Harga Konsumen pada kelompok pengeluaran Makanan, Minuman dan tembakau sebesar 1,20 persen; kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,63 persen; kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,52 persen; kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin RumahTangga sebesar 0,22 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,19 persen; kelompok Transportasi sebesar 2,95 persen; kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,38 persen; dan kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,11 persen.

#### 2.1.5.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Struktur perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1.4 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha**  
**(Dalam Jutaan Rupiah)**

| Kategori | Uraian                                                            | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| (1)      | (2)                                                               | (11)  | (12)  | (13)  | (14)  | (15)  |
| A        | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                               | 25,63 | 25,13 | 24,56 | 24,80 | 23,60 |
| B        | Pertambangan dan Penggalian                                       | 9,90  | 10,79 | 10,37 | 9,72  | 11,45 |
| C        | Industri Pengolahan                                               | 8,39  | 8,11  | 8,01  | 7,86  | 8,07  |
| D        | Pengadaan Listrik, Gas                                            | 0,08  | 0,08  | 0,08  | 0,09  | 0,09  |
| E        | Pengadaan Air                                                     | 0,34  | 0,34  | 0,35  | 0,38  | 0,37  |
| F        | Konstruksi                                                        | 7,92  | 7,92  | 8,06  | 7,81  | 7,90  |
| G        | Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 9,21  | 9,26  | 9,41  | 9,34  | 9,44  |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| Kategori                              | Uraian                                                         | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| H                                     | Transportasi dan Pergudangan                                   | 5,19          | 5,16          | 5,23          | 5,17          | 5,12          |
| I                                     | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 3,60          | 3,65          | 3,82          | 3,83          | 3,76          |
| J                                     | Informasi dan Komunikasi                                       | 4,36          | 4,36          | 4,53          | 4,91          | 4,99          |
| K                                     | Jasa Keuangan                                                  | 2,02          | 2,00          | 1,98          | 1,99          | 1,99          |
| L                                     | Real Estate                                                    | 2,40          | 2,36          | 2,41          | 2,59          | 2,56          |
| M,N                                   | Jasa Perusahaan                                                | 0,12          | 0,12          | 0,13          | 0,13          | 0,12          |
| O                                     | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 9,38          | 9,28          | 9,34          | 9,28          | 8,65          |
| P                                     | Jasa Pendidikan                                                | 7,58          | 7,51          | 7,65          | 7,74          | 7,44          |
| Q                                     | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 2,14          | 2,16          | 2,25          | 2,52          | 2,61          |
| R,S,T,U                               | Jasa lainnya                                                   | 1,74          | 1,76          | 1,84          | 1,85          | 1,81          |
| <b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b> |                                                                | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

Sumber: BPS Kab. HSS

## 2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Daerah mengacu pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang merupakan kesepakatan bersama antara Bupati Hulu Sungai Selatan dengan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kebijakan keuangan mencakup kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berikut uraian kebijakan keuangan tersebut.

### 2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut:

#### 1. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilarang menganggarkan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturan daerahnya bertentangan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau telah dibatalkan.
- Kebijakan penganggaran tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah).
- Pendapatan yang diperoleh dari bagian laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang layanannya belum mencapai 80% dari jumlah



penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM dianggarkan sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, selanjutnya diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan sarana prasarana dan sarana penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan tersebut dianggarkan untuk tambahan penyertaan modal kepada PDAM sesuai peraturan perundang-undangan.

## **2. Kebijakan Dana Perimbangan**

- a. Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2020.
- b. Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) mempertimbangkan besaran alokasi DBH yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Tahun Anggaran 2021, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2021 dan/atau tidak tercapainya hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2021, serta memperhatikan realisasi DBH Tahun Anggaran 2020.

## **3. Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

- a. Target pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari pemerintah provinsi, didasarkan pada alokasi bagi hasil Tahun Anggaran 2020, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2020, ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
- b. Penetapan target penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD pada kelompok Pendapatan Lain-Lain Daerah Yang Sah, setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud.

### **2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah**

Kebijakan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari:

#### **1. Belanja Tidak Langsung**

- a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai diprediksikan untuk Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, mutasi dan penambahan PNSD yang telah disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai.



b. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah dan bantuan sosial dilakukan secara lebih selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan dibatasi dan diperjelas format pertanggungjawabannya, pemberian hibah dan bantuan sosial ini diberikan untuk pendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah seperti TMMD dan KPUD, semi pemerintah seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK dan masyarakat serta organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

c. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil diprediksikan untuk Tahun Anggaran 2021 tetap memperhatikan pada realisasi target Tahun Anggaran 2020 dengan penyesuaian rencana pendapatan Tahun Anggaran 2020.

**2. Belanja Langsung**

- a. Menghindari pemborosan dengan melaksanakan kegiatan berdasarkan prioritas program kegiatan yang telah ditentukan dan berdasarkan analisa beban kerja serta kewajiban biaya yang dikaitkan dengan outputnya.
- b. Proporsi belanja modal lebih besar dari pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dan dilakukan secara selektif serta proporsional.
- c. Penganggaran honorarium bagi PNSD dan non PNSD dibatasi sesuai tingkat kewajiban dan beban tugas.
- d. Segala bentuk biaya pelatihan dan perjalanan dinas dilakukan untuk kegiatan yang benar-benar penting dan dilakukan secara selektif.

**2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Kebijakan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri atas:

**1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Struktur anggaran setelah pendapatan dan belanja daerah adalah pembiayaan daerah. Pembiayaan terjadi karena adanya surplus dan defisit anggaran daerah. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dialokasikan jika terjadi defisit anggaran yang berfungsi untuk menutup selisih kurang anggaran. Adapun sumber penerimaan pembiayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun anggaran 2021 bersumber dari penggunaan sisa lebih anggaran tahun lalu (SiLPA);

**2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan jika terjadi surplus anggaran untuk memanfaatkan sisa lebih anggaran. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak mengalokasikan anggaran untuk pengeluaran pembiayaan selama Tahun 2021.



### **BAB III**

#### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

#### **3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

##### **3.1.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021**

Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran (TA) 2021 secara ringkas disajikan pada Tabel 3.1.1 berikut ini.

**Tabel 3.1.1 Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2021**

|           | <b>Uraian</b>                         | <b>Anggaran<br/>(Rp)</b>    | <b>Realisasi<br/>(Rp)</b>  | <b>Surplus<br/>Penerimaan / Sisa<br/>Pengeluaran (Rp)</b> |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>I</b>  | <b>Pendapatan dan Belanja</b>         |                             |                            |                                                           |
|           | Pendapatan Daerah                     | 1.275.769.551.357,00        | 1.342.594.283.395,62       | 66.824.732.038,62                                         |
|           | Belanja Daerah                        | 1.578.122.225.635,28        | 1.420.783.809.255,16       | (157.338.416.380,12)                                      |
|           | <b>Surplus (defisit)</b>              | <b>(302.352.674.278,28)</b> | <b>(78.189.525.859,54)</b> | <b>224.163.148.418,74</b>                                 |
| <b>II</b> | <b>Pembiayaan</b>                     |                             |                            |                                                           |
|           | Penerimaan Pembiayaan                 | 302.352.674.278,28          | 302.352.674.278,28         | 0,00                                                      |
|           | Pengeluaran Pembiayaan                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                                      |
|           | <b>Pembiayaan Netto</b>               | <b>302.352.674.278,28</b>   | <b>302.352.674.278,28</b>  | <b>0,00</b>                                               |
|           | <b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b> | <b>0,00</b>                 | <b>224.163.148.418,74</b>  | <b>224.163.148.418,74</b>                                 |

Berdasarkan tabel 3.1.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa:

1. Realisasi Pendapatan Daerah TA 2021 sebesar Rp1.342.594.283.395,62 lebih besar Rp66.824.732.038,62 atau 5,24% dibandingkan anggaran sebesar Rp1.275.769.551.357,00.
2. Realisasi Belanja Daerah TA 2021 sebesar Rp1.420.783.809.255,16 lebih rendah Rp157.338.416.380,12 atau 9,97% dibandingkan anggaran sebesar Rp1.578.122.225.635,28.
3. Pada realisasi APBD TA 2021 terdapat defisit sebelum pembiayaan sebesar Rp78.189.525.859,54. Sedangkan pada pembiayaan terdapat Pembiayaan Neto sebesar Rp302.352.674.278,28 sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp224.163.148.418,74.

SiLPA TA 2021 berasal dari pelampauan target pendapatan daerah sebesar Rp66.824.732.038,62 atau 5,24%; efisiensi anggaran belanja daerah sebesar Rp157.338.416.380,12 atau 9,97%.

##### **3.1.2 Perbandingan Realisasi TA 2021 dan 2020**

Perbandingan realisasi TA 2021 dengan TA 2020 disajikan pada Tabel 3.1.2. Berdasarkan Tabel 3.1.2 tersebut, nampak bahwa:

1. Pendapatan daerah TA 2021 turun sebesar Rp11.225.601.824,24 atau 0,83%.
2. Belanja daerah TA 2021 naik sebesar Rp94.036.231.068,14 atau 7,09%.



3. Pembiayaan Neto naik sebesar Rp27.072.307,032,84 atau 9,83% sedangkan SiLPA turun sebesar Rp78.189.525.859,54 atau 25,86%.

**Tabel 3.1.2 Perbandingan Realisasi TA 2021 dan TA 2020**

|           | Uraian                                | Tahun 2021<br>(Rp)         | Tahun 2020<br>(Rp)        | TA.2021 - TA.2020<br>(Rp)   | %               |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>I</b>  | <b>Pendapatan dan Belanja</b>         |                            |                           |                             |                 |
|           | Pendapatan Daerah                     | 1.342.594.283.395,62       | 1.353.819.885.219,86      | (11.225.601.824,24)         | (0,83)          |
|           | Belanja Daerah                        | 1.420.783.809.255,16       | 1.326.747.578.187,02      | 94.036.231.068,14           | 7,09            |
|           | <b>Surplus (defisit)</b>              | <b>(78.189.525.859,54)</b> | <b>27.072.307.032,84</b>  | <b>(105.261.832.892,38)</b> | <b>(388,82)</b> |
| <b>II</b> | <b>Pembiayaan</b>                     |                            |                           |                             |                 |
|           | Penerimaan Pembiayaan                 | 302.352.674.278,28         | 275.280.367.245,44        | 27.072.307.032,84           | 9,83            |
|           | Pengeluaran Pembiayaan                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                        | 0,00            |
|           | <b>Pembiayaan Netto</b>               | <b>302.352.674.278,28</b>  | <b>275.280.367.245,44</b> | <b>27.072.307.032,84</b>    | <b>9,83</b>     |
|           | <b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b> | <b>224.163.148.418,74</b>  | <b>302.352.674.278,28</b> | <b>(78.189.525.859,54)</b>  | <b>(25,86)</b>  |

### 3.1.3 Ikhtisar Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan TA 2021

Realisasi belanja daerah TA 2021 sebesar Rp1.420.783.809.255,16 terdiri atas belanja operasi sebesar Rp970.121.278.940,00, belanja modal sebesar Rp260.921.215.974,16, belanja tidak terduga sebesar Rp4.408.917.341,00 dan belanja transfer sebesar Rp185.332.397.000,00.

### 3.1.4 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dengan menggunakan total realisasi pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah sebagai tolak ukur *persentase*, jumlah masing-masing perbandingan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2021 sebesar Rp247.697.934.566,62 atau sebesar 18,45% dari keseluruhan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1.342.594.283.395,62;
- Realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 sebesar Rp1.072.252.216.279,00 atau sebesar 79,86% dari keseluruhan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1.342.594.283.395,62;
- Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2021 sebesar Rp22.644.132.550,00 atau sebesar 1,69% dari keseluruhan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1.342.594.283.395,62;
- Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 sebesar Rp482.702.664.650,00 atau sebesar 33,97% dari total realisasi belanja daerah sebesar Rp1.420.783.809.255,16;
- Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 sebesar Rp444.359.498.382,00 atau sebesar 31,28% dari total realisasi belanja daerah sebesar Rp1.420.783.809.255,16;





- f. Realisasi Belanja Hibah TA 2021 sebesar Rp25.458.597.908,00 atau sebesar 1,79% dari total realisasi belanja daerah sebesar Rp1.420.783.809.255,16;
- g. Realisasi Belanja Bansos TA 2021 sebesar Rp17.600.518.000,00 atau sebesar 1,24% dari total realisasi belanja daerah sebesar Rp1.420.783.809.255,16;
- h. Realisasi Belanja Modal TA 2021 sebesar Rp260.921.215.974,16 atau sebesar 18,36% dari total realisasi belanja daerah sebesar Rp1.420.783.809.255,16;
- i. Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2021 sebesar Rp4.408.917.000,00 atau sebesar 0,31% dari total realisasi belanja daerah sebesar Rp1.420.783.809.255,16;
- j. Realisasi Belanja Transfer TA 2021 sebesar Rp185.332.397.000,00 atau sebesar 13,04% dari total realisasi belanja daerah sebesar Rp1.420.783.809.255,16.

Belanja daerah terealisasi sebesar 90,03% dibandingkan dengan anggarannya. Tidak tercapainya target Belanja TA 2021 merupakan akibat dari efisiensi anggaran pada tiap-tiap pos belanja serta *refocussing* anggaran untuk pendanaan Covid-19.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6) yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku entitas akuntansi, dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1.1

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. SKPD di Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi dinas, badan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kantor, kecamatan, dan kelurahan.

**Tabel 4.1.1 Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

| No | Kode      | Nama SKPD                                                                                     |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 01.01.01  | Dinas Pendidikan                                                                              |
| 2  | 01.02.01  | Dinas Kesehatan                                                                               |
| 3  | 01.02.02  | RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan                                                        |
| 4  | 01.03.01  | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang                                                           |
| 5  | 01.04.01  | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup                                |
| 6  | 01.05.01  | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran                                              |
| 7  | 01.05.02  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                           |
| 8  | 01.06.01  | Dinas Sosial                                                                                  |
| 9  | 02.03.01  | Dinas Ketahanan Pangan                                                                        |
| 10 | 02.06.01  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                       |
| 11 | 02.07.01  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                        |
| 12 | 02.08.01  | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 13 | 02.09.01  | Dinas Perhubungan                                                                             |
| 14 | 02.10.01  | Dinas Komunikasi dan Informatika                                                              |
| 15 | 02.11.01  | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian                                   |
| 16 | 02.12.01  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                        |
| 17 | 02.13.01  | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata                                                          |
| 18 | 02.17.01  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                                              |
| 19 | 03.01.01  | Dinas Perikanan                                                                               |
| 20 | 03.03.01  | Dinas Pertanian                                                                               |
| 21 | 03.06.01  | Dinas Perdagangan                                                                             |
| 22 | 04.01.01  | Sekretariat Daerah                                                                            |
| 23 | 4.01.01.1 | Bagian Hukum                                                                                  |
| 24 | 4.01.01.2 | Bagian Pemerintahan                                                                           |
| 25 | 4.01.01.3 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan                                                       |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Kode       | Nama SKPD                                                         |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 26 | 4.01.01.4  | Bagian Kesejahteraan Rakyat                                       |
| 27 | 4.01.01.5  | Bagian Organisasi                                                 |
| 28 | 4.01.01.6  | Bagian Umum                                                       |
| 29 | 4.01.01.7  | Bagian Pengadaan barang dan Jasa                                  |
| 30 | 4.01.01.8  | Bagian Perekonomian dan Pembangunan                               |
| 31 | 04.02.01   | Inspektorat Kabupaten                                             |
| 32 | 04.03.01   | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 33 | 04.04.01   | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah                  |
| 34 | 04.05.01   | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia            |
| 35 | 04.08.01   | Sekretariat DPRD                                                  |
| 36 | 04.11.01   | Kecamatan Sungai Raya                                             |
| 37 | 04.11.02   | Kecamatan Padang Batung                                           |
| 38 | 04.11.03   | Kecamatan Telaga Langsat                                          |
| 39 | 04.11.04   | Kecamatan Angkinang                                               |
| 40 | 04.11.05   | Kecamatan Kandangan                                               |
| 41 | 04.11.05.1 | Kelurahan Kandangan Kota                                          |
| 42 | 04.11.05.2 | Kelurahan Kandangan Barat                                         |
| 43 | 04.11.05.3 | Kelurahan Kandangan Utara                                         |
| 44 | 04.11.05.4 | Kelurahan Jambu Hilir                                             |
| 45 | 04.11.06   | Kecamatan Simpur                                                  |
| 46 | 04.11.07   | Kecamatan Daha Selatan                                            |
| 47 | 04.11.08   | Kecamatan Daha Utara                                              |
| 48 | 04.11.09   | Kecamatan Kalumpang                                               |
| 49 | 04.11.10   | Kecamatan Loksado                                                 |
| 50 | 04.11.11   | Kecamatan Daha Barat                                              |
| 51 | 04.12.01   | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                 |

Di samping entitas akuntansi berupa SKPD sebagaimana tersebut di atas, terdapat pula entitas akuntansi berupa unit kerja pada SKPD. Entitas akuntansi berupa unit kerja pada SKPD tersebut adalah unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Unit kerja pada SKPD yang menerapkan BLUD yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry. Selain itu terdapat pula unit kerja sebagai Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan yang mengelola anggaran JKN yang sebagian bukan merupakan entitas akuntansi karena belum berstatus sebagai Badan Layanan Umum, sebagian lagi sudah bersatus BLUD namun belum menjalankan fungsi BLUD secara penuh yaitu Rumah Sakit Daha Sejahtera, Puskesmas Kandangan, dan Puskesmas Negara, sehingga masih berada di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun nama-nama UPT Dinas Kesehatan, diuraikan dalam Tabel 4.1.2 berikut:



**Tabel 4.1.2 UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

| No | Kode      | Nama SKPD                 |
|----|-----------|---------------------------|
| 1  | 1.02.1.1  | Puskesmas Padang Batung   |
| 2  | 1.02.1.2  | Puskesmas Kaliring        |
| 3  | 1.02.1.3  | Puskesmas Malinau         |
| 4  | 1.02.1.4  | Puskesmas Loksado         |
| 5  | 1.02.1.5  | Puskesmas Telaga Langsung |
| 6  | 1.02.1.6  | Puskesmas Angkinang       |
| 7  | 1.02.1.7  | Puskesmas Bamban          |
| 8  | 1.02.1.8  | Puskesmas Kandangan       |
| 9  | 1.02.1.9  | Puskesmas Gambah          |
| 10 | 1.02.1.10 | Puskesmas Jambu Hilir     |
| 11 | 1.02.1.11 | Puskesmas Sungai Raya     |
| 12 | 1.02.1.12 | Puskesmas Batang Kulur    |
| 13 | 1.02.1.13 | Puskesmas Simpur          |
| 14 | 1.02.1.14 | Puskesmas Wasah           |
| 15 | 1.02.1.15 | Puskesmas Kalumpang       |
| 16 | 1.02.1.16 | Puskesmas Bayanan         |
| 17 | 1.02.1.17 | Puskesmas Sungai Pinang   |
| 18 | 1.02.1.18 | Puskesmas Baruh Jaya      |
| 19 | 1.02.1.19 | Puskesmas Bajayau         |
| 20 | 1.02.1.20 | Puskesmas Negara          |
| 21 | 1.02.1.21 | Puskesmas Pasungkan       |
| 22 | 1.02.1.22 | RSUD Daha Sejahtera       |

#### 4.2 Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menerapkan akuntansi berbasis akrual yang telah dimulai pada Tahun Anggaran 2015 hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Dimana pada Pasal 10 Ayat (2) dinyatakan bahwa penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Kebijakan akuntansi untuk penerapan basis akuntansi secara akrual tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Beberapa bagian penting dari kebijakan akuntansi basis akrual yang diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan diuraikan sebagai berikut.



#### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

##### **4.3.1 Pengukuran Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

##### **1. Aset Lancar**

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c. Piutang dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yakni mengurangi nilai piutang dengan penyisihan piutang tidak tertagih;
- d. Persediaan dicatat sebesar:
  - 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
  - 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- e. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar (*outstanding*).

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang, jenis piutang, serta mempertimbangkan keberadaan agunan dan barang sitaan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:



**Tabel 4.1.3 Kualitas Umur Piutang**

| No. | Kategori Piutang | Piutang Pajak        |                | Piutang Retribusi    |                |
|-----|------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
|     |                  | % penyisihan piutang | Jatuh Tempo    | % penyisihan piutang | Jatuh Tempo    |
| 1.  | Lancar           | 0,50%                | Kurang 1 tahun | 0,50%                | Kurang 1 bulan |
| 2.  | Kurang Lancar    | 10%                  | 1 s/d 3 tahun  | 10%                  | 1 s/d 3 bulan  |
| 3.  | Diragukan        | 50%                  | 2 s/d 5 tahun  | 50%                  | 3 s/d 12 bulan |
| 4.  | Macet            | 100%                 | 5 tahun lebih  | 100%                 | 1 tahun lebih  |

## 2. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang terdiri atas Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen.

### a. Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan dan diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu.

### b. Investasi non permanen pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupa pengelolaan dana bergulir kepada kelompok masyarakat, untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu dan kemudian disalurkan kembali.

#### **Penilaian**

Investasi dalam bentuk dana bergulir kepada kelompok masyarakat dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah saldo investasi dalam bentuk dana bergulir kepada kelompok masyarakat setelah dikurangi penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih yang ditentukan berdasarkan umur dana bergulir yaitu sejak jatuh tempo atas kewajiban yang harus dipenuhi oleh kelompok masyarakat

#### **Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih**

Penyisihan dana bergulir tidak tertagih dihitung berdasarkan persentase tertentu dari saldo dana bergulir yang telah diklasifikasikan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan dana bergulir, sebagai berikut:

**Tabel 4.1.4 Penyisihan Investasi Non Permanen Penggadauan Sapi**

| No. | Umur Sejak Jatuh Tempo | % penyisihan dana bergulir | Kategori      |
|-----|------------------------|----------------------------|---------------|
| 1.  | Kurang dari 1 bulan    | 5%                         | Lancar        |
| 2.  | 1 s/d 3 bulan          | 10%                        | Kurang Lancar |
| 3.  | 3 s/d 12 bulan         | 50%                        | Diragukan     |



| No. | Umur Sejak Jatuh Tempo | % penyisihan dana bergulir | Kategori |
|-----|------------------------|----------------------------|----------|
| 4.  | Lebih dari 12 bulan    | 100%                       | Macet    |

c. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupa penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Lainnya dan Investasi Permanen Lainnya.

**Pengakuan**

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria:

1. kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
2. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

**Penilaian**

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode sebagai berikut:

a. Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Metode ini diterapkan untuk kepemilikan kurang dari 20%.

b. Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Metode ini diterapkan untuk: (1) kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas; dan (2) kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

Investasi Permanen Lainnya adalah investasi jangka panjang lainnya yang tidak termasuk ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah. Contoh investasi permanen lainnya adalah Pinjaman kepada BUMD, Lembaga



Lainnya dan Dana Abadi. Investasi ini dicatat sebesar harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperolehnya.

### **3. Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai selatan telah menerapkan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (*minimum capitalization threshold*), yakni batasan jumlah biaya tertentu yang digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terdiri atas pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, renovasi, dan restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diatur sebagai berikut:

- a. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk per satuan Peralatan dan Mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Seluruh aset tetap berupa Tanah dan Aset Tetap Lainnya seperti barang bercorak budaya/ kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya dikapitalisasi menjadi aset tetap tanpa melihat nilai satuan minimum atas perolehan aset tetap tersebut.
- c. Nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pemeliharaan Gedung dan Bangunan sama dengan atau melebihi dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- d. Nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan (sesuai Bultek 15 Tahun 2014 halaman 26).

### **4. Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lainnya.

Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

### **5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan dalam Neraca sebagai pengurang nilai Aset Tetap dan disajikan secara akumulasi. Metode penyusutan yang





dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Untuk perhitungan penyusutan, dihitung secara bulanan yaitu pada saat perolehan aset tetap. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Masa Manfaat dan Penyusutan Barang Milik Daerah.

#### **4.3.2 Pengukuran Kewajiban**

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

##### **1. Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

##### **2. Kewajiban Jangka Panjang**

Utang jangka panjang merupakan utang yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal laporan keuangan.

#### **4.3.3 Ekuitas Dana**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dan utang Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ekuitas dicatat sebesar nilai transaksi. Ekuitas dinilai sebesar nilai ekuitas awal ditambah/dikurangi surplus/defisit dari laporan operasional dan ditambah dengan koreksi ekuitas.

#### **4.3.4 Pengukuran Pendapatan – LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui dan diukur pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.



- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- f. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah neto-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- g. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- h. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

#### **4.3.5 Pengukuran Belanja – LRA**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui dan diukur pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- d. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- e. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Adapun Klasifikasi Belanja yang digunakan:

##### **1. Belanja Operasi**

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai (belanja langsung maupun belanja tidak langsung), belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

##### **2. Belanja Modal**

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain belanja untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.



### **3. Belanja Tidak Terduga**

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

#### **4.3.6 Pengukuran Pembiayaan**

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diakui :

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- c. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

#### **4.3.7 Pengukuran Pendapatan – LO**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengukuran Pendapatan-LO:

- a. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah–LO diukur sesuai jumlah hak pemerintah daerah atas pendapatan tersebut yang dilakukan berdasarkan azas bruto dan tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya untuk mendapatkannya.
- b. Pengukuran Pendapatan Transfer – LO dilakukan berdasarkan jumlah yang diterima di RKUD.
- c. Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO dilakukan sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD.



- d. Pendapatan Non Operasional – LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang diterima.
- e. Pendapatan Luar Biasa – LO diukur berdasarkan azas bruto atau tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut dan diukur berdasarkan jumlah nominal atas pendapatan tersebut.
- f. Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.

#### **4.3.8 Pengukuran Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan Beban:

- a. Saat timbulnya kewajiban

Beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

- b. Saat terjadinya konsumsi aset

Beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Pengukuran Beban:

- a. Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah.
- c. Beban Non Operasional diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban Non Operasional diukur dengan mata uang rupiah.



- d. Beban Luar Biasa diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban Luar Biasa diukur dengan mata uang rupiah.

#### **4.3.9 Pengukuran Laporan Arus Kas (LAK)**

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Laporan Arus Kas disusun dengan menggunakan metode langsung yaitu mencatat transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan berdasarkan realisasi anggaran pos-pos yang bersangkutan secara langsung dalam satu tahun periode laporan, yang meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar pada masing-masing kelompok sesuai dengan aktivitas arus kas serta kenaikan atau (penurunan) bersih kas selama periode. Urusan kas dan perhitungan dilaporkan sebagai Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

#### **4.3.10 Pengukuran Laporan Saldo Perubahan Anggaran Lebih (LP-SAL)**

Laporan saldo anggaran lebih menyajikan informasi mengenai penggunaan saldo SiLPA atau SiKPA pada tahun pelaporan dibanding tahun sebelumnya. Kebijakan akuntansi Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) lebih hanya disajikan oleh entitas pemerintah (Pemerintah Daerah). SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan. Saldo Anggaran Lebih adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian yang diperkenankan.

#### **4.3.11 Pengukuran Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Pelaporan perubahan ekuitas adalah untuk memberikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibanding dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas baik berasal dari dampak kumulatif atau koreksi kesalahan dan ekuitas akhir.

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan Ekuitas Awal ditambah dengan surplus/defisit-LO dikurangi koreksi ekuitas.

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**

Sehubungan dengan penerapan Kebijakan Akuntansi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, maka mulai Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



#### **4.4.1 Pengakuan Pendapatan-LRA**

Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 21 menyatakan bahwa Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pengakuan pendapatan pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah oleh KSAP diinterpretasikan dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 2 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Kas Umum Negara/Daerah, bahwa pendapatan tersebut termasuk “Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD.”

Dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Kas Umum Daerah, sedangkan pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah, tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA.

#### **4.4.2 Pengakuan Belanja**

Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 31 dan 32 menyatakan sebagai berikut:

31. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
32. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Untuk memenuhi ketentuan paragraf 31 tersebut di atas, belanja yang pembayarannya diajukan melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) diakui pada saat diterbitkannya SP2D atas SPM LS tersebut.

Sedangkan pelaksanaan ketentuan paragraf 32, untuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran melalui bendahara pengeluaran dilakukan sebagai berikut:

- a. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Ganti Uang (GU) sebagai perintah pencairan dana sekaligus sebagai bentuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Sedangkan pada akhir tahun diterbitkan SP2D Nihil sebagai pengesahan atas penggunaan UP pada akhir tahun.
- b. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nihil atas pengeluaran melalui Tambah Uang (TU) sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran dana TU.
- c. Khusus untuk RSUD H. Hasan Basry yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan dengan Badan Layanan Umum (BLU), pengesahan belanja mengacu



pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

#### **4.4.3 Metode Penilaian Investasi**

PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi pada paragraf 33 dan 34 mengatur metode penilaian yang digunakan pada investasi pemerintah, yakni: (a) investasi pemerintah dengan kepemilikan kurang dari 20% dinilai dengan menggunakan metode biaya; (b) investasi pemerintah dengan kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetap memiliki pengaruh yang signifikan dinilai menggunakan metode ekuitas; dan (c) investasi pemerintah dengan kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

Untuk memenuhi standar sebagaimana tersebut di atas, pada laporan keuangan tahun 2016 investasi pada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan, BPR Kandangan, BKK disajikan berdasarkan metode ekuitas sedangkan investasi pada PT. Bank Kalsel disajikan berdasarkan metode biaya.

Dalam penerapan metode ekuitas tersebut, digunakan pendekatan konservatif dan neto. Konservatif, artinya kenaikan nilai investasi didasarkan pada ekuitas perusahaan yang dapat dipastikan menambah ekuitas Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Neto, yakni Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak mencatat setiap mutasi yang menyangkut ekuitas perusahaan yang berpengaruh terhadap catatan nilai investasi pada pembukuan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pembukuan pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan hanya mencatat kenaikan atau penurunan bersih nilai investasi pada masing-masing perusahaan.



## **BAB V**

### **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

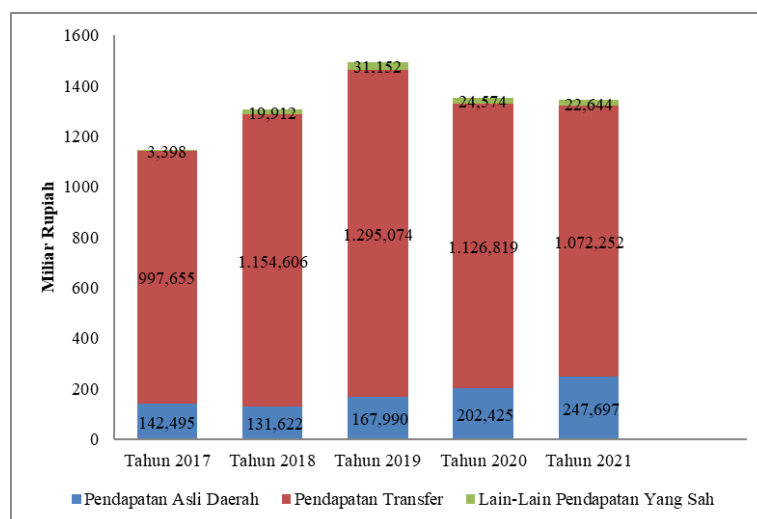
Rincian dan penjelasan masing-masing pos dalam Laporan Keuangan.

#### **5.1 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Pendapatan TA 2021 terealisasi sebesar Rp1.342.594.283.395,62 atau mencapai 105,24% dari target APBD Perubahan TA 2021 sebesar Rp1.275.769.551.357,00. Pendapatan Daerah TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp11.225.601.824,24 atau 0,83% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.353.819.885.219,86. Penurunan di seluruh sektor pendapatan terjadi akibat adanya pandemi Covid-19.

Perbedaan realisasi pendapatan TA 2021 dengan TA 2020 antara lain disebabkan naiknya Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp45.272.427.052,76 atau 22,36% dari realisasi PAD TA 2020. Selain itu dipengaruhi oleh turunnya realisasi pada Pendapatan Transfer sebesar Rp54.567.328.726,00 atau 4,84% dari realisasi Pendapatan Transfer TA 2020; dan turunnya realisasi Pendapatan Hibah pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp1.930.700.151,00 atau 7,86% dari realisasi TA 2020 yang disebabkan oleh tidak adanya lagi Pendapatan Hibah dari Pemerintah seperti tahun sebelumnya dan penurunan pendapatan dari setoran SP3 (sumbangan pihak ke 3 dari masyarakat).

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2021 berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp247.697.934.566,62; Pendapatan Transfer sebesar Rp1.072.252.216.279,00; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp22.644.132.550,00. Perkembangan realisasi Pendapatan sejak TA 2017 terlihat pada Grafik 5.1.



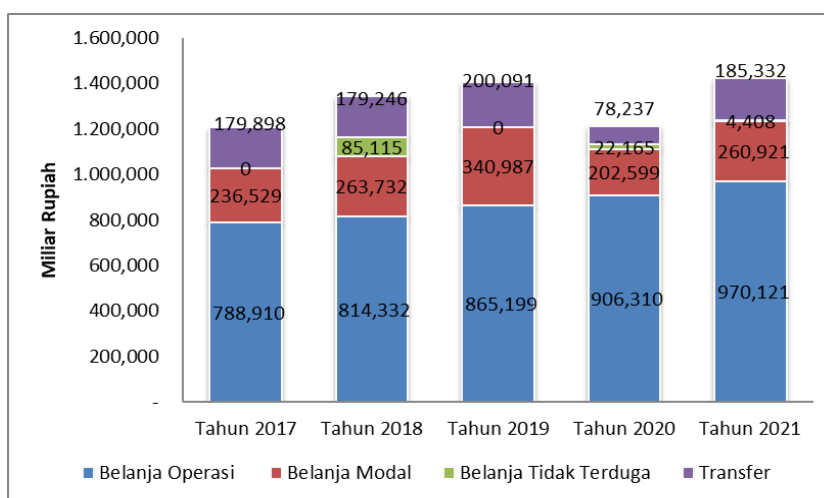
**Grafik 5.1: Perkembangan Realisasi Pendapatan TA 2017 - 2021**

Belanja TA 2021 terealisasi sebesar Rp1.420.783.809.255,16 atau sebesar 90,03% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp1.578.122.225.635,28. Belanja TA 2021 naik sebesar Rp94.036.231.068,14 atau





7,09% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp1.326.747.578.187,02. Realisasi Belanja terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp970.121.278.940,00; Belanja Modal sebesar Rp260.921.215.974,16; Belanja Tak Terduga sebesar Rp4.408.917.341,00; dan Belanja Transfer sebesar Rp185.332.397.000,00. Perkembangan realisasi Belanja dan Transfer sejak TA 2017 terlihat pada Grafik 5.2.



**Grafik 5.2: Perkembangan Realisasi Belanja TA 2017 - 2021**

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp1.342.594.283.395,62 dan realisasi Belanja Daerah sebesar Rp1.420.783.809.255,16 maka terdapat defisit anggaran sebelum pembiayaan pada TA 2021 sebesar Rp78.189.525.859,54. Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Neto) pada TA 2021 adalah sebesar Rp302.352.674.278,28 yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan. Defisit anggaran sebelum pembiayaan dan realisasi Pembiayaan Neto membentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2021 sebesar Rp224.163.148.418,74.

Laporan realisasi anggaran terdiri atas akun pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Uraian selengkapnya masing-masing akun laporan realisasi anggaran dijelaskan pada bagian berikut ini.

### 5.1.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan TA 2021 adalah sebesar Rp1.342.594.283.395,62 yang berarti mencapai 105,24% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp1.275.769.551.357,00. Pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam TA 2021 serta realisasi TA 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1 Pendapatan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

| Pendapatan             | Tahun 2021           |                      | Tahun 2020<br>Realisasi (Rp) |
|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
|                        | Anggaran (Rp)        | Realisasi (Rp)       |                              |
| Pendapatan Asli Daerah | 202.239.285.720,00   | 247.697.934.566,62   | 202.425.507.513,86           |
| Pendapatan Transfer    | 1.049.834.045.637,00 | 1.072.252.216.279,00 | 1.126.819.545.005,00         |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| Pendapatan                    | Tahun 2021                  |                             | Tahun 2020<br>Realisasi (Rp) |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                               | Anggaran (Rp)               | Realisasi (Rp)              |                              |
| Lain-lain Pendapatan yang Sah | 23.696.220.000,00           | 22.644.132.550,00           | 24.574.832.701,00            |
| <b>Jumlah</b>                 | <b>1.275.769.551.357,00</b> | <b>1.342.594.283.395,62</b> | <b>1.353.819.885.219,86</b>  |

#### 5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Realisasi PAD pada TA 2021 adalah sebesar Rp247.697.934.566,62 yang berarti mencapai 122,48% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp202.239.285.720,00. PAD terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Perbandingan realisasi PAD dengan anggaran TA 2021 serta realisasi TA 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2 Rincian Pendapatan Asli Daerah**

| Pendapatan Asli Daerah                                       | Tahun 2021                |                           | Tahun 2020<br>Realisasi (Rp) |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                                                              | Anggaran (Rp)             | Realisasi (Rp)            |                              |
| Pendapatan Pajak Daerah                                      | 14.310.773.000,00         | 13.543.126.921,00         | 12.046.129.929,00            |
| Pendapatan Retribusi Daerah                                  | 8.675.139.600,00          | 6.608.175.981,00          | 8.461.009.994,00             |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 6.004.500.000,00          | 6.091.259.048,00          | 4.801.193.114,00             |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                    | 173.248.873.120,00        | 221.455.372.616,62        | 177.117.174.476,86           |
| <b>Jumlah</b>                                                | <b>202.239.285.720,00</b> | <b>247.697.934.566,62</b> | <b>202.425.507.513,86</b>    |

#### 5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 sebesar Rp13.543.126.921,00 atau mencapai 94,64% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp14.310.773.000,00. Hal ini berarti realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 lebih tinggi Rp1.496.996.992,00 atau 12,43% dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp12.046.129.929,00. Perbandingan realisasi Pajak Daerah dengan anggaran TA 2021 serta realisasi TA 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.3 Rincian Pendapatan Pajak Daerah**

| Pendapatan Pajak Daerah | Tahun 2021       |                  | Tahun 2020<br>Realisasi (Rp) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
|                         | Anggaran (Rp)    | Realisasi (Rp)   |                              |
| Pajak Hotel             | 246.540.000,00   | 270.634.814,00   | 174.873.351,00               |
| Pajak Restoran          | 2.552.000.000,00 | 2.270.484.557,00 | 1.865.524.883,00             |
| Pajak Hiburan           | 3.100.000,00     | 3.230.000,00     | 17.130.000,00                |
| Pajak Reklame           | 204.000.000,00   | 254.348.560,00   | 225.635.500,00               |
| Pajak Penerangan Jalan  | 6.428.000.000,00 | 6.623.284.242,00 | 6.375.453.989,00             |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| Pendapatan Pajak Daerah              | Tahun 2021               |                          | Tahun 2020<br>Realisasi (Rp) |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
|                                      | Anggaran (Rp)            | Realisasi (Rp)           |                              |
| Pajak Parkir                         | 22.800.000,00            | 17.832.750,00            | 11.377.100,00                |
| Pajak Air Tanah                      | 10.800.000,00            | 11.520.000,00            | 10.140.000,00                |
| Pajak Sarang Burung Walet            | 30.000.000,00            | 31.056.966,00            | 5.471.250,00                 |
| Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 2.500.000.000,00         | 1.125.193.724,00         | 1.205.528.916,00             |
| Pajak Bumi dan Bangunan P2           | 1.343.533.000,00         | 1.350.953.183,00         | 1.175.286.591,00             |
| Pajak BPHTB                          | 970.000.000,00           | 1.584.588.125,00         | 979.708.349,00               |
| <b>Jumlah</b>                        | <b>14.310.773.000,00</b> | <b>13.543.126.921,00</b> | <b>12.046.129.929,00</b>     |

Sistem pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menerapkan sistem *Self Assesment* dan *Official Assesment*. Sistem *Self Assesment* yakni pajak daerah yang dihitung dan dilaporkan oleh wajib pajak sendiri, sedangkan sistem *Official Assesment* yakni penetapan pajak daerah oleh daerah berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah.

Jenis Pajak Daerah yang menggunakan sistem *self assessment* :

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak Parkir
- Pajak Sarang Burung Walet
- Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan

Jenis Pajak Daerah yang menggunakan sistem *Official Assessment* :

- Pajak Reklame
- Pajak Air Tanah
- Pajak Bumi dan Bangunan

Pendapatan Pajak Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2021 dapat memenuhi/melebihi target yang telah direncanakan dan mengalami peningkatan dibanding dengan realisasi tahun 2020. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah guna peningkatan realisasi pendapatan pajak daerah yakni dengan melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah yang dilakukan yakni :

- Melakukan sosialisasi pajak daerah, baik secara langsung maupun melalui media.



2. Penerbitan surat himbauan, surat teguran dan surat tagihan terhadap objek pajak.
3. Pembuatan dan pendistribusian saran promosi pajak (*banner* dan *leaflet*).
4. Melakukan koordinasi yang intens dengan SKPD terkait.
5. Melaksanakan program kegiatan anugerah pajak sebagai salah satu bentuk perhatian Pemerintah Daerah terhadap objek pajak.
6. Melakukan pendataan dan pemutakhiran data wajib pajak.
7. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi terkait adanya proyek-proyek pusat maupun provinsi yang pelaksanaan pekerjaannya ada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, hal ini kaitannya dengan pajak mineral bukan logam dan batuan.

#### **A. Pajak Hotel**

Realisasi pajak hotel melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 serta mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan realisasi penerimaan dari target tahun 2021 dan tahun 2020 dikarenakan adanya beberapa upaya yang sudah dilakukan, upaya tersebut yakni :

- Melakukan kegiatan pemutakhiran data wajib pajak hotel.
- Upaya koordinasi/pemberitahuan kepada wajib pajak hotel terkait kewajiban pajak hotel melalui telepon dan pesan WhatsApp.
- Pemasangan alat rekam transaksi di 2 (dua) objek hotel.
- Kerjasama dengan pihak Kejaksaan Negeri Kandangan dalam rangka penagihan tunggakan pajak.
- Pemberian *reward* kepada wajib pajak hotel yang taat pajak melalui program Anugerah Pajak.

#### **B. Pajak Restoran**

Realisasi pajak restoran pada tahun 2021 tidak mencapai target yang telah ditetapkan, namun jika dibandingkan dengan tahun 2020 penerimaan atas pajak restoran mengalami kenaikan dikarenakan adanya beberapa upaya yang sudah dilakukan, upaya tersebut yakni :

- Melakukan kegiatan pemutakhiran data wajib pajak restoran/rumah makan.
- Melakukan penerimaan pajak restoran dengan pola/sistem jemput bola.
- Pemasangan alat rekam transaksi di 8 (delapan) objek restoran/rumah makan.
- Kerjasama dengan pihak Kejaksaan Negeri Kandangan dalam rangka penagihan tunggakan pajak.
- Pemberian *reward* kepada wajib pajak restoran/rumah makan yang taat pajak melalui program Anugerah Pajak.



**C. Pajak Hiburan**

Realisasi pajak hiburan pada tahun 2021 melebihi target yang ditetapkan akan tetapi mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020. Adapun hal yang mempengaruhi yakni adanya wabah pandemik covid-19, dimana beberapa objek hiburan terpaksa tidak beroperasi lagi, misalnya arena bermain anak *Sky Game* di Pasar Kandangan yang tidak diberikan izin untuk beroperasi karena pandemik covid-19 sehingga berimbas terhadap penerimaan pajak daerah.

**D. Pajak Reklame**

Penerimaan pajak reklame pada tahun 2021 melampaui target yang direncanakan serta naik cukup signifikan dibanding dengan realisasi tahun 2020. Hal ini disebabkan upaya tim dari pemerintah daerah yang lebih intens dalam melakukan penyisiran terhadap objek pajak reklame terpasang yang tidak memenuhi kewajiban perizinan dan perpajakannya, selanjutnya dilakukan teguran dan penagihan terhadap wajib pajak tersebut.

**E. Pajak Penerangan Jalan**

Realisasi pajak penerangan jalan tahun 2021 dapat melebihi target yang direncanakan dan melebihi penerimaan di tahun 2020.

**F. Pajak Parkir**

Untuk realisasi pajak parkir tidak mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2021. Adapun hal yang mempengaruhi yakni belum optimalnya pelaksanaan pemungutan pajak parkir.

**G. Pajak Air Tanah**

Realisasi pajak air tanah dapat mencapai target yang direncanakan pada tahun 2021 serta mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020.

**H. Pajak Sarang Burung Walet**

Untuk realisasi pajak sarang burung walet tahun 2021 telah mencapai target yang sudah ditetapkan, hal ini karena semakin optimalnya pengelolaan dan pengawasan pajak sarang burung walet.

**I. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 serta mengalami penurunan yang cukup besar dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan adanya pandemik Covid-19 sehingga pemerintah daerah melakukan *refocusing*/pemangkasan terhadap pekerjaan fisik pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ini menyebabkan rendahnya kebutuhan terhadap mineral bukan logam dan batuan dan berakibat terhadap penerimaan pajak dari jenis ini.



## J. Pajak Bumi dan Bangunan

Realisasi pajak bumi dan bangunan pada tahun 2021 belum mencapai target yang telah ditetapkan serta mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun 2020 karena karena semakin optimalnya upaya penagihan pajak yang dilakukan secara *door to door*.

## K. Pajak BPHTB

Realisasi bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB) pada tahun 2021 melebihi target pendapatan dan mengalami kenaikan dibanding tahun 2020 disebabkan karena transaksi BPHTB untuk jual beli banyak yang di atas NPOTKP (Nilai Perolehan Objek Tidak Kena Pajak) dalam hal ini di atas Rp60.000.000,00.

### 5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing SKPD penghasil. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2021 adalah sebesar Rp6.608.175.981,00 atau mencapai 76,17% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp8.675.139.600,00. Hal ini berarti realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2021 lebih rendah Rp1.852.834.013,00 atau 21,90% dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp8.461.009.994,00.

Pendapatan Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Retribusi daerah pengelolaannya dilaksanakan oleh SKPD pengelola penerimaan. Anggaran dan realisasi pada TA 2021 untuk masing-masing jenis retribusi serta perbandingannya dengan realisasi pada TA 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.4 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah**

| Retribusi Daerah                                            | Tahun 2021              |                         | Tahun 2020<br>Realisasi (Rp) |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                                                             | Anggaran (Rp)           | Realisasi (Rp)          |                              |
| <b>Retribusi Jasa Umum:</b>                                 |                         |                         |                              |
| Retribusi Pelayanan Kesehatan                               | 678.157.200,00          | 732.381.600,00          | 2.643.379.964,00             |
| Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan                         | 0,00                    | 2.050.000,00            | 1.500.000,00                 |
| Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan                  | 565.140.000,00          | 362.705.000,00          | 411.865.000,00               |
| Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum               | 446.480.000,00          | 354.462.500,00          | 225.400.000,00               |
| Retribusi Pelayanan Pasar                                   | 750.600.000,00          | 813.536.000,00          | 731.310.000,00               |
| Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor                      | 213.218.600,00          | 305.690.000,00          | 183.560.000,00               |
| Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta                      | 41.500.000,00           | 0,00                    | 0,00                         |
| Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang                         | 37.000.000,00           | 14.885.000,00           | 11.193.500,00                |
| Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 297.305.000,00          | 303.435.000,00          | 303.496.300,00               |
| <b>Jumlah</b>                                               | <b>3.029.400.800,00</b> | <b>2.889.145.100,00</b> | <b>4.511.704.764,00</b>      |
| <b>Retribusi Jasa Usaha:</b>                                |                         |                         |                              |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| Retribusi Daerah                                                   | Tahun 2021              |                         | Tahun 2020<br>Realisasi (Rp) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                                                                    | Anggaran (Rp)           | Realisasi (Rp)          |                              |
| Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah                                | 723.875.400,00          | 528.006.240,00          | 448.343.920,00               |
| Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan                                   | 1.996.426.400,00        | 1.611.671.881,00        | 1.637.059.855,00             |
| Retribusi Terminal                                                 | 44.380.000,00           | 12.949.000,00           | 31.090.000,00                |
| Retribusi Tempat Khusus Parkir                                     | 1.557.752.000,00        | 843.856.500,00          | 973.160.400,00               |
| Retribusi Tempat<br>Penginapan/Pesanggrahan/Villa                  | 350.000.000,00          | 175.350.000,00          | 121.700.000,00               |
| Retribusi Rumah Potong Hewan                                       | 22.600.000,00           | 9.850.000,00            | 16.075.000,00                |
| Retribusi Pelayanan Kepelabuhan                                    | 14.700.000,00           | 17.842.000,00           | 13.100.000,00                |
| Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga                            | 324.105.000,00          | 186.331.000,00          | 184.210.500,00               |
| Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah                          | 85.600.000,00           | 72.990.000,00           | 51.650.000,00                |
| <b>Jumlah</b>                                                      | <b>5.119.438.800,00</b> | <b>3.458.846.621,00</b> | <b>3.476.389.675,00</b>      |
| <b>Retribusi Perizinan Tertentu:</b>                               |                         |                         |                              |
| Retribusi Izin Mendirikan Bangunan                                 | 491.300.000,00          | 258.994.260,00          | 454.490.555,00               |
| Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan<br>Pelayanan Angkutan Umum | 35.000.000,00           | 1.190.000,00            | 18.425.000,00                |
| <b>Jumlah</b>                                                      | <b>526.300.000,00</b>   | <b>260.184.260,00</b>   | <b>472.915.555,00</b>        |
| <b>Jumlah Hasil Retribusi Daerah</b>                               | <b>8.675.139.600,00</b> | <b>6.608.175.981,00</b> | <b>8.461.009.994,00</b>      |

Berikut penjelasan mengenai pendapatan retribusi daerah pada TA 2021:

**A. Retribusi Jasa Umum**

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp734.431.600,00 terdiri atas penerimaan yang dipungut oleh Dinas Kesehatan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan balai kesehatan sebesar Rp732.381.600,00 dan oleh Dinas Pertanian berupa penerimaan atas retribusi pelayanan kesehatan hewan sebesar Rp2.050.000,00.
- 2) Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp362.705.000,00 berasal dari retribusi yang dipungut oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- 3) Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp354.462.500,00 terdiri atas penerimaan pendapatan retribusi yang dipungut melalui Dinas Perhubungan sebesar Rp7.000.000,00 dan Dinas Perdagangan sebesar Rp347.462.500,00.
- 4) Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp813.536.000,00 terdiri atas penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Perdagangan berupa retribusi pelayanan pasar – los.
- 5) Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp305.690.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Perhubungan.
- 6) Realisasi Retribusi penggantian Biaya Cetak Peta Rp0,00 merupakan



penerimaan retribusi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

- 7) Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar Rp14.885.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Perdagangan.
- 8) Realisasi Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp303.435.000,00 merupakan penerimaan retribusi pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

#### **B. Retribusi Jasa Usaha**

- 1) Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp528.006.240,00 merupakan penerimaan atas penggunaan aset milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.1.5 Rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

| <b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah:<br/>SKPD</b>        | <b>Tahun 2021<br/>Realisasi (Rp)</b> | <b>Tahun 2020<br/>Realisasi (Rp)</b> |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang                         | 184.030.000,00                       | 116.600.000,00                       |
| Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan LH            | 80.420.500,00                        | 58.096.500,00                        |
| Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian | 13.220.000,00                        | 20.153.500,00                        |
| Dinas Perdagangan                                           | 57.928.240,00                        | 48.511.920,00                        |
| Bagian Umum                                                 | 8.950.000,00                         | 42.692.000,00                        |
| Kecamatan Kandangan                                         | 10.600.000,00                        | 4.700.000,00                         |
| Kecamatan Padang Batung                                     | 6.000.000,00                         | 6.000.000,00                         |
| Kecamatan Angkinang                                         | 3.020.000,00                         | 300.000,00                           |
| Kecamatan Daha Selatan                                      | 8.000.000,00                         | 1.640.000,00                         |
| Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah            | 155.837.500,00                       | 149.650.000,00                       |
| <b>Jumlah</b>                                               | <b>528.006.240,00</b>                | <b>448.343.920,00</b>                |

- 2) Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan sebesar Rp1.611.671.881,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Perdagangan.
- 3) Realisasi Retribusi Terminal sebesar Rp12.949.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Perhubungan.
- 4) Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp843.856.500,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Perhubungan sebesar Rp131.016.500,00 dan Dinas Perdagangan sebesar Rp712.840.000,00.
- 5) Realisasi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebesar Rp175.350.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.
- 6) Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp9.850.000,00





merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Pertanian.

- 7) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebesar Rp17.842.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Perhubungan.
- 8) Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi sebesar Rp186.331.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.
- 9) Realisasi Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah sebesar Rp72.990.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Perikanan sebesar Rp71.740.000,00 dan pendapatan bagi hasil karet pada Dinas Pertanian sebesar Rp1.250.000,00.

### C. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu terdiri atas realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp258.994.260,00 dan Izin Trayek sebesar Rp1.190.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui beberapa SKPD dan Kecamatan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.6 Rincian Retribusi Perizinan Tertentu**

| Retribusi Perizinan Tertentu SKPD   | Retribusi IMB Realisasi (Rp) | Retribusi Izin Trayek Realisasi (Rp) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 152.954.395,00               |                                      |
| Dinas Perhubungan                   | 0,00                         | 1.190.000,00                         |
| Kecamatan Kandangan                 | 52.216.355,00                |                                      |
| Kecamatan Padang Batung             | 7.649.625,00                 |                                      |
| Kecamatan Sungai Raya               | 14.364.425,00                |                                      |
| Kecamatan Simpur                    | 918.500,00                   |                                      |
| Kecamatan Kalumpang                 | 1.256.350,00                 |                                      |
| Kecamatan Loksado                   | 908.000,00                   |                                      |
| Kecamatan Angkinang                 | 14.997.010,00                |                                      |
| Kecamatan Telaga Langsat            | 2.369.600,00                 |                                      |
| Kecamatan Daha Utara                | 2.729.000,00                 |                                      |
| Kecamatan Daha Selatan              | 6.876.000,00                 |                                      |
| Kecamatan Daha Barat                | 1.755.000,00                 |                                      |
| <b>Jumlah</b>                       | <b>258.994.260,00</b>        | <b>1.190.000,00</b>                  |

Untuk pencapaian realisasi Retribusi Daerah pada tahun 2021 ini masih belum memenuhi target yang ditetapkan, selain itu mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pencapaian realisasi tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada seluruh sektor ekonomi. Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah guna meningkatkan penerimaan pada sektor Retribusi Daerah yakni :



1. Koordinasi yang intens dengan SKPD pengelola Retribusi Daerah.
2. Pendataan objek Retribusi Daerah baru.
3. Revisi terhadap Peraturan Daerah sebagai bentuk tindak lanjut pendataan objek Retribusi Daerah baru.
4. Revisi terhadap tarif Retribusi Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan di masyarakat.

#### 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, merupakan penerimaan PAD yang berasal dari hasil penyertaan modal Pemerintah Kabupaten berupa bagian laba dari lembaga keuangan bank dan bukan bank.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 adalah sebesar Rp6.091.259.048,00 atau mencapai 101,44% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp6.004.500.000,00. Hal ini berarti realisasi TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.290.065.934,00 atau 26,87% dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp4.801.193.114,00. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dicatat berdasarkan basis kas, yakni diakui seluruhnya sebagai pendapatan atas semua penerimaan ke Kas Daerah pada TA 2021. Realisasi tersebut berasal dari obyek investasi (penyertaan modal) Pemerintah Daerah pada Bank Kalsel sebesar Rp55.000.000.000,00 dan pada Koperasi Swarga sebesar Rp75.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.7 Rincian Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: | Tahun 2021              |                         | Tahun 2020 Realisasi (Rp) |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                    | Anggaran (Rp)           | Realisasi (Rp)          |                           |
| BPD Kalsel                                         | 6.004.500.000,00        | 6.086.759.048,00        | 4.796.693.114,00          |
| KPN Swarga                                         | 0,00                    | 4.500.000,00            | 4.500.000,00              |
| <b>Jumlah</b>                                      | <b>6.004.500.000,00</b> | <b>6.091.259.048,00</b> | <b>4.801.193.114,00</b>   |

#### 5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2021 adalah sebesar Rp221.455.372.616,62 atau mencapai 127,83% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp173.248.873.120,00. Hal ini berarti realisasi TA 2021 naik sebesar Rp44.338.198.139,76 atau 25,03% dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp177.117.174.476,86. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2021 terdiri atas pendapatan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

**Tabel 5.1.8 Rincian Realisasi Lain-lain PAD yang Sah**

| Lain-lain PAD yang Sah                                    | Tahun 2021                |                           | Tahun 2020<br>Realisasi (Rp) |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                                                           | Anggaran (Rp)             | Realisasi (Rp)            |                              |
| Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan                 | 0,00                      | 253.364.337,00            | 351.508.020,00               |
| Jasa Giro                                                 | 6.130.320.000,00          | 5.814.298.197,46          | 6.001.824.256,00             |
| Pendapatan Bunga                                          | 7.251.814.000,00          | 4.899.274.956,64          | 7.824.063.619,00             |
| Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 777.823.000,00            | 38.314.166,95             | 46.849.368,00                |
| Pendapatan Denda Pajak Daerah                             | 0,00                      | 41.485.797,00             | 22.491.788,20                |
| Pendapatan Denda Retribusi Daerah                         | 0,00                      | 47.205.000,00             | 25.238.272,00                |
| Pendapatan dari Pengembalian                              | 0,00                      | 1.186.473.874,78          | 1.669.977.411,66             |
| Pendapatan dari Angsuran/Cicilan                          | 0,00                      | 0,00                      | 1.500.000,00                 |
| Pendapatan BLUD                                           | 149.462.278.589,00        | 200.392.360.009,79        | 152.122.308.367,00           |
| Pendapatan Dana Kapitasi JKN                              | 9.626.637.531,00          | 8.742.946.277,00          | 9.051.413.375,00             |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir                | 0,00                      | 39.650.000,00             | 0,00                         |
| <b>Jumlah</b>                                             | <b>173.248.873.120,00</b> | <b>221.455.372.616,62</b> | <b>177.117.174.476,86</b>    |

A. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp253.364.337,00 yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Hasil penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp218.884.337,00 terdiri atas hasil penjualan lelang TA 2021 sebesar Rp215.687.247,00 dan penerimaan dari cicilan penjualan pompa air Alsintan sebesar Rp3.000.000,00, serta terdapat kelebihan pendapatan atas transfer hasil lelang oleh KPKNL sebesar Rp197.090,00.
2. Hasil penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp28.980.000,00 berupa penerimaan atas biaya kompensasi pembongkaran trotoar TA 2021.
3. Hasil penjualan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.500.000,00 berupa penerimaan Hasil Penjualan Hewan yang sakit sebanyak 2 Ekor pada Dinas Pertanian.

B. Penerimaan jasa giro sebesar Rp5.814.298.197,46 terdiri atas penerimaan jasa giro sebagai berikut:

1. Jasa giro atas kas daerah sebesar Rp5.748.108.379,95;
2. Jasa giro atas rekening bendahara pengeluaran sebesar Rp66.189.817,51.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 25 ayat (1) bahwa bunga bank dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah merupakan Pendapatan Negara/Daerah maka Jasa Giro yang diterima oleh pemegang kas dana JKN harus langsung disetorkan ke Kas Daerah, sehingga Jasa Giro Kas JKN mulai Tahun 2013 sudah masuk ke



Kas Daerah.

- C. Pendapatan dari bunga deposito sebesar Rp4.899.274.956,64 merupakan pendapatan dari penempatan Kas Daerah pada deposito yang terdiri atas:
1. Bunga deposito pada Bank Kalsel Cabang Kandangan sebesar Rp3.882.383.564,64;
  2. Bunga deposito pada Bank Syariah Kalsel Cabang Kandangan sebesar Rp611.754.387,00; dan
  3. Bunga deposito pada BRI Cabang Kandangan sebesar Rp405.137.005,00.

Penempatan dana Kas Daerah dalam bentuk deposito merupakan bagian dari manajemen Kas Daerah yang bertujuan memperoleh hasil maksimal atas kas menganggur (*idle cash*).

- D. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp38.314.166,95 yang terdiri atas:

**Tabel 5.1.9 Rincian Denda atas Keterlambatan  
Pelaksanaan Pekerjaan**

| Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | Realisasi (Rp)       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Bidang Pendidikan                                         | 3.092.720,95         |
| Bidang Kesehatan                                          | 25.342.278,00        |
| Bidang Kewilayahan                                        | 9.879.168,00         |
| <b>Jumlah</b>                                             | <b>38.314.166,95</b> |

- E. Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp41.485.797,00 terdiri atas:
1. Denda pajak restoran sebesar Rp17.314.837,00;
  2. Denda pajak reklame sebesar Rp418.288,00;
  3. Denda pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar Rp20.209.080,00; dan
  4. Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp3.543.592,00.
- F. Pendapatan Denda Retribusi sebesar Rp47.205.000,00 terdiri atas denda retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp200.000,00, denda retribusi Pemeriksaan sebesar Rp46.600.000,00, dan denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp405.000,00.
- G. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp1.186.473.874,78 terdiri atas beberapa pengembalian sebagai berikut:
1. Pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp192.861.438,00.



2. Pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp2.960.000,00.
  3. Pengembalian kelebihan pembayaran jasa pihak ketiga sebesar Rp410.849.867,78.
  4. Pengembalian Bendahara Pengeluaran sebesar Rp386.725.852,00.
  5. Pengembalian kelebihan pembayaran bantuan sosial dan Hibah sebesar Rp193.076.717,00.
- H. Pendapatan BLUD sebesar Rp200.392.360.009,79 terdiri atas pendapatan BLUD:
1. RSUD Brigjend H. Hasan Basry sebesar Rp183.510.535.110,29.
  2. Puskesmas Kandangan sebesar Rp1.312.092.078,45.
  3. Puskesmas Negara sebesar Rp1.581.580.136,09.
  4. RS Daha Sejahtera sebesar Rp13.988.152.684,96.
- I. Pendapatan Dana Kapitasi JKN sebesar Rp8.742.946.277,00 berasal dari semua FKTP/ Puskesmas penerima dana Kapitasi, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.10 Rincian Puskesmas Penerima Dana Kapitasi JKN**

| Pendapatan Dana Kapitasi JKN | Realisasi (Rp)          |
|------------------------------|-------------------------|
| Puskesmas Padang Batung      | 427.843.396,00          |
| Puskesmas Kaliring           | 500.602.019,00          |
| Puskesmas Malinau            | 190.635.412,00          |
| Puskesmas Loksado            | 275.135.324,00          |
| Puskesmas Telaga Langsat     | 492.147.320,00          |
| Puskesmas Angkinang          | 563.426.353,00          |
| Puskesmas Bamban             | 262.998.046,00          |
| Puskesmas Gambah             | 300.105.918,00          |
| Puskesmas Jambu Hilir        | 869.204.777,00          |
| Puskesmas Sungai Raya        | 437.310.559,00          |
| Puskesmas Batang Kulur       | 256.240.816,00          |
| Puskesmas Simpur             | 532.065.732,00          |
| Puskesmas Wasah              | 288.525.296,00          |
| Puskesmas Kalumpang          | 323.554.810,00          |
| Puskesmas Bayanan            | 621.382.832,00          |
| Puskesmas Sungai Pinang      | 714.089.641,00          |
| Puskesmas Baruh Jaya         | 715.329.138,00          |
| Puskesmas Bajayau            | 361.231.351,00          |
| Puskesmas Pasungkan          | 611.117.537,00          |
| <b>Jumlah</b>                | <b>8.742.946.277,00</b> |



- J. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebesar Rp39.650.000,00 yaitu pendapatan yang dipungut melalui Dinas Pertanian berupa pengembalian dari beberapa kelompok ternak atas piutang pengembangan sapi.

#### 5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pada Tahun 2021 alokasi dana transfer ke daerah ditetapkan melalui Perpres Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021. Sedangkan penyaluran dan penggunaan dana transfer untuk DAU, DAK, DID dan Dana Desa diatur terakhir melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya.

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 adalah sebesar Rp1.072.252.216.279,00 yang berarti mencapai 102,14% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp1.049.834.045.637,00. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.11 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer**

| Pendapatan Transfer                                     | Tahun 2021                  |                             | Tahun 2020<br>Realisasi (Rp) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                                                         | Anggaran (Rp)               | Realisasi (Rp)              |                              |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan | 803.056.832.637,00          | 831.612.712.997,00          | 864.401.301.956,00           |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya          | 171.821.933.000,00          | 171.821.933.000,00          | 192.156.860.000,00           |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah                        | 74.955.280.000,00           | 68.817.570.282,00           | 70.261.383.049,00            |
| <b>Jumlah</b>                                           | <b>1.049.834.045.637,00</b> | <b>1.072.252.216.279,00</b> | <b>1.126.819.545.005,00</b>  |

##### 5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Transfer ke Daerah dan Dana Desa atau yang disingkat dengan TKDD adalah bagian dari belanja negara yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dan desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dana desa.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2021 sebesar Rp831.612.712.997,00 atau 103,56% dari anggaran yang telah ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp803.056.832.637,00 yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.12 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**

| Dana Perimbangan                | Tahun 2021         |                    | Tahun 2020<br>Realisasi (Rp) |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
|                                 | Anggaran (Rp)      | Realisasi (Rp)     |                              |
| Dana Bagi Hasil (DBH)           | 147.921.915.000,00 | 197.773.311.486,00 | 222.382.834.194,00           |
| Dana Alokasi Umum (DAU)         | 474.753.627.000,00 | 474.753.627.000,00 | 482.100.383.000,00           |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 75.005.747.637,00  | 71.332.731.438,00  | 61.965.883.202,00            |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| Dana Perimbangan                    | Tahun 2021                |                           | Tahun 2020<br>Realisasi (Rp) |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                                     | Anggaran (Rp)             | Realisasi (Rp)            |                              |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 105.375.543.000,00        | 87.753.043.073,00         | 97.952.201.560,00            |
| <b>Jumlah</b>                       | <b>803.056.832.637,00</b> | <b>831.612.712.997,00</b> | <b>864.401.301.956,00</b>    |

#### 5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil sebesar Rp197.773.311.486,00 yang terdiri dari DBH Pajak Bumi dan Bangunan, DBH Pajak Penghasilan (PPH), DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Sumber Daya Alam (SDA) dan DBH dari Pungutan Pengusahaan Perikanan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.13 Rincian Dana Bagi Hasil**

| Dana Perimbangan -<br>Dana Transfer Umum -<br>Bagi Hasil Pajak (DBH)    | Tahun 2021                |                           | Tahun 2020<br>Realisasi (Rp) |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                                                                         | Anggaran (Rp)             | Realisasi (Rp)            |                              |
| DBH Pajak Bumi dan Bangunan                                             | 11.202.495.000,00         | 52.447.681.903,00         | 11.341.176.731,00            |
| DBH PPh Pasal 21                                                        | 5.942.172.000,00          | 5.966.253.000,00          | 8.373.890.359,00             |
| DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN                                    | 220.093.000,00            | 196.012.000,00            |                              |
| Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau                                         | 0,00                      | 624,00                    | 11.700,00                    |
| DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi                                  | 59.283.000,00             | 68.554.300,00             | 529.374.882,00               |
| DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Land-Rent             | 441.290.000,00            | 67.910.025,00             | 452.835.950,00               |
| DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Royalti               | 128.660.856.000,00        | 137.227.649.277,00        | 200.835.345.283,00           |
| DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 267.407.000,00            | 441.631.207,00            | 61.923.000,00                |
| Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan                          | 1.128.319.000,00          | 1.357.619.150,00          | 788.276.289,00               |
| <b>Jumlah</b>                                                           | <b>147.921.915.000,00</b> | <b>197.773.311.486,00</b> | <b>222.382.834.194,00</b>    |

#### 5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Alokasi DAU TA 2021 untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah diterima seluruhnya pada TA 2021 sebesar Rp474.753.627.000,00.

#### 5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Penerimaan DAK Fisik pada TA 2021 sebesar Rp71.332.731.438,00 dialokasikan untuk bidang-bidang sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

**Tabel 5.1.14 Rincian Realisasi Penerimaan DAK Fisik**

| Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik:      | Tahun 2021               |                          | Tahun 2020 Realisasi (Rp) |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                       | Anggaran (Rp)            | Realisasi (Rp)           |                           |
| Bidang Pendidikan                     | 3.146.952.000,00         | 3.092.726.000,00         | 11.638.822.530,00         |
| Bidang Kesehatan dan KB               | 22.542.705.197,00        | 19.441.442.498,00        | 18.274.053.864,00         |
| Bidang Pertanian                      | 956.824.000,00           | 954.722.000,00           | 713.160.000,00            |
| Bidang Kelautan dan Perikanan         | 1.155.000.000,00         | 1.108.297.850,00         | 1.255.645.000,00          |
| Bidang Jalan                          | 20.438.555.000,00        | 20.227.037.040,00        | 0,00                      |
| Bidang Infrastruktur Air Minum        | 5.483.556.966,00         | 5.459.390.000,00         | 10.511.346.310,00         |
| Bidang Sanitasi                       | 2.097.726.000,00         | 2.097.726.000,00         | 6.234.949.998,00          |
| Bidang Irigasi                        | 16.375.325.474,00        | 16.142.287.050,00        | 7.569.105.500,00          |
| Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2.809.103.000,00         | 0,00                     | 0,00                      |
| Bidang Perumahan dan Permukiman       | 0,00                     | 2.809.103.000,00         | 3.307.500.000,00          |
| Bidang Pariwisata                     | 0,00                     | 0,00                     | 984.900.000,00            |
| Bidang Industri Kecil dan Menengah    | 0,00                     | 0,00                     | 1.476.400.000,00          |
| <b>Jumlah</b>                         | <b>75.005.747.637,00</b> | <b>71.332.731.438,00</b> | <b>61.965.883.202,00</b>  |

**5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.07/2021. Penerimaan DAK Non Fisik pada TA 2021 sebesar Rp87.753.043.073,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.15 Rincian Realisasi Penerimaan DAK Non Fisik**

| Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik                 | Tahun 2021        |                   | Tahun 2020 Realisasi (Rp) |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|                                                     | Anggaran (Rp)     | Realisasi (Rp)    |                           |
| Tunjangan Profesi Guru PNSD                         | 70.769.661.000,00 | 65.073.906.600,00 | 64.437.312.000,00         |
| Tambahan Penghasilan Guru PNSD                      | 928.750.000,00    | 928.750.000,00    | 510.750.000,00            |
| Tunjangan Khusus Guru PNSD                          | 1.216.780.000,00  | 973.424.000,00    | 0,00                      |
| BOP PAUD                                            | 4.801.200.000,00  | 4.543.605.750,00  | 4.533.584.250,00          |
| BOP Pendidikan Kesetaraan                           | 4.046.500.000,00  | 4.046.500.000,00  | 3.970.125.500,00          |
| BOP Museum dan Taman Budaya-Museum                  | 600.000.000,00    | 592.672.150,00    | 600.000.000,00            |
| BOKKB-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)           | 16.559.270.000,00 | 9.760.835.073,00  | 21.707.403.801,00         |
| BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan                   | 500.934.000,00    | 0,00              | 0,00                      |
| BOKKB-Akreditasi Puskesmas                          | 1.206.373.000,00  | 0,00              | 0,00                      |
| BOKKB-Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) | 2.901.827.000,00  | 0,00              | 1.613.209.000,00          |
| Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan            | 1.046.325.000,00  | 1.035.426.500,00  | 235.767.009,00            |
| Dana Pelayanan Kepariwisata                         | 0,00              | 0,00              | 344.050.000,00            |
| Dana Bantuan BLPS                                   | 335.173.000,00    | 0,00              | 0,00                      |





| Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | Tahun 2021                |                          | Tahun 2020 Realisasi (Rp) |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                     | Anggaran (Rp)             | Realisasi (Rp)           |                           |
| Fasilitas Penanaman Modal           | 0,00                      | 335.173.000,00           | 0,00                      |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 462.750.000,00            | 462.750.000,00           | 0,00                      |
| <b>Jumlah</b>                       | <b>105.375.543.000,00</b> | <b>87.753.043.073,00</b> | <b>97.952.201.560,00</b>  |

#### 5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Pendapatan transfer pemerintah pusat – lainnya tahun 2021 direalisasi sebesar Rp171.821.933.000,00 atau 100% dari total yang dianggarkan pada APBD Perubahan sebesar Rp171.821.933.000,00. Pendapatan transfer pemerintah pusat – lainnya terdiri atas pendapatan dana penyesuaian (DID) dan pencatatan pendapatan dana desa dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.16 Rincian Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya**

| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | Tahun 2021                |                           | Tahun 2020 Realisasi (Rp) |
|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                | Anggaran (Rp)             | Realisasi (Rp)            |                           |
| Dana Penyesuaian - Dana Insentif Daerah        | 53.518.401.000,00         | 53.518.401.000,00         | 74.722.664.000,00         |
| Dana Desa yang Bersumber dari APBN             | 118.303.532.000,00        | 118.303.532.000,00        | 117.434.196.000,00        |
| <b>Jumlah</b>                                  | <b>171.821.933.000,00</b> | <b>171.821.933.000,00</b> | <b>192.156.860.000,00</b> |

#### 5.1.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah (DID)

Pengelolaan Dana Insentif Daerah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.07/2021. Realisasi pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) yang bersumber dari APBN TA 2021 sebesar Rp53.518.401.000,00 atau 100% dari total yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp53.518.401.000,00.

Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp53.518.401.000,00 diterima Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara 2 (dua) tahap, tahap pertama diterima tanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp26.759.200.000,00 dan tahap kedua diterima tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp26.759.201.000,000.

#### 5.1.1.2.2.2 Dana Desa

Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp118.303.532.000,00 disalurkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditransfer langsung ke Rekening Kas Desa (RKD). Tata cara pencatatan Dana Desa diatur dalam SE Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Desa oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPPN menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.



2. KPPN menyampaikan salinan SP2D kepada Bupati dan Kepala Desa.
3. Berdasarkan salinan SP2D tersebut, Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada KPPN dan Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
4. Berdasarkan salinan SP2D yang disampaikan kepada Bupati dan lembar konfirmasi penyaluran Dana Desa di RKD, PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa (SP2DD) sebagai dasar pencatatan realisasi pendapatan Dana Desa.

#### 5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah pada TA 2021 adalah sebesar Rp68.817.570.282,00 yang berarti mencapai 91,81% dari anggaran yang telah ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp74.955.280.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.17 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah**

| Pendapatan Bagi Hasil Pajak                     | Tahun 2021               |                          | Tahun 2020 Realisasi (Rp) |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                                 | Anggaran (Rp)            | Realisasi (Rp)           |                           |
| Pajak Kendaraan Bermotor                        | 7.000.000.000,00         | 6.452.254.145,00         | 7.013.101.882,00          |
| Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor               | 7.335.000.000,00         | 5.925.087.370,00         | 10.077.161.642,00         |
| Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor            | 53.581.632.000,00        | 43.569.150.687,00        | 40.922.024.110,00         |
| Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan | 38.648.000,00            | 108.066.138,00           | 85.794.411,00             |
| Pajak Rokok                                     | 7.000.000.000,00         | 12.763.011.942,00        | 12.163.301.004,00         |
| <b>Jumlah</b>                                   | <b>74.955.280.000,00</b> | <b>68.817.570.282,00</b> | <b>70.261.383.049,00</b>  |

#### 5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah penerimaan daerah selain yang telah dikelompokkan di atas. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupa Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971 – 7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pendapatan dana BOS dianggarkan pada akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan, Obyek Lain-Lain Pendapatan, Rincian Obyek Pendapatan Hibah Dana BOS, Sub Rincian Obyek Pendapatan Hibah Dana BOS.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang dapat direalisasi pada TA 2021 sebesar Rp22.644.132.550,00 atau mencapai 95,56% dari total anggaran yang telah



ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp23.696.220.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.18 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

| Pendapatan Hibah                                                          | Tahun 2021               |                          | Tahun 2020<br>Realisasi (Rp) |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
|                                                                           | Anggaran (Rp)            | Realisasi (Rp)           |                              |
| Pendapatan Hibah                                                          | 1.025.200.000,00         | 55.024.550,00            | 61.628.100,00                |
| Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 22.671.020.000,00        | 22.589.108.000,00        | 24.513.204.601,00            |
| <b>Jumlah</b>                                                             | <b>23.696.220.000,00</b> | <b>22.644.132.550,00</b> | <b>24.574.832.701,00</b>     |

#### 5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Realisasi pendapatan hibah tahun 2021 sebesar Rp55.024.550,00 terdiri dari penerimaan atas sumbangan pihak ketiga sebesar Rp53.958.750,00 dan pendapatan hibah dari pengembalian sisa hibah DWP Tahun 2020 sebesar Rp1.065.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.19 Rincian Pendapatan Hibah**

| Pendapatan Hibah                                     | Tahun 2021              |                      | Tahun 2020<br>Realisasi (Rp) |
|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
|                                                      | Anggaran (Rp)           | Realisasi (Rp)       |                              |
| Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan | 1.025.200.000,00        | 53.958.750,00        | 61.628.100,00                |
| Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi       | 0,00                    | 1.065.800,00         | 0,00                         |
| <b>Jumlah</b>                                        | <b>1.025.200.000,00</b> | <b>55.024.550,00</b> | <b>61.628.100,00</b>         |

#### 5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pendapatan hibah atas penerimaan transfer Dana BOS dari Provinsi sebesar Rp22.589.108.000,00 yang terdiri atas Pendapatan Dana BOS sebagai berikut:

**Tabel 5.1.20 Rincian Realisasi Pendapatan Dana BOS**

| Pendapatan Hibah Dana BOS | Tahun 2021<br>Realisasi (Rp) | Tahun 2020<br>Realisasi (Rp) |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| SD Negeri                 | 17.051.618.000,00            | 18.738.874.601,00            |
| SMP Negeri                | 5.537.490.000,00             | 5.774.330.000,00             |
| <b>Jumlah</b>             | <b>22.589.108.000,00</b>     | <b>24.513.204.601,00</b>     |

### 5.1.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2021 sebesar Rp1.420.783.809.255,16 yang berarti mencapai 90,03% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp1.578.122.225.635,28. Belanja menurut jenisnya terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 5.1.21 Rincian Realisasi Belanja**

| Belanja             | Tahun 2021                  |                             | Tahun 2020<br>Realisasi (Rp) |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                     | Anggaran (Rp)               | Realisasi (Rp)              |                              |
| Belanja Operasi     | 1.085.590.398.611,06        | 970.121.278.940,00          | 906.310.422.488,75           |
| Belanja Modal       | 293.524.117.576,00          | 260.921.215.974,16          | 202.599.536.825,27           |
| Belanja Tak Terduga | 13.675.312.448,22           | 4.408.917.341,00            | 22.165.472.553,00            |
| Belanja Transfer    | 185.332.397.000,00          | 185.332.397.000,00          | 195.672.146.320,00           |
| <b>Jumlah</b>       | <b>1.578.122.225.635,28</b> | <b>1.420.783.809.255,16</b> | <b>1.326.747.578.187,02</b>  |

### 5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.

Realisasi Belanja Operasi TA 2021 adalah sebesar Rp970.121.278.940,00 yang berarti mencapai 89,36% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp1.085.590.398.611,06. Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.22 Rincian Belanja Operasi**

| Belanja Operasi         | Tahun 2021                  |                           | Tahun 2020<br>Realisasi (Rp) |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                         | Anggaran (Rp)               | Realisasi (Rp)            |                              |
| Belanja Pegawai         | 528.616.181.498,56          | 482.702.664.650,00        | 468.226.677.267,00           |
| Belanja Barang dan Jasa | 509.285.568.014,50          | 444.359.498.382,00        | 385.945.661.462,75           |
| Belanja Hibah           | 26.172.625.498,00           | 25.458.597.908,00         | 27.917.073.003,00            |
| Belanja Bantuan Sosial  | 21.516.023.600,00           | 17.600.518.000,00         | 24.221.010.756,00            |
| <b>Jumlah</b>           | <b>1.085.590.398.611,06</b> | <b>970.121.278.940,00</b> | <b>906.310.422.488,75</b>    |

#### 5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 adalah sebesar Rp482.702.664.650,00 yang berarti mencapai 91,31% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp528.616.181.498,56. Realisasi Belanja Pegawai merupakan belanja yang berasal dari gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.23 Rincian Realisasi Belanja Pegawai**

| Belanja Pegawai                                                    | Tahun 2021         |                    | Tahun 2020<br>Realisasi (Rp) |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
|                                                                    | Anggaran (Rp)      | Realisasi (Rp)     |                              |
| Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                     | 307.960.665.968,56 | 282.110.539.724,00 | 282.152.972.107,00           |
| Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                   | 111.395.710.481,00 | 102.647.182.121,00 | 101.663.789.473,00           |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN | 87.072.241.681,00  | 80.252.542.574,00  | 63.990.680.174,00            |
| Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD                                    | 18.877.395.900,00  | 16.630.984.414,00  | 11.015.796.175,00            |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| Belanja Pegawai                                         | Tahun 2021                |                           | Tahun 2020<br>Realisasi (Rp) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                                                         | Anggaran (Rp)             | Realisasi (Rp)            |                              |
| Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH                     | 487.807.468,00            | 259.830.385,00            | 136.894.656,00               |
| Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 2.822.360.000,00          | 801.585.432,00            | 912.465.432,00               |
| Belanja Pegawai Dana BOS                                | 0,00                      | 0,00                      | 3.527.394.250,00             |
| Belanja Pegawai Operasional BLUD                        | 0,00                      | 0,00                      | 4.826.685.000,00             |
| <b>Jumlah</b>                                           | <b>528.616.181.498,56</b> | <b>482.702.664.650,00</b> | <b>468.226.677.267,00</b>    |

#### 5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 adalah sebesar Rp444.359.498.382,00 yang berarti mencapai 87,25% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp509.285.568.014,50. Realisasi belanja barang dan jasa merupakan belanja untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, dengan realisasi selama TA 2021 dan TA 2020 sebagai berikut:

**Tabel 5.1.24 Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa**

| Belanja Barang dan Jasa                                                              | Tahun 2021                |                           | Tahun 2020<br>Realisasi (Rp) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                                                                                      | Anggaran (Rp)             | Realisasi (Rp)            |                              |
| Belanja Barang                                                                       | 216.244.675.117,50        | 190.727.194.536,00        | 34.757.881.948,25            |
| Belanja Jasa                                                                         | 176.079.643.135,00        | 155.293.295.594,00        | 126.093.872.382,50           |
| Belanja Pemeliharaan                                                                 | 27.947.307.299,00         | 22.497.725.910,00         | 17.298.968.798,00            |
| Belanja Perjalanan Dinas                                                             | 47.072.760.284,00         | 36.104.573.303,00         | 33.305.554.958,00            |
| Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 21.545.647.801,00         | 20.048.523.591,00         | 7.848.845.580,00             |
| Belanja Barang dan Jasa BOS                                                          | 20.395.534.378,00         | 19.688.185.448,00         | 15.531.644.362,00            |
| Belanja Barang dan Jasa BLUD                                                         | 0,00                      | 0,00                      | 151.108.893.434,00           |
| <b>Jumlah</b>                                                                        | <b>509.285.568.014,50</b> | <b>444.359.498.382,00</b> | <b>385.945.661.462,75</b>    |

##### a. Belanja Barang

Realisasi belanja barang TA 2021 adalah sebesar Rp190.727.194.536,00 terdiri atas belanja sebagai berikut:

**Tabel 5.1.25 Rincian Belanja Barang**

| Belanja Barang (Persediaan)    | Tahun 2021                |                           | Tahun 2020<br>Realisasi (Rp) |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                                | Anggaran (Rp)             | Realisasi (Rp)            |                              |
| Belanja Barang Pakai Habis     | 216.175.898.617,50        | 190.658.418.536,00        | 34.757.881.948,25            |
| Belanja Barang Tak Habis Pakai | 68.776.500,00             | 68.776.000,00             | 0,00                         |
| <b>Jumlah</b>                  | <b>216.244.675.117,50</b> | <b>190.727.194.536,00</b> | <b>34.757.881.948,25</b>     |



Terdapat belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp141.679.905.937,00 pada belanja barang pakai habis karena penganggaran untuk BLUD ada pada belanja tersebut. Adapun rincian belanja barang dan jasa BLUD disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.26 Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD**

| Belanja BLUD             | Tahun 2021<br>Realisasi (Rp) | Tahun 2020<br>Realisasi (Rp) |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| BLUD RSUD HASAN BASRY    | 128.499.977.464,00           | 143.612.374.884,00           |
| BLUD RS DAHA SEJAHTERA   | 10.593.736.385,00            | 4.569.026.266,00             |
| BLUD PUSKESMAS KANDANGAN | 1.220.648.890,00             | 1.318.483.724,00             |
| BLUD PUSKESMAS NEGARA    | 1.365.543.198,00             | 1.609.008.560,00             |
| <b>Jumlah</b>            | <b>141.679.905.937,00</b>    | <b>151.108.893.434,00</b>    |

**b. Belanja Jasa**

Realisasi belanja jasa sebesar Rp155.293.295.594,00 terdiri atas beberapa belanja jasa dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.1.27 Rincian Realisasi Belanja Jasa**

| Belanja Jasa                                                                | Tahun 2021                |                           | Tahun 2020<br>Realisasi (Rp) |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                                                                             | Anggaran (Rp)             | Realisasi (Rp)            |                              |
| Belanja Jasa Kantor                                                         | 109.248.437.735,00        | 91.656.393.268,00         | 52.689.823.123,50            |
| Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                              | 60.525.625.309,00         | 58.915.337.342,00         | 47.321.728.277,00            |
| Belanja Sewa                                                                | 913.933.441,00            | 605.746.800,00            | 841.210.272,00               |
| Belanja Jasa Konsultansi                                                    | 2.887.319.650,00          | 2.105.578.342,00          | 361.789.859,00               |
| Belanja Beasiswa Pendidikan PNS                                             | 60.000.000,00             | 51.720.000,00             | 24.217.813,00                |
| Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, BinteK dan Diklat                   | 2.318.327.000,00          | 1.832.519.842,00          | 930.987.500,00               |
| Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah | 126.000.000,00            | 126.000.000,00            | 16.164.249.581,00            |
| Belanja Honorarium PNS                                                      | 0,00                      | 0,00                      | 340.775.000,00               |
| Belanja Insentif Tenaga Medis Penanganan Covid 19                           | 0,00                      | 0,00                      | 7.419.090.957,00             |
| <b>Jumlah</b>                                                               | <b>176.079.643.135,00</b> | <b>155.293.295.594,00</b> | <b>126.093.872.382,50</b>    |

**c. Belanja Pemeliharaan**

Realisasi belanja pemeliharaan sebesar Rp22.497.725.910,00 yang terdiri dari belanja Pemeliharaan Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.1.28 Rincian Realisasi Belanja Pemeliharaan**

| Belanja Pemeliharaan                     | Tahun 2021       |                  | Tahun 2020<br>Realisasi (Rp) |
|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
|                                          | Anggaran (Rp)    | Realisasi (Rp)   |                              |
| Belanja Pemeliharaan Tanah               | 398.925.000,00   | 397.315.321,00   | 0,00                         |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 2.917.078.989,00 | 2.150.767.853,00 | 336.012.800,00               |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| Belanja Pemeliharaan                             | Tahun 2021               |                          | Tahun 2020<br>Realisasi (Rp) |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
|                                                  | Anggaran (Rp)            | Realisasi (Rp)           |                              |
| Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan         | 3.886.060.810,00         | 3.677.245.041,00         | 2.569.371.951,00             |
| Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan | 20.492.442.500,00        | 16.020.866.695,00        | 10.274.085.606,00            |
| Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya          | 252.800.000,00           | 251.531.000,00           | 8.250.000,00                 |
| Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor             | 0,00                     | 0,00                     | 4.111.248.441,00             |
| <b>Jumlah</b>                                    | <b>27.947.307.299,00</b> | <b>22.497.725.910,00</b> | <b>17.298.968.798,00</b>     |

**d. Belanja Perjalanan Dinas**

Realisasi belanja perjalanan dinas tahun 2021 sebesar Rp36.104.573.303,00. Berikut disajikan perbandingan dengan realisasi tahun 2020:

**Tabel 5.1.29 Realisasi Belanja Perjalanan Dinas**

| Belanja Perjalanan Dinas | Tahun 2021               |                          | Tahun 2020<br>Realisasi (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
|                          | Anggaran (Rp)            | Realisasi (Rp)           |                              |
| Belanja Perjalanan Dinas | 47.072.760.284,00        | 36.104.573.303,00        | 33.305.554.958,00            |
| <b>Jumlah</b>            | <b>47.072.760.284,00</b> | <b>36.104.573.303,00</b> | <b>33.305.554.958,00</b>     |

**e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Realisasi belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp20.048.523.591,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.30 Realisasi Belanja untuk Pihak Ketiga/Pihak Lain**

| Belanja Untuk Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | Tahun 2021               |                          | Tahun 2020<br>Realisasi (Rp) |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
|                                                  | Anggaran (Rp)            | Realisasi (Rp)           |                              |
| Belanja Uang                                     | 6.041.538.700,00         | 4.882.555.720,00         | 7.848.845.580,00             |
| Belanja Jasa                                     | 15.504.109.101,00        | 15.165.967.871,00        | 0,00                         |
| <b>Jumlah</b>                                    | <b>21.545.647.801,00</b> | <b>20.048.523.591,00</b> | <b>7.848.845.580,00</b>      |

**f. Belanja Barang dan Jasa BOS**

Belanja Barang dan Jasa BOS tahun 2021 direalisasi sebesar Rp19.688.185.448,00. Belanja barang dan jasa dan BOS terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang pada masing-masing sekolah negeri penerima dana bos dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.31 Rincian Belanja Barang dan Jasa Dana BOS**

| Sekolah       | Belanja Pegawai (Rp)    | Belanja Barang (Rp)      | Total (Rp)               |
|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| SDN           | 2.884.473.000,00        | 12.066.160.628,00        | 14.950.633.628,00        |
| SMPN          | 1.209.708.000,00        | 3.527.843.820,00         | 4.737.551.820,00         |
| <b>Jumlah</b> | <b>4.094.181.000,00</b> | <b>15.594.004.448,00</b> | <b>19.688.185.448,00</b> |



#### 5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa kepada penerima yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Pengelolaan hibah diatur melalui Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Realisasi Belanja Hibah TA 2021 sebesar Rp25.458.597.908,00 yang berarti mencapai 97,27% dari total anggaran yang ditetapkan pada APBD sebesar Rp26.172.625.498,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.32 Rincian Belanja Hibah**

| Belanja Hibah                                                  | Tahun 2021               |                          | Tahun 2020<br>Realisasi (Rp) |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
|                                                                | Anggaran (Rp)            | Realisasi (Rp)           |                              |
| Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya                 | 4.651.800.000,00         | 4.181.100.000,00         | 27.917.073.003,00            |
| Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Ormas yang Berbadan Hukum | 20.236.871.498,00        | 19.993.547.588,00        | 0,00                         |
| Belanja Hibah Dana BOS (Satdikdas Swasta)                      | 600.000.000,00           | 600.000.000,00           | 0,00                         |
| Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik           | 683.954.000,00           | 683.950.320,00           | 0,00                         |
| <b>Jumlah</b>                                                  | <b>26.172.625.498,00</b> | <b>25.458.597.908,00</b> | <b>27.917.073.003,00</b>     |

##### a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp4.181.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Table 5.1.33 Rincian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya**

| SKPD             | Hibah Kepada            | Realisasi Tahun 2021 (Rp) | Realisasi Tahun 2020 (Rp) | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dinas Pendidikan | Hibah BOP PAUD Tahap I  | 2.181.900.000,00          | 4.356.000.000,00          | Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/143/KUM/2021 tentang Penetapan Lembaga Penerima dan Besaran Hibah Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Bagi Lembaga Swasta Tahap I Tahun Anggaran 2021.  |
|                  | Hibah BOP PAUD Tahap II | 1.999.200.000,00          | 0,00                      | Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/273/KUM/2021 Tentang Penetapan Lembaga Penerima dan Besaran Hibah Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Bagi Lembaga Swasta Tahap II Tahun Anggaran 2021. |
| <b>Jumlah</b>    |                         | <b>4.181.100.000,00</b>   | <b>4.356.000.000,00</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |





**b. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**

Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia tahun 2021 direalisasi sebesar Rp19.993.547.588,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.1.34 Rincian Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan PerUU**

| SKPD                                 | Hibah Kepada                                                 | Realisasi Tahun 2021 (Rp) | Realisasi Tahun 2020 (Rp) | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dinas Pendidikan                     | PPG Guru PAI                                                 | 125.000.000,00            | 0,00                      | Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/162/KUM/2021 Tanggal 14 Juni 2021 tentang Penetapan Lembaga Penerima dan Besaran Dana Hibah Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan guru Pendidikan Agama Islam Tahun Anggaran 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                      | PAUD, SD, SMP                                                | 140.848.000,00            | 0,00                      | Berita Acara Serah Terima Hibah Barang berupa 1 unit Laptop Nomor 421.1/2329/Disdikbud Tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang berupa 1 unit Laptop Nomor 421.1/2347/Disdikbud Tanggal 23 Desember 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                      | Hibah BOP sekolah Nonformal/ Kesetaraan Tahap I dan Tahap II | 3.732.000.000,00          | 0,00                      | - Tahap I :Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/144/KUM/2021 Tentang Penetapan Lembaga Penerima dan Besaran Hibah Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Bagi Lembaga Swasta Tahap I Tahun Anggaran 2021.<br>- Tahap II : Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/272/KUM/2021 tentang Penetapan Lembaga Penerima dan Besaran Hibah Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Bagi Lembaga Swasta Tahap II Tahun Anggaran 2021. |
| Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata | KONI                                                         | 2.375.000.000,00          | 2.472.200.000,00          | Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 188.45/103/KUM/2021 Tanggal 7 April 2021 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penyaluran Dana Hibah Kepada Organisasi Tahun Anggaran 2021. senilai Rp3.078.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                      | NPC                                                          | 285.000.000,00            | 430.060.000,00            | Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 188.45/103/KUM/2021 Tanggal 7 April 2021 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penyaluran Dana Hibah Kepada Organisasi Tahun Anggaran 2021. senilai Rp3.078.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                      | Karang Taruna                                                | 38.000.000,00             | 0,00                      | Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 188.45/103/KUM/2021 Tanggal 7 April 2021 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penyaluran Dana Hibah Kepada Organisasi Tahun Anggaran 2021. senilai Rp3.078.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| SKPD                        | Hibah Kepada                         | Realisasi Tahun 2021 (Rp) | Realisasi Tahun 2020 (Rp) | Keterangan                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | KNPI                                 | 142.500.000,00            | 0,00                      | Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 188.45/103/KUM/2021 Tanggal 7 April 2021 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penyaluran Dana Hibah Kepada Organisasi Tahun Anggaran 2021. senilai Rp3.078.000.000,00 |
|                             | Kwarcab Pramuka                      | 237.500.000,00            | 144.000.000,00            | Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 188.45/103/KUM/2021 Tanggal 7 April 2021 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penyaluran Dana Hibah Kepada Organisasi Tahun Anggaran 2021. senilai Rp3.078.000.000,00 |
| Dinas Pertanian             | Peserta Temu Teknis                  | 18.000.000,00             | 0,00                      | Hadiah Lomba                                                                                                                                                                                                         |
| Bagian Kesejahteraan Rakyat | BAZNAS                               | 250.000.000,00            | 250.000.000,00            | Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/86/KUM/2021 tentang Penerimaan dan Besaran Penyaluran Dana Hibah kepada Lembaga dan Organisasi Tahun anggaran 2021                                           |
|                             | MUI                                  | 3.070.657.900,00          | 2.400.000.000,00          |                                                                                                                                                                                                                      |
| Badan Kesbangpol            | Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan | 2.335.860.000,00          | 0,00                      | SK Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 188.45/204/KUM/2021 Tanggal 27 Juli 2021 Tentang Penetapan Penerima dan Besaran Dana Hibah Kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021                     |
|                             | DHC'45) Kab. Hulu Sungai Selatan     | 350.000.000,00            | 350.000.000,00            | SK Bupati HSS Nomor 188.45/170/KUM/2021 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Dana Hibah kepada Badan Penerus Pembudayaan Kejuangan 45 Kab. HSS TA. 2021 tanggal ditetapkan 22 Juni 2021                            |
| <b>Jumlah</b>               |                                      | <b>13.100.365.900,00</b>  | <b>6.046.260.000,00</b>   |                                                                                                                                                                                                                      |

**Tabel 5.1.35 Rincian Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat keterangan terdaftar**

| SKPD                        | Hibah Kepada                                                                                          | Realisasi Tahun 2021 (Rp) | Realisasi Tahun 2020 (Rp) | Keterangan                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dinas Kesehatan             | PMI Kabupaten HSS                                                                                     | 469.826.000,00            | 466.000.000,00            | Naskah Perjanjian hibah Daerah antara Pemkab HSS dengan PMI Kab. HSS Nomor : 800/1117/DINKES; Nomor : 062/PK-HSS/KEU/IV/2021 Tanggal 21 April 2021 Tujuan Hibah untuk urusan PMI Kab. HSS untuk membiayai dan menunjang kegiatan PMI |
| Dinas Perumahan Rakyat KPLH | Pondok Pesantren Putri Dalam Pagar                                                                    | 758.664.000,00            | 0,00                      | Berita Acara Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial (Nomor: 663/1/BA.VHB/Dispera KPLH/2021) dan Berita Acara Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial (Nomor: 663/2/BA.VHB/Dispera KPLH/2021)                                                |
| Dinas Pertanian             | KT. Sumber Rejeki, KT. Padang Hariung, Gapoktan Usaha Baisut, KT Mekar Sari, KT. Kulampayan, KT. Suka | 139.500.000,00            | 0,00                      | Pembangunan jaringan irigasi usaha tani                                                                                                                                                                                              |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| SKPD          | Hibah Kepada                                                                            | Realisasi Tahun 2021 (Rp) | Realisasi Tahun 2020 (Rp) | Keterangan                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
|               | Ramai, KT. Berkat Bersama                                                               |                           |                           |                                                                |
|               | Kelompok Tani Taruna Membangun                                                          | 1.327.250.000,00          | 0,00                      | Pembangunan/rehab jalan usaha tani                             |
|               | Kelompok Tani Hidup Makmur                                                              | 119.500.000,00            | 0,00                      | Pembangunan/rehab DAM parit                                    |
|               | KT. Karya Tani, Masyarakat Peduli Gambut, KT. Berkat Mufakat, KT Palapah, KT Gawi Banua | 197.949.400,00            | 0,00                      | Hibah peralatan dan mesin pengendali kebakaran lahan dan hutan |
|               | KT. Mali-mali, KT. Balanti, KT. Sungai Kedaya, KT. Berkat Usaha                         | 97.379.138,00             | 0,00                      | Hibah peralatan dan mesin alat cultivator dan traktor roda 2   |
| <b>Jumlah</b> |                                                                                         | <b>3.110.068.538,00</b>   | <b>466.000.000,00</b>     |                                                                |

**Tabel 5.1.36 Rincian Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial kemasyarakatan**

| SKPD                            | Hibah Kepada                                                      | Realisasi Tahun 2021 (Rp) | Realisasi Tahun 2020 (Rp) | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Balai Adat Loksado                                                | 60.000.000,00             | 30.000.000,00             | Surat Keputusan Nomor : 189.45/127/KUM/2021 Tentang Penetapan penerima dan besaran penyaluran dana hibah kepada Balai Adat dan Lembaga/ Sanggarseni Tahun Anggaran 2021,                                                                        |
| Satpol PP                       | Kerukunan Barisan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 653.500.000,00            | 0,00                      | Keputusan bupati hulu Sungai Selatan Nomor : 188.45/101/KUM/2021 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penyaluran Dana Hibah kepada Kerukunan Barisan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2021 Tanggal 7 April 2021 |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| SKPD                        | Hibah Kepada                                                                                                          | Realisasi Tahun 2021 (Rp) | Realisasi Tahun 2020 (Rp) | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dinas Ketahanan Pangan      | 1.GAPOKTAN Maju Bersama dan .GAPOKTAN Bumi Raya                                                                       | 258.000.000,00            | 0,00                      | Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 188.45/64/KUM/2021 tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani Penerima Hibah Barang berupa Bangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Lantai Jemur Tahun Anggaran 2021 Tanggal 5 Maret 2021 dan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 188.45/259/KUM/2020 tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani Penerima Bantuan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat di Daerah Sentra Produksi dan Penyediaan Sarana Pendukungnya Tahun 2021 tanggal 10 September 2020 |
|                             | KWT Mandiri<br>1. Sari Purnawati dan KWT Mekar Sari<br>1. Nurdiani                                                    | 99.910.800,00             | 0,00                      | SK Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 04A Tahun 2021 Tanggal 18 Januari 2021 tentang Penerima Manfaat Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dinas Perikanan             | Kelompok Pokdakan Lentera, Sumber Pulau Besar, Bersama, dan Sinar Harapan                                             | 370.861.000,00            | 0,00                      | Budidaya Ikan Haruan dan Tauman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                             | Kelompok Basamaan, Kel. Jam'ah Polklahsar Berkah, KUB Berjat Sabar, KUB Sukamaju, KUB Sumber Usaha, KUB Permata Indah | 534.756.000,00            | 0,00                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin untuk perikanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dinas Pertanian             | KT. Kalaka, KT. Mengupil, KT. Sumber Rejeki, KT. Tani Makmur, KT. Kerjasama                                           | 55.450.000,00             | 0,00                      | Pengadaan alat pasca panen thresher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bagian Kesejahteraan Rakyat | Mesjid/Langgar/Majelis Ta'lim/Kubah Makam                                                                             | 1.450.635.350,00          | 1.645.000.000,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                             | Pondok Pesantren                                                                                                      | 250.000.000,00            | 200.000.000,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kelurahan Kandungan Utara   | PMK Tingdam                                                                                                           | 50.000.000,00             | 0,00                      | Berita Acara Serah Terima Barang 1 Set Peralatan Pemadam Kebakaran Nomor : 622.43/933/BAST/KU/2021 Tanggal 3 Mei 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Jumlah</b>               |                                                                                                                       | <b>3.783.113.150,00</b>   | <b>1.875.000.000,00</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



**c. Belanja Hibah Dana BOS**

Belanja Hibah Dana BOS direalisasikan sebesar Rp600.000.000,00 yang merupakan Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima Satuan Pendidikan Dasar (Satdikdas) Swasta.

**d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direalisasikan sebesar Rp683.950.320,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.1.37 Rincian Belanja Bantuan keuangan Kepada Partai Politik**

| Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | Tahun 2021            |                       | Tahun 2020<br>Realisasi (Rp) |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
|                                              | Anggaran (Rp)         | Realisasi (Rp)        |                              |
| Partai Nasional Demokrat (NASDEM)            | 155.124.000,00        | 155.123.509,00        | 155.123.509,00               |
| Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)     | 69.261.000,00         | 69.260.935,00         | 69.260.935,00                |
| Partai Keadilan Sejahtera (PKS)              | 172.137.000,00        | 172.136.946,00        | 172.136.946,00               |
| Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)              | 51.605.000,00         | 51.604.417,00         | 51.604.417,00                |
| Partai Golongan Karya (GOLKAR)               | 78.253.000,00         | 78.252.784,00         | 78.252.784,00                |
| Partai Persatuan Pembangunan (PPP)           | 35.257.000,00         | 35.256.625,00         | 35.256.625,00                |
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) | 51.391.000,00         | 51.390.057,00         | 51.390.057,00                |
| Partai Demokrat (DEMOKRAT)                   | 33.097.000,00         | 33.096.099,00         | 33.096.099,00                |
| Partai Amanat Nasional (PAN)                 | 37.829.000,00         | 37.828.948,00         | 37.828.948,00                |
| <b>Jumlah</b>                                | <b>683.954.000,00</b> | <b>683.950.320,00</b> | <b>683.950.320,00</b>        |

Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2021 diantaranya menyebutkan pada point 5 bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis Belanja Hibah obyek belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

**5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan status sosial masyarakat baik secara langsung kepada anggota masyarakat maupun melalui kelompok dan organisasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, serta kelompok sosial lainnya.

Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Bantuan sosial TA 2021 direalisasi sebesar Rp17.600.518.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.38 Rincian Belanja Bantuan Sosial**

| Belanja Bantuan Sosial                         | Tahun 2021               |                          | Tahun 2020<br>Realisasi (Rp) |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
|                                                | Anggaran (Rp)            | Realisasi (Rp)           |                              |
| Bantuan Sosial kepada Individu                 | 6.003.400.000,00         | 3.696.375.000,00         | 9.459.200.756,00             |
| Bantuan Sosial kepada Keluarga                 | 12.466.073.600,00        | 10.967.518.000,00        | 0,00                         |
| Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat      | 101.000.000,00           | 100.575.000,00           | 14.761.810.000,00            |
| Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan | 2.945.550.000,00         | 2.836.050.000,00         | 0,00                         |
| <b>Jumlah</b>                                  | <b>21.516.023.600,00</b> | <b>17.600.518.000,00</b> | <b>24.221.010.756,00</b>     |

Bantuan sosial berupa uang atau barang dianggarkan dalam kelompok Belanja Barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD yang membidangi, namun untuk kepentingan penyajian laporan keuangan disajikan dalam kelompok Belanja Bantuan Sosial. Bantuan Sosial berupa uang dan barang dilaksanakan oleh SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.1.39 Rincian Realisasi Bantuan Sosial per SKPD**

| SKPD                      | Realisasi Tahun 2021<br>(Rp) | Realisasi Tahun 2020<br>(Rp) |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Dinas Pendidikan          | 0,00                         | 80.250.000,00                |
| Dinas Sosial              | 17.308.527.000,00            | 2.371.796.000,00             |
| Dinas Ketahanan Pangan    | 0,00                         | 351.757.650,00               |
| Kelurahan Kandangan Barat | 291.991.000,00               | 223.401.100,00               |
| <b>Jumlah</b>             | <b>17.600.518.000,00</b>     | <b>3.027.204.750,00</b>      |

Untuk lebih jelas rincian penyaluran dana Bantuan Sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.40 Rincian Realisasi Jenis Bantuan Sosial**

| Penyaluran Dana Bantuan Sosial                             | Realisasi Tahun 2021 (Rp) |                      | Total<br>(Rp)    |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|
|                                                            | Dinas Sosial              | Kel. Kandangan Barat |                  |
| <b>Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu:</b>             |                           |                      |                  |
| Tali Asih Veteran dan Janda Veteran                        | 89.500.000,00             | 0,00                 | 89.500.000,00    |
| Sembako Veteran dan Janda Veteran                          | 22.750.000,00             | 0,00                 | 22.750.000,00    |
| Jaminan Hidup Lanjut Usia (JADUP LU)                       | 2.480.850.000,00          | 0,00                 | 2.480.850.000,00 |
| Bersama Untuk Peduli Anak Yatim (BERUPAYA)                 | 108.600.000,00            | 0,00                 | 108.600.000,00   |
| Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)                   | 78.000.000,00             | 0,00                 | 78.000.000,00    |
| Alat Bantu Disabilitas                                     | 46.375.000,00             | 0,00                 | 46.375.000,00    |
| Sembako Penyandang Disabilitas                             | 45.000.000,00             | 0,00                 | 45.000.000,00    |
| Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Untuk Penyandang Disabilitas | 27.000.000,00             | 0,00                 | 27.000.000,00    |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| Penyaluran Dana Bantuan Sosial                                                      | Realisasi Tahun 2021 (Rp) |                       | Total (Rp)               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                                                                     | Dinas Sosial              | Kel. Kandangan Barat  |                          |
| Perawatan Diri Orang Dengan gangguan Kejiwaan (ODK)                                 | 10.400.000,00             | 0,00                  | 10.400.000,00            |
| Pakaian /Baju kaos untuk anak anak terlantar/siswa PSBR                             | 7.500.000,00              | 0,00                  | 7.500.000,00             |
| Usaha Ekonomi Produktif                                                             | 579.100.000,00            | 0,00                  | 579.100.000,00           |
| Masyarakat terdampak Covid 19                                                       | 201.300.000,00            | 0,00                  | 201.300.000,00           |
|                                                                                     | <b>3.696.375.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>3.696.375.000,00</b>  |
| <b>Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga:</b>                                      |                           |                       |                          |
| Program Rumah Sejahtera (PRS)                                                       | 9.504.723.000,00          | 0,00                  | 9.504.723.000,00         |
| Beras Sejahtera Daerah (RASTRADA)                                                   | 1.271.379.000,00          | 0,00                  | 1.271.379.000,00         |
| Pemasangan Listrik, Alat Pemadam Portable dan Pembangunan WC Keluarga Pra Sejahtera | 0,00                      | 191.416.000,00        | 191.416.000,00           |
|                                                                                     | <b>10.776.102.000,00</b>  | <b>191.416.000,00</b> | <b>10.967.518.000,00</b> |
| <b>Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat:</b>                           |                           |                       |                          |
| Pemasangan Listrik, Alat Pemadam Portable dan Pembangunan WC Kelompok Masyarakat    | 0,00                      | <b>100.575.000,00</b> | <b>100.575.000,00</b>    |
|                                                                                     |                           |                       |                          |
| <b>Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan:</b>                      |                           |                       |                          |
| Permakanan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)                           | <b>2.836.050.000,00</b>   | 0,00                  | 2.836.050.000,00         |
| <b>Jumlah</b>                                                                       | <b>17.308.527.000,00</b>  | <b>291.991.000,00</b> | <b>17.600.518.000,00</b> |

### 5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.

Realisasi Belanja Modal TA 2021 adalah sebesar Rp260.921.215.974,16 yang berarti mencapai 88,89% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp293.524.117.576,00.

Penganggaran Belanja Modal mengikuti kebijakan akuntansi mengenai nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai minimum kapitalisasi aset tetap adalah batasan besaran minimum belanja per unit barang untuk dianggarkan sebagai Belanja Modal. Pembelian barang yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam Belanja Barang. Realisasi Belanja Modal menurut jenis adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.41 Rincian Realisasi Belanja Modal per Jenis**

| Belanja Modal       | Tahun 2021        |                   | Tahun 2020 Realisasi (Rp) |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|                     | Anggaran (Rp)     | Realisasi (Rp)    |                           |
| Tanah               | 12.088.673.758,00 | 1.563.402.500,00  | 5.665.753.150,00          |
| Peralatan dan Mesin | 61.732.816.917,00 | 55.907.592.945,00 | 46.653.731.769,00         |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| Belanja Modal               | Tahun 2021                |                           | Tahun 2020<br>Realisasi (Rp) |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                             | Anggaran (Rp)             | Realisasi (Rp)            |                              |
| Bangunan dan Gedung         | 119.225.872.294,00        | 108.565.226.735,16        | 57.811.004.588,92            |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 98.528.774.517,00         | 93.351.134.994,00         | 90.023.175.380,35            |
| Aset Tetap Lainnya          | 1.947.980.090,00          | 1.533.858.800,00          | 2.338.663.937,00             |
| Aset Lainnya                | 0,00                      | 0,00                      | 107.208.000,00               |
| <b>Jumlah</b>               | <b>293.524.117.576,00</b> | <b>260.921.215.974,16</b> | <b>202.599.536.825,27</b>    |

Belanja modal dan realisasi aset yang diperoleh dari belanja modal dijelaskan pada bab Neraca mengenai Aset Tetap.

Realisasi belanja modal berdasarkan obyek belanja adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.42 Rincian Realisasi Belanja Modal per Obyek Belanja**

| Uraian Belanja Modal                                  | Tahun 2021               |                          | Tahun 2020<br>Realisasi (Rp) |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
|                                                       | Anggaran (Rp)            | Realisasi (Rp)           |                              |
| <b>Belanja Modal Tanah</b>                            | <b>12.088.673.758,00</b> | <b>1.563.402.500,00</b>  | <b>5.665.753.150,00</b>      |
| Pengadaan Tanah Persil                                | 587.423.758,00           | 479.798.000,00           | 4.530.005.250,00             |
| Pengadaan Tanah Lapangan                              | 11.501.250.000,00        | 1.083.604.500,00         | 1.135.747.900,00             |
| <b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>              | <b>61.732.816.917,00</b> | <b>55.907.592.945,00</b> | <b>46.653.731.769,00</b>     |
| Pengadaan Alat Bantu                                  | 463.025.000,00           | 432.273.000,00           | 8.500.000,00                 |
| Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor                | 2.571.882.000,00         | 2.442.960.000,00         | 3.948.159.000,00             |
| Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor                  | 2.427.500.000,00         | 2.356.200.000,00         | 235.490.000,00               |
| Pengadaan Alat Ukur                                   | 48.800.000,00            | 43.418.000,00            | 281.525.000,00               |
| Pengadaan Alat Pengolahan                             | 243.700.000,00           | 237.990.000,00           | 0,00                         |
| Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan    | 0,00                     | 0,00                     | 285.080.200,00               |
| Pengadaan Alat Kantor                                 | 17.635.484.657,00        | 17.166.926.871,00        | 6.819.942.318,00             |
| Pengadaan Alat Rumah Tangga                           | 5.141.279.508,00         | 4.564.004.300,00         | 4.215.891.126,00             |
| Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat          | 371.546.584,00           | 357.965.000,00           | 445.197.000,00               |
| Pengadaan Alat Studio                                 | 1.067.230.850,00         | 941.551.500,00           | 404.091.721,00               |
| Pengadaan Alat Komunikasi                             | 140.423.441,00           | 125.875.000,00           | 46.385.000,00                |
| Pengadaan Peralatan Komunikasi Navigasi               | 52.225.000,00            | 51.850.000,00            | 0,00                         |
| Pengadaan Alat Kedokteran                             | 14.439.249.960,00        | 11.627.023.134,00        | 23.245.058.174,00            |
| Pengadaan Alat Kesehatan Umum                         | 4.096.262.488,00         | 3.816.381.129,00         | 17.787.500,00                |
| Pengadaan Unit Alat Laboratorium                      | 920.125,00               | 920.000,00               | 1.165.706.000,00             |
| Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah                 | 2.149.920.000,00         | 2.080.349.000,00         | 2.450.859.430,00             |
| Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika | 1.200.000,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan Hidup     | 137.039.000,00           | 128.850.000,00           | 34.950.000,00                |
| Pengadaan Komputer Unit                               | 5.276.221.871,00         | 5.008.641.444,00         | 2.984.834.300,00             |
| Pengadaan Peralatan Komputer                          | 5.168.787.933,00         | 4.243.059.199,00         | 0,00                         |
| Pengadaan Alat Deteksi                                | 650.000,00               | 650.000,00               | 0,00                         |
| Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api                | 0,00                     | 0,00                     | 5.500.000,00                 |





PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| Uraian Belanja Modal                             | Tahun 2021                |                           | Tahun 2020<br>Realisasi (Rp) |
|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                                                  | Anggaran (Rp)             | Realisasi (Rp)            |                              |
| Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan         | 27.000.000,00             | 22.038.618,00             | 58.775.000,00                |
| Pengadaan Alat SAR                               | 19.190.000,00             | 16.100.000,00             | 0,00                         |
| Pengadaan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan  | 10.641.500,00             | 10.368.000,00             | 0,00                         |
| Pengadaan Unit Peralatan Proses/Produksi         | 160.487.000,00            | 150.233.000,00            | 0,00                         |
| Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Darat          | 40.150.000,00             | 39.965.750,00             | 0,00                         |
| Pengadaan Peralatan Olahraga                     | 42.000.000,00             | 42.000.000,00             | 0,00                         |
| <b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>         | <b>119.225.872.294,00</b> | <b>108.565.226.735,16</b> | <b>57.811.004.588,92</b>     |
| Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja           | 116.124.497.294,00        | 105.623.338.067,16        | 46.576.511.326,92            |
| Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal         | 1.763.525.000,00          | 1.627.393.194,00          | 10.919.622.262,00            |
| Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan               | 678.650.000,00            | 665.397.200,00            | 203.364.500,00               |
| Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas              | 659.200.000,00            | 649.098.274,00            | 75.921.500,00                |
| Pengadaan Bangunan Rambu-rambu                   | 0,00                      | 0,00                      | 35.585.000,00                |
| <b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</b> | <b>98.528.774.517,00</b>  | <b>93.351.134.994,00</b>  | <b>90.023.175.380,35</b>     |
| Pengadaan Jalan                                  | 46.412.558.540,00         | 43.509.300.778,00         | 41.037.164.443,00            |
| Pengadaan Jembatan                               | 15.202.790.860,00         | 14.189.982.413,00         | 17.202.635.183,35            |
| Pengadaan Bangunan Air Irigasi                   | 19.155.550.474,00         | 18.886.052.869,00         | 10.049.044.296,00            |
| Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai               | 3.991.320.000,00          | 3.545.328.324,00          | 3.534.186.486,00             |
| Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku               | 586.036.000,00            | 564.702.428,00            | 0,00                         |
| Pengadaan Bangunan Air Kotor                     | 0,00                      | 0,00                      | 1.095.506.000,00             |
| Pengadaan Bangunan Air                           | 0,00                      | 0,00                      | 30.900.000,00                |
| Pengadaan Instalasi Air Bersih/Air Baku          | 1.078.350.000,00          | 1.072.349.201,00          | 10.541.146.310,00            |
| Pengadaan Instalasi Air Kotor                    | 2.969.150.000,00          | 2.704.883.741,00          | 722.194.252,00               |
| Pengadaan Instalasi Pengelolaan Sampah           | 0,00                      | 0,00                      | 189.500.000,00               |
| Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik           | 3.246.375.000,00          | 3.158.160.500,00          | 0,00                         |
| Pengadaan Jaringan Listrik                       | 5.796.340.000,00          | 5.631.874.740,00          | 5.441.398.410,00             |
| Pengadaan Jaringan Gas                           | 0,00                      | 0,00                      | 179.500.000,00               |
| Pengadaan Jaringan Telepon                       | 90.303.643,00             | 88.500.000,00             | 0,00                         |
| <b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>          | <b>1.947.980.090,00</b>   | <b>1.533.858.800,00</b>   | <b>2.338.663.937,00</b>      |
| Pengadaan Bahan Perpustakaan Tercetak            | 1.600.367.590,00          | 1.252.138.800,00          | 2.014.130.537,00             |
| Pengadaan Bahan Perpustakaan Terekam             | 99.187.500,00             | 38.495.000,00             | 0,00                         |
| Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan             | 34.775.000,00             | 34.250.000,00             | 35.800.000,00                |
| Pengadaan Alat Olah raga Lainnya                 | 0,00                      | 0,00                      | 105.908.000,00               |
| Pengadaan Hewan Ternak                           | 0,00                      | 0,00                      | 108.000.000,00               |
| Pengadaan Aset Tetap Renovasi                    | 100.000.000,00            | 96.975.000,00             | 74.825.400,00                |
| Pengadaan Aset Tidak Berwujud                    | 113.650.000,00            | 112.000.000,00            | 0,00                         |
| <b>Belanja Modal Aset Lainnya</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>107.208.000,00</b>        |
| Aplikasi, Aset Tak Berwujud                      | 0,00                      | 0,00                      | 107.208.000,00               |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| Uraian Belanja Modal | Tahun 2021                |                           | Tahun 2020<br>Realisasi (Rp) |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                      | Anggaran (Rp)             | Realisasi (Rp)            |                              |
| <b>Jumlah</b>        | <b>293.524.117.576,00</b> | <b>260.921.215.974,16</b> | <b>202.599.536.825,27</b>    |

Belanja modal tersebut termasuk di dalamnya adalah belanja modal Dana BOS yang direalisasi sebesar Rp3.326.167.693,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.43 Belanja Modal Dana BOS**

| Belanja Modal Dana BOS | Realisasi Tahun 2021 (Rp) | Realisasi Tahun 2020 (Rp) |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SD                     | 2.339.395.736,00          | 5.382.092.052,00          |
| SMP                    | 986.771.957,00            | 1.851.982.167,00          |
| <b>Jumlah</b>          | <b>3.326.167.693,00</b>   | <b>7.234.074.219,00</b>   |

**Tabel 5.1.44 Rincian Belanja Modal Dana BOS per Jenis Belanja**

| Belanja Modal BOS    | Jumlah Sekolah | Nilai (Rp)              |                       | Jumlah (Rp)             |
|----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                      |                | Dana BOS                | BOS Afirmasi          |                         |
| Peralatan dan Mesin: |                |                         |                       | 2.535.183.193,00        |
| - SDN                | 232 dan 7      | 1.696.382.036,00        | 136.000.000,00        |                         |
| - SMPN               | 31 dan 1       | 671.078.157,00          | 31.723.000,00         |                         |
|                      |                | <b>2.367.460.193,00</b> | <b>167.723.000,00</b> |                         |
| Aset Tetap Lainnya:  |                |                         |                       | 790.984.500,00          |
| - SDN                | 239            | 507.013.700,00          | 0,00                  |                         |
| - SMPN               | 32             | 283.970.800,00          | 0,00                  |                         |
|                      |                | <b>790.984.500,00</b>   | <b>0,00</b>           |                         |
| <b>Jumlah</b>        |                |                         |                       | <b>3.326.167.693,00</b> |

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menganggarkan alokasi dana BOS Afirmasi berdasarkan pagu alokasi Satdikdas Negeri yang tercantum dalam naskah Perjanjian Hibah Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 364/P/2019, melalui mekanisme penganggaran. Juknis tentang dana bos afirmasi dan bos kinerja lebih lanjut diatur dalam Permendikburistek Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi Tahun 2021.

### 5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga (BTT) adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bantuan sosial dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan adalah pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana yang



berhubungan langsung dengan masyarakat, tetapi anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Realisasi belanja tidak terduga selama tahun 2021 sebesar Rp4.408.917.341,00 atau 32,24% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp13.675.312.448,22. Perbandingan belanja tidak terduga TA 2021 dan TA 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.45 Belanja Tak Terduga**

| Belanja Tidak Terduga | Tahun 2021               |                         | Tahun 2020<br>Realisasi (Rp) |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                       | Anggaran (Rp)            | Realisasi (Rp)          |                              |
| Belanja Tidak Terduga | 13.675.312.448,22        | 4.408.917.341,00        | 22.165.472.553,00            |
| <b>Jumlah</b>         | <b>13.675.312.448,22</b> | <b>4.408.917.341,00</b> | <b>22.165.472.553,00</b>     |

Adapun rincian belanja tidak terduga Tahun 2021 direalisasi pada beberapa belanja sebagai berikut:

**Tabel 5.1.46 Rincian Belanja Tidak Terduga**

| Uraian Belanja Tidak Terduga                 | Realisasi Tahun 2021<br>(Rp) |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Covid-19                                     | 949.911.500,00               |
| Tanggap Darurat Banjir                       | 248.550.000,00               |
| Santunan Korban Bencana Kebakaran            | 266.000.000,00               |
| Santunan Korban Bencana Alam                 | 68.450.000,00                |
| Santunan Biaya Berobat                       | 19.226.077,00                |
| Bansos Tidak Terencana (Santunan Kematian)   | 2.350.500.000,00             |
| Pengembalian Hibah Pemerintah                | 186.014.964,00               |
| Pengembalian sisa Utang Dana Desa Tahun 2020 | 320.264.800,00               |
| <b>Jumlah</b>                                | <b>4.408.917.341,00</b>      |

Rincian belanja tidak terduga per SKPD disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.47 Rincian Belanja Tidak Terduga Per SKPD**

| SKPD            | Realisasi Tahun 2021 (Rp) |                       |                      |                         |                           |                                     | Jumlah<br>(Rp)          |
|-----------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|                 | Covid                     | Santunan<br>Bencana   | Santunan<br>Berobat  | Santunan<br>Kematian    | Tanggap<br>Darurat Banjir | Pengembalian ke<br>Pemerintah Pusat |                         |
| Dinas Kesehatan | 320.584.300,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                | 320.584.300,00          |
| BPBD            | 629.327.200,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    | 244.500.000,00            | 0,00                                | 873.827.200,00          |
| Dinas Sosial    | 0,00                      | 334.450.000,00        | 19.226.077,00        | 2.350.500.000,00        | 4.050.000,00              | 0,00                                | 2.708.226.077,00        |
| BPKPD           | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 506.279.764,00                      | 506.279.764,00          |
| <b>Total</b>    | <b>949.911.500,00</b>     | <b>334.450.000,00</b> | <b>19.226.077,00</b> | <b>2.350.500.000,00</b> | <b>248.550.000,00</b>     | <b>506.279.764,00</b>               | <b>4.408.917.341,00</b> |

Belanja tidak terduga digunakan untuk belanja penanganan Covid-19, santunan untuk kematian dan berobat, santunan untuk korban bencana melalui BPKPD untuk beberapa SKPD penerima sebagai berikut:



## 1. Dinas Kesehatan

Belanja tidak terduga untuk Dinas Kesehatan tahun 2021 direalisasi sebesar Rp320.584.300,00. BTT Covid untuk Dinas Kesehatan dilakukan sebanyak 1 tahap Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Covid dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.48 Rincian BTT Covid Dinas Kesehatan**

| Uraian                                                                | Realisasi (Rp)        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Urusan Pelayanan Kesehatan | 177.030.100,00        |
| Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap                        | 111.000.000,00        |
| Belanja insentif satgas/petugas penanganan Covid 19                   | 9.300.000,00          |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                      | 2.175.000,00          |
| Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin                                   | 3.400.000,00          |
| Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik                                 | 2.969.200,00          |
| Belanja Pemeliharaan Taman                                            | 1.350.000,00          |
| Belanja Modal Alat Kantor/Rumah Tangga Lainnya                        | 13.360.000,00         |
| <b>Jumlah</b>                                                         | <b>320.584.300,00</b> |

## 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Realisasi belanja tidak terduga untuk BPBD tahun 2021 sebesar Rp873.827.200,00 yang digunakan untuk belanja penanganan bencana banjir dan covid. Penyaluran dana BTT dilakukan sebanyak 4 tahap, 2 tahap diantaranya untuk disalurkan kembali ke Dinas Kesehatan dan Dinas Perumahan Rakyat KPLH dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.49 Realisasi BTT per SKPD pada BPBD**

| SKPD                        | Realisasi Tahun 2021 (Rp) | Realisasi Tahun 2020 (Rp) |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| BPBD                        | 421.500.000,00            | 465.469.000,00            |
| Dinas Kesehatan HSS         | 447.127.200,00            | 147.630.000,00            |
| Dinas Perumahan Rakyat KPLH | 5.200.000,00              | 0,00                      |
| <b>JUMLAH</b>               | <b>873.827.200,00</b>     | <b>613.099.000,00</b>     |

### a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Realisasi penggunaan dana dari BTT pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021 sebesar Rp421.500.000,00 digunakan untuk penanganan covid (biaya pemakaman) dan penanganan tanggap darurat banjir dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja jasa tenaga ahli (anggota penguburan dan penyemprotan) sebesar Rp176.500.000,00
- Belanja bahan lainnya berupa papan sebesar Rp500.000,00 untuk



penguburan.

- Belanja bantuan sosial berupa uang kepada keluarga sebesar Rp244.500.000,00 yang langsung ditransfer melalui sistem *virtual account* dengan besaran Rp500.000,00 per kepala keluarga.

**b. Dinas Perumahan Rakyat KPLH**

Realisasi penggunaan dana dari BTT Covid pada Dinas Perumahan Rakyat KPLH tahun 2021 sebesar Rp5.200.000,00 digunakan untuk biaya pemakaman dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja jasa tenaga ahli (anggota penguburan dan penyemprotan) sebesar Rp4.800.000,00; dan
- Belanja bahan lainnya berupa papan sebesar Rp400.000,00.

**c. Dinas Kesehatan**

Realisasi penggunaan dana dari BTT Covid pada Dinas Kesehatan tahun 2021 sebesar Rp447.127.200,00 yang terdiri atas beberapa belanja dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.1.50 Realisasi BTT Covid per Belanja**

| Uraian                                                                | Realisasi (Rp)        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Urusan Pelayanan Kesehatan | 305.989.000,00        |
| Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap                        | 50.816.000,00         |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                 | 14.497.200,00         |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- ATK                         | 4.181.000,00          |
| Belanja Bahan-bahan Lainnya                                           | 15.555.000,00         |
| Belanja Alat untuk Kegiatan Kantor                                    | 8.750.000,00          |
| Belanja Alat Listrik                                                  | 10.149.000,00         |
| Belanja sewa Kendaraan                                                | 3.440.000,00          |
| Belanja Bahan habis Pakai BBM                                         | 950.000,00            |
| Belanja Modal Alat Pendingin /AC                                      | 8.390.000,00          |
| Belanja Modal Alat Peralatan personal komputer                        | 1.900.000,00          |
| Belanja Modal Alat rumah tangga lainnya                               | 22.510.000,00         |
| <b>Jumlah</b>                                                         | <b>447.127.200,00</b> |

**3. Dinas Sosial**

Realisasi belanja tidak terduga yang disalurkan ke Dinas Sosial berasal dari BPKPD sebesar Rp2.708.226.077,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan santunan kematian sebesar Rp2.350.500.000,00 yang diberikan kepada individu dengan besaran Rp1.500.000,00 per individu.
- Bantuan santunan biaya berobat sebesar Rp19.226.077,00 yang



diserahkan sesuai hasil verifikasi.

- Bantuan korban bencana sebesar Rp334.450.000,00 berupa bantuan untuk korban bencana kebakaran sebesar Rp266.000.000,00 disalurkan berdasarkan hasil verifikasi dari Satpol PP Damkar; dan bencana alam lainnya sebesar Rp68.450.000,00 yang disalurkan berdasarkan rekomendasi dari tim verifikasi.
- Bantuan untuk tanggap darurat banjir sebesar Rp4.050.000,00.

#### 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)

Realisasi belanja tidak terduga pada BPKPD sebesar Rp506.279.764,00 berupa belanja yang digunakan untuk pembayaran sebagai berikut:

- Pengembalian hibah dari pemerintah sebesar Rp186.014.964,00 berupa sisa dana hibah bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dari BNPB.
- Pembayaran utang dana desa tahun 2019 sebesar Rp320.264.800,00 merupakan pengembalian sisa dana desa yang tidak disalurkan yang dibayarkan melalui kas daerah ke rekening kas negara pada tanggal 20 April 2021.

#### 5.1.2.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan belanja yang terdiri atas Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan. Belanja Transfer Pendapatan terdiri dari belanja bagi hasil pajak daerah dan belanja bagi hasil pendapatan lainnya. Sedangkan Transfer Bantuan Keuangan terdiri atas Bantuan Keuangan Kepada Desa.

Realisasi Transfer TA 2021 sebesar Rp185.332.397.000,00 yang berarti mencapai 100,00% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp185.332.397.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.51 Rincian Realisasi Belanja Transfer**

| Belanja Transfer         | Tahun 2021                |                           | Tahun 2020<br>Realisasi (Rp) |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                          | Anggaran (Rp)             | Realisasi (Rp)            |                              |
| Belanja Bagi Hasil       | 2.628.865.000,00          | 2.628.865.000,00          | 2.288.000.000,00             |
| Belanja Bantuan Keuangan | 182.703.532.000,00        | 182.703.532.000,00        | 193.384.146.320,00           |
| <b>Jumlah</b>            | <b>185.332.397.000,00</b> | <b>185.332.397.000,00</b> | <b>195.672.146.320,00</b>    |

#### 5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Realisasi belanja bagi hasil pendapatan sebesar Rp2.628.865.000,00 merupakan transfer atas pendapatan bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk pembiayaan APB-Desa sebanyak 144 Desa se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Transfer Bagi Hasil Pendapatan direalisasikan sebesar 100,00% dari total anggaran yang telah ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar



Rp2.628.865.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.52 Rincian Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan**

| Belanja Bagi Hasil                                                        | Tahun 2021              |                         | Tahun 2020<br>Realisasi (Rp) |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                                                                           | Anggaran (Rp)           | Realisasi (Rp)          |                              |
| Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten             | 1.528.865.000,00        | 1.528.865.000,00        | 1.274.000.000,00             |
| Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa | 1.100.000.000,00        | 1.100.000.000,00        | 1.014.000.000,00             |
| <b>Jumlah</b>                                                             | <b>2.628.865.000,00</b> | <b>2.628.865.000,00</b> | <b>2.288.000.000,00</b>      |

#### **1. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah**

Realisasi transfer bagi hasil pajak daerah (BHPD) TA 2021 sebesar Rp1.528.865.000,00 merupakan belanja bagi hasil pajak daerah yang disalurkan kepada 114 Desa berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 113 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2021. Penyaluran terhadap BHPD dilakukan dalam 4 (empat) tahap, yaitu tahap I sebesar 10%, tahap II sebesar 40%, tahap III sebesar 40% dan tahap IV sebesar 10%. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dana sudah disalurkan seluruhnya kepada 144 Desa yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

#### **2. Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah**

Realisasi transfer bagi hasil retribusi daerah (BHRD) TA 2021 sebesar Rp1.100.000.000,00 merupakan belanja bagi hasil pajak daerah yang disalurkan kepada 114 Desa berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 113 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2021. Penyaluran terhadap BHRD dilakukan dalam 4 (empat) tahap, yaitu tahap I sebesar 10%, tahap II sebesar 40%, tahap III sebesar 40% dan tahap IV sebesar 10%. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dana sudah disalurkan seluruhnya kepada 144 Desa yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

#### **5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan**

Realisasi belanja bantuan keuangan tahun 2021 sebesar Rp182.703.532.000,00 atau mencapai 100,00% dari total anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp182.703.532.000,00. Belanja transfer bantuan keuangan terdiri atas bantuan keuangan kepada desa dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 5.1.53 Rincian Realisasi Transfer Bantuan Keuangan**

| Belanja Bantuan Keuangan                                                      | Tahun 2021                |                           | Tahun 2020 Realisasi (Rp) |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                               | Anggaran (Rp)             | Realisasi (Rp)            |                           |
| Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota                     | 0,00                      | 0,00                      | 683.950.320,00            |
| Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa | 182.703.532.000,00        | 182.703.532.000,00        | 192.700.196.000,00        |
| <b>Jumlah</b>                                                                 | <b>182.703.532.000,00</b> | <b>182.703.532.000,00</b> | <b>193.384.146.320,00</b> |

Realisasi belanja bantuan keuangan umum kabupaten/kota kepada desa berupa belanja transfer alokasi dana desa dan dana desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp182.703.532.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.54 Rincian Realisasi Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa**

| Bantuan Keuangan kepada Desa | Tahun 2021                |                           | Tahun 2020 Realisasi (Rp) |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                              | Anggaran (Rp)             | Realisasi (Rp)            |                           |
| Alokasi Dana Desa            | 64.400.000.000,00         | 64.400.000.000,00         | 75.266.000.000,00         |
| Dana Desa                    | 118.303.532.000,00        | 118.303.532.000,00        | 117.434.196.000,00        |
| <b>Jumlah</b>                | <b>182.703.532.000,00</b> | <b>182.703.532.000,00</b> | <b>192.700.196.000,00</b> |

Transfer bantuan keuangan kepada desa terdiri atas:

- Alokasi Dana Desa sebesar Rp64.400.000.000,00 yang diberikan kepada 144 Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui 4 tahapan realisasi;
- Dana Desa sebesar Rp118.303.532.000,00 dengan mekanisme pencairan yang diatur dalam SE Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Desa oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai berikut:
  1. KPPN menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
  2. KPPN menyampaikan salinan SP2D kepada Bupati dan Kepala Desa.
  3. Berdasarkan salinan SP2D tersebut, Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada KPPN dan Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
  4. Berdasarkan salinan SP2D yang disampaikan kepada Bupati dan lembar konfirmasi penyaluran Dana Desa di RKD, PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa (SP2DD) sebaga dasar pencatatan realisasi pendapatan Dana Desa.
  5. Berdasarkan SP2DD tersebut, PPKD selaku BUD menerbitkan Surat





Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) sebagai dasar pencatatan realisasi belanja bantuan keuangan ke desa.

6. Penerbitan SP2DD dan SPBDD dilakukan berdasarkan tahapan penyaluran Dana Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### 5.1.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Realisasi Pembiayaan Neto TA 2021 adalah sebesar Rp302.352.674.278,28 yang berarti mencapai 100,00% dari jumlah yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp302.352.674.278,28 Pembiayaan Neto terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.55 Rincian Pembiayaan Neto**

| Pembiayaan                     | Tahun 2021                |                           | Tahun 2020<br>Realisasi (Rp) |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                                | Anggaran (Rp)             | Realisasi (Rp)            |                              |
| Penerimaan Pembiayaan          | 302.352.674.278,28        | 302.352.674.278,28        | 275.280.367.245,44           |
| Pengeluaran Pembiayaan         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                         |
| <b>Jumlah Pembiayaan Netto</b> | <b>302.352.674.278,28</b> | <b>302.352.674.278,28</b> | <b>275.280.367.245,44</b>    |

#### 5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan dari Pembiayaan Daerah TA 2021 sebesar Rp302.352.674.278,28 atau 100,00% dari total anggaran perubahan sebesar Rp302.352.674.278,28. Penerimaan pembiayaan mencakup penerimaan Kas Daerah yang berasal dari penggunaan SiLPA tahun lalu, penerimaan kembali piutang, dan penerimaan hasil investasi non permanen dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.56 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah**

| Penerimaan Pembiayaan Daerah                     | Tahun 2021                |                           | Tahun 2020<br>Realisasi (Rp) |
|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                                                  | Anggaran (Rp)             | Realisasi (Rp)            |                              |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 302.333.220.278,28        | 302.352.674.278,28        | 275.260.913.245,44           |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah     | 19.454.000,00             | 0,00                      | 19.454.000,00                |
| <b>Jumlah</b>                                    | <b>302.352.674.278,28</b> | <b>302.352.674.278,28</b> | <b>275.280.367.245,44</b>    |

##### 5.1.4.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun sebelumnya dialokasikan untuk pembiayaan pada TA 2021.



Penggunaan SiLPA TA 2021 sebesar Rp302.352.674.278,28. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan TA 2020. Penetapan penggunaan SiLPA sebagai sumber pembiayaan anggaran ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2021.

Penggunaan SiLPA berasal dari:

1. Sisa kas di Kas Daerah sebesar Rp284.681.021.298,28;
2. Sisa kas di Kas BLUD sebesar Rp15.962.571.745,00;
3. Sisa kas di Kas Dana Kapitasi JKN sebesar Rp1.279.182.660,00; dan
4. Sisa kas di Bendahara Dana BOS sebesar Rp429.898.575,00.

#### **5.1.4.1.2 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah**

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah TA 2021 sebesar Rp0,00 dikarenakan tidak adanya penerimaan kembali pemberian pinjaman.

#### **5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan**

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak menganggarkan Pengeluaran Pembiayaan selama Tahun 2020.

#### **5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)**

Berdasarkan defisit anggaran sebelum pembiayaan sebesar Rp78.189.525.859,54 dan realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp302.352.674.278,28 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2021 sebesar Rp224.163.148.418,74. SiLPA TA 2021 tersebut berasal dari kelebihan penerimaan pendapatan, efisiensi anggaran belanja, dan kelebihan pembiayaan netto sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Dari target pendapatan sebesar Rp1.275.769.551.357,00 realisasinya sebesar Rp1.342.594.283.395,62 sehingga terdapat pelampauan target pendapatan sebesar Rp66.824.732.038,62.
2. Dari anggaran belanja sebesar Rp1.578.122.225.635,28 realisasinya sebesar Rp1.420.783.809.255,16 sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp157.338.416.380,12.

Efisiensi anggaran belanja tersebut terdiri atas rincian sebagai berikut:

- a. Efisiensi anggaran belanja operasi sebesar Rp115.469.119.671,06;
- b. Efisiensi anggaran belanja modal sebesar Rp32.602.901.601,84; dan
- c. Efisiensi anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp9.266.395.107,22;

SiLPA tahun 2021 sebesar Rp224.163.148.418,74 memiliki nilai yang sama dengan saldo kas pada neraca yang terdiri dari:



1. Sisa kas di Kas Daerah sebesar Rp164.313.797.944,95;
2. Sisa kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp12.500.000,00;
3. Sisa kas di Kas BLUD sebesar Rp58.907.198.654,79;
4. Sisa kas di Kas Bendahara Kapitasi JKN sebesar Rp924.998.385,00; dan
5. Sisa kas di Kas Bendahara BOS sebesar Rp4.653.434,00.



## **5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)**

### **5.2.1 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal**

Saldo Anggaran Lebih (SAL) TA 2020 sebesar Rp302.352.674.278,28 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020.

### **5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan**

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp302.352.674.278,28 direalisasikan sebagai penggunaan SiLPA TA 2021 dari yang dianggarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD TA 2021 sebesar Rp302.352.674.278,28.

### **5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2021**

Berdasarkan defisit anggaran sebelum pembiayaan sebesar Rp78.189.525.859,54 dan realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp302.352.674.278,28 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2021 sebesar Rp224.163.148.418,74. SiLPA TA 2021 tersebut berasal dari pelampauan target pendapatan, efisiensi belanja, dan pelampauan target pembiayaan neto, sebagaimana diuraikan berikut ini.

- A. Dari target pendapatan sebesar Rp1.275.769.551.357,00 realisasinya sebesar Rp1.342.594.283.395,62 sehingga terdapat pelampauan target pendapatan sebesar Rp66.824.732.038,62. Pelampauan target pendapatan tersebut berasal dari pelampauan target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp45.458.648.846,62; ditambah pelampauan target Pendapatan Transfer sebesar Rp22.418.170.642,00; dikurangi tidak tercapainya target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp1.052.087.450,00.
- B. Dari anggaran belanja sebesar Rp1.578.122.225.635,28 realisasinya sebesar Rp1.420.783.809.255,16 sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp157.338.416.380,12. Efisiensi anggaran belanja tersebut terdiri atas rincian sebagai berikut:
  1. Efisiensi anggaran belanja operasi sebesar Rp115.469.119.671,06 yang terdiri atas:
    - Efisiensi anggaran pembayaran belanja pegawai sebesar Rp45.913.516.848,56.
    - Efisiensi anggaran pembayaran belanja barang dan jasa sebesar Rp64.926.069.632,50.
    - Sisa anggaran untuk pembayaran belanja hibah sebesar Rp714.027.590,00.
    - Sisa anggaran untuk pembayaran belanja Bantuan Sosial sebesar Rp3.915.505.600,00.
  2. Sisa anggaran belanja modal sebesar Rp32.602.901.601,84 dengan



rincian:

- Sisa anggaran belanja modal tanah sebesar Rp10.525.271.258,00.
- Sisa anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp5.825.223.972,00.
- Sisa anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp10.660.645.558,84.
- Sisa anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp5.177.639.523,00.
- Sisa anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp414.121.290,00.

3. Efisiensi anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp9.266.395.107,22.

#### **5.2.4 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir**

Jumlah SAL per 31 Desember 2021 sebesar Rp224.163.148.418,74. Dari SiLPA TA 2021 sebesar Rp224.163.148.418,74 terdapat SiLPA terikat sebesar Rp78.753.630.395,79 yang terdiri dari:

1. Sisa DAK Fisik Tahun 2021 sebesar Rp56.229.840,00;
2. Sisa DAK Non Fisik Tahun 2021 sebesar Rp11.274.230.798,00;
3. Sisa DID Tahun 2021 sebesar Rp7.586.319.284,00
4. Dana BLUD sebesar Rp58.907.198.654,79;
5. Dana Kapitasi JKN sebesar Rp924.998.385,00; dan
6. Dana BOS sebesar Rp4.653.434,00.



### 5.3 Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Pada penjelasan Neraca ini digunakan Neraca per 31 Desember 2020 sebagai komparatif.

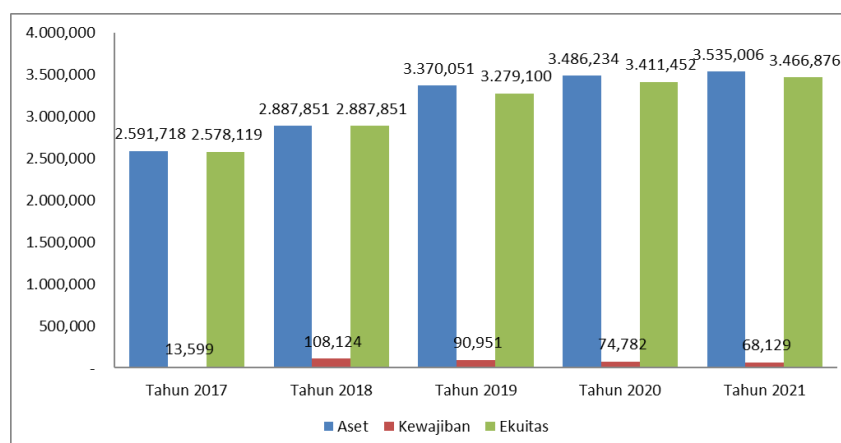
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3.1 Ringkasan Neraca Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

| Uraian:                             | 31 Desember 2021<br>(Rp)    | 31 Desember 2020<br>(Rp)    |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Aset Lancar                         | 300.479.365.657,66          | 395.740.541.491,97          |
| Investasi Jangka Panjang            | 88.392.391.429,69           | 87.548.450.074,96           |
| Aset Tetap                          | 3.135.870.443.805,03        | 2.993.686.015.370,44        |
| Dana Cadangan                       | 0,00                        | 0,00                        |
| Aset Lainnya                        | 10.264.422.391,00           | 8.351.368.121,00            |
| <b>Jumlah Aset</b>                  | <b>3.535.006.623.283,38</b> | <b>3.485.326.375.058,37</b> |
| Kewajiban Jangka Pendek             | 68.129.947.361,50           | 74.326.063.069,00           |
| Kewajiban Jangka Panjang            | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>Jumlah Kewajiban</b>             | <b>68.129.947.361,50</b>    | <b>74.326.063.069,00</b>    |
| Ekuitas                             | 3.466.876.675.921,88        | 3.411.000.311.989,37        |
| <b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b> | <b>3.535.006.623.283,38</b> | <b>3.485.326.375.058,37</b> |

Perbandingan aset, kewajiban dan ekuitas dana selama lima tahun terakhir untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan disajikan dalam grafik berikut:

**Grafik 5.3: Perbandingan aset, kewajiban dan ekuitas pada Neraca Tahun 2017-2021**



#### 5.3.1 Aset

Jumlah Aset per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp3.535.006.623.283,38 dan Rp3.485.326.375.058,37 naik sebesar Rp49.680.248.225,01 atau 1,43%.



**Tabel 5.3.2 Ringkasan Aset Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

| Uraian                   | 31 Desember 2021<br>(Rp)    | 31 Desember 2020<br>(Rp)    |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Aset Lancar              | 300.479.365.657,66          | 395.740.541.491,97          |
| Investasi Jangka Panjang | 88.392.391.429,69           | 87.548.450.074,96           |
| Aset Tetap               | 3.135.870.443.805,03        | 2.993.686.015.370,44        |
| Dana Cadangan            | 0,00                        | 0,00                        |
| Aset Lainnya             | 10.264.422.391,00           | 8.351.368.121,00            |
| <b>Jumlah Aset</b>       | <b>3.535.006.623.283,38</b> | <b>3.485.326.375.058,37</b> |

#### 5.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun dihitung sejak tanggal neraca. Jumlah aset lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp300.479.365.657,66 dan Rp395.740.541.491,97 turun sebesar Rp95.261.175.834,31 atau 24,07%. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.3.3 Rincian Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

| Aset Lancar                                | 31 Desember 2021<br>(Rp)  | 31 Desember 2020<br>(Rp)  |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Kas                                        | 224.163.148.418,74        | 302.365.102.234,28        |
| Piutang Pajak                              | 1.147.114.564,86          | 2.165.838.743,00          |
| Piutang Retribusi                          | 1.736.952.445,00          | 1.571.289.065,00          |
| Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya     | 22.857.583.833,00         | 0,00                      |
| Piutang Transfer Pemerintah Pusat          | 0,00                      | 18.177.423.834,00         |
| Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | 34.415.878.502,00         | 24.917.319.944,00         |
| Piutang Bagian Lancar TPA                  | 0,00                      | 596.562.500,00            |
| Piutang Bagian Lancar TGR                  | 0,00                      | 211.915.000,00            |
| Piutang Lainnya                            | 31.000.000,00             | 29.667.291.529,71         |
| Penyisihan Piutang                         | (6.345.145.825,41)        | (5.494.440.234,49)        |
| Persediaan                                 | 22.472.833.719,47         | 21.562.238.876,47         |
| <b>Jumlah Aset Lancar</b>                  | <b>300.479.365.657,66</b> | <b>395.740.541.491,97</b> |

**Tabel 5.3.4 Rincian Kas Neraca**

| Kas                              | 31 Desember 2021<br>(Rp) | 31 Desember 2020<br>(Rp) |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kas di Kas Daerah                | 164.313.797.944,95       | 284.681.021.298,28       |
| Kas di Bendahara Pengeluaran     | 12.500.000,00            | 0,00                     |
| Kas di Bendahara Penerimaan      | 0,00                     | 0,00                     |
| Kas di Badan Layanan Umum Daerah | 58.907.198.654,79        | 15.962.571.745,00        |
| Kas di Bendahara Kapitasi JKN    | 924.998.385,00           | 1.279.182.660,00         |
| Kas di Bendahara Dana BOS        | 4.653.434,00             | 429.898.575,00           |



| Kas               | 31 Desember 2021<br>(Rp)  | 31 Desember 2020<br>(Rp)  |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| Kas Lainnya       | 0,00                      | 12.427.956,00             |
| <b>Jumlah Kas</b> | <b>224.163.148.418,74</b> | <b>302.365.102.234,28</b> |

#### 5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp164.313.797.944,95 dan Rp284.681.021.298,28. Saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 turun sebesar Rp120.367.223.353,33 atau 42,28%. Saldo Kas di Kas Daerah adalah penempatan berupa giro dengan rincian saldo sebagai berikut:

**Tabel 5.3.5 Rincian Kas di Kas Daerah**

| Kas di Kas Daerah               | 31 Desember 2021<br>(Rp)  | 31 Desember 2020<br>(Rp)  |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rekening Giro                   | 164.313.797.944,95        | 284.681.021.298,28        |
| <b>Jumlah Kas di Kas Daerah</b> | <b>164.313.797.944,95</b> | <b>284.681.021.298,28</b> |

#### 1. Rekening Giro

Rekening giro bank merupakan bagian dari kekayaan milik Pemerintah Daerah yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.6 Rincian Rekening Giro**

| Rekening Giro pada Bank Kal-Sel Cab. Kandangan | 31 Desember 2021<br>(Rp)  | 31 Desember 2020<br>(Rp)  |
|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Kas Umum Daerah (Kasda) No. 008.00.03.00017.0  | 164.313.797.944,95        | 284.681.021.298,28        |
| <b>Jumlah Rekening Giro</b>                    | <b>164.313.797.944,95</b> | <b>284.681.021.298,28</b> |

#### 2. Deposito

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan per 31 Desember 2021 tidak mempunyai saldo pada rekening deposito.

Penempatan deposito diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penempatan Uang Milik Daerah Dalam Rangka Manajemen Kas yang ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2021. Dalam Bab II Pasal 3 disebutkan bahwa BUD dapat menempatkan uang milik daerah dalam rangka manajemen kas dalam bentuk deposito pada bank yang ditunjuk sebagai penempatan/pemegang Rekening Kas Umum Daerah apabila saldo kas pada Kas Umum Daerah melebihi Saldo Kas Minimal. Besarnya uang milik daerah yang ditempatkan paling banyak adalah sebesar kelebihan saldo pada perhitungan Saldo Kas Minimal.

Selama tahun 2021 dilakukan penempatan deposito dalam rangka manajemen kas pada Bank Kalsel Cabang Kandangan sebesar Rp100.000.000.000,00 sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Badan





Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 07/BPKPD 2021 dan Nomor 20/PKS/KDG-OPR/2021 tentang Kerja Sama Penempatan Uang Milik Daerah Dalam Rangka Manajemen Kas pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Kantor Cabang Kandangan tanggal 16 Juni 2021. Saldo deposito adalah dana Pemerintah Daerah yang ditempatkan di bank dalam bentuk deposito untuk jangka waktu satu bulan, dan diperpanjang secara otomatis atau *automatic roll over* (ARO). Tingkat bunga deposito yang diberikan oleh pihak bank adalah sebesar 4% yang diperhitungkan setiap waktu jatuh tempo dan dibayarkan ke Kas Daerah. Pendapatan atas bunga deposito diakui/dibukukan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 131 menyebutkan bahwa deposito harus disetor/dicairkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada akhir tahun berjalan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui surat Nomor 950/1714/BPKPD tanggal 22 Nopember 2021 meminta kepada Bank agar memindahbukukan deposito berjangka milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp100.000.000.000,00 ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Kalsel Cabang Kandangan. Atas surat tersebut pihak Bank Kalsel Cabang Kandangan sudah melakukan pencairan deposito ke Kas Daerah pada tanggal 16 Desember 2021.

#### **5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang tunai maupun non tunai yang berada di rekening bank bendahara pengeluaran SKPD. Saldo kas di rekening bendahara pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.500.000,00. Saldo tersebut merupakan saldo kas yang terdapat pada bendahara pengeluaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dari belanja makan minum yang batal dibayarkan namun sampai dengan 31 Desember 2021 belum dikembalikan ke kas daerah. Atas saldo tersebut, bendahara Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sudah mengembalikan ke kas daerah pada tanggal 8 Februari 2022.

#### **5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 merupakan penerimaan pendapatan tahun 2021 yang belum disetor ke Kas Daerah. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak mempunyai saldo kas di bendahara penerimaan.

#### **5.3.1.1.4 Kas di Badan Layanan Umum Daerah**

Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan kas dan setara kas yang digunakan untuk pengelolaan penerimaan pendapatan dan biaya yang berasal



dari hasil operasional BLUD. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp58.907.198.654,79 dan Rp15.962.571.745,00 naik sebesar Rp42.944.626.909,79 atau 269,03% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.7 Rincian Kas di Badan Layanan Umum Daerah**

| Kas di BLUD               | 31 Desember 2021<br>(Rp) | 31 Desember 2020<br>(Rp) |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| RSUD Hasan Basry          | 50.127.432.935,29        | 8.262.825.049,00         |
| Puskesmas Kandangan       | 199.928.307,45           | 265.202.119,00           |
| Puskesmas Negara          | 461.707.864,09           | 402.406.426,00           |
| RS Daha Sejahtera         | 8.118.129.547,96         | 7.032.138.151,00         |
| <b>Jumlah Kas di BLUD</b> | <b>58.907.198.654,79</b> | <b>15.962.571.745,00</b> |

### 1. RSUD Hasan Basry

Saldo kas BLUD RSUD Hasan Basry per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp50.127.432.935,29 dan Rp8.262.825.049,00 naik sebesar Rp41.864.607.886,29 atau 506,66%.

**Tabel 5.3.8 Rincian Kas BLUD RSUD Hasan Basry**

| Kas di BLUD                          | 31 Desember 2021<br>(Rp) | 31 Desember 2020<br>(Rp) |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Rekening Pendapatan pada BSI</b>  |                          |                          |
| No. Rekening 8337402880              | 50.125.995.923,54        | 8.262.459.289,00         |
| <b>Rekening Pengeluaran pada BSI</b> |                          |                          |
| No. Rekening 8337401310              | 1.437.011,75             | 365.760,00               |
| <b>Jumlah Kas di BLUD</b>            | <b>50.127.432.935,29</b> | <b>8.262.825.049,00</b>  |

### 2. Puskesmas Kandangan

Puskesmas Kandangan ditetapkan sebagai BLUD berdasarkan SK Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/398/KUM/2020 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Kandangan sebagai Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD tanggal 18 Desember 2020. Saldo kas BLUD Puskesmas Kandangan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp199.928.307,45 dan Rp265.202.119,00 turun sebesar Rp65.273.811,55 atau 24,61% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.9 Rincian Kas BLUD Puskesmas Kandangan**

| Kas di BLUD                    | 31 Desember 2021<br>(Rp) | 31 Desember 2020<br>(Rp) |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| No. Rekening 008.00.04.00369.2 | 199.928.307,45           | 265.202.119,00           |
| <b>Jumlah Kas di BLUD</b>      | <b>199.928.307,45</b>    | <b>265.202.119,00</b>    |

### 3. Puskesmas Negara

Puskesmas Negara ditetapkan sebagai BLUD berdasarkan SK Bupati Hulu



Sungai Selatan Nomor 188.45/399/KUM/2020 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Negara sebagai Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD tanggal 18 Desember 2020. Saldo kas BLUD Puskesmas Negara per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp461.707.864,09 dan Rp402.406.426,00 naik sebesar Rp59.301.438,09 atau 14,74% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.10 Rinician Kas BLUD Puskesmas Negara**

| Kas di BLUD                    | 31 Desember 2021<br>(Rp) | 31 Desember 2020<br>(Rp) |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| No. Rekening 008.00.04.00375.3 | 461.707.864,09           | 402.406.426,00           |
| <b>Jumlah Kas di BLUD</b>      | <b>461.707.864,09</b>    | <b>402.406.426,00</b>    |

#### 4. RS Daha Sejahtera

Rumah Sakit Daha Sejahtera ditetapkan sebagai BLUD berdasarkan SK Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/396/KUM/2020 tentang Penetapan rumah Sakit Daha Sejahtera sebagai Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah tanggal 18 Desember 2020. Saldo kas BLUD RS Daha Sejahtera per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp8.118.129.547,96 dan Rp7.032.138.151,00 naik sebesar Rp1.085.991.396,96 atau 15,44% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.11 Rincian Kas BLUD RS Daha Sejahtera**

| Kas di BLUD                 | 31 Desember 2021<br>(Rp) | 31 Desember 2020<br>(Rp) |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| No. Rekening 008.00.00752.7 | 8.118.129.547,96         | 7.032.138.151,00         |
| <b>Jumlah Kas di BLUD</b>   | <b>8.118.129.547,96</b>  | <b>7.032.138.151,00</b>  |

##### 5.3.1.15 Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN

Kas Dana Kapitasi JKN adalah dana hasil klaim Puskesmas atas Pelayanan Kesehatan ke BPJS yang masih belum digunakan. Saldo Kas Dana Kapitasi JKN per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp924.998.385,00 dan Rp1.279.182.660,00. Saldo Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN turun sebesar Rp354.184.275,00 atau 27,69% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.12 Rincian Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN**

| Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN | 31 Desember 2021<br>(Rp) | 31 Desember 2020<br>(Rp) |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Puskesmas Padang Batung            | 45.475.210,00            | 64.124.992,00            |
| Puskesmas Kaliring                 | 54.370.274,00            | 55.028.356,00            |
| Puskesmas Malinau                  | 17.818.755,00            | 23.537.663,00            |
| Puskesmas Loksado                  | 32.720.473,00            | 54.827.376,00            |
| Puskesmas Telaga Langsat           | 51.117.934,00            | 75.483.318,00            |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp)   |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Puskesmas Angkinang                | 58.570.243,00         | 96.560.260,00           |
| Puskesmas Bamban                   | 21.992.127,00         | 38.927.279,00           |
| Puskesmas Gambah                   | 37.169.422,00         | 59.450.007,00           |
| Puskesmas Jambu Hilir              | 131.616.305,00        | 136.673.673,00          |
| Puskesmas Sungai Raya              | 45.864.354,00         | 142.559.791,00          |
| Puskesmas Batang Kulur             | 16.509.286,00         | 37.384.034,00           |
| Puskesmas Simpur                   | 61.934.674,00         | 128.352.281,00          |
| Puskesmas Wasah                    | 27.787.096,00         | 34.555.767,00           |
| Puskesmas Kalumpang                | 19.566.981,00         | 43.328.578,00           |
| Puskesmas Bayanan                  | 58.403.733,00         | 38.030.256,00           |
| Puskesmas Sungai Pinang            | 58.573.967,00         | 73.647.742,00           |
| Puskesmas Baruh Jaya               | 88.992.162,00         | 66.759.762,00           |
| Puskesmas Bajayau                  | 29.662.761,00         | 35.849.149,00           |
| Puskesmas Pasungkan                | 66.852.628,00         | 74.102.376,00           |
| <b>Jumlah</b>                      | <b>924.998.385,00</b> | <b>1.279.182.660,00</b> |

Penurunan kas di Bendahara Kapitasi JKN tahun 2021 disebabkan adanya penyesuaian perhitungan SiLPA JKN berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan BPJS sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

#### 5.3.1.1.6 Kas di Bendahara Dana BOS

Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp4.653.434,00 dan Rp429.898.575,00 turun sebesar Rp425.245.141,00 atau 98,92%. Mulai Tahun 2017, penerimaan dan pengeluaran Dana BOS dikelola melalui mekanisme APBD. Kas di Bendahara Dana BOS merupakan sisa kas pada masing-masing sekolah penerima dana BOS Tahun 2021, sebagai berikut:

**Tabel 5.3.13 Rincian Kas di Bendahara Dana BOS**

| Sekolah       | 31 Desember 2020 (Rp) | Mutasi (Rp)              |                          | 31 Desember 2021 (Rp) |
|---------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|               |                       | Penerimaan               | Pengeluaran              |                       |
| SD            | 242.875.298,00        | 17.051.618.000,00        | 17.290.029.364,00        | 4.463.934,00          |
| SMP           | 187.023.277,00        | 5.537.490.000,00         | 5.724.323.777,00         | 189.500,00            |
| <b>Jumlah</b> | <b>429.898.575,00</b> | <b>22.589.108.000,00</b> | <b>23.014.353.141,00</b> | <b>4.653.434,00</b>   |

Rincian per sekolah pada *Lampiran 1 dan 2*.

#### 5.3.1.1.7 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp12.427.956,00.



**Tabel 5.3.14 Rincian Kas Lainnya**

| Kas Lainnya                 | 31 Desember 2021<br>(Rp) | 31 Desember 2020<br>(Rp) |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Utang Pajak Dana BOS</b> |                          |                          |
| SDN                         | 0,00                     | 2.126.624,00             |
| SMPN                        | 0,00                     | 10.301.332,00            |
| <b>Jumlah Kas Lainnya</b>   | <b>0,00</b>              | <b>12.427.956,00</b>     |

#### 5.3.1.1.8 Piutang Pajak

Akun Piutang Pajak menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari pajak daerah yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum diterima pendapatannya. Piutang Pajak per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp1.147.114.564,86 dan Rp2.165.838.743,00 turun sebesar Rp1.018.724.178,14 atau 47,04%. Piutang Pajak terdiri dari Piutang PBB- P2, Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dan piutang pajak reklame dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.15 Rincian Piutang Pajak**

| Piutang Pajak               | 31 Desember 2021<br>(Rp) | 31 Desember 2020<br>(Rp) |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Piutang PBB - P2            | 560.875.728,00           | 1.665.201.431,00         |
| Piutang PPJ                 | 583.449.694,00           | 500.637.312,00           |
| Piutang Pajak Reklame       | 2.789.142,86             | 0,00                     |
| <b>Jumlah Piutang Pajak</b> | <b>1.147.114.564,86</b>  | <b>2.165.838.743,00</b>  |

#### 1. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp560.875.728,00 dan sebesar Rp1.665.201.431,00 turun sebesar Rp1.104.325.703,00 atau 66,32% terdiri atas tagihan PBB-P2 dan penerimaan atas ketetapan PBB-P2 TA 2021, serta koreksi piutang PBB P2 karena verifikasi dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.16 Rincian Saldo Piutang PBB-P2**

| Piutang PBB | 31 Desember 2020<br>(Rp) | Mutasi (Rp)      |               |            | 31 Desember 2021<br>(Rp) |
|-------------|--------------------------|------------------|---------------|------------|--------------------------|
|             |                          | Koreksi          | Pelunasan     | Penambahan |                          |
| Tahun 2011  | 659.107.532,00           | (605.087.375,00) | 0,00          | 0,00       | 54.020.157,00            |
| Tahun 2012  | 269.875.220,00           | (241.211.659,00) | 12.856,00     | 0,00       | 28.650.705,00            |
| Tahun 2013  | 254.317.029,00           | (228.210.445,00) | 30.526,00     | 0,00       | 26.076.058,00            |
| Tahun 2014  | 53.118.856,00            | 0,00             | 5.198.809,00  | 0,00       | 47.920.047,00            |
| Tahun 2015  | 851.102,00               | 0,00             | 49.316,00     | 0,00       | 801.786,00               |
| Tahun 2016  | 103.769.286,00           | 0,00             | 7.320.338,00  | 0,00       | 96.448.948,00            |
| Tahun 2017  | 106.290.200,00           | 0,00             | 7.889.810,00  | 0,00       | 98.400.390,00            |
| Tahun 2018  | 58.927.217,00            | 0,00             | 7.499.899,00  | 0,00       | 51.427.318,00            |
| Tahun 2019  | 10.576.129,00            | 0,00             | 3.987.639,00  | 0,00       | 6.588.490,00             |
| Tahun 2020  | 148.368.860,00           | 0,00             | 25.926.991,00 | 0,00       | 122.441.869,00           |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| Piutang PBB   | 31 Desember 2020<br>(Rp) | Mutasi (Rp)               |                         |                         | 31 Desember 2021<br>(Rp) |
|---------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                          | Koreksi                   | Pelunasan               | Penambahan              |                          |
| Tahun 2021    | 0,00                     | 0,00                      | 1.293.036.999,00        | 1.321.136.959,00        | 28.099.960,00            |
| <b>Jumlah</b> | <b>1.665.201.431,00</b>  | <b>(1.074.509.479,00)</b> | <b>1.350.953.183,00</b> | <b>1.321.136.959,00</b> | <b>560.875.728,00</b>    |

Penerimaan selama TA 2021 terdiri atas penerimaan tahun berjalan dan pelunasan tahun sebelumnya. Atas pembayaran tersebut sudah dilakukan identifikasi untuk memastikan NOP dan tahun pajak yang dibayar. Selain itu atas saldo piutang PBB Tahun 2021 termasuk di dalamnya verifikasi piutang PBB pada 66 Desa di 7 Kecamatan sebesar Rp1.074.509.479,00 dan sudah dilakukan penghapusan piutang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/177/KUM/2021 tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Tanggal 25 Juni 2021.

## 2. Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan hak Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang belum dibayar oleh PLN sampai dengan 31 Desember 2021. Saldo piutang PPJ per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp583.449.694,00 dan Rp500.637.312,00 naik sebesar Rp82.812.382,00 atau 16,54%. Piutang Pajak Penerangan Jalan untuk bulan Desember Tahun 2021 telah diterima seluruhnya pada tanggal 13 Januari 2022. Berikut disajikan mutasi piutang pajak penerangan jalan selama tahun 2022:

**Tabel 5.3.17 Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan**

| Uraian        | 31 Desember 2020<br>(Rp) | Mutasi                |                       | 31 Desember 2021<br>(Rp) |
|---------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
|               |                          | Pelunasan             | Penambahan            |                          |
| Piutang PPJ   | 500.637.312,00           | 500.637.312,00        | 583.449.694,00        | 583.449.694,00           |
| <b>Jumlah</b> | <b>500.637.312,00</b>    | <b>500.637.312,00</b> | <b>583.449.694,00</b> | <b>583.449.694,00</b>    |

## 3. Piutang Pajak Reklame

Piutang pajak reklame tahun 2021 berupa piutang pajak reklame Bank Kalsel.

BPKPD menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) setelah diterbitkannya surat teguran, hal ini sebagai hasil tindak lanjut koordinasi dengan pihak Bank Kalsel. Ada 6 (enam) SKPD yang diterbitkan pada tanggal 29 Nopember 2021, total ketetapan pokok pajak sebesar Rp31.726.500,00 dengan rincian SKPD:

- Nomor: 000489/SKPD/04/1/2021 sebesar Rp10.920.000,00.
- Nomor: 000490/SKPD/04/1/2021 sebesar Rp3.201.000,00.
- Nomor: 000491/SKPD/04/1/2021 sebesar Rp3.201.000,00.



- d. Nomor: 000492/SKPD/04/1/2021 sebesar Rp6.402.000,00.
- e. Nomor: 000493/SKPD/04/1/2021 sebesar Rp 4.801.500,00.
- f. Nomor: 000494/SKPD/04/1/2021 sebesar Rp3.201.000,00

Atas SKPD tersebut belum dilakukan pembayaran oleh Bank kalsel sampai dengan tahun anggaran berakhir. Saldo piutang pajak reklame per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp2.789.142,86 dan Rp0,00.

#### 5.3.1.1.8.1 Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan Piutang Pajak dilakukan berdasarkan umur piutang yang dibagi berdasarkan kategori kelancaran. Perhitungan penyisihan piutang dilakukan untuk menentukan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) atas piutang pajak. Saldo penyisihan piutang pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp341.889.036,41 dengan rincian penyisihan Tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 5.3.18 Perhitungan Penyisihan Piutang PBB-P2**

| Kategori Umur Piutang PBB-P2 | Jumlah Bruto (Rp)     | Penyisihan Tidak tertagih | Jumlah Penyisihan (Rp) |
|------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Lancar                       | 28.099.960,00         | 0,50%                     | 140.499,80             |
| Kurang Lancar                | 129.030.359,00        | 10%                       | 12.903.035,90          |
| Diragukan                    | 149.827.708,00        | 50%                       | 74.913.854,00          |
| Macet                        | 253.917.701,00        | 100%                      | 253.917.701,00         |
| <b>Jumlah</b>                | <b>560.875.728,00</b> |                           | <b>341.875.090,70</b>  |

**Tabel 5.3.19 Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Reklame**

| Kategori Umur Piutang Pajak Reklame | Jumlah Bruto (Rp)   | Penyisihan Tidak tertagih | Jumlah Penyisihan (Rp) |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| Lancar                              | 2.789.142,86        | 0,50%                     | 13.945,71              |
| Kurang Lancar                       | -                   | 10%                       | -                      |
| Diragukan                           | -                   | 50%                       | -                      |
| Macet                               | -                   | 100%                      | -                      |
| <b>Jumlah</b>                       | <b>2.789.142,86</b> |                           | <b>13.945,71</b>       |

Berdasarkan Bultek Akuntansi Nomor 21 bahwa piutang yang sifatnya tidak diusahakan sendiri oleh Pemerintah Daerah maka tidak diberlakukan penyisihan atas piutang tersebut. Oleh karena itu atas Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum tidak dilakukan penyisihan piutang.

#### 5.3.1.1.9 Piutang Retribusi

Akun piutang retribusi merupakan hak Pemerintah Daerah dari pengenaan retribusi daerah yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum diterima pembayarannya. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp1.736.952.445,00 dan Rp1.571.289.065,00. Saldo Piutang Retribusi



naik sebesar Rp165.663.380,00 atau 10,54% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.20 Rincian Piutang Retribusi**

| Piutang Retribusi                             | 31 Desember 2021<br>(Rp) | 31 Desember 2020<br>(Rp) |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Retribusi Pelayanan Pasar (Dinas Perdagangan) | 1.652.113.445,00         | 1.504.937.065,00         |
| Retribusi Menara (Dinas Kominfo)              | 3.065.000,00             | 0,00                     |
| Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinkes)        | 81.774.000,00            | 66.352.000,00            |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>1.736.952.445,00</b>  | <b>1.571.289.065,00</b>  |

Rincian Piutang retribusi pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

#### 1. Dinas Perdagangan

Piutang retribusi pada Dinas Perdagangan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp1.652.113.445,00 dan Rp1.504.937.065,00. Piutang retribusi pelayanan pasar naik sebesar Rp147.176.380,00 atau 9,78% dibandingkan dengan tahun 2020. Rincian piutang retribusi pada Dinas Perdagangan disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.3.21 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Grosir**

| Uraian        | 31 Desember 2020<br>(Rp) | Mutasi (Rp)           |                       | 31 Desember 2021<br>(Rp) |
|---------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
|               |                          | Pelunasan             | Penambahan            |                          |
| Tahun 2011    | 1.380.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 1.380.000,00             |
| Tahun 2012    | 77.871.850,00            | 0,00                  | 0,00                  | 77.871.850,00            |
| Tahun 2013    | 53.920.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 53.920.000,00            |
| Tahun 2014    | 92.168.300,00            | 1.327.500,00          | 0,00                  | 90.840.800,00            |
| Tahun 2015    | 102.743.350,00           | 1.927.500,00          | 0,00                  | 100.815.850,00           |
| Tahun 2016    | 170.695.200,00           | 11.545.000,00         | 0,00                  | 159.150.200,00           |
| Tahun 2017    | 170.893.000,00           | 9.652.500,00          | 0,00                  | 161.240.500,00           |
| Tahun 2018    | 136.293.800,00           | 20.196.700,00         | 0,00                  | 116.097.100,00           |
| Tahun 2019    | 244.253.200,00           | 64.025.400,00         | 0,00                  | 180.227.800,00           |
| Tahun 2020    | 454.718.365,00           | 186.005.700,00        | 270.000,00            | 268.982.665,00           |
| Tahun 2021    | 0,00                     | 0,00                  | 440.044.680,00        | 440.044.680,00           |
| <b>Jumlah</b> | <b>1.504.937.065,00</b>  | <b>294.680.300,00</b> | <b>440.314.680,00</b> | <b>1.650.571.445,00</b>  |

Penambahan piutang retribusi pelayanan pasar grosir selama tahun 2021 sebesar Rp440.044.680,00 terdiri atas piutang retribusi yang terdapat pada 3 lokasi pasar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu:

1. Pasar Kandangan sebesar Rp305.272.100,00;
2. Pasar Angkinang sebesar Rp13.425.000,00; dan
3. Pasar Negara sebesar Rp121.347.580,00.

Selain piutang retribusi pelayanan pasar grosir, pada Dinas Perdagangan juga terdapat piutang retribusi pelayanan pasar los sebesar Rp1.542.000,00





merupakan kekurangan setor retribusi pelayanan pasar los pada tahun 2021. Atas kekurangan setor tersebut, bendahara Dinas Perdagangan telah menyetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 6 Januari 2022.

**Tabel 5.3.22 Rincian Mutasi Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Los**

| Uraian                 | 31 Desember 2020<br>(Rp) | Mutasi (Rp) |                     | 31 Desember 2021<br>(Rp) |
|------------------------|--------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|
|                        |                          | Pelunasan   | Penambahan          |                          |
| Kurang setor pasar los | 0,00                     | 0,00        | 1.542.000,00        | 1.542.000,00             |
| <b>Jumlah</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>1.542.000,00</b> | <b>1.542.000,00</b>      |

## 2. Dinas Komunikasi dan Informatika

Piutang retribusi pada Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp3.065.000,00 dan Rp0,00 merupakan piutang retribusi menara telekomunikasi pada PT Tower Bersama Grup. Berikut disajikan rincian pelunasan dan penambahan piutang retribusi menara selama tahun 2021:

**Tabel 5.3.23 Rincian Piutang Retribusi Menara**

| Uraian                | 31 Desember 2020<br>(Rp) | Mutasi (Rp) |                     | 31 Desember 2021<br>(Rp) |
|-----------------------|--------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|
|                       |                          | Pelunasan   | Penambahan          |                          |
| PT Tower Bersama Grup | 0,00                     | 0,00        | 3.065.000,00        | 3.065.000,00             |
| <b>Jumlah</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>3.065.000,00</b> | <b>3.065.000,00</b>      |

## 3. Dinas Kesehatan

Piutang Retribusi pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp81.774.000,00 dan Rp66.352.000,00 merupakan piutang retribusi pelayanan kesehatan klaim BPJS. Terdapat koreksi saldo awal atas piutang retribusi pelayanan kesehatan dikarenakan nilai verifikasi yang disetujui oleh BPJS lebih kecil dari klaim yang diajukan sebesar Rp2.262.400,00 dengan rincian mutasi selama tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 5.3.24 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan**

| Uraian            | 31 Desember 2020<br>(Rp) | Mutasi (Rp)           |                      |                      | 31 Desember 2021<br>(Rp) |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
|                   |                          | Koreksi               | Pelunasan            | Penambahan           |                          |
| Rawat Inap (BPJS) | 66.352.000,00            | (2.262.400,00)        | 63.725.600,00        | 81.774.000,00        | 81.774.000,00            |
| <b>Jumlah</b>     | <b>66.352.000,00</b>     | <b>(2.262.400,00)</b> | <b>63.725.600,00</b> | <b>81.774.000,00</b> | <b>81.774.000,00</b>     |

Piutang retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dikategorikan lancar.

### 5.3.1.1.9.1 Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi dilakukan berdasarkan umur piutang yang dibagi berdasarkan kategori kelancaran. Perhitungan penyisihan piutang retribusi dilakukan untuk menentukan nilai bersih yang dapat direalisasikan atas piutang retribusi. Saldo penyisihan piutang retribusi per 31 Desember



2021 sebesar Rp1.430.973.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.25 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Grosir**

| Kategori Umur Piutang Retribusi Pasar/Pertokoan | Jumlah Bruto (Rp)       | Penyisihan Tidak tertagih | Jumlah Penyisihan (Rp)  |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Lancar                                          | 0,00                    | 0,50%                     | 0,00                    |
| Kurang Lancar                                   | 0,00                    | 10%                       | 0,00                    |
| Diragukan                                       | 440.044.680,00          | 50%                       | 220.022.340,00          |
| Macet                                           | 1.210.526.765,00        | 100%                      | 1.210.526.765,00        |
| <b>Jumlah</b>                                   | <b>1.650.571.445,00</b> |                           | <b>1.430.549.105,00</b> |

**Tabel 5.3.26 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi**

| Kategori Umur Piutang Retribusi Menara | Jumlah Bruto (Rp)   | Penyisihan Tidak tertagih | Jumlah Penyisihan (Rp) |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| Lancar                                 | 3.065.000,00        | 0,50%                     | 15.325,00              |
| Kurang Lancar                          | 0,00                | 10%                       | 0,00                   |
| Diragukan                              | 0,00                | 50%                       | 0,00                   |
| Macet                                  | 0,00                | 100%                      | 0,00                   |
| <b>Jumlah</b>                          | <b>3.065.000,00</b> |                           | <b>15.325,00</b>       |

**Tabel 5.3.27 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan**

| Kategori Umur Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan | Jumlah Bruto (Rp)    | Penyisihan Tidak tertagih | Jumlah Penyisihan (Rp) |
|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| Lancar                                              | 81.774.000,00        | 0,50%                     | 408.870,00             |
| Kurang Lancar                                       | 0,00                 | 10%                       | 0,00                   |
| Diragukan                                           | 0,00                 | 50%                       | 0,00                   |
| Macet                                               | 0,00                 | 100%                      | 0,00                   |
| <b>Jumlah</b>                                       | <b>81.774.000,00</b> |                           | <b>408.870,00</b>      |

#### 5.3.1.1.10 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Merupakan piutang yang terdiri dari piutang bunga deposito, piutang BLUD, dan piutang pinjaman kepada kelompok masyarakat. Saldo piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp22.857.583.833,00 dan Rp0,00.

Pada tahun 2020 jenis piutang yang termasuk pada piutang lain-lain PAD yang sah digolongkan sebagai piutang lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, beberapa jenis piutang yang termasuk piutang lainnya direklasifikasi saldo awalnya menjadi piutang lain-lain PAD yang sah yaitu piutang bunga deposito, piutang BLUD, piutang hasil pengelolaan dana bergulir, dan piutang dari angsuran/cicilan penjualan. Seluruh penerimaan atas piutang tersebut masuk ke dalam pos LRA lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.



**Tabel 5.3.28 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah**

| No.           | Piutang Lain-lain PAD yang Sah          | 31 Desember 2021<br>(Rp) | 31 Desember 2020<br>(Rp) |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1             | Piutang Bunga Deposito                  | 0,00                     | 0,00                     |
| 2             | Piutang BLUD                            | 18.408.555.333,00        | 0,00                     |
| 3             | Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | 3.643.551.000,00         | 0,00                     |
| 4             | Piutang Tagihan Penjualan Angsuran      | 593.562.500,00           | 0,00                     |
| 5             | Piutang TGR                             | 211.915.000,00           | 0,00                     |
| <b>Jumlah</b> |                                         | <b>22.857.583.833,00</b> | <b>0,00</b>              |

**1. Piutang Bunga Deposito**

Saldo piutang bunga deposito per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp393.069.548,00. Piutang bunga deposito pada tahun 2020 masuk ke dalam jenis piutang lainnya, kemudian pada tahun 2021 direklasifikasi menjadi piutang lain-lain PAD yang sah.

Tidak terdapat piutang atas bunga deposito milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena pada tanggal 16 Desember 2021 seluruh deposito yang ditempatkan pada Bank Kalsel Cabang Kandangan sudah dicairkan.

**2. Piutang BLUD**

Piutang BLUD merupakan kewajiban pihak ketiga terhadap BLUD. Saldo piutang BLUD per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 18.408.555.333,00 dan Rp27.720.318.945,00 turun sebesar Rp9.311.763.612,00 atau 33,59%. Piutang BLUD tahun 2021 terdapat pada 4 (empat) BLUD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.29 Rincian Piutang BLUD**

| Piutang BLUD             | 31 Desember 2021<br>(Rp) | 31 Desember 2020<br>(Rp) |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| BLUD RSUD H. Hasan Basry | 14.412.681.493,00        | 23.634.253.845,00        |
| BLUD Puskesmas Kandangan | 2.985.000,00             | 9.030.000,00             |
| BLUD Puskesmas Negara    | 35.954.000,00            | 28.770.000,00            |
| BLUD RS Daha Sejahtera   | 3.956.934.840,00         | 4.048.265.100,00         |
| <b>Jumlah</b>            | <b>18.408.555.333,00</b> | <b>27.720.318.945,00</b> |

**a. Piutang BLUD RSUD H. Hasan Basry**

Piutang BLUD RSUD H. Hasan Basry Kandangan berupa Jasa Pelayanan atau Retribusi Daerah yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2021. Saldo piutang BLUD per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp14.412.681.493,00 dan Rp23.634.253.845,00 dengan rincian mutasi selama tahun 2021 sebagai berikut:



**Tabel 5.3.30 Rincian Piutang BLUD RS Hasan Basry**

| RSUD HASAN BASRY                    | 31 Desember 2020<br>(Rp) | Mutasi (Rp)              |                          | 31 Desember 2021<br>(Rp) |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                     |                          | Pelunasan                | Penambahan               |                          |
| Covid                               | 19.236.293.000,00        | 19.236.293.000,00        | 8.168.952.900,00         | 8.168.952.900,00         |
| BPJS                                | 4.279.567.784,00         | 4.279.567.784,00         | 6.083.967.587,00         | 6.083.967.587,00         |
| PT. SAM                             | 13.598.429,00            | 13.598.429,00            | 0,00                     | 0,00                     |
| PT. Hasnur                          | 24.748.328,00            | 24.748.328,00            | 0,00                     | 0,00                     |
| Pemda HST                           | 0,00                     | 0,00                     | 98.575.358,00            | 98.575.358,00            |
| H. Ihur                             | 7.500.000,00             | 7.500.000,00             | 0,00                     | 0,00                     |
| PT Tribuana Mas                     | 37.132.217,00            | 37.132.217,00            | 0,00                     | 0,00                     |
| An. Akhmad Yuseri Fauzi             | 7.974.731,00             | 7.974.731,00             | 0,00                     | 0,00                     |
| Tn. Basariani                       | 2.975.900,00             | 2.975.900,00             | 0,00                     | 0,00                     |
| Tn. Kurdi                           | 1.368.814,00             | 0,00                     | 0,00                     | 1.368.814,00             |
| Tn. Tahmid                          | 5.443.405,00             | 5.443.405,00             | 0,00                     | 0,00                     |
| Ny. Mujahadah                       | 1.920.885,00             | 1.920.885,00             | 0,00                     | 0,00                     |
| Jalaludin                           | 2.320.352,00             | 2.320.352,00             | 0,00                     | 0,00                     |
| Tn. Saddam Huesin                   | 0,00                     | 0,00                     | 2.249.899,00             | 2.249.899,00             |
| Kantin An. Ny. Sarifah              | 1.150.000,00             | 1.150.000,00             | 0,00                     | 0,00                     |
| Kantin Sari Agustina                | 0,00                     | 0,00                     | 2.400.000,00             | 2.400.000,00             |
| Kantin Wahyuni                      | 0,00                     | 0,00                     | 7.200.000,00             | 7.200.000,00             |
| Retribusi parkir umum               | 2.810.000,00             | 1.945.000,00             | 0,00                     | 865.000,00               |
| Sewa ATM Bank Kalsel                | 9.450.000,00             | 9.450.000,00             | 0,00                     | 0,00                     |
| Sewa Mini Market<br>(Koperasi RSHB) | 0,00                     | 0,00                     | 39.960.000,00            | 39.960.000,00            |
| Sewa Tempat BSI                     | 0,00                     | 0,00                     | 7.141.935,00             | 7.141.935,00             |
| <b>Jumlah</b>                       | <b>23.634.253.845,00</b> | <b>23.632.020.031,00</b> | <b>14.410.447.679,00</b> | <b>14.412.681.493,00</b> |

#### **b. Piutang BLUD Puskesmas Kandangan**

Piutang BLUD Puskesmas Kandangan berupa Jasa Pelayanan hasil klaim BPJS yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2021. Saldo piutang BLUD per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp2.985.000,00 dan Rp9.030.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.31 Rincian Piutang BLUD Puskesmas Kandangan**

| PUSKESMAS<br>KANDANGAN             | 31 Desember 2020<br>(Rp) | Mutasi (Rp)         |                     | 31 Desember 2021<br>(Rp) |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
|                                    |                          | Pelunasan           | Penambahan          |                          |
| BPJS Rawat Inap<br>dan Rawat Jalan | 9.030.000,00             | 9.030.000,00        | 2.985.000,00        | 2.985.000,00             |
| <b>Jumlah</b>                      | <b>9.030.000,00</b>      | <b>9.030.000,00</b> | <b>2.985.000,00</b> | <b>2.985.000,00</b>      |

#### **c. Piutang BLUD Puskesmas Negara**

Piutang BLUD Puskesmas Negara berupa Jasa Pelayanan hasil klaim BPJS yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2021. Saldo



piutang BLUD per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp35.954.000,00 dan Rp28.770.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.32 Rincian Piutang BLUD Puskesmas Negara**

| PUSKESMAS<br>NEGARA | 31 Desember 2020<br>(Rp) | Mutasi (Rp)          |                      | 31 Desember 2021<br>(Rp) |
|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
|                     |                          | Pelunasan            | Penambahan           |                          |
| BPJS Rawat Inap     | 26.400.000,00            | 26.400.000,00        | 32.600.000,00        | 32.600.000,00            |
| BPJS Rawat Jalan    | 2.370.000,00             | 2.370.000,00         | 3.354.000,00         | 3.354.000,00             |
| <b>Jumlah</b>       | <b>28.770.000,00</b>     | <b>28.770.000,00</b> | <b>35.954.000,00</b> | <b>35.954.000,00</b>     |

#### d. Piutang BLUD RS Daha Sejahtera

Piutang BLUD RS Daha Sejahtera berupa Jasa Pelayanan hasil klaim BPJS yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2021. Saldo piutang BLUD per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp3.956.934.840,00 dan Rp4.048.265.100,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.33 Rincian Piutang BLUD RS. Daha Sejahtera**

| RS DAHA<br>SEJAHTERA | 31 Desember 2020<br>(Rp) | Mutasi (Rp)         |                         |                         | 31 Desember 2021<br>(Rp) |
|----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                      |                          | Koreksi             | Pelunasan               | Penambahan              |                          |
| Klaim Covid-19       | 3.836.186.000,00         | 3.000.000,00        | 3.839.186.000,00        | 3.460.269.000,00        | 3.460.269.000,00         |
| Klaim BPJS           | 212.079.100,00           | 0,00                | 212.079.100,00          | 496.665.840,00          | 496.665.840,00           |
| <b>Jumlah</b>        | <b>4.048.265.100,00</b>  | <b>3.000.000,00</b> | <b>4.051.265.100,00</b> | <b>3.956.934.840,00</b> | <b>3.956.934.840,00</b>  |

### 3. Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Saldo piutang hasil pengelolaan dana bergulir per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.643.551.000,00 merupakan piutang yang terdiri atas piutang pinjaman DPKUP (penggemukan sapi) dan piutang pengembangan sapi yang dikelola oleh Dinas Pertanian dengan rincian sebagai berikut:

#### a. Piutang Pinjaman DPKUP

DPKUP merupakan piutang lainnya berupa hewan ternak (penggemukan sapi) yang diserahkan kepada masyarakat yang penyalurannya dilakukan melalui Dinas Pertanian. Saldo Piutang DPKUP per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp1.863.726.000,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

**Tabel 5.3.34 Rincian Piutang DPKUP**

| Uraian     | 31 Desember 2020<br>(Rp) | Mutasi    |            | 31 Desember 2021<br>(Rp) |
|------------|--------------------------|-----------|------------|--------------------------|
|            |                          | Pelunasan | Penambahan |                          |
| Tahun 2012 | 52.000.000,00            | 0,00      | 0,00       | 52.000.000,00            |
| Tahun 2013 | 346.450.000,00           | 0,00      | 0,00       | 346.450.000,00           |
| Tahun 2014 | 28.000.000,00            | 0,00      | 0,00       | 28.000.000,00            |
| Tahun 2015 | 459.000.000,00           | 0,00      | 0,00       | 459.000.000,00           |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| Uraian        | 31 Desember 2020<br>(Rp) | Mutasi      |             | 31 Desember 2021<br>(Rp) |
|---------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------|
|               |                          | Pelunasan   | Penambahan  |                          |
| Tahun 2016    | 978.276.000,00           | 0,00        | 0,00        | 978.276.000,00           |
| <b>Jumlah</b> | <b>1.863.726.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.863.726.000,00</b>  |

Tidak ada penerimaan kembali atas piutang DPKUP selama Tahun 2021. Pada bulan November tahun 2021, piutang dana bergulir DPKUP yang sudah tergolong macet diproses oleh Kejaksaan Negeri Kandangan. Piutang ini menimbulkan tunggakan sejak tahun 2017 dan menjadi temuan berulang setiap tahunnya oleh BPK-RI. Hampir semua petugas teknis di bidang peternakan pada Dinas Pertanian sudah dimintai keterangan, juga sekitar 45 orang peternak, pengelola awal kegiatan, dan penjual sapi sudah diminta keterangannya. Beberapa org petugas teknis dan peternak berdasarkan panggilan sebagai saksi. Sampai dengan laporan keuangan ini terbit, kasus tersebut sudah diambil alih oleh tim investigasi dari BPKP.

**b. Piutang Pinjaman Pengembangan Sapi**

Saldo piutang pinjaman pengembangan sapi per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.779.825.000,00. Piutang ini merupakan reklasifikasi dari investasi non permanen berupa pinjaman hewan ternak sapi kepada kelompok ternak mulai dari tahun 2006 sampai dengan 2009 yang dikelola oleh Dinas Pertanian.

**Tabel 5.3.35 Rincian Piutang Pengembangan Sapi**

| Uraian                    | 31 Desember 2020<br>(Rp) | Mutasi (Rp)          |             | 31 Desember 2021<br>(Rp) |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|
|                           |                          | Pelunasan            | Penambahan  |                          |
| Tahun 2006 s/d Tahun 2010 | 33.100.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 33.100.000,00            |
| Tahun 2007 s/d Tahun 2012 | 288.150.000,00           | 0,00                 | 0,00        | 288.150.000,00           |
| Tahun 2008 s/d Tahun 2012 | 433.400.000,00           | 3.400.000,00         | 0,00        | 430.000.000,00           |
| Tahun 2009 s/s Tahun 2015 | 969.200.000,00           | 31.250.000,00        | 0,00        | 937.950.000,00           |
| Tahun 2010 s/d Tahun 2014 | 12.250.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 12.250.000,00            |
| Tahun 2012 s/d Tahun 2016 | 63.500.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 63.500.000,00            |
| Tahun 2013 s/d Tahun 2017 | 10.000.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 10.000.000,00            |
| Tahun 2015 s/d Tahun 2020 | 9.875.000,00             | 5.000.000,00         | 0,00        | 4.875.000,00             |
| <b>Jumlah</b>             | <b>1.819.475.000,00</b>  | <b>39.650.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.779.825.000,00</b>  |

Terdapat pengembalian dari beberapa kelompok ternak selama tahun 2021 berdasarkan hasil laporan monitoring per triwulan dari Dinas Pertanian sebesar Rp39.650.000,00 dan seluruhnya sudah disetorkan ke Kas Daerah.

**4. Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan**

Saldo piutang dari angsuran/cicilan penjualan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp593.562.500,00 dan sebesar Rp596.562.500,00. Piutang



dari angsuran/cicilan penjualan merupakan tagihan atas penjualan alat mesin pertanian berupa *Hand Tractor*, *Power Thresher* dan Pompa Air, yang sudah jatuh tempo dan akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun.

**Tabel 5.3.36 Rincian Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan**

| Uraian                                      | 31 Desember 2020<br>(Rp) | Mutasi (Rp)         |             | 31 Desember 2021<br>(Rp) |
|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|
|                                             |                          | Pelunasan           | Penambahan  |                          |
| Hand Traktor dan Power Thresher (2004-2007) | 65.870.000,00            | 0,00                | 0,00        | 65.870.000,00            |
| Hand Traktor (2005-2008)                    | 61.200.000,00            | 0,00                | 0,00        | 61.200.000,00            |
| Pompa Air (2005-2010)                       | 463.992.500,00           | 3.000.000,00        | 0,00        | 460.992.500,00           |
| Hand Traktor (2008-2009)                    | 5.500.000,00             | 0,00                | 0,00        | 5.500.000,00             |
| <b>Jumlah</b>                               | <b>596.562.500,00</b>    | <b>3.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>593.562.500,00</b>    |

## 5. Piutang Tuntutan Ganti Rugi

Saldo piutang tuntutan ganti rugi (TGR) per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp211.915.000,00. Piutang ganti rugi atas kekayaan daerah terdiri atas saldo piutang ganti rugi dari temuan pemeriksaan yang berdasarkan keputusan pembebanan telah dan akan jatuh tempo kurang dari satu tahun yang terdapat pada RSUD Brigjend. H. Hasan Basry berupa tagihan terhadap Bendahara Penerimaan Jamkesda TA 2012 yang ditetapkan berdasarkan LHPt BPK atas Penyelesaian Kerugian Daerah Semester II Tahun 2016 Nomor 21/LHPt/XIX.BJM/2016 tanggal 30 Desember 2016. Sampai dengan 31 Desember 2021 tidak ada pembayaran atas ganti rugi tersebut.

**Tabel 5.3.37 Rincian Piutang Bagian Lancar TGR**

| Uraian           | 31 Desember 2020<br>(Rp) | Mutasi      |             | 31 Desember 2021<br>(Rp) |
|------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------|
|                  |                          | Pelunasan   | Penambahan  |                          |
| RSUD Hasan Basry | 211.915.000,00           | 0,00        | 0,00        | 211.915.000,00           |
| <b>Jumlah</b>    | <b>211.915.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>211.915.000,00</b>    |

Terkait piutang TGR atas nama Mansyuri, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menerbitkan surat Nomor S-1515/WKN.12/KNL.03/2021 tanggal 18 September 2021 perihal Penagihan Langsung dan Penyampaian Surat Paksa a.n Mansyuri.

### 5.3.1.1.10.1 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah dilakukan berdasarkan umur piutang yang dibagi ke dalam kategori kelancaran. Perhitungan penyisihan piutang lainnya dilakukan untuk menentukan nilai bersih yang dapat direalisasikan atas piutang lainnya. Saldo penyisihan Piutang lain-lain PAD yang sah terdiri atas:



**Tabel 5.3.38 Rincian Penyisihan Piutang BLUD RSUD H. Hasan Basry**

| Kategori Umur Piutang<br>BLUD RSUD H. Hasan<br>Basry | Jumlah Bruto<br>(Rp)     | Penyisihan<br>Tidak tertagih | Jumlah<br>Penyisihan<br>(Rp) |
|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Lancar                                               | 14.410.447.679,00        | 0,50%                        | 72.052.238,40                |
| Kurang Lancar                                        | 2.233.814,00             | 10%                          | 223.381,40                   |
| Diragukan                                            | 0,00                     | 50%                          | 0,00                         |
| Macet                                                | 0,00                     | 100%                         | 0,00                         |
| <b>Jumlah</b>                                        | <b>14.412.681.493,00</b> |                              | <b>72.275.619,80</b>         |

**Tabel 5.3.39 Rincian Penyisihan Piutang BLUD Puskesmas Kandangan**

| Kategori Umur Piutang<br>BLUD Puskesmas<br>Kandangan | Jumlah Bruto<br>(Rp) | Penyisihan<br>Tidak tertagih | Jumlah<br>Penyisihan<br>(Rp) |
|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| Lancar                                               | 2.985.000,00         | 0,50%                        | 14.925,00                    |
| Kurang Lancar                                        | 0,00                 | 10%                          | 0,00                         |
| Diragukan                                            | 0,00                 | 50%                          | 0,00                         |
| Macet                                                | 0,00                 | 100%                         | 0,00                         |
| <b>Jumlah</b>                                        | <b>2.985.000,00</b>  |                              | <b>14.925,00</b>             |

**Tabel 5.3.40 Rincian Penyisihan Piutang BLUD Puskesmas Negara**

| Kategori Umur Piutang<br>BLUD Puskesmas<br>Negara | Jumlah Bruto<br>(Rp) | Penyisihan<br>Tidak tertagih | Jumlah Penyisihan<br>(Rp) |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|
| Lancar                                            | 35.954.000,00        | 0,50%                        | 179.770,00                |
| Kurang Lancar                                     | 0,00                 | 10%                          | 0,00                      |
| Diragukan                                         | 0,00                 | 50%                          | 0,00                      |
| Macet                                             | 0,00                 | 100%                         | 0,00                      |
| <b>Jumlah</b>                                     | <b>35.954.000,00</b> |                              | <b>179.770,00</b>         |

**Tabel 5.3.41 Rincian Penyisihan Piutang BLUD RS Daha Sejahtera**

| Kategori Umur Piutang<br>BLUD RS Daha<br>Sejahtera | Jumlah Bruto<br>(Rp)    | Penyisihan<br>Tidak tertagih | Jumlah Penyisihan<br>(Rp) |
|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Lancar                                             | 3.956.934.840,00        | 0,50%                        | 19.784.674,20             |
| Kurang Lancar                                      | 0,00                    | 10%                          | 0,00                      |
| Diragukan                                          | 0,00                    | 50%                          | 0,00                      |
| Macet                                              | 0,00                    | 100%                         | 0,00                      |
| <b>Jumlah</b>                                      | <b>3.956.934.840,00</b> |                              | <b>19.784.674,20</b>      |

**Tabel 5.3.42 Rincian Penyisihan Piutang DPKUP**

| Kategori Umur Piutang<br>DPKUP | Jumlah Bruto<br>(Rp)    | Penyisihan<br>Tidak tertagih | Jumlah Penyisihan<br>(Rp) |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Lancar                         | 0,00                    | 0,50%                        | 0,00                      |
| Kurang Lancar                  | 0,00                    | 10%                          | 0,00                      |
| Diragukan                      | 0,00                    | 50%                          | 0,00                      |
| Macet                          | 1.863.726.000,00        | 100%                         | 1.863.726.000,00          |
| <b>Jumlah</b>                  | <b>1.863.726.000,00</b> |                              | <b>1.863.726.000,00</b>   |





**Tabel 5.3.43 Rincian Penyisihan Piutang Pengembangan Sapi**

| Kategori Umur Piutang DPKUP | Jumlah Bruto (Rp)       | Penyisihan Tidak tertagih | Jumlah Penyisihan (Rp)  |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Lancar                      | 0,00                    | 0,50%                     | 0,00                    |
| Kurang Lancar               | 0,00                    | 10%                       | 0,00                    |
| Diragukan                   | 0,00                    | 50%                       | 0,0                     |
| Macet                       | 1.779.825.000,00        | 100%                      | 1.779.825.000,00        |
| <b>Jumlah</b>               | <b>1.779.825.000,00</b> |                           | <b>1.779.825.000,00</b> |

**Tabel 5.3.44 Rincian Penyisihan Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan**

| Kategori Umur Piutang Bagian Lancar Tagihan PA | Jumlah Bruto (Rp)     | Penyisihan Tidak tertagih | Jumlah Penyisihan (Rp) |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Lancar                                         | 0,00                  | 0,50%                     | 0,00                   |
| Kurang Lancar                                  | 0,00                  | 10%                       | 0,00                   |
| Diragukan                                      | 0,00                  | 50%                       | 0,00                   |
| Macet                                          | 593.562.500,00        | 100%                      | 593.562.500,00         |
| <b>Jumlah</b>                                  | <b>593.562.500,00</b> |                           | <b>593.562.500,00</b>  |

**Tabel 5.3.45 Rincian Penyisihan Bagian Lancar TGR**

| Kategori Umur Piutang Bag. Lancar TGR | Jumlah Bruto (Rp)     | Penyisihan Tidak tertagih | Jumlah Penyisihan (Rp) |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Lancar                                | 0,00                  | 0,50%                     | 0,00                   |
| Kurang Lancar                         | 0,00                  | 10%                       | 0,00                   |
| Diragukan                             | 0,00                  | 50%                       | 0,00                   |
| Macet                                 | 211.915.000,00        | 100%                      | 211.915.000,00         |
| <b>Jumlah</b>                         | <b>211.915.000,00</b> |                           | <b>211.915.000,00</b>  |

#### 5.3.1.1.11 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Merupakan Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah maupun. Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp18.177.423.834,00.

Piutang DBH dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Alokasi piutang transfer pemerintah pusat atas dana perimbangan dihitung berdasarkan PMK Nomor 129/PMK.07/2021 tanggal 16 September 2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Pada saat Peraturan Menteri tersebut mulai berlaku, maka PMK Nomor 25/PMK.07/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan PMK Nomor 129/PMK.07/2021 tanggal 16 September 2021 terdapat penyelesaian kurang bayar untuk tahun 2019 dan 2020 sebesar



Rp18.003.475.675,00 yang berarti masih ada kurang bayar sebesar Rp173.948.159,00 dari saldo piutang tahun 2020. Sampai dengan 31 Desember 2021 atas sisa kurang bayar tersebut sudah masuk ke kas daerah, sehingga piutang atas kurang bayar tahun 2020 sudah diselesaikan seluruhnya. Tidak terdapat kurang bayar untuk tahun 2021.

**Tabel 5.3.46 Rincian Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat**

| Uraian                             | 31 Desember 2020<br>(Rp) | Mutasi (Rp)              |             | 31 Desember 2021<br>(Rp) |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
|                                    |                          | Pelunasan                | Penambahan  |                          |
| Piutang Bagi Hasil Pajak           | 4.982.670.259,00         | 4.982.670.259,00         | 0,00        | 0,00                     |
| Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA | 13.194.753.575,00        | 13.194.753.575,00        | 0,00        | 0,00                     |
| <b>Jumlah</b>                      | <b>18.177.423.834,00</b> | <b>18.177.423.834,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              |

Berdasarkan Bultek Akuntansi Nomor 21 piutang transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang.

#### 5.3.1.1.12 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang transfer antar daerah merupakan piutang atas dana bagi hasil pajak Provinsi Kalimantan Selatan dari penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) serta penerimaan Pajak Rokok.

Saldo piutang transfer antar daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp34.415.878.502,00 dan Rp24.917.319.944,00. Piutang bagi hasil pajak tersebut merupakan pendapatan hasil pajak provinsi yang belum diterima pada Triwulan IV/2021 periode Oktober s/d Desember yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2021 ditambah dengan sisa pendapatan bagi hasil pajak provinsi Triwulan III dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.47 Piutang Transfer Antar Daerah**

| Uraian        | 31 Desember 2020<br>(Rp) | Mutasi (Rp)             |                          |                          | 31 Desember 2021<br>(Rp) |
|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|               |                          | Koreksi Saldo Awal      | Pelunasan                | Penambahan               |                          |
| PKB           | 3.003.473.151,00         | 0,00                    | 3.003.473.151,00         | 4.126.360.320,00         | 4.126.360.320,00         |
| BBNKB         | 2.178.817.616,00         | 0,00                    | 2.178.817.616,00         | 4.558.426.864,00         | 4.558.426.864,00         |
| PBBKB         | 17.342.391.232,00        | 0,00                    | 17.342.391.232,00        | 23.386.168.417,00        | 23.386.168.417,00        |
| PAP           | 36.141.212,00            | 0,00                    | 36.141.212,00            | 20.498.449,00            | 20.498.449,00            |
| Pajak Rokok   | 2.356.496.733,00         | 1.675.733.591,00        | 4.032.230.324,00         | 2.324.424.452,00         | 2.324.424.452,00         |
| <b>Jumlah</b> | <b>24.917.319.944,00</b> | <b>1.675.733.591,00</b> | <b>26.593.053.535,00</b> | <b>34.415.878.502,00</b> | <b>34.415.878.502,00</b> |

Terdapat koreksi saldo awal piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp1.675.733.591,00 disebabkan karena adanya bagi hasil pajak rokok yang diterima kasda pada tanggal 18 Agustus 2021 atas Pajak Rokok bulan Desember 2020 berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor



054 Tahun 2021 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Bulan Desember Tahun 2020.

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2021 terdiri atas dana bagi hasil pajak Pemerintah Provinsi Triwulan IV dan sisa Triwulan III yang meliputi:

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp4.126.360.320,00 yang terdiri atas:
  1. Dana bagi hasil penerimaan pajak Triwulan III periode Bulan Juli – September 2021 sebesar Rp1.967.605.740,00 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 066 Tahun 2022 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Bulan Juli – September 2021. Dana bagi hasil PKB Triwulan III sudah masuk ke rekening kas daerah sebanyak 2 tahap yaitu pada tanggal 19 dan 25 Januari 2022 masing-masing sebesar Rp983.802.870,00;
  2. Dana bagi hasil penerimaan pajak Triwulan IV periode Bulan Oktober – Desember 2021 sebesar Rp2.158.754.580,00 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 012 Tahun 2022 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Bulan Oktober Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2021. Dana bagi hasil PKB triwulan 4 sudah diterima pada tanggal 31 maret 2022 sebesar Rp1.511.128.206,00 atau 70% dari total alokasi PKB.
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp4.558.426.864,00 yang terdiri atas:
  1. Dana bagi hasil BBNKB Triwulan III Periode Bulan Juli – September 2021 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 066 Tahun 2021 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Bulan Juli – September 2021 sebesar Rp2.205.184.511,00. Sisa dana bagi hasil BBNKB sudah masuk ke rekening kas daerah pada tanggal 19 Januari 2022 sebesar Rp1.102.592.256,00 dan pada tanggal 25 Januari 2022 sebesar Rp1.102.592.255,00.
  2. Dana bagi hasil BBNKB Triwulan IV sesuai Peraturan Gubernur Nomor 012 Tahun 2022 tentang Bagi Hasil Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Bulan Oktober Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2021 sebesar Rp2.353.242.353,00. Dana bagi hasil BBNKB triwulan 4 sudah diterima pada tanggal 31 maret 2022 sebesar Rp1.647.269.647,00 atau 70% dari total alokasi BBNKB.
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar



Rp23.386.168.417,00 yang terdiri atas:

1. Sisa dana bagi hasil PBBKB Triwulan III sebesar 65% sesuai Peraturan Gubernur Nomor 065 Tahun 2021 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Bulan Juli – September 2021 sebesar Rp8.512.458.810,00. Dana bagi hasil PBBKB periode Juli – September sudah diterima dan masuk rekening kas daerah pada tanggal 3 Februari 2022 sebesar Rp4.583.631.667,00 dan pada tanggal 16 Februari 2022 sebesar Rp 3.928.827.143,00;
  2. Dana bagi hasil PBBKB Triwulan IV sesuai Peraturan Gubernur Nomor 013 Tahun 2022 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Oktober Sampai Dengan Desember Tahun 2021 sebesar Rp14.873.709.607,00.
- Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp20.498.449,00 merupakan dana bagi hasil Triwulan IV sesuai Peraturan Gubernur Nomor 014 Tahun 2022 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Bulan Oktober Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021. Dana bagi hasil PAP triwulan 4 sudah diterima seluruhnya pada tanggal 31 maret 2022.
  - Pajak Rokok sebesar Rp2.324.424.452,00 merupakan dana bagi hasil Triwulan IV sesuai Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2021 Tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Bulan Oktober Sampai Dengan Bulan November Tahun 2021. Dana bagi hasil pajak rokok sudah diterima seluruhnya pada tanggal 31 maret 2022.

Berdasarkan Bultek Akuntansi nomor 21 piutang transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang.

#### 5.3.1.1.13 Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp31.000.000,00 dan Rp29.667.291.529,71 turun sebesar Rp29.636.291.529,71 atau 99,90%. Penurunan nilai pada piutang lainnya disebabkan adanya perpindahan penggolongan jenis piutang yang pada tahun 2020 tergolong sebagai piutang lainnya, pada tahun 2021 digolongkan sebagai piutang lain-lain PAD yang sah. Piutang Lainnya merupakan pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2021, yang terdiri dari:

**Tabel 5.3.48 Rincian Piutang Lainnya**

| Piutang Lainnya        | 31 Desember 2021<br>(Rp) | 31 Desember 2020<br>(Rp) |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Piutang Bunga Deposito | 0,00                     | 52.246.584,71            |



| Piutang Lainnya                 | 31 Desember 2021<br>(Rp) | 31 Desember 2020<br>(Rp) |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Piutang BLUD                    | 0,00                     | 27.720.318.945,00        |
| Piutang Pinjaman DPKUP          | 0,00                     | 1.863.726.000,00         |
| Piutang Pinjaman DPM LUEP       | 28.000.000,00            | 28.000.000,00            |
| Piutang Denda Pinjaman DPM LUEP | 3.000.000,00             | 3.000.000,00             |
| <b>Jumlah</b>                   | <b>31.000.000,00</b>     | <b>29.667.291.529,71</b> |

#### 1. Piutang DPM LUEP

Piutang DPM-LUEP merupakan piutang pengembalian pinjaman DPM LUEP yang belum terlunasi sampai dengan 31 Desember 2021. Pinjaman DPM LUEP diberikan kepada Badan Usaha Perdesaan yang bergerak dalam jual beli gabah dan beras dengan tujuan mengamankan harga gabah dan beras di tingkat petani sesuai dengan harga referensi pemerintah. Saldo Piutang DPM LUEP per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp28.000.000,00 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.3.49 Rincian Piutang DPM LUEP**

| Uraian        | 31 Desember 2020<br>(Rp) | Mutasi (Rp) |             | 31 Desember 2021<br>(Rp) |
|---------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------|
|               |                          | Pelunasan   | Penambahan  |                          |
| Tahun 2015    | 28.000.000,00            | 0,00        | 0,00        | 28.000.000,00            |
| <b>Jumlah</b> | <b>28.000.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28.000.000,00</b>     |

Saldo piutang pengembalian pinjaman DPM LUEP per 31 Desember 2021 sebesar Rp28.000.000,00 merupakan saldo piutang tahun 2015 yang masih harus dibayar oleh penerima pinjaman dikurangi pelunasan cicilan selama tahun 2021. Tidak ada penerimaan atas piutang pinjaman LUEP selama Tahun 2021.

#### 2. Piutang Denda Pinjaman DPM LUEP

Piutang denda pinjaman DPM LUEP merupakan piutang atas denda yang timbul dari Piutang Pinjaman DPM LUEP berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kandungan Nomor 9/Pen.Somasi/2011/PN.Kgn. pada Tahun 2011 berupa kewajiban denda sebesar Rp3.000.000,00.

##### 5.3.1.1.13.1 Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan piutang lainnya dilakukan berdasarkan umur piutang yang dibagi ke dalam kategori kelancaran. Perhitungan penyisihan piutang lainnya dilakukan untuk menentukan nilai bersih yang dapat direalisasikan atas piutang lainnya. Saldo penyisihan piutang lainnya terdiri atas:

**Tabel 5.3.50 Rincian Penyisihan Piutang DPM LUEP**

| Kategori Umur Piutang DPM LUEP | Jumlah Bruto<br>(Rp) | Penyisihan<br>Tidak tertagih | Jumlah Penyisihan<br>(Rp) |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|
| Lancar                         | 0,00                 | 0,50%                        | 0,00                      |
| Kurang Lancar                  | 0,00                 | 10%                          | 0,00                      |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| Kategori Umur Piutang DPM LUEP | Jumlah Bruto (Rp)    | Penyisihan Tidak tertagih | Jumlah Penyisihan (Rp) |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| Diragukan                      | 0,00                 | 50%                       | 0,00                   |
| Macet                          | 28.000.000,00        | 100%                      | 28.000.000,00          |
| <b>Jumlah</b>                  | <b>28.000.000,00</b> |                           | <b>28.000.000,00</b>   |

**Tabel 5.3.51 Rincian Penyisihan Piutang Denda Pinjaman DPM LUEP**

| Kategori Umur Piutang Denda Pinjaman DPM LUEP | Jumlah Bruto (Rp)   | Penyisihan Tidak tertagih | Jumlah Penyisihan (Rp) |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| Lancar                                        | 0,00                | 0,50%                     | 0,00                   |
| Kurang Lancar                                 | 0,00                | 10%                       | 0,00                   |
| Diragukan                                     | 0,00                | 50%                       | 0,00                   |
| Macet                                         | 3.000.000,00        | 100%                      | 3.000.000,00           |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>3.000.000,00</b> |                           | <b>3.000.000,00</b>    |

#### 5.3.1.14 Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Jumlah persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp22.472.833.719,47 (*Lampiran 3*) dan Rp21.562.238.876,47 naik sebesar Rp910.594.843,00 atau 4,22% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.52 Rincian Persediaan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

| Persediaan                      | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bahan Bangunan dan Konstruksi   | 126.567.360,00        | 114.364.469,35        |
| Bahan Kimia                     | 477.319.645,19        | 572.220.358,00        |
| Bahan Bakar dan Pelumas         | 84.278.255,00         | 123.560.360,00        |
| Bahan Baku                      | 48.023.350,00         | 0,00                  |
| Bahan/Bibit Tanaman             | 175.706.000,00        | 88.411.980,00         |
| Isi Tabung Gas                  | 13.170.300,00         | 0,00                  |
| Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan   | 16.953.500,00         | 16.953.500,00         |
| Bahan Lainnya                   | 5.331.585.727,00      | 2.814.986.088,23      |
| Suku Cadang Alat Laboratorium   | 182.433.112,60        | 0,00                  |
| Alat Tulis Kantor               | 178.647.956,00        | 360.139.388,00        |
| Bahan cetak                     | 776.332.745,00        | 613.080.300,00        |
| Benda Pos                       | 448.000,00            | 300.000,00            |
| Alat Listrik                    | 672.806.285,62        | 1.077.881.546,00      |
| Perlengkapan Dinas              | 34.773.050,00         | 0,00                  |
| Perlengkapan Pendukung Olahraga | 0,00                  | 4.500.000,00          |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| Persediaan                                           | 31 Desember 2021<br>(Rp) | 31 Desember 2020<br>(Rp) |
|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Suvenir/Cinderamata                                  | 68.655.000,00            | 0,00                     |
| Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya             | 337.405.610,00           | 176.840.495,00           |
| Obat                                                 | 13.489.338.898,06        | 13.947.563.826,89        |
| Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 458.388.925,00           | 1.617.602.865,00         |
| Bahan Makanan Pokok                                  | 0,00                     | 33.833.700,00            |
| <b>Jumlah</b>                                        | <b>22.472.833.719,47</b> | <b>21.562.238.876,47</b> |

Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (*opname*) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh bendahara barang masing-masing SKPD. Berikut penjelasan dari masing-masing jenis persediaan:

**a. Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi**

Saldo persediaan bahan bangunan dan konstruksi sebesar Rp126.567.360,00 merupakan sisa persediaan yang terdapat pada 2 SKPD yaitu Dinas Pengendalian Penduduk KBPPPA sebesar Rp133.360,00 berupa papan plang nama; dan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp126.434.000,00 berupa patok tanda batas tanah reklasifikasi dari aset tetap.

**b. Persediaan Bahan Kimia**

Saldo persediaan bahan kimia sebesar Rp477.319.645,19 merupakan persediaan obat-obatan cairan kimia yang terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat KPLH sebesar Rp440.370.965,19; dan persediaan obat cairan kimia dan pupuk pada Dinas Pertanian sebesar Rp36.948.680,00.

**c. Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas**

Saldo persediaan bahan bakar dan pelumas sebesar Rp84.278.255,00 merupakan persediaan bahan bakar solar pada RSUD BLUD H. Hasan Basry.

**d. Persediaan Bahan Baku**

Saldo persediaan bahan baku sebesar Rp48.023.350,00 merupakan persediaan bahan baku makanan untuk makan minum pasien pada RSUD H. Hasan Basry (BLUD).

**e. Persediaan Bahan/Bibit Tanaman**

Saldo persediaan bahan/bibit tanaman sebesar Rp175.706.000,00 merupakan persediaan bibit tanaman yang terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat KPLH.



**f. Persediaan Isi Tabung Gas**

Saldo persediaan isi tabung gas sebesar Rp13.170.300,00 merupakan persediaan isi tabung gas pasien yang terdapat pada RSUD H. Hasan Basry (BLUD).

**g. Persediaan Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan**

Saldo persediaan bahan/bibit ternak/bibit ikan sebesar Rp16.953.500,00 merupakan persediaan bibit ikan yang terdapat pada Dinas Perikanan.

**h. Persediaan Bahan Lainnya**

Saldo persediaan bahan lainnya sebesar Rp5.331.585.727,00 merupakan persediaan yang berasal dari sisa persediaan BTT Covid dan persediaan bahan habis pakai BLUD puskesmas dan rumah sakit dan yang terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.139.619.274,00; dan pada RSUD BLUD H. Hasan Basry sebesar Rp4.191.966.453,00.

**i. Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium**

Saldo persediaan suku cadang alat laboratorium sebesar Rp182.433.112,60 merupakan persediaan alat-alat laboratorium yang terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat KPLH.

**j. Persediaan Alat Tulis Kantor**

Saldo persediaan alat tulis kantor sebesar 178.647.956,00 berupa sisa persediaan alat tulis kantor yang terdapat pada beberapa SKPD (termasuk dari Dana BOS) sebagai berikut:

**Tabel 5.3.53 Saldo Persediaan ATK per SKPD**

| SKPD                                   | 31 Desember 2021<br>(Rp) |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Dinas Pendidikan (Dana BOS SD dan SMP) | 248.000,00               |
| Dinas Kesehatan                        | 6.296.400,00             |
| RSUD BLUD Hasan Basry                  | 101.453.965,00           |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang    | 2.747.500,00             |
| Dinas Perumahan Rakyat dan KPLH        | 683.000,00               |
| Dinas Sosial                           | 2.065.000,00             |
| Dinas Tenaga Kerja KUKP                | 23.125,00                |
| Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata   | 957.500,00               |
| Bagian Hukum                           | 5.745.000,00             |
| Bagian Pemerintahan                    | 1.850.000,00             |
| Bagian Organisasi                      | 5.160.000,00             |
| Bagian Umum                            | 5.777.800,00             |
| Inspektorat Daerah                     | 25.055.800,00            |
| Sekretariat DPRD                       | 20.463.566,00            |
| Kecamatan Simpur                       | 121.300,00               |





| SKPD   | 31 Desember 2021<br>(Rp) |
|--------|--------------------------|
| Jumlah | 178.647.956,00           |

**k. Persediaan Bahan Cetak**

Saldo persediaan bahan cetak sebesar Rp776.332.745,00 merupakan persediaan cetak buku, kalender, register, karcis dan blanko cetakan untuk tahun 2022 yang terdapat pada beberapa SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.54 Persediaan Bahan Cetak per SKPD**

| SKPD                                 | 31 Desember 2021<br>(Rp) |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Dinas Kesehatan                      | 55.610.000,00            |
| RSUD H. Hasan Basry                  | 31.286.200,00            |
| Dinas Perumahan Rakyat dan KPLH      | 11.711.725,00            |
| Satpol PP                            | 400.000,00               |
| Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 182.394.500,00           |
| Dinas Penanaman Modal PTSP           | 15.000.000,00            |
| Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata | 61.230.500,00            |
| Dinas Perdagangan                    | 114.869.000,00           |
| Bagian Prokopim                      | 181.148.200,00           |
| Inspektorat Daerah                   | 1.104.000,00             |
| BPKPD                                | 121.578.620,00           |
| Jumlah                               | 776.332.745,00           |

**l. Persediaan Benda Pos**

Saldo persediaan benda pos per 31 Desember 2021 sebesar Rp448.000,00 berupa sisa persediaan materai yang terdapat pada beberapa SKPD (termasuk dari Dana BOS) sebagai berikut:

**Tabel 5.3.55 Persediaan Benda Pos per SKPD**

| SKPD             | 31 Desember 2021<br>(Rp) |
|------------------|--------------------------|
| Dinas Pendidikan | 48.000,00                |
| Dinas Kesehatan  | 190.000,00               |
| Dinas Sosial     | 70.000,00                |
| Bagian Hukum     | 120.000,00               |
| Kecamatan Simpur | 20.000,00                |
| Jumlah           | 448.000,00               |

**m. Persediaan Alat Listrik**

Saldo persediaan alat listrik per 31 Desember 2021 sebesar Rp672.806.285,62 berupa persediaan kabel, lampu, dan peralatan



kelistrikan lainnya yang terdapat pada beberapa SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.56 Persediaan Alat Listrik per SKPD**

| SKPD                        | 31 Desember 2021<br>(Rp) |
|-----------------------------|--------------------------|
| Dinas Kesehatan             | 10.049.500,00            |
| RSUD H. Hasan Basry         | 3.511.990,00             |
| Dinas Perumahan Rakyat KPLH | 656.491.295,62           |
| Dinas Sosial                | 29.000,00                |
| Bagian Umum                 | 2.162.500,00             |
| Inspektorat Daerah          | 562.000,00               |
| <b>Jumlah</b>               | <b>672.806.285,62</b>    |

**n. Persediaan Perlengkapan Dinas**

Saldo persediaan perlengkapan dinas sebesar Rp34.773.050,00 merupakan persediaan baju seragam untuk acara lingkungan yang terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat KPLH.

**o. Persediaan Suvenir/Cinderamata**

Saldo persediaan suvenir/cinderamata sebesar Rp68.655.000,00 merupakan persediaan yang terdapat pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp34.100.000,00; dan pada Bagian Umum sebesar Rp34.555.000,00.

**p. Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**

Saldo persediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp337.405.610,00 berupa persediaan alat kebersihan dan bahan pembersih yang terdapat pada beberapa SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.57 Persediaan Bahan Pembersih per SKPD**

| SKPD                                 | 31 Desember 2021<br>(Rp) |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Dinas Kesehatan                      | 6.300.000,00             |
| RSUD BLUD Hasan Basry                | 159.601.000,00           |
| Dinas Pekerjaan Umum dan TR          | 82.000,00                |
| Dinas Perumahan Rakyat KPLH          | 112.130.160,00           |
| Dinas Sosial                         | 182.500,00               |
| Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata | 54.797.700,00            |
| Bagian Umum                          | 3.766.750,00             |
| Inspektorat Daerah                   | 545.500,00               |
| <b>Jumlah</b>                        | <b>337.405.610,00</b>    |



**q. Persediaan Obat**

Saldo persediaan obat sebesar Rp13.489.338.898,06 merupakan persediaan obat-obatan medis yang terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp7.352.298.820,06; RSUD H. Hasan Basry (BLUD) sebesar Rp5.927.924.714,00; dan Dinas Pengendalian Penduduk KBPPPA sebesar Rp209.115.364,00.

**r. Persediaan Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat**

Saldo persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp458.388.925,00 merupakan saldo persediaan bahan makanan pokok untuk bantuan bencana, peralatan rumah tangga untuk bantuan pelatihan, baju seragam, dan barang-barang untuk hadiah yang terdapat pada SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.58 Persediaan Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat**

| SKPD                        | 31 Desember 2021<br>(Rp) |
|-----------------------------|--------------------------|
| Dinas Perumahan Rakyat KPLH | 266.880.100,00           |
| Satpol PP                   | 27.444.200,00            |
| Dinas Sosial                | 164.064.625,00           |
| <b>Jumlah</b>               | <b>458.388.925,00</b>    |

Selain saldo persediaan tersebut diatas, terdapat juga persediaan yang sudah tidak terpakai lagi/usang/expired yang terdapat pada 5 SKPD sebesar Rp1.068.152.486,26 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.59 Rincian Persediaan Usang TA 2021**

| No           | SKPD                          | Persediaan                   | Sisa<br>(Rp)   | Jumlah<br>(Rp)          |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------|
| 1            | Dinas Kesehatan               | Obat pada UPT Gudang Farmasi | 305.580.745,00 | 678.621.739,78          |
|              |                               | Obat pada RS Pratama         | 162.016.651,40 |                         |
|              |                               | Obat pada 16 Puskesmas       | 210.729.462,38 |                         |
|              |                               | Obat pada bangsal covid      | 294.881,00     |                         |
| 2            | RSUD BLUD H. Hasan Basry      | Obat-obatan                  | 156.992.085,48 | 156.992.085,48          |
| 3            | Dinas PPKBPPPA                | Obat-obatan                  | 82.478.600,00  | 82.478.600,00           |
| 4            | Dinas Kependudukan dan Catpil | Blanko dan buku register     | 95.840.000,00  | 95.840.000,00           |
| 5            | BPKPD                         | Blanko/Karcis TA 2021        | 54.220.061,00  | 54.220.061,00           |
| <b>TOTAL</b> |                               |                              |                | <b>1.068.152.486,26</b> |



Sampai dengan laporan ini dibuat telah dilakukan usulan untuk pemusnahan persediaan usang yang terdapat pada 5 SKPD. Persediaan usang tahun berjalan disajikan sebagai beban lain-lain pada Laporan Operasional.

#### 5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Saldo Investasi Jangka Panjang merupakan saldo penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan umur lebih dari satu tahun. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp88.392.391.429,69 dan Rp87.548.450.074,96. Selama Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak melakukan penambahan dalam Investasi Jangka Panjang.

**Tabel 5.3.60 Rincian Investasi Jangka Panjang**

| Investasi Jangka Panjang               | 31 Desember 2021<br>(Rp) | 31 Desember 2020<br>(Rp) |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Investasi Non Permanen Lainnya         | 0,00                     | 1.819.475.000,00         |
| Penyisihan INP Dana Bergulir           | 0,00                     | (1.819.475.000,00)       |
| <b>INP Lainnya Netto</b>               | 0,00                     | 0,00                     |
| Investasi Permanen                     | 88.392.391.429,69        | 87.548.450.074,96        |
| <b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b> | <b>88.392.391.429,69</b> | <b>87.548.450.074,96</b> |

##### 5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen Lainnya

Jumlah Investasi Non Permanen per 31 Desember 2021 merupakan nilai penempatan dana Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam bentuk program dana bergulir. Saldo Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp1.819.475.000,00. Adanya pengembalian atas investasi non permanen pengembangan sapi disebabkan oleh adanya upaya penagihan yang dilakukan terhadap kelompok ternak oleh Dinas Pertanian sebagai tindak lanjut atas temuan BPK. Berdasarkan surat pernyataan dari Dinas Pertanian Nomor 520/542/DISTAN Tanggal 7 April 2021 menyatakan bahwa kegiatan Pengembangan Ternak Sapi yang dipelihara oleh kelompok sudah tidak ada lagi (dijual) dikarenakan terdesak kebutuhan ekonomi keluarga. Dinas Pertanian hanya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerimaan angsuran dari kelompok ternak sapi yang dilakukan setiap triwulan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan konfirmasi menunjukkan bahwa:

- Kondisi sapi pengembangan yang dimiliki kelompok ternak/orang dalam kondisi mati atau dijual;
- Pembayaran pengembalian baik pokok maupun bunga pinjaman tidak sesuai dengan SPK karena kondisi ekonomi penggaduh;
- Perjanjian kerja telah kedaluwarsa/lewat lima tahun.

Saldo investasi non permanen lainnya pada tahun 2020 tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya dan berdasarkan hasil pemeriksaan sudah tidak



memenuhi kriteria sebagai investasi. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menerbitkan SK Bupati Nomor 188.45/184/KUM/2021 tentang Mekanisme Penghapusan Aset Investasi Non Permanen Lainnya - Dana Bergulir. Surat keputusan Bupati tersebut sebagai tindak lanjut rekomendasi atas temuan BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 1B/LHP/XIX.BJM/05/2021. Surat keputusan Bupati ini juga menjadi dasar untuk melakukan reklasifikasi saldo pengembangan sapi dari investasi non permanen lainnya menjadi piutang lain-lain PAD yang Sah pada neraca. Selain itu, penghapusan investasi non permanen hanya bisa dilakukan apabila sudah dilimpahkan ke KPKNL.

#### 5.3.1.2.2 Investasi Permanen

Jumlah Investasi Permanen merupakan penempatan dana Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam bentuk Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersifat permanen (ditujukan untuk kepemilikan) yang dicatat dengan menggunakan metode biaya (*cost method*) maupun metode ekuitas (*equity method*). Jumlah Investasi Permanen per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp88.392.391.429,69 dan Rp87.548.450.074,96.

##### 5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp88.392.391.429,69 dan Rp87.548.450.074,96. Tidak ada penambahan penyertaan modal baik pada PDAM Tirta Dharma Kandangan maupun PD BPR HSS selama Tahun 2021.

**Tabel 5.3.61 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

| Penyertaan Modal (Invesatsi) Pemda | 31 Desember 2021<br>(Rp) | 31 Desember 2020<br>(Rp) |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bank Kalsel                        | 55.000.000.000,00        | 55.000.000.000,00        |
| Perusahaan Daerah                  | 28.552.019.911,23        | 27.669.167.243,07        |
| BPR HSS                            | 4.092.162.386,46         | 4.131.073.699,89         |
| Koperasi                           | 75.000.000,00            | 75.000.000,00            |
| BKK                                | 80.053.495,00            | 80.053.495,00            |
| BUMDes                             | 593.155.637,00           | 593.155.637,00           |
| <b>Jumlah</b>                      | <b>88.392.391.429,69</b> | <b>87.548.450.074,96</b> |

#### 1. Bank Kalsel

Saldo Penyertaan Modal pada Bank Kalsel per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp55.000.000.000,00. Besaran persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas penyertaan modal pada Bank Kalsel yaitu 4,02% sehingga dicatat dengan metode biaya. Tidak ada penambahan penyertaan modal pada Bank Kalsel selama tahun 2021.



## 2. Perusahaan Daerah

Saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Perusahaan Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp28.552.019.911,23 dan Rp27.669.167.243,07. Perusahaan Daerah pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri atas PDAM Tirta Dharma Kandangan dan PD Sasangga Banua dengan rincian nilai penyertaan modal sebagai berikut:

**Tabel 5.3.62 Rincian Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah**

| Penyertaan Modal (Investasi) Pemda | 31 Desember 2020 (Rp)    | Mutasi (Rp) |                       | 31 Desember 2021 (Rp)    |
|------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
|                                    |                          | Penambahan  | Bagian Laba/ (Rugi)   |                          |
| PDAM Tirta Dharma                  | 26.289.799.792,97        | 0,00        | 882.852.668,16        | 27.172.652.461,13        |
| PD Sasangga Banua                  | 1.379.367.450,10         | 0,00        | 0,00                  | 1.379.367.450,10         |
| <b>Jumlah</b>                      | <b>27.669.167.243,07</b> | <b>0,00</b> | <b>882.852.668,16</b> | <b>28.552.019.911,23</b> |

### a. PDAM Tirta Dharma Kandangan

Penyertaan Modal pada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan per 31 Desember 2021 dicatat dengan metode ekuitas dengan persentase kepemilikan 82% berdasarkan Laporan Keuangan PDAM *Audited* yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Bharata, Arifin, Mumajad dan Sayuti Jakarta. Tidak ada penambahan investasi pada PDAM Tirta Dharma Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021.

Selama tahun 2021 berdasarkan laporan keuangan *Audited*, PDAM Tirta Dharma mencatat bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp882.852.668,16. Saldo Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Dharma Kandangan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp27.172.652.461,13 dan Rp26.289.799.792,97.

### b. PD Sasangga Banua

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada PD Sasangga Banua per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp1.379.367.450,10. Status PD Sasangga Banua sampai dengan tahap penyusunan laporan keuangan ini sudah dilikuidasi dengan diterbitkannya Laporan Likuidasi PD Sasangga Banua oleh Kantor Hukum DR. Masdari Tasmin, SH.,MH. namun masih menunggu Raperda pengesahan pembubaran oleh DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai surat Bupati kepada Ketua DPRD dengan Nomor 500/271/ Ekobang tanggal 15 April 2021 perihal Tindak Lanjut Pembubaran PD Sasangga Banua.

Data utama likuidasi adalah data yang disajikan oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang didampingi oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan, yaitu: Laporan Keuangan Penutupan



Perusahaan Daerah Sasangga Banua Untuk Tahun Buku yang Berakhir Tanggal 15 September 2012 dan 31 Desember 2011 dengan posisi neraca pada saat penutupan sebagai berikut:

**Tabel 5.3.63 Neraca Penutupan PD Sasangga Banua**

| Uraian:                             | 2012<br>(Rp)            | 2011<br>(Rp)            |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Aset Lancar                         | 1.865.406.091,60        | 1.818.328.158,48        |
| Aset Tidak Lancar                   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Jumlah Aset</b>                  | <b>1.865.406.091,60</b> | <b>1.818.328.158,48</b> |
| Kewajiban Jangka Pendek             | 486.038.641,50          | 1.853.065.661,56        |
| Kewajiban Jangka Panjang            | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Jumlah Kewajiban</b>             | <b>486.038.641,50</b>   | <b>1.853.065.661,56</b> |
| Modal (penyertaan modal Kab. HSS)   | 3.050.000.000,00        | 3.050.000.000,00        |
| Akumulasi Kerugian                  | (1.670.632.549,90)      | (3.084.737.503,08)      |
| <b>Jumlah Ekuitas</b>               | <b>1.379.367.450,10</b> | <b>(34.737.503,08)</b>  |
| <b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b> | <b>1.865.406.091,60</b> | <b>1.818.328.158,48</b> |

### 3. BPR Hulu Sungai Selatan

Saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada BPR HSS per 31 Desember 2021 dan 2020 berdasarkan Laporan Keuangan BPR *Audited* sebesar Rp4.092.162.386,46 dan Rp4.131.073.699,89. Tidak ada penambahan investasi pada BPR HSS selama tahun 2021.

Selama tahun 2021 berdasarkan Laporan Keuangan BPR HSS *Audited* yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maroeto dan Nur Shadiq Jakarta, mencatat bagian rugi atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp38.911.313,43. Penilaian penyertaan modal dicatat dengan metode ekuitas dengan persentase kepemilikan sebesar 55% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.64 Rincian Penyertaan Modal pada BPR HSS**

| Penyertaan<br>Modal (Investasi)<br>Pemda | 31 Desember 2020<br>(Rp) | Mutasi (Rp) |                        | 31 Desember 2021<br>(Rp) |
|------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|
|                                          |                          | Penambahan  | Bagian Laba/<br>(Rugi) |                          |
| BPR Kandangan                            | 4.131.073.699,89         | 0,00        | (38.911.313,43)        | 4.092.162.386,46         |
| <b>Jumlah</b>                            | <b>4.131.073.699,89</b>  | <b>0,00</b> | <b>(38.911.313,43)</b> | <b>4.092.162.386,46</b>  |

### 4. KPN Swarga

Saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada KPN Swarga Kandangan dicatat dengan metode biaya (kepemilikan sebesar 1,51%). Saldo penyertaan modal per 31 Desember 2021 sebesar Rp75.000.000,00. Selama Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak melakukan penambahan atas penyertaan modal pada KPN Swarga Kandangan.



## 5. Badan Kredit Kecamatan (BKK)

Saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Badan Kredit Kecamatan (BKK) per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp80.053.495,00. Tidak ada penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada BKK sampai dengan tahun anggaran 2021.

## 6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp593.155.637,00. Tidak ada penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan seiring dengan perubahan perundang-undangan pengelolaan BUMDes di wilayah Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi Perseroan Terbatas (PT). Tidak ada pembekuan untuk BUMDes tetapi ada kesepakatan bersama agar masing-masing BUMDes melalui RUPS harus mengembalikan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai Surat Nomor: 500.2/413/Ekobang Tanggal 23 Mei 2012. Tidak terdapat pengembalian dari masing-masing Bumdes selama tahun 2021.

**Tabel 5.3.65 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMDes**

| Penyertaan Modal<br>(Investasi) Pemda | 31 Desember 2020<br>(Rp) | Pengembalian<br>(Rp) | 31 Desember 2021<br>(Rp) |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| BUMDes Kandungan                      | 81.421.539,00            | 0,00                 | 81.421.539,00            |
| BUMDes Padang Batung                  | 273.800.000,00           | 0,00                 | 273.800.000,00           |
| BUMDes Sungai Raya                    | 150.000.000,00           | 0,00                 | 150.000.000,00           |
| BUMDes Simpur                         | 11.600.000,00            | 0,00                 | 11.600.000,00            |
| BUMDes Angkinang                      | 76.334.098,00            | 0,00                 | 76.334.098,00            |
| <b>Jumlah</b>                         | <b>593.155.637,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>593.155.637,00</b>    |

### 5.3.1.3 ASET TETAP

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

Mulai Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah. Perubahan penggolongan dan kodifikasi barang berdasarkan Permendagri 108 Tahun 2016 sudah dapat diakomodir melalui SIMDA BMD. Penyesuaian kebijakan akuntansi atas Permendagri 108 diatur secara lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Masa Manfaat dan Penyusutan Barang Milik Daerah.

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2021 merupakan nilai Aset Tetap yang





dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp3.135.870.443.805,03 dan Rp2.993.686.015.370,44, yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan serta Akumulasi Penyusutan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.66 Ringkasan Aset Tetap**

| Aset Tetap                  | 31 Desember 2021<br>(Rp)    | 31 Desember 2020<br>(Rp)    |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tanah                       | 613.374.512.442,00          | 599.431.287.627,00          |
| Peralatan dan Mesin         | 568.337.097.233,51          | 505.553.125.124,51          |
| Gedung dan Bangunan         | 1.184.329.541.409,32        | 1.095.014.166.622,16        |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 1.816.821.269.231,45        | 1.756.049.479.588,45        |
| Aset Tetap Lainnya          | 49.793.305.379,83           | 48.463.991.579,83           |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 74.349.264.800,00           | 5.613.771.380,00            |
| Akumulasi Penyusutan        | (1.171.134.546.691,08)      | (1.016.439.806.551,51)      |
| <b>Jumlah</b>               | <b>3.135.870.443.805,03</b> | <b>2.993.686.015.370,44</b> |

Penambahan nilai Aset Tetap terdiri atas: (1) penambahan aset dari belanja modal tahun 2021 termasuk didalamnya berasal dari belanja modal dana BOS dan BLUD; (2) penambahan aset dari belanja Dana BTT Covid; (3) penerimaan aset dari donasi/hibah; (4) penambahan aset dari belanja non modal tahun 2021; (5) klasifikasi masuk berupa Konstruksi Dalam Pekerjaan yang telah selesai dikerjakan dan menjadi aset; dan (7) koreksi pengelompokan yang menambah nilai aset.

Pengurangan nilai Aset Tetap terdiri atas: (1) penghapusan aset tetap; (2) klasifikasi keluar berupa Konstruksi dalam Pekerjaan yang fisiknya belum selesai dikerjakan; (3) koreksi pengelompokan yang mengurangi nilai aset; (4) reklasifikasi ke aset lainnya (aset tidak berwujud dan aset rusak berat); dan (5) reklasifikasi menjadi barang ekstrakompabel.

Mutasi Aset Tetap (tanpa akumulasi penyusutan) Kabupaten Hulu Sungai Selatan per 31 Desember 2021 sesuai realisasi penambahan dan pengurangan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.67 Rincian Mutasi Aset Tetap**

| Aset Tetap                  | 31 Desember 2020<br>(Rp) | Mutasi Selama TA 2021 |                     | 31 Desember 2021<br>(Rp) |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
|                             |                          | Tambah (Rp)           | Kurang (Rp)         |                          |
| Tanah                       | 599.431.287.627,00       | 84.586.019.457,00     | (70.642.794.642,00) | 613.374.512.442,00       |
| Peralatan dan Mesin         | 505.553.125.124,51       | 74.013.329.474,00     | (11.229.357.365,00) | 568.337.097.233,51       |
| Gedung dan Bangunan         | 1.095.014.166.622,16     | 158.912.636.968,16    | (69.597.262.181,00) | 1.184.329.541.409,32     |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 1.756.049.479.588,45     | 94.201.383.824,00     | (33.429.594.181,00) | 1.816.821.269.231,45     |
| Aset Tetap Lainnya          | 48.463.991.579,83        | 1.494.483.800,00      | (165.170.000,00)    | 49.793.305.379,83        |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 5.613.771.380,00         | 70.611.216.350,00     | (1.875.722.930,00)  | 74.349.264.800,00        |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| Aset Tetap | 31 Desember 2020<br>(Rp) | Mutasi Selama TA 2021 |                      | 31 Desember 2021<br>(Rp) |
|------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
|            |                          | Tambah (Rp)           | Kurang (Rp)          |                          |
| Jumlah     | 4.010.125.821.921,95     | 483.819.069.873,16    | (186.939.901.299,00) | 4.307.004.990.496,11     |

#### 5.3.1.3.1 Tanah

Berdasarkan PSAP 07, tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Tanah yang termasuk dalam aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp613.374.512.442,00 dan Rp599.431.287.627,00. Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 naik sebesar Rp13.943.224.815,00 atau 2,33% dari saldo Aset Tetap Tanah tahun 2020. Adapun daftar aset tetap tanah pada SKPD adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3.68 Rincian Aset Tetap Tanah per SKPD**

| NO | SKPD                                       | 31 Desember 2021<br>(Rp) | 31 Desember 2020<br>(Rp) |
|----|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | Dinas Pendidikan                           | 90.231.143.875,00        | 75.777.683.014,00        |
| 2  | Dinas Kesehatan                            | 18.969.668.144,00        | 16.246.109.606,00        |
| 3  | RSUD Hasan Basry Kandangan                 | 23.807.989.232,00        | 23.272.989.232,00        |
| 4  | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang        | 163.700.178.997,00       | 163.310.458.997,00       |
| 5  | Dinas Perumahan Rakyat KPLH                | 55.522.105.425,00        | 44.276.331.725,00        |
| 7  | Dinas Sosial                               | 2.112.092.949,00         | 1.488.153.770,00         |
| 8  | Dinas Ketahanan Pangan                     | 96.705.000,00            | 96.705.000,00            |
| 9  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil    | 100.500.000,00           | 100.500.000,00           |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa         | 144.000.000,00           | 144.000.000,00           |
| 11 | Dinas Pengend.Penduduk KB, PPA             | 527.500.000,00           | 466.500.000,00           |
| 12 | Dinas Perhubungan                          | 19.163.573.410,00        | 19.112.873.410,00        |
| 13 | Dinas Komunikasi dan Informatika           | 639.367.770,00           | 639.367.770,00           |
| 14 | Dinas Tenaga Kerja, KUK, dan Perindustrian | 2.166.532.900,00         | 2.089.660.500,00         |
| 15 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP             | 1.669.500.000,00         | 0,00                     |
| 16 | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata       | 7.353.135.745,00         | 5.620.381.145,00         |
| 17 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan           | 5.089.114.000,00         | 5.089.114.000,00         |
| 18 | Dinas Perikanan                            | 482.725.537,00           | 840.375.000,00           |
| 19 | Dinas Pertanian                            | 55.595.112.610,00        | 43.578.030.762,00        |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| NO            | SKPD                                             | 31 Desember 2021<br>(Rp)  | 31 Desember 2020<br>(Rp)  |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 20            | Dinas Perdagangan                                | 16.267.983.917,00         | 10.604.133.917,00         |
| 21            | Sekretariat Daerah                               | 10.258.571.000,00         | 79.647.071.142,00         |
| 22            | Bagian Pemerintahan                              | 16.968.143.421,00         | 16.968.143.421,00         |
| 23            | Bagian Umum                                      | 46.647.211.480,00         | 40.820.170.720,00         |
| 24            | Bagian Perekonomian dan Pembangunan              | 1.341.900.000,00          | 0,00                      |
| 25            | Inspektorat Daerah                               | 1.343.181.200,00          | 800.000.000,00            |
| 26            | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 13.716.828.316,00         | 13.238.328.316,00         |
| 27            | Badan Kepegawaian dan PSDM                       | 1.466.199.543,00          | 1.340.265.770,00          |
| 28            | Sekretariat DPRD                                 | 343.200.000,00            | 343.200.000,00            |
| 29            | Kecamatan Sungai Raya                            | 12.800.866.580,00         | 11.289.694.300,00         |
| 30            | Kecamatan Padang Batung                          | 7.928.206.164,00          | 805.363.609,00            |
| 31            | Kecamatan Telaga Langsat                         | 1.820.959.852,00          | 513.872.971,00            |
| 32            | Kecamatan Angkinang                              | 4.968.288.754,00          | 4.030.634.407,00          |
| 33            | Kecamatan Kandangan                              | 1.412.694.120,00          | 154.839.170,00            |
| 34            | Kelurahan Kandangan Kota                         | 261.126.770,00            | 261.126.770,00            |
| 35            | Kelurahan Kandangan Barat                        | 75.636.770,00             | 75.636.770,00             |
| 36            | Kelurahan Kandangan Utara                        | 109.476.345,00            | 63.020.000,00             |
| 37            | Kelurahan Jambu Hilir                            | 986.812.718,00            | 845.560.000,00            |
| 38            | Kecamatan Simpur                                 | 2.620.023.992,00          | 709.460.000,00            |
| 39            | Kecamatan Daha Selatan                           | 16.145.178.337,00         | 13.018.262.800,00         |
| 40            | Kecamatan Daha Utara                             | 1.943.802.280,00          | 503.835.280,00            |
| 41            | Kecamatan Kalumpang                              | 4.915.479.959,00          | 199.281.503,00            |
| 42            | Kecamatan Loksado                                | 1.026.835.500,00          | 489.530.500,00            |
| 43            | Kecamatan Daha Barat                             | 367.736.060,00            | 293.398.560,00            |
| 44            | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                | 267.223.770,00            | 267.223.770,00            |
| <b>Jumlah</b> |                                                  | <b>613.374.512.442,00</b> | <b>599.431.287.627,00</b> |

Adapun mutasi tanah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3.69 Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2021**

| Uraian                                  | Jumlah<br>(Rp)            |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Saldo Awal Per 1 Januari 2021           | 599.431.287.627,00        |
| Penambahan Aset Tetap Tanah Tahun 2021  | 84.586.019.457,00         |
| Pengurangan Aset Tetap tanah Tahun 2021 | (70.642.794.642,00)       |
| <b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2021</b> | <b>613.374.512.442,00</b> |

**A. Penambahan Aset Tetap Tanah**

Penambahan aset tetap Tanah sebesar Rp84.586.019.457,00 terdiri atas penambahan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

1. Penambahan berupa Realisasi Belanja Modal Tanah pada LRA sebesar Rp1.563.402.500,00 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.70 Daftar Pengadaan Tanah Tahun 2021**

| No            | Nama SKPD                           | Nilai (Rp)              |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1             | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan     | 967.657.000,00          |
| 2             | Dinas Kesehatan                     | 444.798.000,00          |
| 3             | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 115.947.500,00          |
| 4             | Kecamatan Kalumpang                 | 35.000.000,00           |
| <b>Jumlah</b> |                                     | <b>1.563.402.500,00</b> |

Rincian mengenai belanja modal Tanah per jenis barang pada **Lampiran 4**.

2. Hibah sebesar Rp9.839.350.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup berupa hibah tanah kompleks perumahan, pemukiman dan jalan lingkungan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.71 Rincian Hibah Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat KPLH**

| No            | Jenis                | Luas (m2)     | Alamat                                       | Berita Acara                                     | Nilai (Rp)              |
|---------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1             | Tanah Jalan kompleks | 3.585         | Perumahan Teluk Pinang Indah Ds. Baluti      | No. 01/BA.PSU-TPI/DISPERA/HSS/IX/2021            | 2.330.250.000,00        |
| 2             | Tanah Jalan kompleks | 732           | Perumahan Griya Sandaga Binjai               | No. 01/BA.PSU-GS_BINJAI/DISPERA KPLH/HSS/VI/2021 | 219.600.000,00          |
| 3             | Tanah Jalan kompleks | 280           | Perumahan Griya Sandaga Bilui                | No. 01/BA.PSU-GS_BILUI/DISPERA KPLH/HSS/VI/2021  | 210.000.000,00          |
| 4             | Tanah Jalan kompleks | 2.158         | Perumahan Griya Intan Amandit                | No. 01/BA.PSU-GIA/DISPERA KPLH/HSS/VI/2021       | 647.400.000,00          |
| 5             | Tanah Jalan kompleks | 1.305         | Perumahan Pondok Bidadari Asri               | No. 01/BA.PSU-PBA/DISPERA KPLH/HSS/VI/2021       | 652.500.000,00          |
| 6             | Tanah Jalan kompleks | 4.455         | Perumahan Pondok Bidadari Asri 2             | No. 01/BA.PSU-PBAII/DISPERA KPLH/HSS/VI/2021     | 2.227.500.000,00        |
| 7             | Tanah Jalan kompleks | 5.572         | Perumahan Berlian Syariah Borneo Residence 2 | No. 01/BA.PSU-BSR/DISPERA KPLH/HSS/VI/2021       | 2.228.800.000,00        |
| 8             | Tanah Jalan kompleks | 5.440         | Perumahan Anugerah Residence Gambah Dalam    | No. 01/BA.PSU-ARI/DISPERA KPLH/HSS/IX/2021       | 816.000.000,00          |
| 9             | Tanah Jalan kompleks | 3.382         | Perumahan Anugerah Permai Gambah Dalam       | No. 01/BA.PSU-AP/DISPERA KPLH/HSS/IX/2021        | 507.300.000,00          |
| <b>Jumlah</b> |                      | <b>26.909</b> |                                              |                                                  | <b>9.839.350.000,00</b> |

3. Reklasifikasi dari non modal sebesar Rp591.047.700,00 merupakan reklasifikasi dari beban barang dan jasa ke belanja modal atau aset tetap yang seharusnya pada beberapa SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.72 Rincian Reklasifikasi dai Non Modal per SKPD**

| No | SKPD                        | Reklas dari        | Nilai (Rp)     | Keterangan                                     |
|----|-----------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------------------|
| 1  | Dinas Pendidikan            | Beban Barjas BOS   | 6.500.000,00   | Pemasangan paving block SDN Batu Bini          |
| 2  | Dinas Perumahan Rakyat KPLH | Beban Jasa         | 47.460.500,00  | Jasa konsultasi dan pengawasan peningkatan TPU |
|    |                             | Beban Pemeliharaan | 248.463.200,00 | Peningkatan TPU di Daha Utara                  |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| No     | SKPD               | Reklas dari        | Nilai (Rp)     | Keterangan                                                            |
|--------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 3      | Dinas Sosial       | Beban Jasa         | 5.839.000,00   | Jasa konsultan pengawasan dan honor pekerjaan pemasangan paving block |
| 4      | Dinas Pertanian    | Beban Jasa         | 9.875.000,00   | Jasa konsultan pengawasan pengurugan tanah                            |
|        |                    | Beban Pemeliharaan | 99.750.000,00  | Pengurugan tanah halaman BPP Daha Utara                               |
| 5      | Inspektorat Daerah | Beban Pegawai      | 1.600.000,00   | Honor pengadaan paving block                                          |
|        |                    | Beban Jasa         | 11.770.000,00  | Jasa konsultan perencanaan paving block                               |
|        |                    | Beban Pemeliharaan | 159.790.000,00 | Pengadaan paving block                                                |
| Jumlah |                    |                    | 591.047.700,00 |                                                                       |

4. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp1.546.140.115,00, merupakan mutasi masuk dari KIB lain guna menyesuaikan masing-masing aset dengan KIB yang seharusnya dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.73 Reklasifikasi dari KIB lain**

| No            | SKPD                                 | Dari KIB                    | Nilai (Rp)              | Keterangan                                                                                                       |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Dinas Pendidikan                     | KIB C (Gedung dan Bangunan) | 100.374.000,00          | Pemasangan patok tanda batas tanah SMPN 2 Kandangan                                                              |
| 2             | Dinas Kesehatan                      | KIB F (KDP)                 | 39.700.000,00           | Perencanaan urugan tanah puskesmas Sungai Pinang dan bajayau serta jasa appraisal tanah puskesmas Telaga Langsat |
|               |                                      | KIB C (Gedung dan Bangunan) | 424.277.000,00          | Perbaikan halaman bangsal karantina                                                                              |
| 3             | Dinas Perumahan Rakyat KPLH          | KIB C (Gedung dan Bangunan) | 197.240.000,00          | Pengurugan lahan TPA                                                                                             |
| 4             | Dinas Sosial                         | KIB C (Gedung dan Bangunan) | 189.867.179,00          | Pemasangan paving block                                                                                          |
|               |                                      | KIB F (KDP)                 | 13.490.000,00           | Perencanaan pemasangan paving block                                                                              |
| 5             | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata | KIB C (Gedung dan Bangunan) | 7.954.600,00            | Pemasangan paving block                                                                                          |
| 6             | Kel. Kandangan Utara                 | KIB C (Gedung dan Bangunan) | 21.856.345,00           | Pemasangan paving block                                                                                          |
| 7             | Kel. Jambu Hilir                     | KIB C (Gedung dan Bangunan) | 141.252.718,00          | Pemasangan paving block                                                                                          |
| 8             | Kec. Daha Utara                      | KIB C (Gedung dan Bangunan) | 209.857.000,00          | Pemasangan paving block                                                                                          |
| 9             | Kec. Daha Barat                      | KIB C (Gedung dan Bangunan) | 74.337.500,00           | Siring/urugan                                                                                                    |
| 10            | BKPSDM                               | KIB C (Gedung dan Bangunan) | 125.933.773,00          | Paving block halaman kantor                                                                                      |
| <b>Jumlah</b> |                                      |                             | <b>1.546.140.115,00</b> |                                                                                                                  |

5. Mutasi masuk antar SKPD sebesar Rp70.526.847.142,00 merupakan aset yang pengadaannya atau pembeliannya dari SKPD asal kemudian dimutasikan ke masing-masing SKPD pengguna dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.74 Rincian Mutasi Masuk antar SKPD**

| No | SKPD Tujuan      | SKPD Asal          | Nilai (Rp)        | Keterangan                |
|----|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 1  | Dinas Pendidikan | Sekretariat Daerah | 13.378.929.861,00 | Tanah bangunan pendidikan |
| 2  | Dinas Kesehatan  | Sekretariat Daerah | 1.814.783.538,000 | Tanah tempat kerja        |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| No            | SKPD Tujuan                          | SKPD Asal                   | Nilai (Rp)               | Keterangan                              |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 3             | RS H. Hasan Basry                    | Sekretariat Daerah          | 535.000.000,00           | Tanah kavling                           |
| 4             | Dinas Pekerjaan Umum dan TR          | Sekretariat Daerah          | 389.720.000,00           | Tanah untuk jalan                       |
| 5             | Dinas Perumahan Rakyat KPLH          | Sekretariat Daerah          | 1.110.500.000,00         | Tanah kavling                           |
| 6             | Dinas Sosial                         | Sekretariat Daerah          | 217.503.000,00           | Tanah kosong                            |
|               |                                      | Dinas Perumahan Rakyat KPLH | 197.240.000,00           | Lahan TPA                               |
| 7             | Dinas Perhubungan                    | Sekretariat Daerah          | 50.700.000,00            | Tanah kavling                           |
| 8             | Dinas PPKBPPPA                       | Sekretariat Daerah          | 61.000.000,00            | Tanah bangunan gedung kantor            |
| 9             | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata | Sekretariat Daerah          | 1.724.800.000,00         | Tanah sarana olahraga                   |
| 10            | Dinas Tenaga Kerja KUKP              | Sekretariat Daerah          | 76.872.400,00            | Tanah bangunan gedung kantor            |
| 11            | Dinas Penanaman Modal dan PTSP       | Sekretariat Daerah          | 1.669.500.000,00         | Tanah bangunan gedung kantor            |
| 12            | Dinas Perikanan                      | Sekretariat Daerah          | 64.225.537,00            | Tanah kavling                           |
| 13            | Dinas Perdagangan                    | Sekretariat Daerah          | 5.663.850.000,00         | Tanah kavling                           |
| 14            | Dinas Pertanian                      | Dinas Perikanan             | 421.875.000,00           | Tanah kolam                             |
|               |                                      | Sekretariat Daerah          | 11.485.581.848,00        | Tanah tempat kerja dan tanah perkebunan |
| 15            | Bagian Perekonomian dan Pembangunan  | Sekretariat Daerah          | 1.341.900.000,00         | Tanah bangunan gedung                   |
| 16            | Bagian Umum                          | Sekretariat Daerah          | 5.827.040.760,00         | Tanah bangunan gedung dan asrama        |
| 17            | Kecamatan Sungai Raya                | Sekretariat Daerah          | 1.511.172.280,00         | Tanah kosong                            |
| 18            | Kecamatan Angkinang                  | Sekretariat Daerah          | 937.654.347,00           | Tanah kavling                           |
| 19            | Kecamatan Kandangan                  | Sekretariat Daerah          | 1.257.854.950,00         | Tanah kavling dan tanah usaha           |
| 20            | Kelurahan Kandangan Utara            | Sekretariat Daerah          | 24.600.000,00            | Tanah kebun                             |
| 21            | Kecamatan Telaga Langsat             | Sekretariat Daerah          | 1.307.086.881,00         | Tanah kavling                           |
| 22            | Kecamatan Simpur                     | Sekretariat Daerah          | 1.910.563.992,00         | Tanah kavling                           |
| 23            | Kecamatan Padang Batung              | Sekretariat Daerah          | 7.122.842.555,00         | Tanah kosong                            |
| 24            | Kecamatan Loksado                    | Sekretariat Daerah          | 537.305.000,00           | Tanah kavling                           |
| 25            | Kecamatan Kalumpang                  | Sekretariat Daerah          | 4.681.198.456,00         | Tanah kavling                           |
| 26            | Kecamatan Daha Selatan               | Sekretariat Daerah          | 3.126.915.537,00         | Tanah Kavling dan tanah kebun           |
| 27            | Kecamatan Daha Utara                 | Sekretariat Daerah          | 1.230.110.000,00         | Tanah kavling                           |
| 28            | Inspektorat Daerah                   | Sekretariat Daerah          | 370.021.200,00           | Tanah kavling                           |
| 29            | BPKPD                                | Sekretariat Daerah          | 478.500.000,00           | Tanah kavling                           |
| <b>Jumlah</b> |                                      |                             | <b>70.526.847.142,00</b> |                                         |

Mutasi masuk antar SKPD memiliki nilai yang sama dengan mutasi keluar antar SKPD.

- Koreksi penambahan dari aset tetap tanah hasil inventarisasi sebesar Rp519.232.000,00. Aset-aset tanah tersebut merupakan aset yang baru ditemukan kemudian diinventarisasi kedalam kib tanah yang tercatat pada Sekretariat Daerah yaitu:



- Tanah eks kompleks PLTD PLN Ranting Kandangan sebesar Rp477.568.000,00;
- Tanah lokasi bangunan BRI unit Simpur sebesar Rp20.160.000,00; dan
- Tanah Polsek Simpur sebesar Rp21.504.000,00

## B. Pengurangan Aset Tetap Tanah

Pengurangan aset tetap tanah sebesar Rp70.642.794.642,00 terdiri atas pengurangan aset tetap sebagai berikut:

1. Mutasi keluar SKPD sebesar Rp70.526.847.142,00 merupakan aset yang dimutasikan ke masing-masing SKPD pengguna tetapi pembeliannya atau pengadaannya dari SKPD asal. Mutasi keluar SKPD mempunyai nilai yang sama dengan mutasi masuk dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.75 Rincian Mutasi Keluar antar SKPD**

| No | SKPD Asal                   | SKPD Tujuan                         | Nilai (Rp)       | Keterangan                       |
|----|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| 1  | Dinas Perumahan Rakyat KPLH | Dinas Sosial                        | 197.240.000,00   | Lahan TPA                        |
| 2  | Dinas Perikanan             | Dinas Pertanian                     | 421.875.000,00   | Tanah kolam                      |
| 3  | Sekretariat Daerah          | Bagian Perekonomian dan Pembangunan | 1.341.900.000,00 | Tanah bangunan gedung            |
|    |                             | Dinas Perikanan                     | 64.225.537,00    | Tanah kavling                    |
|    |                             | Inspektorat Daerah                  | 370.021.200,00   | Tanah kavling                    |
|    |                             | Dinas PPKBPPPA                      | 61.000.000,00    | Tanah bangunan gedung kantor     |
|    |                             | Kel. Kandangan Utara                | 24.600.000,00    | Tanah kebun                      |
|    |                             | Dinas Tenaga Kerja KUKP             | 76.872.400,00    | Tanah bangunan gedung kantor     |
|    |                             | Kecamatan Daha Selatan              | 3.126.915.537,00 | Tanah Kavling dan tanah kebun    |
|    |                             | Dinas Perhubungan                   | 50.700.000,00    | Tanah kavling                    |
|    |                             | Kecamatan Angkinang                 | 937.654.347,00   | Tanah kavling                    |
|    |                             | Kecamatan Telaga Langsat            | 1.307.086.881,00 | Tanah kavling                    |
|    |                             | Kecamatan Simpur                    | 1.910.563.992,00 | Tanah kavling                    |
|    |                             | Dinas Perdagangan                   | 5.663.850.000,00 | Tanah kavling                    |
|    |                             | Bagian Umum                         | 5.827.040.760,00 | Tanah bangunan gedung dan asrama |
|    |                             | Kecamatan Kalumpang                 | 4.681.198.456,00 | Tanah kavling                    |
|    |                             | Dinas Kesehatan                     | 1.814.783.538,00 | Tanah tempat kerja               |
|    |                             | Kecamatan Daha Utara                | 1.230.110.000,00 | Tanah kavling                    |
|    |                             | Kecamatan Loksado                   | 537.305.000,00   | Tanah kavling                    |
|    |                             | RS H. Hasan Basry                   | 535.000.000,00   | Tanah kavling                    |
|    |                             | BPKPD                               | 478.500.000,00   | Tanah kavling                    |
|    |                             | Kecamatan Kandangan                 | 1.257.854.950,00 | Tanah kavling dan tanah usaha    |
|    |                             | Dinas Sosial                        | 217.503.000,00   | Tanah kosong                     |
|    |                             | Dinas Penanaman Modal               | 1.669.500.000,00 | Tanah bangunan gedung kantor     |





PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| No            | SKPD Asal | SKPD Tujuan                 | Nilai (Rp)               | Keterangan                              |
|---------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
|               |           | Dinas Pertanian             | 11.485.581.848,00        | Tanah tempat kerja dan tanah perkebunan |
|               |           | Kecamatan Padang Batung     | 7.122.842.555,00         | Tanah kosong                            |
|               |           | Dinas Perumahan Rakyat KPLH | 1.110.500.000,00         | Tanah kavling                           |
|               |           | Kecamatan Sungai Raya       | 1.511.172.280,00         | Tanah kosong                            |
|               |           | Dinas Porapar               | 1.724.800.000,00         | Tanah sarana olahraga                   |
|               |           | Dinas Pendidikan            | 13.378.929.861,00        | Tanah bangunan pendidikan               |
|               |           | Dinas PUTR                  | 389.720.000,00           | Tanah untuk jalan                       |
| <b>Jumlah</b> |           |                             | <b>70.526.847.142,00</b> |                                         |

2. Reklasifikasi ke KIB lain sebesar Rp115.947.500,00 guna menyesuaikan aset dengan KIB yang seharusnya dan adanya pekerjaan aset tanah yang masih berupa perencanaan. Saldo tersebut direklasifikasi ke KIB F (konstruksi dalam pengerjaan) yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupa pekerjaan pembangunan jembatan di Kecamatan Daha Selatan dengan rincian:

- honor pejabat pengadaan sebesar Rp900.000,00;
- honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar Rp1.500.000,00;
- jasa konsultansi pembuatan dokumen studi kelayakan sebesar Rp63.690.000,00; dan
- jasa penilaian harga tanah sebesar Rp49.857.500,00.

Dari aspek legalitas kepemilikan berupa sertifikat, dari 1.841 persil tanah milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mempunyai bukti kepemilikan berupa sertifikat sebanyak 936 persil tanah yang disimpan pada Bidang Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5.3.76 Keadaan Aset Tetap Tanah Berdasarkan Bukti Kepemilikan Sertifikat**

| No            | Uraian                    | Persil Tanah        |
|---------------|---------------------------|---------------------|
| 1             | Tanah Bersertifikat       | 936 Persil          |
| 2             | Tanah Belum Bersertifikat | 905 Persil          |
| <b>Jumlah</b> |                           | <b>1.841 Persil</b> |

#### 5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp568.337.097.233,51 dan Rp505.553.125.124,51 terjadi kenaikan sebesar Rp62.783.972.109,00 atau 12,42% dari total Peralatan dan Mesin Tahun 2020 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:





PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

**Tabel 5.3.77 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD**

| NO | SKPD                                                   | 31 Desember 2021<br>(Rp) | 31 Desember 2020<br>(Rp) |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | Dinas Pendidikan                                       | 71.492.208.263,51        | 66.361.899.758,51        |
| 2  | Dinas Kesehatan                                        | 77.327.017.456,00        | 67.515.976.811,00        |
| 3  | RSUD Hasan Basry Kandungan                             | 215.001.910.866,00       | 191.691.152.216,00       |
| 4  | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang                    | 10.792.426.638,00        | 10.445.960.638,00        |
| 5  | Dinas Perumahan Rakyat KPLH                            | 41.465.250.743,00        | 35.736.559.977,00        |
| 6  | Satuan Polisi Pamong Praja                             | 4.851.477.828,00         | 3.449.084.710,00         |
| 7  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                    | 420.825.604,00           | 0,00                     |
| 8  | Dinas Sosial                                           | 2.292.064.158,00         | 2.123.003.658,00         |
| 9  | Dinas Ketahanan Pangan                                 | 1.213.089.006,00         | 1.136.392.006,00         |
| 10 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                | 2.575.930.887,00         | 2.064.588.387,00         |
| 11 | Dinas Pemberdayaan Masy. Desa                          | 780.911.400,00           | 758.541.400,00           |
| 12 | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA             | 5.263.035.884,00         | 4.959.328.384,00         |
| 13 | Dinas Perhubungan                                      | 14.858.138.118,00        | 12.389.119.968,00        |
| 14 | Dinas Komunikasi dan Informatika                       | 11.173.573.053,00        | 7.464.018.154,00         |
| 15 | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKP                   | 3.305.625.005,00         | 3.102.384.275,00         |
| 16 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                         | 3.275.510.684,00         | 1.623.373.534,00         |
| 17 | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata                   | 3.410.575.864,00         | 3.371.331.864,00         |
| 18 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                       | 2.404.193.974,00         | 2.241.275.974,00         |
| 19 | Dinas Perikanan                                        | 5.809.272.633,00         | 3.441.872.633,00         |
| 20 | Dinas Pertanian                                        | 10.974.880.345,00        | 10.576.180.345,00        |
| 21 | Dinas Perdagangan                                      | 3.926.259.004,00         | 3.665.257.504,00         |
| 22 | Sekretariat Daerah                                     | 897.232.326,00           | 419.637.500,00           |
| 23 | Bagian Hukum                                           | 358.346.834,00           | 360.729.734,00           |
| 24 | Bagian Pemerintahan                                    | 1.873.242.561,00         | 1.886.242.561,00         |
| 25 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan                | 1.613.503.004,00         | 1.480.293.004,00         |
| 26 | Bagian Kesejahteraan Rakyat                            | 341.961.584,00           | 314.772.584,00           |
| 27 | Bagian Organisasi                                      | 596.718.703,00           | 506.739.703,00           |
| 28 | Bagian Umum                                            | 23.415.578.476,00        | 22.857.536.270,00        |
| 29 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa                       | 1.216.662.034,00         | 1.160.581.234,00         |
| 30 | Bagian Perekoniman dan Pembangunan                     | 401.927.294,00           | 413.552.294,00           |
| 31 | Inspektorat Daerah                                     | 2.102.481.445,00         | 1.945.212.245,00         |
| 32 | BAPPELITBANGDA                                         | 1.170.660.758,00         | 2.087.896.788,00         |
| 33 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah       | 9.866.043.819,00         | 9.547.261.729,00         |
| 34 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3.429.762.032,00         | 2.456.315.032,00         |
| 35 | Sekretariat DPRD                                       | 7.301.863.390,00         | 6.578.742.790,00         |
| 36 | Kecamatan Sungai Raya                                  | 1.320.330.696,00         | 1.266.290.696,00         |
| 37 | Kecamatan Padang Batung                                | 1.348.438.399,00         | 1.242.988.399,00         |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| NO            | SKPD                              | 31 Desember 2021<br>(Rp)  | 31 Desember 2020<br>(Rp)  |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 38            | Kecamatan Telaga Langsat          | 1.153.808.437,00          | 974.463.437,00            |
| 39            | Kecamatan Angkinang               | 1.150.118.437,00          | 1.117.652.137,00          |
| 40            | Kecamatan Kandangan               | 1.957.440.033,00          | 1.723.640.033,00          |
| 41            | Kelurahan Kandangan Kota          | 413.273.906,00            | 397.473.906,00            |
| 42            | Kelurahan Kandangan Barat         | 487.837.877,00            | 405.662.877,00            |
| 43            | Kelurahan Kandangan Utara         | 393.316.232,00            | 308.864.932,00            |
| 44            | Kelurahan Jambu Hilir             | 654.043.731,00            | 555.993.731,00            |
| 45            | Kecamatan Simpur                  | 1.274.175.787,00          | 1.175.305.787,00          |
| 46            | Kecamatan Daha Selatan            | 1.550.131.472,00          | 1.476.216.472,00          |
| 47            | Kecamatan Daha Utara              | 1.702.548.603,00          | 1.498.383.603,00          |
| 48            | Kecamatan Kalumpang               | 1.465.566.983,00          | 1.363.854.483,00          |
| 49            | Kecamatan Loksado                 | 1.207.329.571,00          | 1.035.513.571,00          |
| 50            | Kecamatan Daha Barat              | 1.264.873.829,00          | 1.180.863.829,00          |
| 51            | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 3.793.701.567,00          | 3.697.141.567,00          |
| <b>Jumlah</b> |                                   | <b>568.337.097.233,51</b> | <b>505.553.125.124,51</b> |

Adapun rincian mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin selama Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.78 Mutasi Peralatan dan Mesin**

| Uraian                                                | Jumlah<br>(Rp)            |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Saldo Awal Per 1 Januari 2021                         | 505.553.125.124,51        |
| Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2021  | 74.013.329.474,00         |
| Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2021 | (11.229.357.365,00)       |
| <b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2021</b>               | <b>568.337.097.233,51</b> |

**A. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama TA 2021 sebesar Rp74.013.329.474,00 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Modal (LRA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp55.907.592.945,00 yang merupakan realisasi Belanja Modal seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan nilai dengan rincian SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.79 Daftar Pengadaan Peralatan dan Mesin Tahun 2021**

| No | Nama SKPD                           | Nilai<br>(Rp)     |
|----|-------------------------------------|-------------------|
| 1  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan     | 5.351.927.793,00  |
| 2  | Dinas Kesehatan                     | 8.564.530.633,00  |
| 3  | RSUD Hasan Basry Kandangan          | 23.651.743.402,00 |
| 4  | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 377.041.000,00    |
| 5  | Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH    | 1.401.073.000,00  |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Nama SKPD                                  | Nilai (Rp)       |
|----|--------------------------------------------|------------------|
| 6  | Satuan Polisi Pamong Praja                 | 65.768.618,00    |
| 7  | Dinas Sosial                               | 202.307.500,00   |
| 8  | Dinas Ketahanan Pangan                     | 95.735.200,00    |
| 9  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil    | 535.020.000,00   |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa         | 46.780.000,00    |
| 11 | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA | 319.643.500,00   |
| 12 | Dinas Perhubungan                          | 189.556.150,00   |
| 13 | Dinas Komunikasi dan Informatika           | 3.629.509.899,00 |
| 14 | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKP       | 225.423.000,00   |
| 15 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP             | 1.663.522.650,00 |
| 16 | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata       | 94.869.000,00    |
| 17 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan           | 396.899.000,00   |
| 18 | Dinas Perikanan                            | 2.367.400.000,00 |
| 19 | Dinas Pertanian                            | 493.223.000,00   |
| 20 | Dinas Perdagangan                          | 260.979.500,00   |
| 21 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan    | 144.710.000,00   |
| 22 | Bagian Kesejahteraan Rakyat                | 26.950.000,00    |
| 23 | Bagian Organisasi                          | 90.727.000,00    |
| 24 | Bagian Umum                                | 1.186.360.000,00 |
| 25 | Bagian Pengadaan Barang/Jasa               | 40.980.800,00    |
| 26 | Inspektorat Daerah                         | 108.290.300,00   |
| 27 | Bappelitbangda                             | 330.431.300,00   |
| 28 | BPKPD                                      | 350.602.100,00   |
| 29 | Badan Kepegawaian dan PSDM                 | 1.115.526.000,00 |
| 30 | Sekretariat DPRD                           | 752.815.600,00   |
| 31 | Kecamatan Sungai Raya                      | 90.640.000,00    |
| 32 | Kecamatan Padang Batung                    | 85.055.000,00    |
| 33 | Kecamatan Telaga Langsat                   | 181.782.500,00   |
| 34 | Kecamatan Angkinang                        | 39.600.000,00    |
| 35 | Kecamatan Kandangan                        | 272.500.000,00   |
| 36 | Kelurahan Kandangan Kota                   | 15.800.000,00    |
| 37 | Kelurahan Kandangan Barat                  | 82.175.000,00    |
| 38 | Kelurahan Kandangan Utara                  | 81.100.000,00    |
| 39 | Kelurahan Jambu Hilir                      | 98.050.000,00    |
| 40 | Kecamatan Simpur                           | 98.870.000,00    |
| 41 | Kecamatan Daha Selatan                     | 75.767.000,00    |
| 42 | Kecamatan Daha Utara                       | 225.265.000,00   |
| 43 | Kecamatan Kalumpang                        | 91.712.500,00    |
| 44 | Kecamatan Loksado                          | 177.356.000,00   |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| No            | Nama SKPD            | Nilai (Rp)               |
|---------------|----------------------|--------------------------|
| 45            | Kecamatan Daha Barat | 137.214.000,00           |
| 46            | Badan Kesbangpol     | 74.360.000,00            |
| <b>Jumlah</b> |                      | <b>55.907.592.945,00</b> |

Rincian mengenai belanja modal Peralatan dan Mesin per jenis barang pada **Lampiran 5**.

- Reklasifikasi dari non modal sebesar Rp1.770.955.690,00 pada beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.80 Daftar Reklasifikasi dari Belanja Non Modal (Barang dan Jasa)**

| No | SKPD                                 | Reklas dari        | Nilai (Rp)     | Keterangan                                                   |
|----|--------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 1  | Dinas Kesehatan                      | Beban Persediaan   | 30.000.000,00  | Plang nama Pustu                                             |
|    |                                      | Beban Pemeliharaan | 18.095.000,00  | Hematology analyzer                                          |
| 2  | Dispera KPLH                         | Beban Persediaan   | 874.000.000,00 | Buldozer                                                     |
|    |                                      |                    | 45.800.000,00  | Pompa air, hand sprayer, thermo gun, chain saw dan paranet   |
|    |                                      |                    | 174.857.350,00 | Trafo, lampu RGB, kontroller RGB, dan alat workshop          |
|    |                                      |                    | 7.300.000,00   | Mesin pemotong rumput                                        |
|    |                                      | Beban Pemeliharaan | 259.250.000,00 | Buldozer; bak sampah, mesin sedot air, mesin pompa air       |
| 3  | Satpol PP                            | Beban Pemeliharaan | 3.944.500,00   | Lampu LED bar                                                |
| 4  | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Beban Pemeliharaan | 29.750.000,00  | Deco mobil bus                                               |
| 5  | Dinas PPKBPPPA                       | Beban Pegawai      | 1.300.000,00   | Honor pengadaan kendaraan roda 2 dan laptop                  |
|    |                                      | Beban Jasa         | 2.000.000,00   | Plang papan nama UPTD                                        |
| 6  | Dinas Perhubungan                    | Beban Pemeliharaan | 24.937.000,00  | Repeter radio                                                |
| 7  | Dinas Kominfo                        | Beban Persediaan   | 6.375.000,00   | Papan nama pengawasan menara                                 |
|    |                                      | Beban Pegawai      | 8.550.000,00   | Honor pengadaan PC unit, printer, ups, kamera, dan brankas   |
| 8  | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata | Beban Pemeliharaan | 20.297.000,00  | mesin pemotong rumput, mesin penyemprot, hand sprayer, artco |
| 9  | Dinas Penanaman Modal dan PTSP       | Beban Persediaan   | 12.232.000,00  | Bunga plastik                                                |
| 10 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan     | Beban Persediaan   | 5.895.000,00   | Mesin vacuum cleaner                                         |
| 11 | Dinas Pertanian                      | Beban Persediaan   | 26.000.000,00  | Gorden                                                       |
| 12 | Dinas Perdagangan                    | Beban Pegawai      | 7.700.000,00   | Honor pengadaan laptop dan lemari arsip                      |
| 13 | Bagian Kesejahteraan Rakyat          | Beban Pegawai      | 1.600.000,00   | Honorarium pengadaan laptop                                  |
| 14 | Bagian Umum                          | Beban Pemeliharaan | 6.450.000,00   | Pembuatan podium                                             |
|    |                                      | Beban Persediaan   | 10.250.000,00  | Pengadaan keset dan karpet                                   |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| No            | SKPD                                    | Reklas dari        | Nilai (Rp)              | Keterangan                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 15            | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Beban Pegawai      | 1.950.000,00            | Honorarium pengadaan laptop dan scanner                                            |
| 16            | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa        | Beban Pemeliharaan | 15.235.000,00           | Laptop                                                                             |
| 17            | Sekretariat DPRD                        | Beban Pegawai      | 1.500.000,00            | Honorarium PPK                                                                     |
| 18            | Kecamatan Sungai Raya                   | Beban Pegawai      | 650.000,00              | Honor pengadaan filling cabinet                                                    |
| 19            | Kecamatan Angkinang                     | Beban Pemeliharaan | 15.000.000,00           | Kipas angin                                                                        |
|               |                                         | Beban Persediaan   | 1.650.000,00            | Vacum cleaner                                                                      |
| 20            | Kecamatan Padang Batung                 | Beban Persediaan   | 3.200.000,00            | Karpet musholla                                                                    |
| 21            | Kecamatan Kandangan                     | Beban Pegawai      | 1.550.000,00            | Honor pengadaan genset                                                             |
| 22            | Kelurahan Kandangan Utara               | Beban Persediaan   | 14.300.000,00           | Alat penyemprot, papan nama, meja kursi, tensi meter, timbangan dan ranjang pasien |
| 23            | Kecamatan Telaga Langsat                | Beban Jasa         | 10.000.000,00           | Pembelian GPS                                                                      |
| 24            | Kecamatan Daha Utara                    | Beban Pegawai      | 500.000,00              | Honor pengadaan                                                                    |
| 25            | Inspektorat Daerah                      | Beban Pemeliharaan | 61.378.900,00           | Meja dan meubelair                                                                 |
|               |                                         | Beban Persediaan   | 41.343.940,00           | Gorden                                                                             |
|               |                                         | Beban Pegawai      | 800.000,00              | Honor pengadaan                                                                    |
| 26            | BAPPELITBANGDA                          | Beban Pegawai      | 815.000,00              | Honor pengadaan                                                                    |
| 27            | Badan Kesbangpol                        | Beban Persediaan   | 24.500.000,00           | Pembelian selang pemadam kebakaran                                                 |
| <b>Jumlah</b> |                                         |                    | <b>1.770.955.690,00</b> |                                                                                    |

3. Reklasifikasi dari belanja modal yang menggunakan dana BTT Covid sebesar Rp46.160.000,00 yang terdapat pada Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.81 Daftar Belanja Modal Peralatan dan Mesin dari Dana BTT Covid**

| No     | SKPD            | Nilai (Rp)    | Keterangan                |
|--------|-----------------|---------------|---------------------------|
| 1      | Dinas Kesehatan | 13.360.000,00 | Tandon                    |
|        |                 | 8.390.000,00  | Alat Pendingin /AC        |
|        |                 | 1.900.000,00  | Printer                   |
|        |                 | 8.780.000,00  | Mesin cuci                |
|        |                 | 13.730.000,00 | Televisi dan wall bracket |
| Jumlah |                 | 46.160.000,00 |                           |

4. Hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp7.344.368.393,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.82 Rincian Hibah Peralatan dan Mesin**

| No | SKPD             | Nilai (Rp)     | Keterangan       | Berita Acara                       |
|----|------------------|----------------|------------------|------------------------------------|
| 1  | Dinas Pendidikan | 916.676.000,00 | Dari Kemendikbud | No. 1634/BAST-SMP/B2G.spt/BMD/2021 |
|    |                  |                |                  | No. 15001/C3/KPA/VI/KP/2021        |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| No            | SKPD               | Nilai (Rp)              | Keterangan                          | Berita Acara                        |
|---------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2             | Dinas Kesehatan    | 991.094.307,00          | Dari Kemenkes berupa KIT kebugaran  | KN.01.03/4/PPK/450/2021             |
|               |                    |                         | Dari Kemenkes berupa lansia kit     | KN.02.04/6/PPK/2092/IX/2021         |
|               |                    |                         | Dari Kemenkes berupa kit UKS        | KN.02.04/PPK/2362/X/2021            |
|               |                    |                         | Dari Kemenkes berupa fridge-tag 2   | KN.02.02/4.3/7058.348/2021          |
|               |                    |                         | Dari Kemenkes berupa vaksin kit     | KN.02.02/4.3/348/2021               |
|               |                    |                         | Dari Kemenkes berupa Iva kit        | KN 02.02/4.3/6364.332/2021          |
|               |                    |                         | Dari Kemenkes berupa alat USG       | KN 02.02/6/PPK/2361/X/2021          |
| 3             | RSUD Hasan Basry   | 18.440.000,00           | Dari BNPB                           | No. /BNPB/OJL/LP.01.03/03/2021      |
|               |                    | 1.239.812.160,00        | Dari Dinas Kesehatan Prov. Kalsel   | No. 442.1/3264/IF/X/2021            |
|               |                    |                         |                                     | No. 442.1/3418/IF/X/2021            |
| 4             | BPBD               | 867.350.000,00          | Dari Kemenkes RI                    | 03/TIJ-GDN-MED/XII/2021             |
|               |                    | 164.500.000,00          | Dari BNPB berupa trailer tangki air | No: BA 97/D<br>V/RT.03.03/03/2021   |
|               |                    | 50.000.000,00           | Dari BRI berupa perahu karet        | No. B /KC-X/LOG/04/2021             |
| 5             | Dinas Perhubungan  | 2.258.905.000,00        | Kementerian Perhubungan             | BAST Pt.301/300/Satker-TPSD/II/2021 |
| 6             | Sekretariat Daerah | 837.590.926,00          | Dari KPU berupa thermo gun          | 01/HK.05-Spj/6306/KPU-Kab/III/2021  |
| <b>Jumlah</b> |                    | <b>7.344.368.393,00</b> |                                     |                                     |

Penerima hibah aset tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan pada beberapa sekolah sebagai berikut:

**Tabel 5.3.83 Daftar Sekolah Penerima Hibah dari Kemendikbud RI**

| No.           | Sekolah                 | Jumlah (Rp)           | Keterangan                                         |
|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| 1             | SDN Wawaran             | 93.098.000,00         | Laptop, LCD, wireless, connector, proyektor, modem |
| 2             | SDN Tambangan 2         | 93.098.000,00         | Laptop, LCD, wireless, connector, proyektor, modem |
| 3             | SDN Pakapuran Kacil 1   | 93.098.000,00         | Laptop, LCD, wireless, connector, proyektor, modem |
| 4             | SDN Amawang Kiri 3      | 93.098.000,00         | Laptop, LCD, wireless, connector, proyektor, modem |
| 5             | SDN Malinau             | 93.098.000,00         | Laptop, LCD, wireless, connector, proyektor, modem |
| 6             | SDN Malutu              | 93.098.000,00         | Laptop, LCD, wireless, connector, proyektor, modem |
| 7             | SDN Anjiran Sungai Raya | 93.098.000,00         | Laptop, LCD, wireless, connector, proyektor, modem |
| 8             | SMPN 8 Kandangan        | 88.330.000,00         | Laptop, LCD, wireless, connector, proyektor, modem |
| 9             | SMPN 7 Kandangan        | 88.330.000,00         | Laptop, LCD, wireless, connector, proyektor, modem |
| 10            | SMPN 2 Sungai Raya      | 88.330.000,00         | Laptop, LCD, wireless, connector, proyektor, modem |
| <b>Jumlah</b> |                         | <b>916.676.000,00</b> |                                                    |



5. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp6.224.744.453,00 merupakan mutasi masuk dari KIB lain guna menyesuaikan masing-masing aset dengan KIB yang seharusnya dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.84 Rincian Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin**

| No            | SKPD                        | Dari KIB                    | Nilai (Rp)              | Keterangan              |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1             | Dinas Pendidikan            | KIB E (Aset Tetap Lainnya)  | 4.600.000,00            | Lihat pada tabel 5.3.84 |
| 2             | RSUD H. Hasan Basry         | KIB D (JIJ)                 | 2.519.640.713,00        | Genset                  |
| 3             | Dinas Perumahan Rakyat KPLH | KIB D (JIJ)                 | 3.657.328.740,00        | Lampu LED               |
| 4             | Kel. Kandungan Utara        | KIB C (Gedung dan Bangunan) | 4.680.000,00            | Meja resepsionis        |
| 5             | Kecamatan Padang Batung     | KIB E (Aset Tetap Lainnya)  | 24.545.000,00           | Televisi dan laptop     |
| 6             | Kecamatan Kalumpang         | KIB E (Aset Tetap Lainnya)  | 10.000.000,00           | Pengadaan cctv          |
| 7             | Kecamatan Daha Utara        | KIB E (Aset Tetap Lainnya)  | 3.950.000,00            | Running text            |
| <b>Jumlah</b> |                             |                             | <b>6.224.744.453,00</b> |                         |

Pada Dinas Pendidikan terdapat reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin untuk kemudian didistribusikan ke beberapa sekolah sebagai berikut:

**Tabel 5.3.85 Daftar Sekolah Penerima Aset Peralatan dan Mesin**

| No.           | Sekolah              | Nilai (Rp)          | Keterangan                   |
|---------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 1             | SDN Pariangan        | 1.000.000,00        | Pengadaan tikar              |
| 2             | SMPN 1 Loksado       | 2.200.000,00        | Pengadaan papan nama sekolah |
| 3             | SMPN 1 Padang Batung | 1.400.000,00        | Pengadaan gitar              |
| <b>Jumlah</b> |                      | <b>4.600.000,00</b> |                              |

6. Mutasi masuk SKPD sebesar Rp1.499.507.993,00 merupakan aset yang pengadaannya atau pembeliannya dari SKPD asal kemudian dimutasikan ke masing-masing SKPD pengguna dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.86 Rincian Mutasi Masuk Aset Peralatan dan Mesin per SKPD**

| No     | SKPD Tujuan      | SKPD Asal                     | Nilai (Rp)       | Keterangan                               |
|--------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| 1      | Dinas Pendidikan | Sekretariat Daerah            | 359.996.100,00   | Thermo gun                               |
| 2      | Dinas Kesehatan  | RSUD H. Hasan Basry           | 339.022.000,00   | Kendaraan roda 4 utk RS Daha Sejahtera   |
| 3      | RSUD Hasan Basry | Dinas Kesehatan               | 4.246.495,00     | Lansia Kit                               |
| 4      | BPBD             | BPKPD                         | 206.325.604,00   | Kendaraan roda 4 dan sepeda motor        |
| 5      | Satpol PP        | Bagian Umum                   | 190.000.000,00   | Kendaraan angkutan roda 4 (mobil pickup) |
| 6      | Dinas Kominfo    | Bagian Umum                   | 132.000.000,00   | Kendaraan roda 4                         |
| 7      | BPKPD            | Dinas Kependudukan dan Catpil | 10.960.000,00    | Kendaraan roda 2                         |
|        |                  | Bagian Umum                   | 256.957.794,00   | Kendaraan roda 4                         |
| Jumlah |                  |                               | 1.499.507.993,00 |                                          |



7. Penambahan karena aset yang baru ditemukan kemudian diinventarisasi kedalam kib yang seharusnya sebesar Rp1.220.000.000,00 yang tercatat pada:
  - Dinas Kesehatan sebesar Rp70.000.000,00 berupa mobil ambulans; dan
  - Satpol PP sebesar Rp1.150.000.000,00 berupa mobil truck R6 pemadam kebakaran, R-3 Viar, dan tosa .

#### **B. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2021 sebesar Rp11.229.357.365,00 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Reklasifikasi ke ekstrakompatabel sebesar Rp1.862.300.223,00 yaitu kumulatif belanja modal aset tetap Peralatan dan Mesin dengan nilai di bawah Rp750.000,00 untuk setiap unit barang dari seluruh SKPD sebagai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.87 Rincian Aset Ekstrakompatabel Peralatan dan Mesin per SKPD**

| No | SKPD                                    | Nilai (Rp)     |
|----|-----------------------------------------|----------------|
| 1  | Dinas Pendidikan                        | 650.109.288,00 |
| 2  | Dinas Kesehatan                         | 187.405.050,00 |
| 3  | RSUD Hasan Basry                        | 184.458.675,00 |
| 4  | Dinas Perumahan Rakyat KPLH             | 18.830.000,00  |
| 5  | Satuan Polisi Pamong Praja              | 7.320.000,00   |
| 6  | Dinas Sosial                            | 28.000.000,00  |
| 7  | Dinas Perhubungan                       | 1.200.000,00   |
| 8  | Dinas Kominfo                           | 66.180.000,00  |
| 9  | Dinas PPKBPPPA                          | 5.656.000,00   |
| 10 | Dinas Kependudukan dan Catpil           | 500.000,00     |
| 11 | Dinas Tenaga Kerja KUKP                 | 17.672.270,00  |
| 12 | Dinas Porapar                           | 47.922.000,00  |
| 13 | Dinas Penanaman Modal PTSP              | 5.452.500,00   |
| 14 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan        | 210.696.000,00 |
| 15 | Dinas Ketahanan Pangan                  | 12.419.000,00  |
| 16 | Dinas Pertanian                         | 57.798.000,00  |
| 17 | Dinas Perdagangan                       | 5.950.000,00   |
| 18 | Bagian Umum                             | 46.060.000,00  |
| 19 | Bagian Kesejahteraan Rakyat             | 550.000,00     |
| 20 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 4.450.000,00   |
| 21 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa        | 135.000,00     |
| 22 | Bagian Organisasi                       | 748.000,00     |
| 23 | Sekretariat DPRD                        | 25.195.000,00  |
| 24 | Kecamatan Sungai Raya                   | 37.250.000,00  |





PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| No            | SKPD                      | Nilai (Rp)              |
|---------------|---------------------------|-------------------------|
| 25            | Kelurahan Kandangan Utara | 11.500.000,00           |
| 26            | Kecamatan Loksado         | 3.910.000,00            |
| 27            | Kecamatan Angkinang       | 10.500.000,00           |
| 28            | Kecamatan Telaga Langsat  | 7.687.500,00            |
| 29            | Kecamatan Daha Selatan    | 1.852.000,00            |
| 30            | Kecamatan Daha Utara      | 22.150.000,00           |
| 31            | Kecamatan Daha Barat      | 17.650.000,00           |
| 32            | Inspektorat Daerah        | 54.543.940,00           |
| 33            | BKPSDM                    | 110.550.000,00          |
| <b>Jumlah</b> |                           | <b>1.862.300.223,00</b> |

2. Adanya penghapusan barang-barang inventaris berupa Peralatan dan Mesin karena kondisi rusak berat sebesar Rp2.285.854.604,00 yang sampai dengan tanggal neraca telah dilakukan proses penghapusan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.88 Daftar Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin karena Rusak Berat**

| No. | SKPD                                 | Nilai (Rp)     | Keterangan                                         | Nomor SK                           |
|-----|--------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1   | Dinas Kesehatan                      | 42.724.750,00  | Sepeda motor dan printer                           | Sekda No. 27 dan No. 10 Tahun 2021 |
| 2   | RSUD Hasan Basry                     | 80.000.000,00  | Sepeda motor                                       | Sekda No. 27 Tahun 2021            |
| 3   | Dinas Perumahan Rakyat KPLH          | 487.088.324,00 | Alat angkutan darat bermotor, alat peraga, printer | Sekda No. 27 dan 10 Tahun 2021     |
| 4   | Dinas Pekerjaan Umum dan TR          | 30.575.000,00  | Sepeda motor, filling cabinet dan printer          | Sekda No. 27 dan 10 Tahun 2021     |
| 5   | Dinas Sosial                         | 2.656.000,00   | Printer                                            | Sekda No. 10 Tahun 2021            |
| 6   | Dinas PPKBPPPA                       | 13.580.000,00  | Scanner, printer dan brankas                       | Sekda No. 10 Tahun 2021            |
| 7   | Dinas Kependudukan dan Catpil        | 36.467.500,00  | Sepeda motor dan printer                           | Sekda No. 27 dan No. 10 Tahun 2021 |
| 8   | Dinas Perhubungan                    | 3.180.000,00   | Printer dan filling kabinet                        | Sekda No. 10 Tahun 2021            |
| 9   | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata | 28.000.000,00  | Sepeda motor                                       | Sekda No. 27 Tahun 2021            |
| 10  | Dinas Tenaga Kerja KUKP              | 4.510.000,00   | Printer dan mesin ketik                            | Sekda No. 10 Tahun 2021            |
| 11  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa   | 24.410.000,00  | Sepeda motor                                       | Sekda No. 27 Tahun 2021            |
| 12  | Dinas Penanaman Modal PTSP           | 18.165.000,00  | Sepeda motor dan printer                           | Sekda No. 27 dan No. 10 Tahun 2021 |
| 13  | Dinas Ketahanan Pangan               | 6.619.200,00   | Lemari arsip dan printer                           | Sekda No. 10 Tahun 2021            |
| 14  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan     | 8.695.000,00   | Printer                                            | Sekda No. 10 Tahun 2021            |
| 15  | Dinas Pertanian                      | 39.475.000,00  | Sepeda motor                                       | Sekda No. 27 Tahun 2021            |
| 16  | Bagian Kesejahteraan Rakyat          | 811.000,00     | Printer                                            | Sekda No. 10 Tahun 2021            |
| 17  | Bagian Umum                          | 20.000.000,00  | Sepeda motor                                       | Sekda No. 27 Tahun 2021            |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| No.           | SKPD                      | Nilai (Rp)              | Keterangan                                   | Nomor SK                           |
|---------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| 18            | Bagian Hukum              | 2.382.900,00            | Mesin kerik                                  | Sekda No. 10 Tahun 2021            |
| 19            | Bagian Pemerintahan       | 13.000.000,00           | Sepeda motor                                 | Sekda No. 27 Tahun 2021            |
| 20            | Bagian Protokol dan Kopim | 9.000.000,00            | Sepeda motor                                 | Sekda No. 27 Tahun 2021            |
| 21            | Bagian Perekonomian       | 11.625.000,00           | Sepeda motor                                 | Sekda No. 27 Tahun 2021            |
| 22            | Kecamatan Padang Batung   | 7.350.000,00            | Sepeda motor dan genset                      | Sekda No. 27 Tahun 2021            |
| 23            | Kelurahan Kandungan Utara | 4.128.700,00            | Printer dan mesin ketik                      | Sekda No. 10 Tahun 2021            |
| 24            | Kecamatan Angkinang       | 13.283.700,00           | Sepeda motor dan printer                     | Sekda No. 27 dan 10 Tahun 2021     |
| 25            | Kecamatan Telaga Langsat  | 4.750.000,00            | Perkakas bengkel listrik dan printer         | Sekda No. 27 dan 10 Tahun 2021     |
| 26            | Kecamatan Daha Barat      | 35.554.000,00           | Sepeda motor                                 | Sekda No. 27 Tahun 2021            |
| 27            | BAPPELITBANGDA            | 1.248.482.330,00        | Printer dan peralatan mesin karena kebakaran | Sekda No. 10 dan No. 28 Tahun 2021 |
| 28            | BKPSDM                    | 4.429.000,00            | Printer                                      | Sekda No. 10 Tahun 2021            |
| 29            | BPKPD                     | 83.412.200,00           | Sepeda motor, printer, tong air              | Sekda No. 27 dan No. 10 Tahun 2021 |
| 30            | Badan Kesbangpol          | 1.500.000,00            | Printer                                      | Sekda No. 10 Tahun 2021            |
| <b>Jumlah</b> |                           | <b>2.285.854.604,00</b> |                                              |                                    |

3. Reklasifikasi ke beban barang dan jasa sebesar Rp77.573.800,00 karena belanja modal tidak menambah nilai aset tetap atau tidak tergolong sebagai aset tetap dengan rincian SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.89 Rincian Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa per SKPD**

| No            | SKPD                             | Reklas ke        | Nilai (Rp)           | Nama Barang                                          |
|---------------|----------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 1             | Dinas Pendidikan                 | Beban Persediaan | 2.420.000,00         | Bola lampu dan kaca bening                           |
|               |                                  |                  | 4.475.100,00         | Alat dapur                                           |
| 2             | Dinas Kesehatan                  | Beban Persediaan | 13.485.000,00        | Bantal,sapu,kursi plastik,gayung,tempat sampah,sprei |
| 3             | RSUD H. Hasan Basry              | Beban Persediaan | 6.684.700,00         | Peralatan kedokteran habis pakai                     |
| 4             | Dinas Sosial                     | Beban Persediaan | 2.591.000,00         | Peralatan rumah tangga                               |
| 5             | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Beban Persediaan | 11.110.000,00        | Masker, video kegiatan, bedak tabur, taplak meja     |
| 6             | Dinas Pertanian                  | Beban Persediaan | 23.250.000,00        | Pipa air UPTD Hariti                                 |
| 7             | Dinas Perdagangan                | Beban Persediaan | 1.728.000,00         | Alat pelatihan                                       |
| 8             | Sekretariat DPRD                 | Beban Persediaan | 6.000.000,00         | Botol minum                                          |
| 9             | Kecamatan Loksado                | Beban Persediaan | 1.630.000,00         | Keset dan pengharum ruangan                          |
| 10            | Kecamatan Daha Utara             | Beban Persediaan | 3.400.000,00         | Sarung kursi                                         |
| 11            | Badan Kesbangpol                 | Beban Persediaan | 800.000,00           | Komputer dan printer                                 |
| <b>Jumlah</b> |                                  |                  | <b>77.573.800,00</b> |                                                      |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

Pada Dinas Pendidikan, reklasifikasi aset tetap ke barang dan jasa (non modal) terdapat pada beberapa sekolah sebagai berikut:

**Tabel 5.3.90 Daftar Reklasifikasi ke Non Modal per Sekolah**

| No            | Sekolah              | Nilai (Rp)          | Keterangan  |
|---------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 1             | SMPN 6 Kandangan     | 420.000,00          | Bola lampu  |
| 2             | SMPN 2 Padang Batung | 2.000.000,00        | Kaca bening |
| <b>Jumlah</b> |                      | <b>2.420.000,00</b> |             |

4. Reklasifikasi ke kib lain dan ke aset lainnya (aset tidak berwujud) sebesar Rp3.980.213.740,00 guna menyesuaikan aset sesuai dengan KIB yang seharusnya dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.91 Rincian Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin**

| No            | SKPD                             | Ke KIB                      | Nilai (Rp)              | Keterangan                                    |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 1             | Dinas Pendidikan                 | KIB C (Gedung dan Bangunan) | 7.150.000,00            | Bangunan tempat tandon air SMP 7 Daha Selatan |
|               |                                  | KIB D (JIJ)                 | 24.462.000,00           | Lihat pada tabel 5.3.92                       |
|               |                                  | Aset Lainnya (ATB)          | 814.275.000,00          | Lihat pada table 5.3.93                       |
| 2             | RSUD Hasan Basry                 | KIB C (Gedung dan Bangunan) | 2.678.206.340,00        | Rehab bangunan RSUD                           |
|               |                                  | KIB D (JIJ)                 | 147.611.000,00          | Pemasangan paving block jalan area publik     |
|               |                                  | KIB F (KDP)                 | 198.790.000,00          | Perencanaan rehab bangunan RSUD               |
|               |                                  | Aset Lainnya (ATB)          | 16.794.400,00           | Lisensi windows                               |
| 3             | Dinas Kependudukan dan Catpil    | Aset Lainnya (ATB)          | 5.500.000,00            | Software antivirus                            |
| 4             | Dinas Kominfo                    | Aset Lainnya (ATB)          | 700.000,00              | Software windows                              |
| 5             | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | KIB E (Aset Tetap Lainnya)  | 9.375.000,00            | Kostum karakter                               |
| 6             | Kecamatan Kandangan              | KIB C (gedung dan Bangunan) | 40.250.000,00           | Bangunan konstruksi genset                    |
| 7             | BPKPD                            | Aset Lainnya (ATB)          | 10.000.000,00           | Aplikasi kertas kerja pengelolaan BMD         |
| 8             | BKPSDM                           | KIB D (JIJ)                 | 27.100.000,00           | Jaringan komputer                             |
| <b>Jumlah</b> |                                  |                             | <b>3.980.213.740,00</b> |                                               |

Pada Dinas Pendidikan reklasifikasi dari peralatan dan mesin ke kib lain terdapat pada beberapa sekolah dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.92 Daftar Reklasifikasi KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan) per Sekolah**

| No. | Sekolah           | Nilai (Rp)    | Keterangan                   |
|-----|-------------------|---------------|------------------------------|
| 1   | SDN Muning Dalam  | 8.500.000,00  | Pengadaan jembatan titian    |
| 2   | SDN Sungai Garuda | 542.000,00    | Pengadaan instalasi PDAM     |
| 3   | SDN Parigi 1      | 420.000,00    | Pengadaan instalasi indihome |
| 4   | SMPN 1 Daha Barat | 10.000.000,00 | Pengadaan jaringan internet  |
| 5   | SMPN 2 Loksado    | 5.000.000,00  | Pengadaan jaringan internet  |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| No.           | Sekolah | Nilai (Rp)           | Keterangan |
|---------------|---------|----------------------|------------|
| <b>Jumlah</b> |         | <b>24.462.000,00</b> |            |

**Tabel 5.3.93 Daftar Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud per Sekolah**

| No.           | Sekolah                | Nilai (Rp)            | Keterangan                         |
|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1             | SDN Kadangan Utara 2   | 116.325.000,00        | Pengadaan perangkat lunak/software |
| 2             | SDN Tambak Bitin 3     | 116.325.000,00        | Pengadaan perangkat lunak/software |
| 3             | SDN Bayanan 1          | 116.325.000,00        | Pengadaan perangkat lunak/software |
| 4             | SDN Sungai Raya Tengah | 116.325.000,00        | Pengadaan perangkat lunak/software |
| 5             | SMPN 3 Kandangan       | 116.325.000,00        | Pengadaan perangkat lunak/software |
| 6             | SMPN 1 Daha Utara      | 116.325.000,00        | Pengadaan perangkat lunak/software |
| 7             | SMPN 1 Sungai Raya     | 116.325.000,00        | Pengadaan perangkat lunak/software |
| <b>Jumlah</b> |                        | <b>814.275.000,00</b> |                                    |

5. Mutasi keluar ke SKPD lain sebesar Rp1.499.507.993,00 mempunyai nilai total yang sama dengan mutasi masuk dari SKPD lain dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.94 Rincian Mutasi Keluar Aset Peralatan dan Mesin antar SKPD**

| No            | SKPD Asal                     | SKPD Tujuan      | Nilai (Rp)              | Keterangan                             |
|---------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 1             | Dinas Kesehatan               | RSUD Hasan Basry | 4.246.495,00            | Lansia Kit                             |
| 2             | RSUD H. Hasan Basry           | Dinas Kesehatan  | 339.022.000,00          | Kendaraan roda 4 utk RS Daha Sejahtera |
| 3             | Dinas Kependudukan dan Catpil | BPKPD            | 10.960.000,00           | Kendaraan roda 2                       |
| 4             | Sekretariat Daerah            | Dinas Pendidikan | 359.996.100,00          | Thermo gun                             |
| 5             | Bagian Umum                   | Dinas Kominfo    | 132.000.000,00          | Kendaraan roda 4                       |
|               |                               | BPKPD            | 256.957.794,00          | Kendaraan roda 4                       |
|               |                               | Satpol PP        | 190.000.000,00          | Mobil pickup                           |
| 6             | BPKPD                         | BPBD             | 206.325.604,00          | Kendaraan roda 4 dan sepeda motor      |
| <b>Jumlah</b> |                               |                  | <b>1.499.507.993,00</b> |                                        |

6. Reklas ke aset lainnya aset rusak berat sebesar Rp1.523.907.005,00 merupakan aset yang sudah tidak dapat digunakan lagi untuk kegiatan operasional pada beberapa SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.95 Rincian Rekalsifikasi ke Aset Rusak Berat**

| No.           | SKPD                        | Reklas Ke                | Nilai (Rp)              | Keterangan             |
|---------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1             | RSUD H. Hasan Basry         | Aset Lainnya Rusak Berat | 1.338.907.005,00        | alat-alat kedokteran   |
| 2             | Dinas Perumahan Rakyat KPLH | Aset Lainnya Rusak Berat | 185.000.000,00          | Truk pengangkut sampah |
| <b>Jumlah</b> |                             |                          | <b>1.523.907.005,00</b> |                        |



### 5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh Gedung dan Bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah Perkantoran, Rumah Dinas, Bangunan Tempat Ibadah, Bangunan Menara, Taman, Monumen/Bangunan Bersejarah, Gudang, Gedung dan Museum.

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp1.184.329.541.409,32 dan Rp1.095.014.166.622,16. Terjadi penambahan pada aset gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp89.315.374.787,16 atau 8,16% dari total gedung dan bangunan Tahun 2020. Adapun Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3.96 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD**

| NO | SKPD                                       | 31 Desember 2021<br>(Rp) | 31 Desember 2020<br>(Rp) |
|----|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | Dinas Pendidikan                           | 265.539.471.542,59       | 258.851.226.587,59       |
| 2  | Dinas Kesehatan                            | 126.478.552.995,00       | 97.871.968.825,00        |
| 3  | RSUD Hasan Basry Kandungan                 | 195.752.805.263,00       | 188.521.134.333,00       |
| 4  | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang        | 46.169.777.360,00        | 42.524.240.182,00        |
| 5  | Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH           | 68.568.461.554,00        | 48.416.060.766,00        |
| 6  | Satuan Polisi Pamong Praja                 | 1.654.203.080,00         | 1.628.301.080,00         |
| 7  | Dinas Sosial                               | 10.078.282.916,16        | 9.602.399.910,00         |
| 8  | Dinas Ketahanan Pangan                     | 1.851.337.000,00         | 1.722.540.000,00         |
| 9  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil    | 554.044.000,00           | 529.052.000,00           |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Masy. Desa              | 385.000.000,00           | 385.000.000,00           |
| 11 | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA | 5.686.192.124,00         | 5.268.092.124,00         |
| 12 | Dinas Perhubungan                          | 8.176.078.302,00         | 7.769.909.302,00         |
| 13 | Dinas Komunikasi dan Informatika           | 1.560.079.868,00         | 1.560.079.868,00         |
| 14 | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKP       | 6.065.328.040,00         | 6.065.328.040,00         |
| 15 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP             | 3.740.253.862,00         | 1.258.016.800,00         |
| 16 | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata       | 108.155.040.273,31       | 106.380.629.773,31       |
| 17 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan           | 4.879.037.000,00         | 4.869.037.000,00         |
| 18 | Dinas Perikanan                            | 5.882.537.800,00         | 5.845.038.800,00         |
| 19 | Dinas Pertanian                            | 28.192.456.998,00        | 26.785.397.339,00        |
| 20 | Dinas Perdagangan                          | 163.779.929.058,00       | 156.563.884.858,00       |
| 21 | Sekretariat Daerah                         | 2.381.841.000,00         | 2.381.841.000,00         |
| 22 | Bagian Pemerintahan                        | 618.573.794,00           | 547.563.494,00           |
| 23 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan    | 37.600.000,00            | 37.600.000,00            |
| 24 | Bagian Umum                                | 34.551.433.334,34        | 33.182.829.034,34        |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| NO            | SKPD                                             | 31 Desember 2021<br>(Rp)    | 31 Desember 2020<br>(Rp)    |
|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 25            | Inspektorat Daerah                               | 1.878.441.964,00            | 1.736.814.864,00            |
| 26            | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 16.190.929.411,00           | 14.884.916.811,00           |
| 27            | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM           | 1.758.294.237,00            | 1.460.275.510,00            |
| 28            | Sekretariat DPRD                                 | 3.337.971.117,00            | 2.836.809.917,00            |
| 29            | Kecamatan Sungai Raya                            | 2.377.007.036,92            | 1.873.422.736,92            |
| 30            | Kecamatan Padang Batung                          | 5.474.584.702,00            | 4.558.841.702,00            |
| 31            | Kecamatan Telaga Langsat                         | 2.501.881.786,00            | 2.418.016.154,00            |
| 32            | Kecamatan Angkinang                              | 4.105.966.252,00            | 3.693.066.252,00            |
| 33            | Kecamatan Kandangan                              | 7.289.202.953,00            | 7.248.952.953,00            |
| 34            | Kelurahan Kandangan Kota                         | 981.641.984,00              | 981.641.984,00              |
| 35            | Kelurahan Kandangan Barat                        | 585.616.700,00              | 527.066.700,00              |
| 36            | Kelurahan Kandangan Utara                        | 1.392.253.959,00            | 948.297.439,00              |
| 37            | Kelurahan Jambu Hilir                            | 453.852.282,00              | 279.913.000,00              |
| 38            | Kecamatan Simpur                                 | 5.144.804.045,00            | 4.602.696.487,00            |
| 39            | Kecamatan Daha Selatan                           | 23.750.911.378,00           | 23.387.041.378,00           |
| 40            | Kecamatan Daha Utara                             | 4.874.221.843,00            | 4.856.721.843,00            |
| 41            | Kecamatan Kalumpang                              | 4.619.979.474,00            | 3.738.778.974,00            |
| 42            | Kecamatan Loksado                                | 2.187.371.804,00            | 2.187.371.804,00            |
| 43            | Kecamatan Daha Barat                             | 3.544.675.297,00            | 3.284.160.297,00            |
| 44            | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                | 1.141.616.020,00            | 942.188.700,00              |
| <b>Jumlah</b> |                                                  | <b>1.184.329.541.409,32</b> | <b>1.095.014.166.622,16</b> |

Adapun mutasi aset Gedung Bangunan selama Tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 5.3.97 Mutasi Gedung Bangunan Tahun 2021**

| Uraian                                                | Jumlah<br>(Rp)              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Saldo Awal Per 1 Januari 2021                         | 1.095.014.166.622,16        |
| Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2021  | 158.912.636.968,16          |
| Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2021 | (69.597.262.181,00)         |
| <b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2021</b>               | <b>1.184.329.541.409,32</b> |

**A. Penambahan Aset Gedung dan Bangunan**

Penambahan Aset Gedung dan Bangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2021 sebesar Rp158.912.636.968,16 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada LRA Tahun 2021 sebesar Rp108.565.226.735,16 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.98 Daftar Pengadaan Gedung dan Bangunan Tahun 2021**

| No | Nama SKPD                       | Nilai<br>(Rp)    |
|----|---------------------------------|------------------|
| 1  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 7.279.837.135,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| No            | Nama SKPD                            | Nilai (Rp)                |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 2             | Dinas Kesehatan                      | 14.552.458.150,00         |
| 3             | RSUD Hasan Basry Kandangan           | 3.391.836.803,00          |
| 4             | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  | 67.647.639.764,00         |
| 5             | Dinas Perumahan Rakyat KPLH          | 2.119.825.600,00          |
| 6             | Dinas Sosial                         | 638.820.170,16            |
| 7             | Dinas Ketahanan Pangan               | 128.797.000,00            |
| 8             | Dinas Pengendalian Penduduk, KBPPPA  | 416.150.000,00            |
| 9             | Dinas Perhubungan                    | 230.801.750,00            |
| 10            | Dinas Penanaman Modal dan PTSP       | 2.482.237.062,00          |
| 11            | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata | 1.255.198.202,00          |
| 12            | Dinas Perikanan                      | 37.499.000,00             |
| 13            | Dinas Pertanian                      | 319.402.717,00            |
| 14            | Dinas Perdagangan                    | 594.270.500,00            |
| 15            | Bagian Pemerintahan                  | 71.010.300,00             |
| 16            | Bagian Umum                          | 1.407.658.600,00          |
| 17            | BPKPD                                | 1.114.042.100,00          |
| 18            | BKPSDM                               | 405.967.900,00            |
| 19            | Sekretariat DPRD                     | 590.931.800,00            |
| 20            | Kecamatan Sungai Raya                | 488.613.300,00            |
| 21            | Kecamatan Padang Batung              | 375.550.000,00            |
| 22            | Kecamatan Telaga Langsat             | 83.865.632,00             |
| 23            | Kecamatan Angkinang                  | 412.900.000,00            |
| 24            | Kelurahan Kandangan Utara            | 270.315.372,00            |
| 25            | Kelurahan Jambu Hilir                | 313.592.000,00            |
| 26            | Kecamatan Simpur                     | 518.278.058,00            |
| 27            | Kecamatan Daha Selatan               | 353.200.000,00            |
| 28            | Kecamatan Daha Utara                 | 209.857.000,00            |
| 29            | Kecamatan Kalumpang                  | 340.391.000,00            |
| 30            | Kecamatan Daha Barat                 | 314.852.500,00            |
| 31            | Badan Kesbangpol                     | 199.427.320,00            |
| <b>Jumlah</b> |                                      | <b>108.565.226.735,16</b> |

Rincian daftar pengadaan aset tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2021 per jenis barang pada **Lampiran 6**.

- Hibah sebesar Rp39.975.979.628,00 merupakan penambahan aset tetap gedung dan bangunan yang berasal dari hibah Pemerintah yang terdapat pada beberapa SKPD sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

**Tabel 5.3.99 Daftar SKPD Penerima Hibah dari Pemerintah**

| No           | SKPD                        | Nilai (Rp)               | Keterangan                                                                                 |
|--------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | Dinas Kesehatan             | 15.146.911.120,00        | Dari Kemenkes BA NO. KN.02.07/I.3/8617/2020 berupa bangunan RS Daha Sejahtera              |
| 2            | Dinas Perumahan Rakyat KPLH | 18.981.205.508,00        | Dari KemenPUPR dengan BA No.473/PKS/DR/2021 berupa bangunan rumah susun                    |
| 3            | Dinas Perdagangan           | 5.847.863.000,00         | Dari Kemenetrian Perdagangan No.BA 187/M-DAG/BAST/04/2021 berupa bangunan gedung pertokoan |
| <b>Nilai</b> |                             | <b>39.975.979.628,00</b> |                                                                                            |

3. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp5.123.748.307,00 yaitu reklas dari kib lain guna menyesuaikan aset sesuai dengan kib yang seharusnya dan adanya paket pekerjaan gedung bangunan yang telah selesai dikerjakan pada Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.100 Rincian Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan**

| No            | SKPD                                 | Dari KIB                    | Nilai (Rp)              | Keterangan                                                      |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1             | Dinas Pendidikan                     | KIB B (Peralatan dan Mesin) | 7.150.000,00            | Bangunan tempat tandon air SMP 7 Daha Selatan                   |
|               |                                      | KIB F (KDP)                 | 154.505.000,00          | Lihat pada tabel 5.3.101                                        |
| 2             | Dinas Kesehatan                      | KIB F (KDP)                 | 302.700.000,00          | Lihat pada table 5.3.101                                        |
| 3             | RSUD Hasan Basry                     | KIB B (Peralatan dan Mesin) | 2.678.206.340,00        | Rehab bangunan RSUD                                             |
|               |                                      | KIB D (JIJ)                 | 638.519.787,00          | Bangunan konstruksi genset                                      |
| 4             | Dinas Perumahan Rakyat KPLH          | KIB F (KDP)                 | 42.862.880,00           | Perencanaan rehab pintu gerbang, tempat parkir dan ruang kantor |
| 5             | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata | KIB D (JIJ)                 | 242.062.000,00          | Rehab sarana kawasan dermaga bamboo rafting                     |
| 6             | Bagian Umum                          | KIB F (KDP)                 | 100.847.700,00          | Rehab gedung kantor, tempat parkir, dan pagar lapangan          |
| 7             | Kecamatan Sungai Raya                | KIB F (KDP)                 | 14.971.000,00           | Rehab gedung MTQ                                                |
| 8             | Kecamatan Kandungan                  | KIB B (Peralatan dan Mesin) | 40.250.000,00           | Bangunan konstruksi genset                                      |
| 9             | Kecamatan Daha Selatan               | KIB F KDP)                  | 10.670.000,00           | Jasa perencanaan pembuatan paving block                         |
| 10            | BPKPD                                | KIB F (KDP)                 | 891.003.600,00          | Lihat pada table 5.3.101                                        |
| <b>Jumlah</b> |                                      |                             | <b>5.123.748.307,00</b> |                                                                 |

Reklasifikasi dari aset tetap KDP yang menjadi aset tetap gedung dan bangunan berupa pekerjaan konsultan perencanaan yang telah selesai pengerjaannya baik yang membentuk bangunan baru atau mengkapitalisasi aset yang sudah ada dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.101 Daftar Penambahan Aset Tetap Gedung Bangunan dari KDP**

| No | SKPD             | Kegiatan Perencanaan                  | Sub Nilai (Rp) | Nilai (Rp)            |
|----|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 1  | Dinas Pendidikan | Rehab ruang kelas SDN Jambu Hulu Muka | 14.805.000,00  | <b>154.505.000,00</b> |
|    |                  | Pembangunan SDN Tamiyang              | 97.250.000,00  |                       |





PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| No | SKPD            | Kegiatan Perencanaan                                                 | Sub Nilai (Rp) | Nilai (Rp)            |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
|    |                 | Rehab sedang/berat ruang kelas SDN Anjiran                           | 35.650.000,00  |                       |
|    |                 | Rehab sedang/berat SMPN 2 Loksado                                    | 6.800.000,00   |                       |
|    |                 |                                                                      |                |                       |
| 2  | Dinas Kesehatan | Renovasi Puskesmas Angkinang                                         | 69.750.000,00  | <b>302.700.000,00</b> |
|    |                 | Pembangunan Poskesdes Gambah Dalam Barrat dan Baru                   | 19.849.000,00  |                       |
|    |                 | Pembangunan Pustu Muning Baru                                        | 5.780.000,00   |                       |
|    |                 | Jasa konsultan pembangunan Puskesmas Padang Batung                   | 75.175.000,00  |                       |
|    |                 | Rehab Puskesmas Jambu Hilir                                          | 24.810.000,00  |                       |
|    |                 | Renovasi Puskesmas Negara                                            | 24.882.000,00  |                       |
|    |                 | Rehab Poskesdes Gambah Dalam, Bago Tanggul, dan Ida Manggala         | 23.287.000,00  |                       |
|    |                 | Pembangunan Poskesdes Bajayau Lama                                   | 15.100.000,00  |                       |
|    |                 | Jasa konsultan pembangunan Pustu Baruh Jaya, Asam dan Amparaya       | 10.700.000,00  |                       |
|    |                 | Jasa konsultan rehab rumdin dokter dan paramedis Puskesmas Kandangan | 9.823.000,00   |                       |
|    |                 | Jasa konsultan rehab Pustu Asam                                      | 3.909.000,00   |                       |
|    |                 | Jasa konsultan pagar dan parkir Puskesmas Wasah                      | 9.820.000,00   |                       |
|    |                 | Jasa konsultan parkir ambulance Puskesmas Sungai Pinang              | 9.815.000,00   |                       |
|    |                 |                                                                      |                |                       |
| 4  | BPKPD           | Rehab rumah dinas Jl. Batuah Kandangan                               | 11.845.900,00  | <b>891.003.600,00</b> |
|    |                 | Rehab rumah dinas Jl. Kamboja Kandangan                              | 11.819.500,00  |                       |
|    |                 | Jasa perencanaan konsultan pembangunan gedung kantor                 | 44.595.000,00  |                       |
|    |                 | Pembangunan gedung kantor BPKPD                                      | 583.543.162,00 |                       |
|    |                 | Jasa konsultan pengawasan pembangunan gedung kantor                  | 23.113.200,00  |                       |
|    |                 | Rehab gedung kantor                                                  | 216.086.838,00 |                       |

4. Reklasifikasi dari non modal sebesar Rp3.227.566.698,00 pada beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.102 Daftar Reklasifikasi dari Non Modal**

| No | SKPD                       | Reklas dari        | Nilai (Rp)     | Keterangan                                                                              |
|----|----------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dinas Kesehatan            | Beban Pemeliharaan | 104.950.000,00 | Renovasi dan pemasangan kanopi rumah dinas dan puskesmas                                |
| 2  | Dinas Peumahan Rakyat KPLH | Beban Jasa         | 55.398.000,00  | Jasa pengawasan pembnagunan tempat parkir, rehab lantai, teralis dan gedung kantor, dan |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| No | SKPD                             | Reklas dari        | Nilai (Rp)     | Keterangan                                                                                                                   |
|----|----------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                  |                    |                | pembangunan rumah kompos                                                                                                     |
|    |                                  |                    | 30.585.500,00  | Jasa perencanaan                                                                                                             |
|    |                                  | Beban Pemeliharaan | 198.665.800,00 | Pemeliharaan RTH, bangunan rumah kompos dan TPS3R, perencanaan perbaikan lantai, dan pemasangan teralis depo pasar Kandangan |
|    |                                  | Beban Pegawai      | 1.600.000,00   | Honor pengadaan rehab gedung kantor                                                                                          |
| 3  | Dinas Sosial                     | Beban Pegawai      | 800.000,00     | honor rehab tembok makam pahlawan                                                                                            |
|    |                                  | Beban Pemeliharaan | 26.130.015,00  | Pemasangan instalasi listrik                                                                                                 |
| 4  | Satuan Polisi Pamong Praja       | Beban Pemeliharaan | 25.902.000,00  | Pemeliharaan gedung kantor                                                                                                   |
| 5  | Dinas Ketahanan Pangan           | Beban Hibah        | 73.998.000,00  | Rehabilitasi lantai jemur lumbung pangan di Muning Tengah                                                                    |
| 6  | Dinas PPKBPPPA                   | Beban Pegawai      | 1.950.000,00   | Honor rehab gedung kantor                                                                                                    |
| 7  | Dinas Kependudukan dan Catpil    | Beban Pemeliharaan | 24.992.000,00  | Rehab gedung kantor                                                                                                          |
| 8  | Dinas Perhubungan                | Beban Pemeliharaan | 175.367.250,00 | (pemeliharaan gedung kantor dan konsultan pengawasan pembangunan musholla terminal)                                          |
| 9  | Dinas Porapar                    | Beban Pegawai      | 3.200.000,00   | Honorarium rehab pagar dan bangunan                                                                                          |
|    |                                  |                    | 4.900.000,00   | honorarium pemasangan paving block, pembuatan atap kolam air panas, rehab sarana objek wisata                                |
|    |                                  |                    | 800.000,00     | Honorarium sarana kawasan dermaga bamboo rafting                                                                             |
|    |                                  | Beban Jasa         | 47.085.000,00  | Jasa konsultasi perencanaan pengecatan kolam renang dan appraisal                                                            |
|    |                                  |                    | 5.075.000,00   | Jasa pengawasan pengecatan kolam renang                                                                                      |
|    |                                  |                    | 99.750.000,00  | Jasa perencanaan sarana ruang kreatif                                                                                        |
|    |                                  | Beban Pemeliharaan | 119.650.000,00 | Pengecatan kolam renang                                                                                                      |
|    |                                  |                    | 145.179.898,00 | Rehab pagar belakang cottage                                                                                                 |
| 10 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Beban Pemeliharaan | 10.000.000,00  | Rehab pintu kantor                                                                                                           |
| 11 | Dinas Pertanian                  | Beban Jasa         | 150.481.442,00 | Jasa konsultan pengawasan pembangunan gedung kantor                                                                          |
|    |                                  | Beban Pemeliharaan | 937.175.500,00 | Pembangunan gedung kantor                                                                                                    |
| 12 | Dinas Perdagangan                | Beban Pegawai      | 3.300.000,00   | Honor pengadaan rehab gedung pertokoan                                                                                       |
|    |                                  | Beban Pemeliharaan | 453.820.600,00 | Rehab gedung pertokoan                                                                                                       |
| 13 | Bagian Umum                      | Beban Pemeliharaan | 43.842.000,00  | Pembuatan kanopi                                                                                                             |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| No            | SKPD                      | Reklas dari        | Nilai (Rp)              | Keterangan                                    |
|---------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 14            | Kecamatan Simpur          | Beban Pegawai      | 22.929.500,00           | Honor konsultan rehab gedung kantor           |
|               |                           | Beban Pemeliharaan | 900.000,00              | Honor pemasangan paving block                 |
| 15            | Kelurahan Kandangan Barat | Beban Pemeliharaan | 58.550.000,00           | Rehab gedung kantor                           |
| 16            | Kelurahan Kandangan Utara | Beban Pemeliharaan | 194.956.793,00          | Rehab gedung bulu tangkis                     |
|               |                           | Beban Jasa         | 6.420.700,00            | Jasa konsultan rehab gedung PKK               |
| 17            | Kelurahan Jambu Hilir     | Beban Pegawai      | 1.600.000,00            | Honor pengadaan paving block, pagar dan taman |
| 18            | Kecamatan Kalumpang       | Beban Pegawai      | 500.000,00              | Honor PPK                                     |
| 19            | Kecamatan Daha Barat      | Beban Pemeliharaan | 20.000.000,00           | Rehab gedung kantor                           |
| 20            | Kecamatan Daha Utara      | Beban Persediaan   | 17.500.000,00           | Penambahan daya listrik                       |
| 21            | Inspektorat Daerah        | Beban Pegawai      | 2.400.000,00            | Honor rehab gedung kantor                     |
|               |                           | Beban Jasa         | 17.402.000,00           | Rehab gedung kantor                           |
|               |                           | Beban Pemeliharaan | 121.825.000,00          | Rehab gedung kantor                           |
| 22            | BKPSDM                    | Beban Jasa         | 17.984.600,00           | Jasa kons. Perencanaan rehab gedung 2         |
| <b>Jumlah</b> |                           |                    | <b>3.227.566.698,00</b> |                                               |

5. Mutasi masuk dari SKPD lain sebesar Rp2.020.115.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.103 Daftar Mutasi Masuk Antar SKPD**

| No            | SKPD Tujuan             | SKPD Asal                   | Nilai (Rp)              | Keterangan                        |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1             | RSUD Hasan Basry        | Dinas Kesehatan             | 368.114.000,00          | Rumah dinas Puskesmas Jambu Hilir |
|               |                         | BPKPD                       | 154.994.000,00          | Rumah dinas                       |
| 2             | Dinas Perdagangan       | BPKPD                       | 416.505.100,00          | Rumah dinas                       |
| 3             | Kecamatan Padang Batung | Dinas Perumahan Rakyat KPLH | 540.193.000,00          | Bangunan RTH                      |
| 4             | Kecamatan Kalumpang     | Dinas Perumahan Rakyat KPLH | 540.309.500,00          | Bangunan RTH                      |
| <b>Jumlah</b> |                         |                             | <b>2.020.115.600,00</b> |                                   |

## B. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2021 sebesar Rp69.597.262.181,00 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Reklasifikasi ke KIB lain sebesar Rp66.988.358.981,00 guna menyesuaikan aset dengan KIB yang seharusnya dan adanya pekerjaan aset gedung bangunan yang masih berupa perencanaan kegiatan sebesar dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

**Tabel 5.3.104 Rincian Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan**

| No            | SKPD                        | Ke KIB                      | Nilai (Rp)               | Keterangan                                                                                         |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Dinas Pendidikan            | KIB A (Tanah)               | 100.374.000,00           | Pemasangan patok tanda batas tanah SMPN 2 Kandangan                                                |
|               |                             | KIB D (JIJ)                 | 174.921.380,00           | Pembangunan jalan/halaman SMPN 1 Telaga Langsat                                                    |
|               |                             | KIB F (KDP)                 | 447.340.300,00           | Lihat pada tabel 5.3.105                                                                           |
| 2             | Dinas Kesehatan             | KIB A (Tanah)               | 424.277.000,00           | Perbaikan halaman bangsal karantina                                                                |
|               |                             | KIB F (KDP)                 | 352.600.000,00           | Lihat Tabel 5.3.105                                                                                |
| 3             | Dinas PUTR                  | KIB F (KDP)                 | 64.002.102.586,00        | Lihat pada tabel 5.3.105                                                                           |
| 4             | Dinas Perumahan Rakyat KPLH | KIB A (Tanah)               | 197.240.000,00           | Pengurangan lahan TPA                                                                              |
| 5             | Dinas Sosial                | KIB A (Tanah)               | 189.867.179,00           | Pemasangan paving block                                                                            |
| 6             | Dinas Porapar               | KIB A (Tanah)               | 7.954.600,00             | Pemasangan paving block                                                                            |
|               |                             | KIB F (KDP)                 | 140.535.000,00           | Lihat pada tabel 5.3.105                                                                           |
| 7             | Dinas Perdagangan           | KIB F (KDP)                 | 99.715.000,00            | Perencanaan grand desain pasar terpadu                                                             |
| 8             | Bagian Umum                 | KIB F (KDP)                 | 183.744.000,00           | Perencanaan rehab selasar setda, dapur pendopo bupati, rumah pintar dan paving block lapangan tugu |
| 9             | Sekretariat DPRD            | KIB F (KDP)                 | 89.770.600,00            | Konsultan perencanaan pembangunan rumah dinas ketua DPRD                                           |
| 10            | Kelurahan Kandangan Utara   | KIB A (Tanah)               | 21.856.345,00            | Pemasangan paving block                                                                            |
|               |                             | KIB B (Peralatan dan Mesin) | 4.680.000,00             | Meja resepsionis                                                                                   |
| 11            | Kelurahan Jambu Hilir       | KIB A (Tanah)               | 141.252.718,00           | Pemasangan paving block                                                                            |
| 12            | Kecamatan Daha Utara        | KIB A (Tanah)               | 209.857.000,00           | Pemasangan paving block                                                                            |
| 13            | Kecamatan Daha Barat        | KIB A (Tanah)               | 74.337.500,00            | Siring/urugan                                                                                      |
| 14            | BKPSDM                      | KIB A (Tanah)               | 125.933.773,00           | Paving block halaman kantor                                                                        |
| <b>Jumlah</b> |                             |                             | <b>66.988.358.981,00</b> |                                                                                                    |

Berikut disajikan rincian reklasifikasi dari aset tetap Gedung dan Bangunan yang menjadi aset tetap KDP dikarenakan pekerjaan yang masih berupa kegiatan perencanaan maupun yang belum selesai pada beberapa SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.105 Daftar Reklasifikasi Gedung dan Bangunan yang Menjadi KDP**

| No | SKPD             | Kegiatan Perencanaan                                                                            | Sub Nilai (Rp) | Nilai (Rp)            |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 1  | Dinas Pendidikan | Rehab ruang kelas SD Kec. Kandangan dan Padang Batung                                           | 84.480.000,00  | <b>447.340.300,00</b> |
|    |                  | Pembangunan SD Kec. Padang Batung, Angkinang, Telaga Langsat, Kalumpang, Simpur dan Sungai raya | 86.622.800,00  |                       |
|    |                  | Rehabilitasi ruang kelas SD Kec. Sungai Raya                                                    | 44.550.000,00  |                       |
|    |                  | Pembangunan SD Kec. Daha Utara dan Daha Selatan                                                 | 32.934.000,00  |                       |
|    |                  | Rehab ruang guru/kepala sekolah/TU                                                              | 53.471.000,00  |                       |
|    |                  | Rehab SD                                                                                        | 29.249.000,00  |                       |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| No | SKPD                 | Kegiatan Perencanaan                                                    | Sub Nilai (Rp)           | Nilai (Rp)               |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    |                      | Rehab SMP                                                               | 38.445.000,00            |                          |
|    |                      | Pembangunan sekolah                                                     | 33.698.500,00            |                          |
|    |                      | Pembangunan ruang perpustakaan SMP 2 Kandangan                          | 43.890.000,00            |                          |
|    |                      |                                                                         |                          |                          |
| 2  | Dinas Kesehatan      | Rehab Pustu                                                             | 39.700.000,00            | <b>352.600.000,00</b>    |
|    |                      | Renovasi Puskesmas Negara                                               | 79.500.000,00            |                          |
|    |                      | Renovasi Puskesmas Sungai Raya                                          | 79.700.000,00            |                          |
|    |                      | Rehab Poskesdes                                                         | 59.500.000,00            |                          |
|    |                      | Pembangunan Poskesdes                                                   | 59.700.000,00            |                          |
|    |                      | Penyusunan dokumen lingkungan hidup Puskesmas Pasungkan                 | 34.500.000,00            |                          |
|    |                      |                                                                         |                          |                          |
| 3  | Dinas Pekerjaan Umum | Pembangunan Gedung Serbaguna 2 Desember                                 | 17.634.806.173,00        | <b>64.002.102.586,00</b> |
|    |                      | Jasa konsultan pengawasan pembangunan Gedung Serbaguna 2 Desember       | 195.081.370,00           |                          |
|    |                      | Honorarium tim teknis pendampingan hukum                                | 26.500.000,00            |                          |
|    |                      | Honorarium PPK dan pembantu PPK                                         | 4.850.000,00             |                          |
|    |                      | Nilai                                                                   | <b>17.861.237.543,00</b> |                          |
|    |                      | Jasa konsultasi perencanaan lapangan tembak indoor                      | 84.900.000,00            |                          |
|    |                      | Honorarium PPK dan PPBJ                                                 | 900.000,00               |                          |
|    |                      | Nilai                                                                   | <b>85.800.000,00</b>     |                          |
|    |                      | Jasa konsultasi perencanaan lapangan semi indoor takraw                 | 74.635.000,00            |                          |
|    |                      | Honorarium PPK dan PPBJ                                                 | 900.000,00               |                          |
|    |                      | Nilai                                                                   | <b>75.535.000,00</b>     |                          |
|    |                      | Rehabilitasi gedung badminton tipe c dan stadion Dr.H.M. Syafii         | 97.300.000,00            |                          |
|    |                      | Honorarium PPK dan PPBJ                                                 | 1.150.000,00             |                          |
|    |                      | Nilai                                                                   | <b>98.450.000,00</b>     |                          |
|    |                      | Jasa konsultasi reviu desain pembangunan lapangan voli 2 Desember       | 47.300.000,00            |                          |
|    |                      | Honorarium PPK dan PPBJ                                                 | 900.000,00               |                          |
|    |                      | Nilai                                                                   | <b>48.200.000,00</b>     |                          |
|    |                      | Pembangunan mesjid di kawasan Islamic Center                            | 45.102.189.085,00        |                          |
|    |                      | Jasa konsultasi pengawasan pembangunan mesjid di kawasan Islamic Center | 596.281.958,00           |                          |
|    |                      | Honorarium tim teknis pendampingan hukum                                | 26.500.000,00            |                          |
|    |                      | Honorarium PPK dan PPBJ                                                 | 9.750.000,00             |                          |
|    |                      | Nilai                                                                   | <b>45.734.721.043,00</b> |                          |
|    |                      | Jasa konsultasi perencanaan RTH kawasan Islamic Center                  | 97.009.000,00            |                          |
|    |                      | Honorarium PPK dan Pembantu PPK                                         | 1.150.000,00             |                          |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| No | SKPD                                 | Kegiatan Perencanaan                                | Sub Nilai (Rp) | Nilai (Rp)     |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|
|    |                                      | Nilai                                               | 98.159.000,00  |                |
|    |                                      |                                                     |                |                |
| 4  | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata | Jasa konsultan pembangunan sarana ruang kreatif     | 99.750.000,00  | 140.535.000,00 |
|    |                                      | Honorarium pembangunan sarana ruang kreatif         | 900.000,00     |                |
|    |                                      | Jasa konsultan apraisal penilaian bangunan olahraga | 39.885.000,00  |                |

2. Reklasifikasi ke non modal sebesar Rp233.343.500,00 pada beberapa SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.106 Rincian Reklasifikasi ke Non Modal**

| No     | SKPD                      | Reklas Ke     | Nilai (Rp)     | Keterangan                                                                                             |
|--------|---------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Dinas Pendidikan          | Beban Jasa    | 30.611.500,00  | Jasa penilaian lahan, pengurusan dan notaris untuk persertifikatan lahan perpustakaan SMPN 2 Kandangan |
| 2      | Kelurahan Kandangan Utara | Beban Pegawai | 1.200.000,00   | honor pekerjaan drainase utk masy RT.7                                                                 |
| 3      | Dinas Ketahanan Pangan    | Beban Hibah   | 73.998.000,00  | pembangunan lumbung pangan masyarakat dan lantai jemur di Murung Raya                                  |
| 4      | BPKPD                     | Beban Pegawai | 1.100.000,00   | honor pengadaan patok tanah                                                                            |
|        |                           | Persediaan    | 126.434.000,00 | pengadaan patok tanah                                                                                  |
| Jumlah |                           |               | 233.343.500,00 |                                                                                                        |

3. Mutasi Keluar antar SKPD sebesar Rp2.020.115.600,00 karena adanya aset gedung bangunan yang berpindah dari satu SKPD ke SKPD lain/terjadi perubahan pengguna. Mempunyai nilai yang sama dengan mutasi masuk antar SKPD dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel. 5.3.107 Daftar Mutasi Keluar Antar SKPD**

| No     | SKPD Asal                   | SKPD Tujuan             | Nilai (Rp)       | Keterangan                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 1      | Dinas Kesehatan             | RSUD Hasan Basry        | 368.114.000,00   | Rumah dinas Puskesmas Jambu Hilir |
| 2      | Dinas Perumahan Rakyat KPLH | Kecamatan Padang Batung | 540.193.000,00   | Bangunan RTH                      |
|        |                             | Kecamatan Kalumpang     | 540.309.500,00   | Bangunan RTH                      |
| 3      | BPKPD                       | Dinas Perdagangan       | 416.505.100,00   | Rumah dinas                       |
|        |                             | RSUD H. Hasan Basry     | 154.994.000,00   | Rumah dinas                       |
| Jumlah |                             |                         | 2.020.115.600,00 |                                   |

4. Penghapusan sebesar Rp355.444.100,00 yaitu penghapusan aset tetap gedung dan bangunan karena rusak berat pada Dinas Kesehatan berupa bangunan Puskesmas Pembantu Bangkau dan Muning Baru berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan No.31 Tahun 2021 pada Lampiran II.



#### 5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang bangunan oleh Pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah dalam kondisi siap pakai. Jalan, Irigasi dan Jaringan selain digunakan dalam kegiatan Pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik dan jaringan telepon.

Saldo aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp1.816.821.269.231,45 dan Rp1.756.049.479.588,45. Terjadi penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan untuk Tahun 2021 sebesar Rp60.771.789.643,00 atau 3,46% dari total aset jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2020 dengan rincian aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.108 Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD**

| NO | SKPD                                             | 31 Desember 2021<br>(Rp) | 31 Desember 2020<br>(Rp) |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | Dinas Pendidikan                                 | 943.422.321,50           | 744.038.941,50           |
| 2  | Dinas Kesehatan                                  | 4.984.514.179,00         | 4.393.014.179,00         |
| 3  | RSUD Hasan Basry Kandangan                       | 29.368.456.765,00        | 29.220.845.765,00        |
| 4  | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang              | 1.633.599.332.419,60     | 1.584.657.733.789,60     |
| 5  | Dinas Perumahan Rakyat KPLH                      | 112.352.482.209,00       | 102.263.283.004,00       |
| 6  | Dinas Sosial                                     | 100.772.880,00           | 100.772.880,00           |
| 7  | Dinas Ketahanan Pangan                           | 3.592.288,00             | 3.592.288,00             |
| 8  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil          | 30.621.000,00            | 30.621.000,00            |
| 9  | Dinas Pengend.Penduduk KB, PPA                   | 46.842.200,00            | 46.842.200,00            |
| 10 | Dinas Perhubungan                                | 4.300.802.590,00         | 4.300.802.590,00         |
| 11 | Dinas Komunikasi dan Informatika                 | 134.870.000,00           | 134.870.000,00           |
| 12 | Dinas Naker Kop dan UKP                          | 119.300.000,00           | 119.300.000,00           |
| 13 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                   | 41.823.633,00            | 41.823.633,00            |
| 14 | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata             | 1.091.672.803,00         | 331.270.375,00           |
| 15 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                 | 81.238.450,00            | 81.238.450,00            |
| 16 | Dinas Perikanan                                  | 3.132.247.000,00         | 3.132.247.000,00         |
| 17 | Dinas Pertanian                                  | 17.177.943.359,00        | 17.177.943.359,00        |
| 18 | Dinas Perdagangan                                | 735.078.000,00           | 735.078.000,00           |
| 19 | Bagian Umum                                      | 1.054.500.900,00         | 1.054.500.900,00         |
| 20 | Inspektorat Daerah                               | 136.433.356,00           | 136.433.356,00           |
| 21 | BAPPELITBANGDA                                   | 64.950.970,00            | 64.950.970,00            |
| 22 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 318.690.400,00           | 318.690.400,00           |
| 23 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya   | 27.100.000,00            | 0,00                     |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| NO            | SKPD                              | 31 Desember 2021<br>(Rp)    | 31 Desember 2020<br>(Rp)    |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 24            | Sekretariat DPRD                  | 90.940.450,00               | 90.940.450,00               |
| 25            | Kecamatan Sungai Raya             | 18.500.000,00               | 18.500.000,00               |
| 26            | Kecamatan Padang Batung           | 40.756.400,00               | 40.756.400,00               |
| 27            | Kecamatan Telaga Langsat          | 8.464.143,00                | 8.464.143,00                |
| 28            | Kecamatan Kandangan               | 63.894.065,00               | 63.894.065,00               |
| 29            | Kelurahan Kandangan Barat         | 29.791.000,00               | 19.796.000,00               |
| 30            | Kelurahan Kandangan Utara         | 3.013.650,00                | 3.013.650,00                |
| 31            | Kelurahan Jambu Hilir             | 7.350.000,00                | 7.350.000,00                |
| 32            | Kecamatan Simpur                  | 138.317.324,00              | 138.317.324,00              |
| 33            | Kecamatan Daha Selatan            | 10.990.000,00               | 10.990.000,00               |
| 34            | Kecamatan Kalumpang               | 2.000.000,00                | 2.000.000,00                |
| 35            | Kecamatan Loksado                 | 2.400.000,00                | 2.400.000,00                |
| 36            | Kecamatan Daha Barat              | 27.850.600,00               | 22.850.600,00               |
| 37            | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 6.530.313.876,35            | 6.530.313.876,35            |
| <b>Jumlah</b> |                                   | <b>1.816.821.269.231,45</b> | <b>1.756.049.479.588,45</b> |

Adapun mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 5.3.109 Mutasi Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2021**

| Uraian                                  | Jumlah<br>(Rp)              |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Saldo Awal Per 1 Januari 2021           | 1.756.049.479.588,45        |
| Penambahan Aset Tetap JIJ Tahun 2021    | 94.201.383.824,00           |
| Pengurangan Aset Tetap JIJ Tahun 2021   | (33.429.594.181,00)         |
| <b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2021</b> | <b>1.816.821.269.231,45</b> |

**A. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Penambahan aset tetap pada Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp94.201.383.824,00 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Modal pada LRA Tahun 2021 sebesar Rp93.351.134.994,00 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.110 Daftar Pengadaan Jalan Irigasi dan Jaringan**

| No            | Nama SKPD                             | Nilai<br>(Rp)            |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1             | Dinas Kesehatan                       | 591.500.000,00           |
| 2             | RSUD Hasan Basry                      | 3.158.160.500,00         |
| 3             | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang   | 75.150.661.391,00        |
| 4             | Dinas Perumahan Rakyat KPLH           | 13.395.598.675,00        |
| 5             | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 955.214.428,00           |
| 6             | Dinas Perikanan                       | 100.000.000,00           |
| <b>Jumlah</b> |                                       | <b>93.351.134.994,00</b> |





Rincian mengenai daftar pengadaan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per jenis barang pada **Lampiran 7**.

- Reklasifikasi dari non modal sebesar Rp171.181.700,00 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.111 Rincian Reklasifikasi dari Non Modal**

| No            | SKPD                                 | Reklas dari        | Nilai (Rp)            | Keterangan                                               |
|---------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| 1             | Dinas Perumahan Rakyat KPLH          | Beban Pemeliharaan | 139.836.700,00        | Pemasangan paving block akses jalan TPS3R dan TPA Malutu |
| 2             | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata | Beban Pegawai      | 800.000,00            | Honorarium pembangunan jalan kawasan bukit Langara       |
|               |                                      | Beban Pemeliharaan | 15.550.000,00         | Perbaikan sumur bor stadion 2 Desember                   |
| 3             | Kelurahan Kandungan Barat            | Beban Pemeliharaan | 9.995.000,00          | Jaringan listrik                                         |
| 4             | Kecamatan Daha Barat                 | Beban Pemeliharaan | 5.000.000,00          | Instalasi bak sampah                                     |
| <b>Jumlah</b> |                                      |                    | <b>171.181.700,00</b> |                                                          |

- Reklasifikasi dari KIB lain sebesar Rp679.067.130,00 guna menyesuaikan aset sesuai dengan KIB yang seharusnya dan adanya paket pekerjaan jalan, irigasi, dan jaringan yang telah selesai dikerjakan pada Tahun 2021 sebesar dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.112 Daftar Reklasifikasi ke KIB JIJ**

| No            | Nama SKPD                            | Dari KIB                    | Nilai (Rp)            | Keterangan                                                                 |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Dinas Pendidikan                     | KIB B (Peralatan dan Mesin) | 24.462.000,00         | Lihat pada tabel 5.3.113                                                   |
|               |                                      | KIB C (Gedung dan Bangunan) | 174.921.380,00        | Pembangunan jalan/halaman SMPN 1 Telaga Langsat                            |
| 2             | RSUD H. Hasan Basry                  | KIB B (Peralatan dan Mesin) | 147.611.000,00        | Pemasangan paving block jalan area publik                                  |
| 3             | Dinas Pekerjaan Umum TR              | KIB F (KDP)                 | 62.980.180,00         | Bangunan pengaman sungai perkuatan tebing                                  |
| 4             | Dinas Perumahan Rakyat KPLH          | KIB F (KDP)                 | 211.092.570,00        | Lihat pada tabel 5.3.114                                                   |
| 5             | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata | KIB F (KDP)                 | 30.900.000,00         | Pembangunan menara air dan kolam penampungan objek wisata air panas Tanuhi |
| 6             | BKPSDM                               | KIB B (Peralatan dan Mesin) | 27.100.000,00         | Jaringan komputer                                                          |
| <b>Jumlah</b> |                                      |                             | <b>679.067.130,00</b> |                                                                            |

Berikut disajikan daftar rincian reklasifikasi dari KIB B (Peralatan dan Mesin) pada beberapa sekolah sebagai berikut:

**Tabel 5.3.113 Daftar Reklasifikasi dari KIB B (Peralatan dan Mesin)**

| No. | Sekolah           | Nilai (Rp)    | Keterangan                   |
|-----|-------------------|---------------|------------------------------|
| 1   | SDN Muning Dalam  | 8.500.000,00  | Pengadaan jembatan titian    |
| 2   | SDN Sungai Garuda | 542.000,00    | Pengadaan instalasi PDAM     |
| 3   | SDN Parigi 1      | 420.000,00    | Pengadaan instalasi indihome |
| 4   | SMPN 1 Daha Barat | 10.000.000,00 | Pengadaan jaringan internet  |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| No.           | Sekolah        | Nilai (Rp)           | Keterangan                  |
|---------------|----------------|----------------------|-----------------------------|
| 5             | SMPN 2 Loksado | 5.000.000,00         | Pengadaan jaringan internet |
| <b>Jumlah</b> |                | <b>24.462.000,00</b> |                             |

Berikut disajikan daftar rincian reklasifikasi dari KIB F (KDP) berupa pekerjaan yang telah selesai tahun 2021 pada beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.114 Daftar Reklasifikasi dari KIB F (KDP) ke KIB D (JIJ)**

| No | SKPD                        | Kegiatan Perencanaan                    | Nilai (Rp)    | Jumlah (Rp)           |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1  | Dinas Perumahan Rakyat KPLH | Penataan PSU Perumahan Griya Sandaga    | 93.775.770,00 | <b>211.092.570,00</b> |
|    |                             | Penataan PSU Perumahan Al-Fairuz Madina | 39.173.800,00 |                       |
|    |                             | Penataan PSU Perumahan Teluk Pinang     | 29.303.000,00 |                       |
|    |                             | Rencana pembangunan kawasan perdesaan   | 48.840.000,00 |                       |

**B. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Pengurangan aset tetap pada Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021 sebesar Rp33.429.594.181,00 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Reklasifikasi ke KIB lain Rp11.631.165.604,00 guna menyesuaikan aset sesuai dengan KIB yang seharusnya dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.115 Daftar Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan**

| No            | Nama SKPD                            | Ke KIB                      | Nilai (Rp)               | Keterangan                                  |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| 1             | RSUD H. Hasan Basry                  | KIB B (Peralatan dan Mesin) | 2.519.640.713,00         | Genset                                      |
|               |                                      | KIB C (Gedung dan Bangunan) | 638.519.787,00           | Bangunan konstruksi genset                  |
| 2             | Dinas Pekerjaan Umum                 | KIB F (KDP)                 | 4.573.614.364,00         | Lihat pada tabel 5.3.116                    |
| 3             | Dinas Perumahan Rakyat KPLH          | KIB B (Peralatan dan Mesin) | 3.657.328.740,00         | Lampu LED                                   |
| 4             | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata | KIB C (Gedung dan Bangunan) | 242.062.000,00           | Rehab sarana kawasan dermaga bamboo rafting |
| <b>Jumlah</b> |                                      |                             | <b>11.631.165.604,00</b> |                                             |

Berikut disajikan daftar rincian reklasifikasi ke KIB F (KDP) berupa pekerjaan yang belum selesai tahun 2021 pada beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.116 Daftar Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang Menjadi KDP**

| No | SKPD                 | Kegiatan Perencanaan                                          | Sub Nilai (Rp)          | Nilai (Rp)              |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1  | Dinas Pekerjaan Umum | Rehabilitasi jalan ruas Tumbukan Banyu Banua Hanyar (Habirau) | 1.561.918.224,00        | <b>4.573.614.364,00</b> |
|    |                      | Honorarium PPK, Pembantu PPK dan PPBJ                         | 2.400.000,00            |                         |
|    |                      | <b>Nilai</b>                                                  | <b>1.564.318.224,00</b> |                         |
|    |                      | Pembangunan jalan menuju Stadion 2 Desember                   | 2.364.522.140,00        |                         |
|    |                      | Jasa konsultasi pengawasan                                    | 49.445.000,00           |                         |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| No | SKPD | Kegiatan Perencanaan                                                             | Sub Nilai (Rp)          | Nilai (Rp) |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
|    |      | Honorarium PPK, Pembantu PPK dan PPBJ                                            | 2.400.000,00            |            |
|    |      | Nilai                                                                            | <b>2.416.367.140,00</b> |            |
|    |      | Jasa konsultasi perencanaan usulan peningkatan jalan DAK                         | 97.680.000,00           |            |
|    |      | Honorarium PPK dan PPBJ                                                          | 800.000,00              |            |
|    |      | Nilai                                                                            | <b>98.480.000,00</b>    |            |
|    |      | Jasa konsultasi perencanaan perluasan SPAM jaringan perpipaan Ds Jembatan Merah  | 98.240.000,00           |            |
|    |      | Honorarium PPK dan PPBJ                                                          | 900.000,00              |            |
|    |      | Nilai                                                                            | <b>99.140.000,00</b>    |            |
|    |      | Jasa konsultasi perencanaan pembangunan SPAM perdesaan                           | 99.330.000,00           |            |
|    |      | Honorarium PPK dan PPBJ                                                          | 1.150.000,00            |            |
|    |      | Nilai                                                                            | <b>100.480.000,00</b>   |            |
|    |      | Jasa konsultasi perencanaan perluasan SPAM jaringan Sungai Raya-Kandangan-Simpur | 98.439.000,00           |            |
|    |      | Honorarium PPK dan PPBJ                                                          | 900.000,00              |            |
|    |      | Nilai                                                                            | <b>99.339.000,00</b>    |            |
|    |      | Jasa konsultasi perencanaan usulan penggantian jembatan DAK                      | 96.690.000,00           |            |
|    |      | Honorarium PPK dan PPBJ                                                          | 800.000,00              |            |
|    |      | Nilai                                                                            | <b>97.490.000,00</b>    |            |
|    |      | Jasa konsultasi perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi (DAK)                  | 98.000.000,00           |            |
|    |      | Nilai                                                                            | <b>98.000.000,00</b>    |            |

2. Reklasifikasi ke aset lainnya aset tidak berwujud sebesar Rp1.397.347.040,00 pada SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.117 Rincian Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud**

| No            | SKPD                 | Jenis          | Nilai (Rp)     | Jumlah (Rp)             | Keterangan                              |
|---------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 1             | Dinas Pekerjaan Umum | Dokumen Kajian | 383.223.500,00 | <b>1.297.347.040,00</b> | Survey kondisi jalan                    |
|               |                      |                | 93.260.000,00  |                         | Dokumen UKL-UPL Jembatan                |
|               |                      |                | 200.450.000,00 |                         | Jasa penyelidikan tanah di Daha Selatan |
|               |                      |                | 175.547.240,00 |                         | Survey kondisi jembatan                 |
|               |                      |                | 97.865.000,00  |                         | Jasa konsultasi reviu dokumen RISPAM    |
|               |                      |                | 172.894.900,00 |                         | Dokumen desain penahan longsor          |
|               |                      |                | 74.281.400,00  |                         | Dokumen UKL-UPL perkuatan tebing        |
|               |                      |                | 99.825.000,00  |                         | Desain perencanaan e-PAKSI              |
|               |                      |                |                |                         |                                         |
| 2             | Dinas Perikanan      | Dokumen Kajian | 100.000.000,00 | <b>100.000.000,00</b>   | Masterplan pengembangan ikan gabus      |
| <b>Jumlah</b> |                      |                |                | <b>1.397.347.040,00</b> |                                         |



3. Reklasifikasi ke non modal sebesar Rp17.005.000,00 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang direklas ke beban jasa berupa honorarium petuga *e-monitoring* dan evaluasi DAK.
4. Penghapusan sebesar Rp20.384.076.537,00 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupa :
  - Penghapusan trotoar (saluran drainase) sebesar Rp28.980.000,00 yang berasal dari usulan masyarakat dengan kompensasi ganti rugi atas pembongkaran tersebut dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.118 Rincian Pembongkaran Trotoar (Saluran Drainase)**

| No.          | Surat Keputusan Sekretaris Daerah | Jenis Barang             | Lokasi/Alamat                        | Panjang | Nilai (Rp)           |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------|----------------------|
| 1            | Nomor 23 Tahun 2021               | Trotoar/Saluran Drainase | Jl. A.Yani Km.1                      | 9 m     | 8.100.000,00         |
| 2            | Nomor 23 Tahun 2021               | Trotoar/Saluran Drainase | Jl. Pemuda No. 2                     | 6,20 m  | 5.580.000,00         |
| 3            | Nomor 24 Tahun 2021               | Trotoar/Saluran Drainase | Jl. Jend Sudirman Hamalau            | 2 m     | 1.800.000,00         |
| 4            | Nomor 24 Tahun 2021               | Trotoar/Saluran Drainase | Jl. Jend Sudirman Simp.4 Tibung Raya | 8 m     | 7.200.000,00         |
| 5            | Nomor 24 Tahun 2021               | Trotoar/Saluran Drainase | Jl. Jend. A. Yani Simp 5             | 6 m     | 5.400.000,00         |
| 6            | Nomor 30 Tahun 2021               | Trotoar/Saluran Drainase | Jl. Jend. Sudirman RT.01             | 1 m     | 900.000,00           |
| <b>Nilai</b> |                                   |                          |                                      |         | <b>28.980.000,00</b> |

- Penghapusan jalan nasional arteri karena dihibahkan ke Kementrian PUPR sebesar Rp20.355.096.537,00 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.119 Rincian Penghapusan Jalan Nasional Arteri**

| No.           | Surat Keputusan Sekretaris Daerah | Jenis Barang          | Lokasi/Alamat                                                                                                  | Nilai (Rp)               |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1             | Nomor 31 Tahun 2021               | Jalan nasional arteri | Jalan lingkaran Kandangan (Bundaran Hamalau, Simp. 4 Karang Jawa) Kec. Sungai Raya                             | 4.524.085.000,00         |
| 2             | Nomor 31 Tahun 2021               | Jalan nasional arteri | Jalan lingkaran Kandangan (Bundaran Hamalau, Simp. 4 Karang Jawa/lingkar Kandangan- Batu Licin) Kec. Kandnagan | 3.969.244.777,00         |
| 3             | Nomor 31 Tahun 2021               | Jalan nasional arteri | Jalan H. M Yusi Kandangan                                                                                      | 11.861.766.760,00        |
| <b>Jumlah</b> |                                   |                       |                                                                                                                | <b>20.355.096.537,00</b> |

Penghapusan jalan tersebut di atas tidak memerlukan persetujuan DPRD karena beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penghapusan disebabkan oleh penyerahan kewenangan jalan dari kewenangan kabupaten menjadi kewenangan pusat oleh karena status jalan adalah ruas jalan nasional.
- b. Telah terjadi penyerahan tersebut yang dibuktikan dengan Berita Cara Serah Terima Nomor 600/191/DisPUTR/2018 tanggal 30 Januari 2018



antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Penghapusan tidak memerlukan persetujuan DPRD dengan memperhatikan ketentuan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Bab X Pemindahtanganan Pasal 331 (ayat 2) dan Pasal 335 yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 331 ayat (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila diperuntukkan bagi kepentingan umum;
- Pasal 335 ayat (1) Tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (2) huruf d, adalah tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan, termasuk diantaranya kegiatan pemerintah daerah dalam lingkup hubungan persahabatan antara negara/daerah dengan negara lain atau masyarakat/lembaga internasional.

Dalam hal ini jalan yang diserahkan adalah jalan nasional yang tentu saja digunakan untuk kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara serta oleh masyarakat luas.

Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 331 ayat (2) huruf d dan Pasal 335 ayat (1) dijelaskan pada Ayat (2) yang dikutip diantaranya jalan umum termasuk akses jalan sesuai peraturan perundangan, jalan tol, dan rel kereta api.

#### **5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya**

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dikelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah dalam kondisi siap pakai.

Aset yang termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah aset tetap renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp49.793.305.379,83 dan Rp48.463.991.579,83. Aset tetap lainnya untuk Tahun 2021 naik sebesar Rp1.329.313.800,00 atau 2,74% dari total aset tetap lainnya Tahun 2020 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

**Tabel 5.3.120 Rincian Aset Tetap Lainnya per SKPD**

| NO            | SKPD                                    | 31 Desember 2021<br>(Rp) | 31 Desember 2020<br>(Rp) |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1             | Dinas Pendidikan                        | 39.715.486.977,83        | 38.616.567.477,83        |
| 2             | Dinas Kesehatan                         | 137.682.000,00           | 137.682.000,00           |
| 3             | RSUD Hasan Basry Kandangan              | 71.600.500,00            | 69.800.500,00            |
| 4             | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang     | 3.106.138.720,00         | 3.106.138.720,00         |
| 5             | Dinas Perumahan Rakyat KPLH             | 1.008.574.800,00         | 1.008.574.800,00         |
| 6             | Satuan Polisi Pamong Praja              | 3.995.460,00             | 3.995.460,00             |
| 7             | Dinas Sosial                            | 41.522.500,00            | 41.522.500,00            |
| 8             | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 3.000.000,00             | 3.000.000,00             |
| 9             | Dinas Pengendalian Penduduk KBPPPA      | 90.750.000,00            | 90.750.000,00            |
| 10            | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKP    | 11.875.000,00            | 11.875.000,00            |
| 11            | Dinas Penanaman Modal dan PTSP          | 2.779.475,00             | 2.779.475,00             |
| 12            | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata    | 114.608.000,00           | 114.608.000,00           |
| 13            | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan        | 1.827.527.747,00         | 1.623.533.447,00         |
| 14            | Dinas Perikanan                         | 900.000,00               | 900.000,00               |
| 15            | Dinas Pertanian                         | 725.276.000,00           | 750.376.000,00           |
| 16            | Sekretariat Daerah                      | 9.625.000,00             | 9.625.000,00             |
| 17            | Bagian Hukum                            | 45.834.800,00            | 45.834.800,00            |
| 18            | Bagian Pemerintahan                     | 72.050.000,00            | 72.050.000,00            |
| 19            | Bagian Umum                             | 234.519.000,00           | 234.519.000,00           |
| 20            | Inspektorat Daerah                      | 23.459.400,00            | 23.459.400,00            |
| 21            | BAPPELITBANGDA                          | 2.263.907.500,00         | 2.214.207.500,00         |
| 22            | BPKPD                                   | 18.642.750,00            | 18.642.750,00            |
| 23            | BKPSDM                                  | 30.250.000,00            | 30.250.000,00            |
| 24            | Sekretariat DPRD                        | 229.002.750,00           | 229.002.750,00           |
| 25            | Kecamatan Padang Batung                 | 250.000,00               | 250.000,00               |
| 26            | Kecamatan Daha Selatan                  | 105.000,00               | 105.000,00               |
| 27            | Kecamatan Kalumpang                     | 300.000,00               | 300.000,00               |
| 28            | Kecamatan Loksado                       | 600.000,00               | 600.000,00               |
| 29            | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik       | 3.042.000,00             | 3.042.000,00             |
| <b>Jumlah</b> |                                         | <b>49.793.305.379,83</b> | <b>48.463.991.579,83</b> |

Adapun mutasi Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3.121 Mutasi Aset Tetap Lainnya**

| Uraian                                    | Jumlah<br>(Rp)           |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Saldo Awal Per 1 Januari 2021             | 48.463.991.579,83        |
| Penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2021  | 1.494.483.800,00         |
| Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 | (165.170.000,00)         |
| <b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2021</b>   | <b>49.793.305.379,83</b> |



#### A. Penambahan Aset Tetap Lainnya

Penambahan aset tetap lainnya selama TA 2021 sebesar Rp1.494.483.800,00 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi belanja modal pada LRA TA 2021 sebesar Rp1.421.858.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.122 Daftar Pengadaan Aset Tetap Lainnya**

| No            | Nama SKPD                             | Nilai (Rp)              |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1             | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan       | 1.092.719.500,00        |
| 2             | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 96.975.000,00           |
| 3             | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan      | 193.669.300,00          |
| 4             | Kecamatan Padang Batung               | 24.545.000,00           |
| 5             | Kecamatan Daha Utara                  | 3.950.000,00            |
| 6             | Kecamatan Kalumpang                   | 10.000.000,00           |
| <b>Jumlah</b> |                                       | <b>1.421.858.800,00</b> |

Rincian mengenai daftar pengadaan Aset Tetap Lainnya per jenis barang pada **Lampiran 8**.

2. Reklasifikasi dari KIB lain sebesar Rp9.375.000,00 yang terdapat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa kostum karakter.
3. Reklasifikasi dari non modal sebesar Rp50.650.000,00 berupa reklasifikasi dari beban barang dan jasa pada:
  - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp950.000,00 berupa honorarium pengembangan bahan pustaka; dan
  - Bappelitbangda sebesar Rp49.700.000,00 berupa belanja pemeliharaan aset tetap dalam renovasi pemeliharaan aula kantor.
4. Hibah dari pemerintah sebesar Rp12.600.000,00 yang terdapat pada:
  - Dinas Pendidikan sebesar Rp10.800.000,00 hibah dari BTIKP Provinsi Kalimantan Selatan pada beberapa sekolah sebagai berikut:

**Tabel 5.3.123 Daftar Sekolah Penerima Hibah**

| No. | Sekolah                  | Nilai (Rp) | Keterangan |
|-----|--------------------------|------------|------------|
| 1   | SDN Tumingki 1           | 900.000,00 | Buku umum  |
| 2   | SDN Panglima Dambung     | 900.000,00 | Buku umum  |
| 3   | SDN Jambu Hilir Baluti 2 | 900.000,00 | Buku umum  |
| 4   | SDN Sungai Raya Tengah   | 900.000,00 | Buku umum  |
| 5   | SDN Kandangan Kota 4     | 900.000,00 | Buku umum  |
| 6   | SDN Pandulangan 2        | 900.000,00 | Buku umum  |
| 7   | SMPN 2 Angkinang         | 900.000,00 | Buku umum  |
| 8   | SMPN 1 Loksado           | 900.000,00 | Buku umum  |
| 9   | SMPN 3 Padang Batung     | 900.000,00 | Buku umum  |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| No.           | Sekolah          | Nilai (Rp)           | Keterangan |
|---------------|------------------|----------------------|------------|
| 10            | SMPN 3 Kandangan | 900.000,00           | Buku umum  |
| 11            | SMPN 7 Kandangan | 900.000,00           | Buku umum  |
| 12            | SMPN 6 Kandangan | 900.000,00           | Buku umum  |
| <b>Jumlah</b> |                  | <b>10.800.000,00</b> |            |

- RSUD H. Hasan Basry sebesar Rp1.800.000,00 berupa hibah mushaf Al-Qur'an dari BAZNAS dengan BAST No. 045/BA/BAZNAS-HSS/XI/2021

#### B. Pengurangan Aset Tetap Lainnya

Pengurangan aset tetap lainnya selama TA 2021 sebesar Rp165.170.000,00 disebabkan oleh reklasifikasi ke KIB lain dan aset lainnya dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.124 Daftar Reklasifikasi dari KIB E (Aset Tetap Lainnya)**

| No            | SKPD                                     | Ke KIB                      | Nilai (Rp)            | Keterangan                                                         |
|---------------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1             | Dinas Pendidikan                         | KIB B (Peralatan dan Mesin) | 4.600.000,00          | Lihat pada tabel 5.3.125                                           |
| 2             | Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata | ATB (Aset Tidak Berwujud)   | 96.975.000,00         | Aset dalam renovasi ( <i>grand design</i> wisata air panas Tanuhi) |
| 3             | Kecamatan Padang Batung                  | KIB B (Peralatan dan Mesin) | 24.545.000,00         | Televisi dan laptop                                                |
| 4             | Kecamatan Kalumpang                      | KIB B (Peralatan dan Mesin) | 10.000.000,00         | Pengadaan cctv                                                     |
| 5             | Kecamatan Daha Utara                     | KIB B (Peralatan dan Mesin) | 3.950.000,00          | Running text                                                       |
| 6             | Dinas Pertanian                          | Aset Lain-lain              | 25.100.000,00         | Ternak yang sudah dijual                                           |
| <b>Jumlah</b> |                                          |                             | <b>165.170.000,00</b> |                                                                    |

Berikut disajikan reklasifikasi dari peralatan dan mesin (KIB B) pada Dinas Pendidikan.

**Tabel 5.3.125 Reklasifikasi pada Dinas Pendidikan**

| No.          | Sekolah              | Nilai (Rp)          | Keterangan                   |
|--------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 1            | SDN Pariangan        | 1.000.000,00        | Pengadaan tikar              |
| 2            | SMPN 1 Loksado       | 2.200.000,00        | Pengadaan papan nama sekolah |
| 3            | SMPN 1 Padang Batung | 1.400.000,00        | Pengadaan gitar              |
| <b>Total</b> |                      | <b>4.600.000,00</b> |                              |

#### 5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.





PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp74.349.264.800,00 dan Rp5.613.771.380,00. Saldo konstruksi dalam pengerjaan untuk Tahun 2021 naik sebesar Rp68.735.493.420,00 atau 1.224,41% dari total KDP Tahun 2020 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.126 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD**

| NO            | SKPD                                 | 31 Desember 2021<br>(Rp) | 31 Desember 2020<br>(Rp) |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1             | Dinas Pendidikan                     | 491.996.300,00           | 199.161.000,00           |
| 2             | Dinas Kesehatan                      | 434.397.000,00           | 424.197.000,00           |
| 3             | RSUD Hasan Basry Kandangan           | 1.148.465.950,00         | 949.675.950,00           |
| 4             | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  | 70.054.043.950,00        | 1.425.359.680,00         |
| 5             | Dinas Perumahan Rakyat KPLH          | 227.429.500,00           | 446.834.950,00           |
| 6             | Dinas Sosial                         | 94.968.000,00            | 13.490.000,00            |
| 7             | Dinas Ketahanan Pangan               | 19.969.000,00            | 19.969.000,00            |
| 8             | Dinas Perhubungan                    | 307.887.500,00           | 307.887.500,00           |
| 9             | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKP | 73.222.000,00            | 73.222.000,00            |
| 10            | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata | 262.012.000,00           | 64.627.000,00            |
| 11            | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan     | 100.775.000,00           | 100.775.000,00           |
| 12            | Dinas Perikanan                      | 30.779.000,00            | 30.779.000,00            |
| 13            | Dinas Pertanian                      | 211.459.000,00           | 21.670.000,00            |
| 14            | Dinas Perdagangan                    | 280.860.000,00           | 181.145.000,00           |
| 15            | Bagian Pemerintahan                  | 44.000.000,00            | 44.000.000,00            |
| 16            | Bagian Umum                          | 298.334.000,00           | 215.437.700,00           |
| 17            | BPKPD                                | 0,00                     | 891.003.600,00           |
| 18            | BKPSDM                               | 49.900.000,00            | 49.900.000,00            |
| 19            | Sekretariat DPRD                     | 89.770.600,00            | 0,00                     |
| 20            | Kecamatan Sungai Raya                | 0,00                     | 14.971.000,00            |
| 21            | Kecamatan Telaga Langsat             | 79.200.000,00            | 79.200.000,00            |
| 22            | Kecamatan Kandangan                  | 5.000.000,00             | 5.000.000,00             |
| 23            | Kelurahan Jambu Hilir                | 14.900.000,00            | 14.900.000,00            |
| 24            | Kecamatan Daha Selatan               | 0,00                     | 10.670.000,00            |
| 25            | Kecamatan Kalumpang                  | 3.950.000,00             | 3.950.000,00             |
| 26            | Kecamatan Loksado                    | 25.946.000,00            | 25.946.000,00            |
| <b>Jumlah</b> |                                      | <b>74.349.264.800,00</b> | <b>5.613.771.380,00</b>  |

Adapun mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan selama Tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 5.3.127 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan**

| Uraian                        | Jumlah<br>(Rp)   |
|-------------------------------|------------------|
| Saldo Awal Per 1 Januari 2021 | 5.613.771.380,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| Uraian                                  | Jumlah<br>(Rp)           |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Penambahan Aset Tetap KDP Tahun 2021    | 70.611.216.350,00        |
| Pengurangan Aset Tetap KDP Tahun 2021   | (1.875.722.930,00)       |
| <b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2021</b> | <b>74.349.264.800,00</b> |

**A. Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Penambahan Aset Tetap KDP Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2021 sebesar Rp70.611.216.350,00 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Reklasifikasi dari KIB lain sebesar Rp70.204.159.350,00 berupa pekerjaan fisik yang sampai dengan tahun anggaran berakhir belum selesai pengerjaannya atau masih dalam tahap perencanaan sebesar dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.128 Rincian Reklasifikasi ke KDP**

| No            | SKPD                 | Dari KIB                    | Nilai<br>(Rp)            | Keterangan                                                                                         |
|---------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Dinas Pendidikan     | KIB C (Gedung dan Bangunan) | 447.340.300,00           | Lihat pada tabel 5.3.129                                                                           |
| 2             | Dinas Kesehatan      | KIB C (Gedung dan Bangunan) | 352.600.000,00           | Lihat pada tabel 5.3.129                                                                           |
| 3             | RSUD H. Hasan Basry  | KIB B (Peralatan dan Mesin) | 198.790.000,00           | Perencanaan rehab bangunan RSUD                                                                    |
| 4             | Dinas Pekerjaan Umum | KIB A (Tanah)               | 115.947.500,00           | Jasa konsultasi study kelayakan dan honorarium                                                     |
|               |                      | KIB C (Gedung dan Bangunan) | 64.002.102.586,00        | Lihat pada tabel 5.3.129                                                                           |
|               |                      | KIB D (JIJ)                 | 4.573.614.364,00         | Lihat pada tabel 5.3.130                                                                           |
| 5             | Dinas Porapar        | KIB C (Gedung dan Bangunan) | 140.535.000,00           | Lihat pada tabel 5.3.129                                                                           |
| 6             | Dinas Perdagangan    | KIB C (Gedung dan Bangunan) | 99.715.000,00            | Perencanaan grand desain pasar terpadu                                                             |
| 7             | Bagian Umum          | KIB C (Gedung dan Bangunan) | 183.744.000,00           | Perencanaan rehab selasar setda, dapur pendopo bupati, rumah pintar dan paving block lapangan tugu |
| 8             | Sekretariat DPRD     | KIB C (Gedung dan Bangunan) | 89.770.600,00            | Konsultan perencanaan pembangunan rumah dinas ketua DPRD                                           |
| <b>Jumlah</b> |                      |                             | <b>70.204.159.350,00</b> |                                                                                                    |

Berikut disajikan rincian reklasifikasi ke KDP dari Gedung dan Bangunan dan dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada beberapa SKPD.

**Tabel 5.3.129 Rincian Reklasifikasi dari KIB C (Gedung dan Bangunan) ke KDP**

| No | SKPD             | Kegiatan Perencanaan                                                                             | Sub Nilai<br>(Rp) | Nilai<br>(Rp)         |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1  | Dinas Pendidikan | Rehab ruang kelas SD Kec. Kandungan dan Padang Batung                                            | 84.480.000,00     | <b>447.340.300,00</b> |
|    |                  | Pembangunan SD Kec. Padang Batung, Angkinang, Telaga Langsat, Kalumpang, Simpung dan Sungai raya | 86.622.800,00     |                       |
|    |                  | Rehabilitasi ruang kelas SD Kec. Sungai Raya                                                     | 44.550.000,00     |                       |
|    |                  | Pembangunan SD Kec. Daha Utara dan Daha Selatan                                                  | 32.934.000,00     |                       |
|    |                  | Rehab ruang guru/kepala sekolah/TU Tahun 2022                                                    | 53.471.000,00     |                       |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| No | SKPD                 | Kegiatan Perencanaan                                                    | Sub Nilai (Rp)           | Nilai (Rp)               |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    |                      | Rehab SD Tahun 2022                                                     | 29.249.000,00            |                          |
|    |                      | Rehab SMP Tahun 2022                                                    | 38.445.000,00            |                          |
|    |                      | Pembangunan sarpras dan utilitas sekolah Tahun 2022                     | 33.698.500,00            |                          |
|    |                      | Pembangunan ruang perpustakaan SMP 2 Kandangan                          | 43.890.000,00            |                          |
|    |                      |                                                                         |                          |                          |
| 2  | Dinas Kesehatan      | Rehab Pustu                                                             | 39.700.000,00            | <b>352.600.000,00</b>    |
|    |                      | Renovasi Puskesmas Negara                                               | 79.500.000,00            |                          |
|    |                      | Renovasi Puskesmas Sungai Raya                                          | 79.700.000,00            |                          |
|    |                      | Rehab Poskesdes                                                         | 59.500.000,00            |                          |
|    |                      | Pembangunan Poskesdes                                                   | 59.700.000,00            |                          |
|    |                      | Penyusunan dokumen lingkungan hidup Puskesmas Pasungkan                 | 34.500.000,00            |                          |
|    |                      |                                                                         |                          |                          |
| 3  | Dinas Pekerjaan Umum | Pembangunan Gedung Serbaguna 2 Desember                                 | 17.634.806.173,00        | <b>64.002.102.586,00</b> |
|    |                      | Jasa konsultan pengawasan pembangunan Gedung Serbaguna 2 Desember       | 195.081.370,00           |                          |
|    |                      | Honorarium tim teknis pendampingan hukum                                | 26.500.000,00            |                          |
|    |                      | Honorarium PPK dan pembantu PPK                                         | 4.850.000,00             |                          |
|    |                      | Nilai                                                                   | <b>17.861.237.543,00</b> |                          |
|    |                      | Jasa konsultasi perencanaan lapangan tembak indoor                      | 84.900.000,00            |                          |
|    |                      | Honorarium PPK dan PPBJ                                                 | 900.000,00               |                          |
|    |                      | Nilai                                                                   | <b>85.800.000,00</b>     |                          |
|    |                      | Jasa konsultasi perencanaan lapangan semi indoor takraw                 | 74.635.000,00            |                          |
|    |                      | Honorarium PPK dan PPBJ                                                 | 900.000,00               |                          |
|    |                      | Nilai                                                                   | <b>75.535.000,00</b>     |                          |
|    |                      | Rehabilitasi gedung badminton tipe c dan stadion Dr.H.M. Syafii         | 97.300.000,00            |                          |
|    |                      | Honorarium PPK dan PPBJ                                                 | 1.150.000,00             |                          |
|    |                      | Nilai                                                                   | <b>98.450.000,00</b>     |                          |
|    |                      | Jasa konsultasi reviu desain pembangunan lapangan voli 2 Desember       | 47.300.000,00            |                          |
|    |                      | Honorarium PPK dan PPBJ                                                 | 900.000,00               |                          |
|    |                      | Nilai                                                                   | <b>48.200.000,00</b>     |                          |
|    |                      | Pembangunan mesjid di kawasan Islamic Center                            | 45.102.189.085,00        |                          |
|    |                      | Jasa konsultasi pengawasan pembangunan mesjid di kawasan Islamic Center | 596.281.958,00           |                          |
|    |                      | Honorarium tim teknis pendampingan hukum                                | 26.500.000,00            |                          |
|    |                      | Honorarium PPK dan PPBJ                                                 | 9.750.000,00             |                          |
|    |                      | Nilai                                                                   | <b>45.734.721.043,00</b> |                          |
|    |                      | Jasa konsultasi perencanaan RTH kawasan Islamic Center                  | 97.009.000,00            |                          |
|    |                      | Honorarium PPK dan Pembantu PPK                                         | 1.150.000,00             |                          |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| No | SKPD                                 | Kegiatan Perencanaan                                 | Sub Nilai (Rp)       | Nilai (Rp)            |
|----|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|    |                                      | Nilai                                                | <b>98.159.000,00</b> |                       |
|    |                                      |                                                      |                      |                       |
| 4  | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata | Jasa konsultan pembangunan saran ruang kreatif       | 99.750.000,00        | <b>140.535.000,00</b> |
|    |                                      | Honorarium pembangunan saran ruang kreatif           | 900.000,00           |                       |
|    |                                      | Jasa konsultan appraisal penilaian bangunan olahraga | 39.885.000,00        |                       |

**Tabel 5.3.130 Daftar Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke KDP**

| No | SKPD                 | Kegiatan Perencanaan                                                             | Sub Nilai (Rp)          | Nilai (Rp)              |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1  | Dinas Pekerjaan Umum | Rehabilitasi jalan ruas Tumbukan Banyu Banua Hanyar (Habirau)                    | 1.561.918.224,00        | <b>4.573.614.364,00</b> |
|    |                      | Honorarium PPK, Pembantu PPK dan PPBJ                                            | 2.400.000,00            |                         |
|    |                      | Nilai                                                                            | <b>1.564.318.224,00</b> |                         |
|    |                      | Pembangunan jalan menuju Stadion 2 Desember                                      | 2.364.522.140,00        |                         |
|    |                      | Jasa konsultasi pengawasan                                                       | 49.445.000,00           |                         |
|    |                      | Honorarium PPK, Pembantu PPK dan PPBJ                                            | 2.400.000,00            |                         |
|    |                      | Nilai                                                                            | <b>2.416.367.140,00</b> |                         |
|    |                      | Jasa konsultasi perencanaan usulan peningkatan jalan DAK                         | 97.680.000,00           |                         |
|    |                      | Honorarium PPK dan PPBJ                                                          | 800.000,00              |                         |
|    |                      | Nilai                                                                            | <b>98.480.000,00</b>    |                         |
|    |                      | Jasa konsultasi perencanaan perluasan SPAM jaringan perpipaan Ds Jembatan Merah  | 98.240.000,00           |                         |
|    |                      | Honorarium PPK dan PPBJ                                                          | 900.000,00              |                         |
|    |                      | Nilai                                                                            | <b>99.140.000,00</b>    |                         |
|    |                      | Jasa konsultasi perencanaan pembangunan SPAM perdesaan                           | 99.330.000,00           |                         |
|    |                      | Honorarium PPK dan PPBJ                                                          | 1.150.000,00            |                         |
|    |                      | Nilai                                                                            | <b>100.480.000,00</b>   |                         |
|    |                      | Jasa konsultasi perencanaan perluasan SPAM jaringan Sungai Raya-Kandangan-Simpur | 98.439.000,00           |                         |
|    |                      | Honorarium PPK dan PPBJ                                                          | 900.000,00              |                         |
|    |                      | Nilai                                                                            | <b>99.339.000,00</b>    |                         |
|    |                      | Jasa konsultasi perencanaan usulan penggantian jembatan DAK                      | 96.690.000,00           |                         |
|    |                      | Honorarium PPK dan PPBJ                                                          | 800.000,00              |                         |
|    |                      | Nilai                                                                            | <b>97.490.000,00</b>    |                         |
|    |                      | Jasa konsultasi perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi (DAK)                  | 98.000.000,00           |                         |
|    |                      | Nilai                                                                            | <b>98.000.000,00</b>    |                         |

2. Reklasifikasi dari non modal sebesar Rp407.057.000,00 pada beberapa SKPD sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

**Tabel 5.3.131 Rincian Reklasifikasi dari Non Modal**

| No.           | SKPD                                 | Nilai (Rp)            | Keterangan                                                                        |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Dinas Perumahan Rakyat KPLH          | 34.550.000,00         | Perencanaan grand design hutan kota wana sehati (Beban Jasa)                      |
| 2             | Dinas Sosial                         | 94.968.000,00         | Jasa konsultan dan honor ruang pelayanan dan aula (Beban Jasa)                    |
| 3             | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata | 87.750.000,00         | Perencanaan rehab stadion, kolam renang, pagar, dan pos keamanan GOS (Beban Jasa) |
| 4             | Dinas Pertanian                      | 189.789.000,00        | Jasa konsultan pembuatan peta (Beban Jasa)                                        |
| <b>Jumlah</b> |                                      | <b>407.057.000,00</b> |                                                                                   |

**B. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Pengurangan aset tetap KDP Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2021 sebesar Rp1.875.722.930,00 disebabkan oleh adanya reklasifikasi ke KIB lain dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.132 Rincian Reklasifikasi Dari KDP**

| No            | SKPD                                 | Ke KIB                      | Nilai (Rp)              | Keterangan                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Dinas Pendidikan                     | KIB C (Gedung dan Bangunan) | 154.505.000,00          | Lihat pada tabel 5.3.133                                                                                          |
| 2             | Dinas Kesehatan                      | KIB A (Tanah)               | 39.700.000,00           | Perencanaan urugan tanah puskesmas Sungai Pinang dan bajayau serta jasa appraisal tanah puskesmas Telaga Langsung |
|               |                                      | KIB C (Gedung dan Bangunan) | 302.700.000,00          | Lihat pada tabel 5.3.133                                                                                          |
| 3             | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  | KIB D (JIJ)                 | 62.980.180,00           | Bangunan pengaman sungai perkuatan tebing                                                                         |
| 4             | Dinas Perumahan Rakyat KPLH          | KIB C (Gedung dan Bangunan) | 42.862.880,00           | Perencanaan rehab pintu gerbang, tempat parkir dan ruang kantor                                                   |
|               |                                      | KIB D (JIJ)                 | 211.092.570,00          | Lihat pada tabel 5.3.134                                                                                          |
| 5             | Dinas Sosial                         | KIB A (Tanah)               | 13.490.000,00           | Perencanaan pemasangan paving block                                                                               |
| 6             | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata | KIB D (JIJ)                 | 30.900.000,00           | Pembangunan menaran air dan kolam penampungan objek wisata air panas Tanuhi                                       |
| 7             | Bagian Umum                          | KIB C (Gedung dan Bangunan) | 100.847.700,00          | Rehab gedung kantor, tempat parkir, dan pagar lapangan                                                            |
| 8             | Kecamatan Sungai Raya                | KIB C (Gedung dan Bangunan) | 14.971.000,00           | Rehab gedung MTQ                                                                                                  |
| 9             | Kecamatan Daha Selatan               | KIB C (Gedung dan Bangunan) | 10.670.000,00           | Jasa konsultan perencanaan pembangunan paving block                                                               |
| 10            | BPKPD                                | KIB C (Gedung dan Bangunan) | 891.003.600,00          | Lihat pada tabel 5.3.133                                                                                          |
| <b>Jumlah</b> |                                      |                             | <b>1.875.722.930,00</b> |                                                                                                                   |

Berikut disajikan rincian reklasifikasi dari KIB F (KDP) ke KIB C (Gedung dan Bangunan) dan ke KIB D (JIJ) pada beberapa SKPD.

**Tabel 5.3.133 Daftar KDP yang menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

| No | SKPD             | Kegiatan Perencanaan                       | Nilai (Rp)    | Jumlah (Rp)           |
|----|------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1  | Dinas Pendidikan | Rehab ruang kelas SDN Jambu Hulu Muka      | 14.805.000,00 | <b>154.505.000,00</b> |
|    |                  | Pembangunan SDN Tamiyang                   | 97.250.000,00 |                       |
|    |                  | Rehab sedang/berat ruang kelas SDN Anjiran | 35.650.000,00 |                       |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| No | SKPD            | Kegiatan Perencanaan                                                 | Nilai (Rp)     | Jumlah (Rp)           |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
|    |                 | Rehab sedang/berat SMPN 2 Loksado                                    | 6.800.000,00   |                       |
|    |                 |                                                                      |                |                       |
| 2  | Dinas Kesehatan | Renovasi Puskesmas Angkinang                                         | 69.750.000,00  | <b>302.700.000,00</b> |
|    |                 | Pembangunan Poskesdes Gambah Dalam Barat dan Baru                    | 19.849.000,00  |                       |
|    |                 | Pembangunan Pustu Muning Baru                                        | 5.780.000,00   |                       |
|    |                 | Jasa konsultan pembangunan Puskesmas Padang Batung                   | 75.175.000,00  |                       |
|    |                 | Rehab Puskesmas Jambu Hilir                                          | 24.810.000,00  |                       |
|    |                 | Renovasi Puskesmas Negara                                            | 24.882.000,00  |                       |
|    |                 | Rehab Poskesdes Gambah Dalam, Bago Tanggul, dan Ida Manggala         | 23.287.000,00  |                       |
|    |                 | Pembangunan Poskesdes Bajayau Lama                                   | 15.100.000,00  |                       |
|    |                 | Jasa konsultan pembangunan Pustu Baruh Jaya, Asam dan Amparaya       | 10.700.000,00  |                       |
|    |                 | Jasa konsultan rehab rumdin dokter dan paramedis Puskesmas Kandangan | 9.823.000,00   |                       |
|    |                 | Jasa konsultan rehab Pustu Asam                                      | 3.909.000,00   |                       |
|    |                 | Jasa konsultan pagar dan parkir Puskesmas Wasah                      | 9.820.000,00   |                       |
|    |                 | Jasa konsultan parkir ambulance Puskesmas Sungai Pinang              | 9.815.000,00   |                       |
|    |                 |                                                                      |                |                       |
| 3  | BPKPD           | Rehab rumah dinas Jl. Batuah Kandangan                               | 11.845.900,00  | <b>891.003.600,00</b> |
|    |                 | Rehab rumah dinas Jl. Kamboja Kandangan                              | 11.819.500,00  |                       |
|    |                 | Jasa perencanaan konsultan pembangunan gedung kantor                 | 44.595.000,00  |                       |
|    |                 | Pembangunan gedung kantor BPKPD                                      | 583.543.162,00 |                       |
|    |                 | Jasa konsultan pengawasan pembangunan gedung kantor                  | 23.113.200,00  |                       |
|    |                 | Rehab gedung kantor                                                  | 216.086.838,00 |                       |

**Tabel 5.3.134 Daftar KDP yang Menjadi Aset Tetap JIJ**

| No | SKPD                        | Kegiatan Perencanaan                    | Nilai (Rp)    | Jumlah (Rp)           |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1  | Dinas Perumahan Rakyat KPLH | Penataan PSU Perumahan Griya Sandaga    | 93.775.770,00 | <b>211.092.570,00</b> |
|    |                             | Penataan PSU Perumahan Al-Fairuz Madina | 39.173.800,00 |                       |
|    |                             | Penataan PSU Perumahan Teluk Pinang     | 29.303.000,00 |                       |
|    |                             | Rencana pembangunan kawasan perdesaan   | 48.840.000,00 |                       |

#### 5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Perhitungan penyusutan aset tetap dihitung dengan metode garis lurus dengan masing-masing masa manfaat yang diatur dalam



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Masa Manfaat dan Penyusutan Barang Milik Daerah.

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp1.171.134.546.691,08 dan Rp1.016.439.806.551,51. Saldo akumulasi penyusutan TA 2021 berasal dari perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2020 ditambah beban penyusutan selama tahun 2021 dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap yang dihapuskan dan dikapitalisasi.

**Tabel 5.3.135 Rincian Akumulasi Penyusutan per SKPD**

| No | SKPD                                    | 31 Desember 2021<br>(Rp) | 31 Desember 2020<br>(Rp) |
|----|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan         | (111.237.077.530,51)     | (98.867.554.302,51)      |
| 2  | Dinas Kesehatan                         | (70.253.726.454,00)      | (60.923.567.145,00)      |
| 3  | RSUD Hasan Basry Kandungan              | (180.234.019.444,00)     | (156.879.174.676,00)     |
| 4  | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang     | (544.165.347.132,57)     | (467.511.252.528,00)     |
| 5  | Dinas Perumahan Rakyat KPLH             | (73.567.907.205,00)      | (62.647.472.170,00)      |
| 6  | Satuan Polisi Pamong Praja              | (2.255.781.268,00)       | (1.535.119.133,00)       |
| 7  | BPBD                                    | (216.313.698,00)         | 0,00                     |
| 8  | Dinas Sosial                            | (3.885.073.268,00)       | (3.543.878.468,00)       |
| 9  | Dinas Ketahanan Pangan                  | (1.384.715.751,00)       | (1.253.026.804,00)       |
| 10 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | (2.018.891.493,00)       | (1.844.516.815,00)       |
| 11 | Dinas Pemberdayaan Masy. Desa           | (722.998.404,00)         | (628.043.232,00)         |
| 12 | Dinas Pengendalian Penduduk, KBPPPA     | (5.016.288.950,00)       | (4.517.070.384,00)       |
| 13 | Dinas Perhubungan                       | (15.936.924.201,00)      | (14.294.784.080,00)      |
| 14 | Dinas Komunikasi dan Informatika        | (5.947.061.894,00)       | (4.711.822.902,00)       |
| 15 | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKP    | (4.227.361.613,00)       | (3.916.700.451,00)       |
| 16 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP          | (1.490.178.691,00)       | (1.208.816.524,00)       |
| 17 | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata    | (13.945.779.629,00)      | (11.428.761.482,00)      |
| 18 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan        | (2.144.936.044,00)       | (1.820.026.118,00)       |
| 19 | Dinas Perikanan                         | (5.217.320.005,00)       | (4.784.290.376,00)       |
| 20 | Dinas Pertanian                         | (21.668.331.207,00)      | (20.098.083.880,00)      |
| 21 | Dinas Perdagangan                       | (27.515.777.552,00)      | (23.875.213.665,00)      |
| 22 | Sekretariat Daerah                      | (1.529.565.215,00)       | (1.373.893.466,00)       |
| 23 | Bagian Hukum                            | (312.525.336,00)         | (267.431.260,00)         |
| 24 | Bagian Pemerintahan                     | (1.808.660.499,00)       | (1.721.525.310,00)       |
| 25 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | (1.158.426.137,00)       | (975.046.185,00)         |
| 26 | Bagian Kesejahteraan Rakyat             | (299.929.673,00)         | (265.438.252,00)         |
| 27 | Bagian Organisasi                       | (463.256.034,00)         | (428.665.537,00)         |
| 28 | Bagian Umum                             | (24.684.822.385,00)      | (22.090.428.619,00)      |
| 29 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa        | (970.515.609,00)         | (817.681.898,00)         |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| No           | SKPD                                | 31 Desember 2021<br>(Rp)      | 31 Desember 2020<br>(Rp)      |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 30           | Bagian Perekonomian dan Pembangunan | (353.693.948,00)              | (313.187.258,00)              |
| 31           | Inspektorat Kabupaten               | (2.248.296.174,00)            | (2.046.354.291,00)            |
| 32           | BAPPELITBANGDA                      | (853.791.768,00)              | (1.801.550.009,00)            |
| 33           | BPKPD                               | (9.335.908.008,00)            | (8.307.879.780,00)            |
| 34           | BKPSDM                              | (2.595.648.286,00)            | (2.221.778.953,00)            |
| 35           | Sekretariat DPRD                    | (5.645.249.513,00)            | (4.907.379.188,00)            |
| 36           | Kecamatan Sungai Raya               | (1.369.909.234,00)            | (1.248.832.167,00)            |
| 37           | Kecamatan Padang Batung             | (1.676.312.241,00)            | (1.453.632.626,00)            |
| 38           | Kecamatan Telaga Langsat            | (1.315.096.200,00)            | (1.173.217.900,00)            |
| 39           | Kecamatan Angkinang                 | (1.489.137.103,00)            | (1.315.440.728,00)            |
| 40           | Kecamatan Kandangan                 | (2.276.834.936,00)            | (1.961.664.993,00)            |
| 41           | Kelurahan Kandangan Kota            | (407.366.386,00)              | (331.651.148,00)              |
| 42           | Kelurahan Kandangan Barat           | (341.923.419,00)              | (288.639.762,00)              |
| 43           | Kelurahan Kandangan Utara           | (293.692.702,00)              | (226.845.030,00)              |
| 44           | Kelurahan Jambu Hilir               | (387.816.039,00)              | (284.724.500,00)              |
| 45           | Kecamatan Simpuri                   | (1.507.097.418,00)            | (1.309.636.487,00)            |
| 46           | Kecamatan Daha Selatan              | (4.347.121.176,00)            | (3.702.418.134,00)            |
| 47           | Kecamatan Daha Utara                | (2.194.750.511,00)            | (1.938.910.313,00)            |
| 48           | Kecamatan Kalumpang                 | (1.635.091.911,00)            | (1.390.487.705,00)            |
| 49           | Kecamatan Loksado                   | (1.326.414.941,00)            | (1.193.997.442,00)            |
| 50           | Kecamatan Daha Barat                | (1.510.882.678,00)            | (1.367.609.653,00)            |
| 51           | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik   | (3.742.999.777,00)            | (3.424.682.822,00)            |
| <b>TOTAL</b> |                                     | <b>(1.171.134.546.691,08)</b> | <b>(1.016.439.806.551,51)</b> |

Berikut disajikan rincian akumulasi penyusutan per jenis aset tetap yang disusutkan:

**Tabel 5.3.136 Rincian Akumulasi Penyusutan per Jenis Aset Tetap**

| No | SKPD                                    | Akumulasi Penyusutan (Rp) |                     |                      |                    | 31 Desember 2021<br>(Rp) |
|----|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
|    |                                         | Peralatan dan Mesin       | Gedung dan Bangunan | JlJ                  | Aset Tetap Lainnya |                          |
| 1  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan         | (51.188.514.286,51)       | (59.902.864.558,00) | (144.028.854,00)     | (1.669.832,00)     | (111.237.077.530,51)     |
| 2  | Dinas Kesehatan                         | (52.743.126.069,00)       | (16.816.974.293,00) | (693.626.092,00)     | 0,00               | (70.253.726.454,00)      |
| 3  | RSUD Hasan Basry Kandangan              | (151.556.481.026,00)      | (21.707.706.479,00) | (6.969.831.939,00)   | 0,00               | (180.234.019.444,00)     |
| 4  | Dinas Pekerjaan Umum TR                 | (8.316.628.476,00)        | (2.803.790.733,00)  | (533.044.927.923,57) | 0,00               | (544.165.347.132,57)     |
| 5  | Dinas Perumahan Rakyat KPLH             | (23.425.526.694,00)       | (5.866.003.593,00)  | (44.276.376.918,00)  | 0,00               | (73.567.907.205,00)      |
| 6  | Satpol PP                               | (2.137.669.135,00)        | (118.112.133,00)    | 0,00                 | 0,00               | (2.255.781.268,00)       |
| 7  | BPBD                                    | (216.313.698,00)          | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | (216.313.698,00)         |
| 8  | Dinas Sosial                            | (1.880.137.520,00)        | (1.987.239.446,00)  | (15.196.302,00)      | (2.500.000,00)     | (3.885.073.268,00)       |
| 9  | Dinas Ketahanan Pangan                  | (1.015.644.825,00)        | (368.770.971,00)    | (299.955,00)         | 0,00               | (1.384.715.751,00)       |
| 10 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | (1.931.706.743,00)        | (81.669.302,00)     | (5.515.448,00)       | 0,00               | (2.018.891.493,00)       |





PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| No | SKPD                                    | Akumulasi Penyusutan (Rp) |                        |                    |                       | 31 Desember 2021<br>(Rp) |
|----|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
|    |                                         | Peralatan dan<br>Mesin    | Gedung dan<br>Bangunan | JIJ                | Aset Tetap<br>Lainnya |                          |
| 11 | Dinas Pemberdayaan Masy. Desa           | (578.932.143,00)          | (144.066.261,00)       | 0,00               | 0,00                  | (722.998.404,00)         |
| 12 | Dinas Pengendalian Penduduk, KBPPPA     | (4.235.243.455,00)        | (772.956.726,00)       | (8.088.769,00)     | 0,00                  | (5.016.288.950,00)       |
| 13 | Dinas Perhubungan                       | (10.825.268.343,00)       | (1.568.851.519,00)     | (3.542.804.339,00) | 0,00                  | (15.936.924.201,00)      |
| 14 | Dinas Komunikasi dan Informatika        | (5.733.732.805,00)        | (166.776.756,00)       | (46.552.333,00)    | 0,00                  | (5.947.061.894,00)       |
| 15 | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKP    | (2.984.982.416,00)        | (1.197.740.250,00)     | (44.638.947,00)    | 0,00                  | (4.227.361.613,00)       |
| 16 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP          | (1.224.640.079,00)        | (262.177.574,00)       | (3.361.038,00)     | 0,00                  | (1.490.178.691,00)       |
| 17 | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata    | (2.468.998.290,00)        | (11.396.469.988,00)    | (80.311.351,00)    | 0,00                  | (13.945.779.629,00)      |
| 18 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan        | (1.757.268.866,00)        | (371.568.869,00)       | (16.098.309,00)    | 0,00                  | (2.144.936.044,00)       |
| 19 | Dinas Perikanan                         | (3.235.637.036,00)        | (1.031.205.900,00)     | (950.477.069,00)   | 0,00                  | (5.217.320.005,00)       |
| 20 | Dinas Pertanian                         | (9.069.474.488,00)        | (7.205.543.824,00)     | (5.393.312.895,00) | 0,00                  | (21.668.331.207,00)      |
| 21 | Dinas Perdagangan                       | (2.194.105.736,00)        | (24.952.733.859,00)    | (368.937.957,00)   | 0,00                  | (27.515.777.552,00)      |
| 22 | Sekretariat Daerah                      | (499.236.704,00)          | (1.029.083.511,00)     | 0,00               | (1.245.000,00)        | (1.529.565.215,00)       |
| 23 | Bagian Hukum                            | (312.525.336,00)          | 0,00                   | 0,00               | 0,00                  | (312.525.336,00)         |
| 24 | Bagian Pemerintahan                     | (1.724.035.791,00)        | (84.624.708,00)        | 0,00               | 0,00                  | (1.808.660.499,00)       |
| 25 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | (1.149.339.470,00)        | (9.086.667,00)         | 0,00               | 0,00                  | (1.158.426.137,00)       |
| 26 | Bagian Kesejahteraan Rakyat             | (299.929.673,00)          | 0,00                   | 0,00               | 0,00                  | (299.929.673,00)         |
| 27 | Bagian Organisasi                       | (463.256.034,00)          | 0,00                   | 0,00               | 0,00                  | (463.256.034,00)         |
| 28 | Bagian Umum                             | (18.189.254.720,00)       | (6.178.943.533,00)     | (316.624.132,00)   | 0,00                  | (24.684.822.385,00)      |
| 29 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa        | (970.515.609,00)          | 0,00                   | 0,00               | 0,00                  | (970.515.609,00)         |
| 30 | Bagian Perekonomian dan Pembangunan     | (353.693.948,00)          | 0,00                   | 0,00               | 0,00                  | (353.693.948,00)         |
| 31 | Inspektorat Daerah                      | (1.786.192.487,00)        | (426.551.647,00)       | (35.552.040,00)    | 0,00                  | (2.248.296.174,00)       |
| 32 | BAPPELITBANGDA                          | (839.770.224,00)          | 0,00                   | (14.021.544,00)    | 0,00                  | (853.791.768,00)         |
| 33 | BPKPD                                   | (7.336.481.491,00)        | (1.941.446.813,00)     | (57.979.704,00)    | 0,00                  | (9.335.908.008,00)       |
| 34 | BKPSDM                                  | (2.257.484.915,00)        | (337.598.788,00)       | (564.583,00)       | 0,00                  | (2.595.648.286,00)       |
| 35 | Sekretariat DPRD                        | (4.692.438.179,00)        | (938.871.039,00)       | (13.940.295,00)    | 0,00                  | (5.645.249.513,00)       |
| 36 | Kecamatan Sungai Raya                   | (1.182.099.705,00)        | (184.844.945,00)       | (2.964.584,00)     | 0,00                  | (1.369.909.234,00)       |
| 37 | Kecamatan Padang Batung                 | (1.118.511.449,00)        | (554.587.182,00)       | (3.213.610,00)     | 0,00                  | (1.676.312.241,00)       |
| 38 | Kecamatan Telaga Langsat                | (842.280.891,00)          | (472.295.003,00)       | (520.306,00)       | 0,00                  | (1.315.096.200,00)       |
| 39 | Kecamatan Angkinang                     | (973.261.037,00)          | (515.876.066,00)       | 0,00               | 0,00                  | (1.489.137.103,00)       |
| 40 | Kecamatan Kandangan                     | (1.478.944.858,00)        | (791.084.707,00)       | (6.805.371,00)     | 0,00                  | (2.276.834.936,00)       |
| 41 | Kelurahan Kandangan Kota                | (264.439.576,00)          | (142.926.810,00)       | 0,00               | 0,00                  | (407.366.386,00)         |
| 42 | Kelurahan Kandangan Barat               | (301.708.751,00)          | (39.032.187,00)        | (1.182.481,00)     | 0,00                  | (341.923.419,00)         |
| 43 | Kelurahan Kandangan Utara               | (192.433.120,00)          | (100.527.920,00)       | (731.662,00)       | 0,00                  | (293.692.702,00)         |
| 44 | Kelurahan Jambu Hilir                   | (375.963.703,00)          | (11.469.523,00)        | (382.813,00)       | 0,00                  | (387.816.039,00)         |
| 45 | Kecamatan Simpur                        | (1.055.823.547,00)        | (447.527.778,00)       | (3.746.093,00)     | 0,00                  | (1.507.097.418,00)       |
| 46 | Kecamatan Daha Selatan                  | (1.217.443.473,00)        | (3.127.382.503,00)     | (2.295.200,00)     | 0,00                  | (4.347.121.176,00)       |
| 47 | Kecamatan Daha Utara                    | (1.267.374.602,00)        | (927.375.909,00)       | 0,00               | 0,00                  | (2.194.750.511,00)       |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| No           | SKPD                 | Akumulasi Penyusutan (Rp)   |                             |                             |                       | 31 Desember 2021 (Rp)         |
|--------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|              |                      | Peralatan dan Mesin         | Gedung dan Bangunan         | JIJ                         | Aset Tetap Lainnya    |                               |
| 48           | Kecamatan Kalumpang  | (1.110.466.135,00)          | (524.032.443,00)            | (593.333,00)                | 0,00                  | (1.635.091.911,00)            |
| 49           | Kecamatan Loksado    | (957.672.053,00)            | (367.106.525,00)            | (1.636.363,00)              | 0,00                  | (1.326.414.941,00)            |
| 50           | Kecamatan Daha Barat | (1.037.796.809,00)          | (468.483.674,00)            | (4.602.195,00)              | 0,00                  | (1.510.882.678,00)            |
| 51           | Badan Kesbangpol     | (3.485.143.207,00)          | (113.446.762,00)            | (144.409.808,00)            | 0,00                  | (3.742.999.777,00)            |
| <b>TOTAL</b> |                      | <b>(396.455.549.626,51)</b> | <b>(178.457.429.677,00)</b> | <b>(596.216.152.555,57)</b> | <b>(5.414.832,00)</b> | <b>(1.171.134.546.691,08)</b> |

Penjelasan lebih lanjut mengenai mutasi akumulasi masing-masing aset tetap adalah sebagai berikut:

#### 5.3.1.3.7.1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Saldo akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp396.455.549.626,51 dan Rp350.054.172.514,51 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

**Tabel 5.3.137 Rincian Mutasi Penyusutan Peralatan dan Mesin**

| NO | SKPD                                    | 31 Desember 2020 (Rp) | Mutasi (Rp)         |                    | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
|    |                                         |                       | Penambahan          | Pengurangan        |                       |
| 1  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan         | (44.028.745.499,51)   | (7.159.768.787,00)  | 0,00               | (51.188.514.286,51)   |
| 2  | Dinas Kesehatan                         | (46.461.731.873,00)   | (6.318.718.946,00)  | (37.324.750,00)    | (52.743.126.069,00)   |
| 3  | RSUD Hasan Basry Kandungan              | (133.879.390.202,00)  | (19.333.501.412,00) | (1.656.410.588,00) | (151.556.481.026,00)  |
| 4  | Dinas Pekerjaan Umum/PTSP               | (7.374.191.976,00)    | (973.011.500,00)    | (30.575.000,00)    | (8.316.628.476,00)    |
| 5  | Dinas Perumahan Rakyat KPLH             | (20.254.303.350,00)   | (3.829.380.516,00)  | (658.157.172,00)   | (23.425.526.694,00)   |
| 6  | Satuan Polisi Pamong Praja              | (1.448.065.718,00)    | (689.603.417,00)    | 0,00               | (2.137.669.135,00)    |
| 7  | BPBD                                    | 0,00                  | (216.313.698,00)    | 0,00               | (216.313.698,00)      |
| 8  | Dinas Sosial                            | (1.750.097.477,00)    | (132.696.043,00)    | (2.656.000,00)     | (1.880.137.520,00)    |
| 9  | Dinas Ketahanan Pangan                  | (922.254.941,00)      | (100.009.084,00)    | (6.619.200,00)     | (1.015.644.825,00)    |
| 10 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | (1.768.903.440,00)    | (210.230.803,00)    | (47.427.500,00)    | (1.931.706.743,00)    |
| 11 | Dinas Pemberdayaan Masy. Desa           | (496.713.557,00)      | (106.628.586,00)    | (24.410.000,00)    | (578.932.143,00)      |
| 12 | Dinas Pengendalian Penduduk, KBPPPA     | (3.854.630.977,00)    | (394.192.478,00)    | (13.580.000,00)    | (4.235.243.455,00)    |
| 13 | Dinas Perhubungan                       | (9.730.167.433,00)    | (1.098.280.910,00)  | (3.180.000,00)     | (10.825.268.343,00)   |
| 14 | Dinas Komunikasi dan Informatika        | (4.532.098.017,00)    | (1.201.634.788,00)  | 0,00               | (5.733.732.805,00)    |
| 15 | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKP    | (2.809.417.963,00)    | (180.074.453,00)    | (4.510.000,00)     | (2.984.982.416,00)    |
| 16 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP          | (994.254.061,00)      | (248.258.831,00)    | (17.872.813,00)    | (1.224.640.079,00)    |
| 17 | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata    | (2.168.126.525,00)    | (328.871.765,00)    | (28.000.000,00)    | (2.468.998.290,00)    |
| 18 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan        | (1.509.087.878,00)    | (256.524.426,00)    | (8.343.438,00)     | (1.757.268.866,00)    |
| 19 | Dinas Perikanan                         | (3.007.826.018,00)    | (227.811.018,00)    | 0,00               | (3.235.637.036,00)    |
| 20 | Dinas Pertanian                         | (8.514.294.224,00)    | (594.655.264,00)    | (39.475.000,00)    | (9.069.474.488,00)    |
| 21 | Dinas Perdagangan                       | (1.791.876.869,00)    | (402.228.867,00)    | 0,00               | (2.194.105.736,00)    |
| 22 | Sekretariat Daerah                      | (419.637.500,00)      | (79.599.204,00)     | 0,00               | (499.236.704,00)      |
| 23 | Bagian Hukum                            | (267.431.260,00)      | (47.476.976,00)     | (2.382.900,00)     | (312.525.336,00)      |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| NO           | SKPD                                    | 31 Desember 2020<br>(Rp)    | Mutasi (Rp)                |                           | 31 Desember 2021<br>(Rp)    |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|              |                                         |                             | Penambahan                 | Pengurangan               |                             |
| 24           | Bagian Pemerintahan                     | (1.646.954.361,00)          | (90.081.430,00)            | (13.000.000,00)           | (1.724.035.791,00)          |
| 25           | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | (966.711.518,00)            | (191.627.952,00)           | (9.000.000,00)            | (1.149.339.470,00)          |
| 26           | Bagian Kesejahteraan Rakyat             | (265.438.252,00)            | (35.302.421,00)            | (811.000,00)              | (299.929.673,00)            |
| 27           | Bagian Organisasi                       | (428.665.537,00)            | (34.590.497,00)            | 0,00                      | (463.256.034,00)            |
| 28           | Bagian Umum                             | (16.423.446.676,00)         | (2.334.175.624,00)         | (568.367.580,00)          | (18.189.254.720,00)         |
| 29           | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa        | (817.681.898,00)            | (152.833.711,00)           | 0,00                      | (970.515.609,00)            |
| 30           | Bagian Perekonomian dan Pembangunan     | (313.187.258,00)            | (52.131.690,00)            | (11.625.000,00)           | (353.693.948,00)            |
| 31           | Inspektorat Daerah                      | (1.630.861.258,00)          | (155.331.229,00)           | 0,00                      | (1.786.192.487,00)          |
| 32           | BAPPELITBANGDA                          | (1.789.212.982,00)          | (38.826.323,00)            | (988.269.081,00)          | (839.770.224,00)            |
| 33           | BPKPD                                   | (6.557.176.025,00)          | (1.042.043.270,00)         | (262.737.804,00)          | (7.336.481.491,00)          |
| 34           | BKPSDM                                  | (1.920.563.873,00)          | (341.350.042,00)           | (4.429.000,00)            | (2.257.484.915,00)          |
| 35           | Sekretariat DPRD                        | (4.059.086.428,00)          | (633.351.751,00)           | 0,00                      | (4.692.438.179,00)          |
| 36           | Kecamatan Sungai Raya                   | (1.102.432.381,00)          | (79.667.324,00)            | 0,00                      | (1.182.099.705,00)          |
| 37           | Kecamatan Padang Batung                 | (1.016.256.143,00)          | (109.605.306,00)           | (7.350.000,00)            | (1.118.511.449,00)          |
| 38           | Kecamatan Telaga Langsat                | (751.525.808,00)            | (94.963.416,00)            | (4.208.333,00)            | (842.280.891,00)            |
| 39           | Kecamatan Angkinang                     | (910.703.974,00)            | (75.671.180,00)            | (13.114.117,00)           | (973.261.037,00)            |
| 40           | Kecamatan Kandangan                     | (1.310.493.284,00)          | (168.451.574,00)           | 0,00                      | (1.478.944.858,00)          |
| 41           | Kelurahan Kandangan Kota                | (208.357.178,00)            | (56.082.398,00)            | 0,00                      | (264.439.576,00)            |
| 42           | Kelurahan Kandangan Barat               | (237.207.426,00)            | (64.501.325,00)            | 0,00                      | (301.708.751,00)            |
| 43           | Kelurahan Kandangan Utara               | (145.104.355,00)            | (51.457.465,00)            | (4.128.700,00)            | (192.433.120,00)            |
| 44           | Kelurahan Jambu Hilir                   | (281.259.785,00)            | (94.703.918,00)            | 0,00                      | (375.963.703,00)            |
| 45           | Kecamatan Simpur                        | (960.252.618,00)            | (95.570.929,00)            | 0,00                      | (1.055.823.547,00)          |
| 46           | Kecamatan Daha Selatan                  | (1.081.709.622,00)          | (135.733.851,00)           | 0,00                      | (1.217.443.473,00)          |
| 47           | Kecamatan Daha Utara                    | (1.135.465.393,00)          | (131.909.209,00)           | 0,00                      | (1.267.374.602,00)          |
| 48           | Kecamatan Kalumpang                     | (955.512.243,00)            | (154.953.892,00)           | 0,00                      | (1.110.466.135,00)          |
| 49           | Kecamatan Loksado                       | (872.695.323,00)            | (84.976.730,00)            | 0,00                      | (957.672.053,00)            |
| 50           | Kecamatan Daha Barat                    | (966.015.185,00)            | (107.335.624,00)           | (35.554.000,00)           | (1.037.796.809,00)          |
| 51           | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik       | (3.316.948.972,00)          | (169.694.235,00)           | (1.500.000,00)            | (3.485.143.207,00)          |
| <b>TOTAL</b> |                                         | <b>(350.054.172.514,51)</b> | <b>(50.906.396.088,00)</b> | <b>(4.505.018.976,00)</b> | <b>(396.455.549.626,51)</b> |

Mutasi akumulasi penyusutan aset tetap Peralatan dan Mesin selama Tahun 2021 dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Mutasi yang mempengaruhi penambahan penyusutan aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp50.906.396.088,00 terdiri dari:
  - Mutasi masuk antar SKPD yang menambah nilai penyusutan sebesar Rp977.508.517,00.
  - Penambahan karena adanya beban penyusutan yang terjadi selama TA 2021 sebesar Rp49.928.887.571,00 (penjelasan lebih lanjut mengenai beban penyusutan ada pada Bab Laporan Operasional).



2. Mutasi yang mempengaruhi pengurangan penyusutan aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.505.018.976,00 terdiri dari:
- Mutasi keluar antar SKPD yang mengurangi nilai penyusutan sebesar Rp977.508.517,00.
  - Pengurangan karena aset yang dihapuskan sebesar Rp2.004.621.871,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.138 Rincian Penyusutan karena Penghapusan**

| No            | SKPD                                 | Nilai Aset (Rp)         | Nilai Penyusutan (Rp)   |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1             | Dinas Kesehatan                      | 42.724.750,00           | 37.324.750,00           |
| 2             | RSUD Hasan Basry                     | 80.000.000,00           | 80.000.000,00           |
| 3             | Dinas Pekerjaan Umum dan TR          | 30.575.000,00           | 30.575.000,00           |
| 4             | Dinas Perumahan Rakyat KPLH          | 487.088.324,00          | 473.157.172,00          |
| 5             | Dinas Sosial                         | 2.656.000,00            | 2.656.000,00            |
| 6             | Dinas Ketahanan Pangan               | 6.619.200,00            | 6.619.200,00            |
| 7             | Dinas Kependudukan dan Catpil        | 36.467.500,00           | 36.467.500,00           |
| 8             | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa   | 24.410.000,00           | 24.410.000,00           |
| 9             | Dinas PPKBPPPA                       | 13.580.000,00           | 13.580.000,00           |
| 10            | Dinas Perhubungan                    | 3.180.000,00            | 3.180.000,00            |
| 11            | Dinas Tenaga Kerja KUKP              | 4.510.000,00            | 4.510.000,00            |
| 12            | Dinas Penanaman Modal PTSP           | 18.165.000,00           | 17.872.813,00           |
| 13            | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata | 28.000.000,00           | 28.000.000,00           |
| 14            | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan     | 8.695.000,00            | 8.343.438,00            |
| 15            | Dinas Pertanian                      | 39.475.000,00           | 39.475.000,00           |
| 16            | Bagian Hukum                         | 2.382.900,00            | 2.382.900,00            |
| 17            | Bagian Pemerintahan                  | 13.000.000,00           | 13.000.000,00           |
| 18            | Bagian Protokol dan Kopim            | 9.000.000,00            | 9.000.000,00            |
| 19            | Bagian Kesejahteraan Rakyat          | 811.000,00              | 811.000,00              |
| 20            | Bagian Umum                          | 20.000.000,00           | 20.000.000,00           |
| 21            | Bagian Perekonomian                  | 11.625.000,00           | 11.625.000,00           |
| 22            | BAPPELITBANGDA                       | 1.248.482.330,00        | 988.269.081,00          |
| 23            | BKPSDM                               | 4.429.000,00            | 83.078.867,00           |
| 24            | BPKPD                                | 83.412.200,00           | 4.429.000,00            |
| 25            | Kecamatan Padang Batung              | 7.350.000,00            | 7.350.000,00            |
| 26            | Kecamatan Telaga Langsat             | 4.750.000,00            | 4.208.333,00            |
| 27            | Kecamatan Angkinang                  | 13.283.700,00           | 13.114.117,00           |
| 28            | Kelurahan Kandangan Utara            | 4.128.700,00            | 4.128.700,00            |
| 29            | Kecamatan Daha Barat                 | 35.554.000,00           | 35.554.000,00           |
| 30            | Badan Kesbangpol                     | 1.500.000,00            | 1.500.000,00            |
| <b>Jumlah</b> |                                      | <b>2.285.854.604,00</b> | <b>2.004.621.871,00</b> |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

- Pengurangan karena aset yang direklasifikasi ke aset rusak berat sebesar Rp1.522.888.588,00 pada beberapa SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.139 Rincian Penyusutan karena Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin**

| No.          | SKPD                        | Reklas ke        | Nilai Penyusutan (Rp)   | Keterangan                     |
|--------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1            | RSUD Hasan Basry            | Aset rusak berat | 1.337.888.588,00        | Alat-alat kedokteran/kesehatan |
| 2            | Dinas Perumahan Rakyat KPLH | Aset rusak berat | 185.000.000,00          | Truk pengangkut sampah         |
| <b>Total</b> |                             |                  | <b>1.522.888.588,00</b> |                                |

### 5.3.1.3.7.2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Saldo akumulasi penyusutan gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp178.457.429.677,00 dan Rp154.546.033.122,00 dengan rincian mutasi dan penjelasannya sebagai berikut:

**Tabel 5.3.140 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan**

| NO | SKPD                                    | 31 Desember 2020 (Rp) | Mutasi (Rp)        |                  | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
|    |                                         |                       | Penambahan         | Pengurangan      |                       |
| 1  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan         | (54.715.677.005,00)   | (6.092.571.505,00) | (905.383.952,00) | (59.902.864.558,00)   |
| 2  | Dinas Kesehatan                         | (13.911.926.034,00)   | (3.017.392.748,00) | (112.344.489,00) | (16.816.974.293,00)   |
| 3  | RSUD Hasan Basry Kandungan              | (17.764.156.286,00)   | (3.943.550.193,00) | 0,00             | (21.707.706.479,00)   |
| 4  | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang     | (1.722.686.866,00)    | (1.081.103.867,00) | 0,00             | (2.803.790.733,00)    |
| 5  | Dinas Perumahan Rakyat KPLH             | (4.875.930.341,00)    | (991.874.090,00)   | (1.800.838,00)   | (5.866.003.593,00)    |
| 6  | Satpol PP                               | (87.053.415,00)       | (31.058.718,00)    | 0,00             | (118.112.133,00)      |
| 7  | Dinas Sosial                            | (1.778.717.068,00)    | (208.522.378,00)   | 0,00             | (1.987.239.446,00)    |
| 8  | Dinas Ketahanan Pangan                  | (330.562.324,00)      | (38.208.647,00)    | 0,00             | (368.770.971,00)      |
| 9  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | (70.863.452,00)       | (10.805.850,00)    | 0,00             | (81.669.302,00)       |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Masy. Desa           | (131.329.675,00)      | (12.736.586,00)    | 0,00             | (144.066.261,00)      |
| 11 | Dinas Pengendalian Penduduk KBPPPA      | (655.715.180,00)      | (117.241.546,00)   | 0,00             | (772.956.726,00)      |
| 12 | Dinas Perhubungan                       | (1.390.363.500,00)    | (178.488.019,00)   | 0,00             | (1.568.851.519,00)    |
| 13 | Dinas Komunikasi dan Informatika        | (136.534.778,00)      | (30.241.978,00)    | 0,00             | (166.776.756,00)      |
| 14 | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKP    | (1.065.518.142,00)    | (132.222.108,00)   | 0,00             | (1.197.740.250,00)    |
| 15 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP          | (212.264.663,00)      | (49.912.911,00)    | 0,00             | (262.177.574,00)      |
| 16 | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata    | (9.206.287.587,00)    | (2.190.182.401,00) | 0,00             | (11.396.469.988,00)   |
| 17 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan        | (296.968.917,00)      | (95.426.834,00)    | (20.826.882,00)  | (371.568.869,00)      |
| 18 | Dinas Perikanan                         | (913.153.069,00)      | (118.052.831,00)   | 0,00             | (1.031.205.900,00)    |
| 19 | Dinas Pertanian                         | (6.575.349.519,00)    | (630.194.305,00)   | 0,00             | (7.205.543.824,00)    |
| 20 | Dinas Perdagangan                       | (21.741.482.439,00)   | (3.211.251.420,00) | 0,00             | (24.952.733.859,00)   |
| 21 | Sekretariat Daerah                      | (953.010.966,00)      | (76.072.545,00)    | 0,00             | (1.029.083.511,00)    |
| 22 | Bagian Pemerintahan                     | (74.570.949,00)       | (10.053.759,00)    | 0,00             | (84.624.708,00)       |
| 23 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | (8.334.667,00)        | (752.000,00)       | 0,00             | (9.086.667,00)        |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| NO           | SKPD                              | 31 Desember 2020<br>(Rp)    | Mutasi (Rp)                |                           | 31 Desember 2021<br>(Rp)    |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|              |                                   |                             | Penambahan                 | Pengurangan               |                             |
| 24           | Bagian Umum                       | (5.376.807.496,00)          | (802.136.037,00)           | 0,00                      | (6.178.943.533,00)          |
| 25           | Inspektorat Daerah                | (384.018.243,00)            | (42.533.404,00)            | 0,00                      | (426.551.647,00)            |
| 26           | BPKPD                             | (1.701.732.735,00)          | (300.013.927,00)           | (60.299.849,00)           | (1.941.446.813,00)          |
| 27           | BKPSDM                            | (301.215.080,00)            | (36.383.708,00)            | 0,00                      | (337.598.788,00)            |
| 28           | Sekretariat DPRD                  | (836.777.747,00)            | (102.093.292,00)           | 0,00                      | (938.871.039,00)            |
| 29           | Kecamatan Sungai Raya             | (143.922.702,00)            | (40.922.243,00)            | 0,00                      | (184.844.945,00)            |
| 30           | Kecamatan Padang Batung           | (435.181.783,00)            | (119.405.399,00)           | 0,00                      | (554.587.182,00)            |
| 31           | Kecamatan Telaga Langsat          | (421.403.033,00)            | (50.891.970,00)            | 0,00                      | (472.295.003,00)            |
| 32           | Kecamatan Angkinang               | (404.736.754,00)            | (111.139.312,00)           | 0,00                      | (515.876.066,00)            |
| 33           | Kecamatan Kandangan               | (645.963.690,00)            | (145.121.017,00)           | 0,00                      | (791.084.707,00)            |
| 34           | Kelurahan Kandangan Kota          | (123.293.970,00)            | (19.632.840,00)            | 0,00                      | (142.926.810,00)            |
| 35           | Kelurahan Kandangan Barat         | (50.896.194,00)             | (8.914.282,00)             | (20.778.289,00)           | (39.032.187,00)             |
| 36           | Kelurahan Kandangan Utara         | (81.100.471,00)             | (20.864.116,00)            | (1.436.667,00)            | (100.527.920,00)            |
| 37           | Kelurahan Jambu Hilir             | (3.265.652,00)              | (8.203.871,00)             | 0,00                      | (11.469.523,00)             |
| 38           | Kecamatan Simpur                  | (349.095.708,00)            | (98.432.070,00)            | 0,00                      | (447.527.778,00)            |
| 39           | Kecamatan Daha Selatan            | (2.618.673.112,00)          | (508.709.391,00)           | 0,00                      | (3.127.382.503,00)          |
| 40           | Kecamatan Daha Utara              | (803.444.920,00)            | (123.930.989,00)           | 0,00                      | (927.375.909,00)            |
| 41           | Kecamatan Kalumpang               | (434.422.129,00)            | (89.610.314,00)            | 0,00                      | (524.032.443,00)            |
| 42           | Kecamatan Loksado                 | (319.774.847,00)            | (47.331.678,00)            | 0,00                      | (367.106.525,00)            |
| 43           | Kecamatan Daha Barat              | (397.724.474,00)            | (70.759.200,00)            | 0,00                      | (468.483.674,00)            |
| 44           | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | (94.125.540,00)             | (19.321.222,00)            | 0,00                      | (113.446.762,00)            |
| <b>TOTAL</b> |                                   | <b>(154.546.033.122,00)</b> | <b>(25.034.267.521,00)</b> | <b>(1.122.870.966,00)</b> | <b>(178.457.429.677,00)</b> |

Mutasi akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan selama TA 2021 berasal dari:

1. Mutasi yang mempengaruhi penambahan penyusutan aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp25.034.267.521,00 terdiri dari:
  - Mutasi masuk antar SKPD yang menambah nilai penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp145.331.993,00.
  - Penambahan berupa beban penyusutan selama TA 2021 sebesar Rp24.888.935.528,00 (secara rinci dijelaskan pada Beban Penyusutan dan Amortisasi Bab Laporan Operasional).
2. Mutasi yang mempengaruhi pengurangan penyusutan aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.122.870.966,00 terdiri dari:
  - Mutasi keluar antar SKPD yang mengurangi nilai penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp145.331.993,00.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

- Pengurangan karena penghapusan bangunan rusak berat sebesar Rp28.034.183,00, yaitu Puskesmas Pembantu Bangkau dan Muning Baru pada Dinas Kesehatan.
- Pengurangan karena adanya kapitalisasi sebesar Rp949.504.790,00 pada beberapa SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.141 Daftar Penyusutan Karena Kapitalisasi**

| No.          | SKPD                             | Jumlah (Rp)           |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1            | Dinas Pendidikan                 | 905.383.952,00        |
| 2            | Dinas Kesehatan                  | 1.079.000,00          |
| 3            | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 20.826.882,00         |
| 4            | Kelurahan Kandangan Barat        | 20.778.289,00         |
| 5            | Kelurahan Kandangan Utara        | 1.436.667,00          |
| <b>Total</b> |                                  | <b>949.504.790,00</b> |

#### 5.3.1.3.7.3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo akumulasi penyusutan gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp596.216.152.555,57 dan Rp511.835.855.915,00 dengan rincian mutasi dan penjelasannya sebagai berikut:

**Tabel 5.3.142 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi**

| NO | SKPD                                    | 31 Desember 2020 (Rp) | Mutasi (Rp)         |                     | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|    |                                         |                       | Penambahan          | Pengurangan         |                       |
| 1  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan         | (123.131.798,00)      | (20.897.056,00)     | 0,00                | (144.028.854,00)      |
| 2  | Dinas Kesehatan                         | (549.909.238,00)      | (143.716.854,00)    | 0,00                | (693.626.092,00)      |
| 3  | RSUD Hasan Basry Kandangan              | (5.235.628.188,00)    | (1.734.203.751,00)  | 0,00                | (6.969.831.939,00)    |
| 4  | Dinas Pekerjaan Umum TR                 | (458.414.373.686,00)  | (92.159.028.373,57) | (17.528.474.136,00) | (533.044.927.923,57)  |
| 5  | Dinas Perumahan Rakyat KPLH             | (37.517.238.479,00)   | (6.759.138.439,00)  | 0,00                | (44.276.376.918,00)   |
| 6  | Dinas Sosial                            | (12.563.923,00)       | (2.632.379,00)      | 0,00                | (15.196.302,00)       |
| 7  | Dinas Ketahanan Pangan                  | (209.539,00)          | (90.416,00)         | 0,00                | (299.955,00)          |
| 8  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | (4.749.923,00)        | (765.525,00)        | 0,00                | (5.515.448,00)        |
| 9  | Dinas Pengendalian Penduduk KBPPPA      | (6.724.227,00)        | (1.364.542,00)      | 0,00                | (8.088.769,00)        |
| 10 | Dinas Perhubungan                       | (3.174.253.147,00)    | (368.551.192,00)    | 0,00                | (3.542.804.339,00)    |
| 11 | Dinas Komunikasi dan Informatika        | (43.190.107,00)       | (3.362.226,00)      | 0,00                | (46.552.333,00)       |
| 12 | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKP    | (41.764.346,00)       | (2.874.601,00)      | 0,00                | (44.638.947,00)       |
| 13 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP          | (2.297.800,00)        | (1.063.238,00)      | 0,00                | (3.361.038,00)        |
| 14 | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata    | (54.347.370,00)       | (25.963.981,00)     | 0,00                | (80.311.351,00)       |
| 15 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan        | (13.969.323,00)       | (2.128.986,00)      | 0,00                | (16.098.309,00)       |
| 16 | Dinas Perikanan                         | (863.311.289,00)      | (87.165.780,00)     | 0,00                | (950.477.069,00)      |





PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| NO           | SKPD                              | 31 Desember 2020<br>(Rp)    | Mutasi (Rp)                 |                            | 31 Desember 2021<br>(Rp)    |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|              |                                   |                             | Penambahan                  | Pengurangan                |                             |
| 17           | Dinas Pertanian                   | (5.008.440.137,00)          | (384.872.758,00)            | 0,00                       | (5.393.312.895,00)          |
| 18           | Dinas Perdagangan                 | (341.854.357,00)            | (27.083.600,00)             | 0,00                       | (368.937.957,00)            |
| 19           | Bagian Umum                       | (290.174.447,00)            | (26.449.685,00)             | 0,00                       | (316.624.132,00)            |
| 20           | Inspektorat Daerah                | (31.474.790,00)             | (4.077.250,00)              | 0,00                       | (35.552.040,00)             |
| 21           | BAPPELITBANGDA                    | (12.337.027,00)             | (1.684.517,00)              | 0,00                       | (14.021.544,00)             |
| 22           | BPKPD                             | (48.971.020,00)             | (9.008.684,00)              | 0,00                       | (57.979.704,00)             |
| 23           | BKPSDM                            | 0,00                        | (564.583,00)                | 0,00                       | (564.583,00)                |
| 24           | Sekretariat DPRD                  | (11.515.013,00)             | (2.425.282,00)              | 0,00                       | (13.940.295,00)             |
| 25           | Kecamatan Sungai Raya             | (2.477.084,00)              | (487.500,00)                | 0,00                       | (2.964.584,00)              |
| 26           | Kecamatan Padang Batung           | (2.194.700,00)              | (1.018.910,00)              | 0,00                       | (3.213.610,00)              |
| 27           | Kecamatan Telaga Langsat          | (289.059,00)                | (231.247,00)                | 0,00                       | (520.306,00)                |
| 28           | Kecamatan Kandangan               | (5.208.019,00)              | (1.597.352,00)              | 0,00                       | (6.805.371,00)              |
| 29           | Kelurahan Kandangan Barat         | (536.142,00)                | (646.339,00)                | 0,00                       | (1.182.481,00)              |
| 30           | Kelurahan Kandangan Utara         | (640.204,00)                | (91.458,00)                 | 0,00                       | (731.662,00)                |
| 31           | Keluurahan Jambu Hilir            | (199.063,00)                | (183.750,00)                | 0,00                       | (382.813,00)                |
| 32           | Kecamatan Simpur                  | (288.161,00)                | (3.457.932,00)              | 0,00                       | (3.746.093,00)              |
| 33           | Kecamatan Daha Selatan            | (2.035.400,00)              | (259.800,00)                | 0,00                       | (2.295.200,00)              |
| 34           | Kecamatan Kalumpang               | (553.333,00)                | (40.000,00)                 | 0,00                       | (593.333,00)                |
| 35           | Kecamatan Loksado                 | (1.527.272,00)              | (109.091,00)                | 0,00                       | (1.636.363,00)              |
| 36           | Kecamatan Daha Barat              | (3.869.994,00)              | (732.201,00)                | 0,00                       | (4.602.195,00)              |
| 37           | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | (13.608.310,00)             | (130.801.498,00)            | 0,00                       | (144.409.808,00)            |
| <b>TOTAL</b> |                                   | <b>(511.835.855.915,00)</b> | <b>(101.908.770.776,57)</b> | <b>(17.528.474.136,00)</b> | <b>(596.216.152.555,57)</b> |

Mutasi akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan selama TA 2021 berasal dari:

1. Mutasi yang mempengaruhi penambahan penyusutan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp101.908.770.776,57 berasal dari beban penyusutan tahun berjalan (lebih lanjut dijelaskan pada Bab Laporan Operasional bagian Beban Penyusutan dan Amortisasi pada laporan ini).
2. Mutasi yang mempengaruhi pengurangan penyusutan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp17.528.474.136,00 karena adanya penghapusan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupa penghapusan trotoar dan jalan nasional arteri.

#### 5.3.1.3.7.4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp5.414.832,00 dan Rp3.745.000,00. Penyusutan aset tetap lainnya dilakukan terhadap aset tetap lainnya selain buku, tanaman, dan hewan





ternak. Oleh karena itu dilakukan koreksi terhadap saldo aset tetap lainnya pada beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.143 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya**

| NO           | SKPD                            | 31 Desember 2020<br>(Rp) | Mutasi (Rp)           |             | 31 Desember 2021<br>(Rp) |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|
|              |                                 |                          | Penambahan            | Pengurangan |                          |
| 1            | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0,00                     | (1.669.832,00)        | 0,00        | (1.669.832,00)           |
| 2            | Dinas Sosial                    | (2.500.000,00)           | 0,00                  | 0,00        | (2.500.000,00)           |
| 3            | Sekretariat Daerah              | (1.245.000,00)           | 0,00                  | 0,00        | (1.245.000,00)           |
| <b>TOTAL</b> |                                 | <b>(3.745.000,00)</b>    | <b>(1.669.832,00)</b> | <b>0,00</b> | <b>(5.414.832,00)</b>    |

Mutasi akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya selama TA 2021 berasal dari penambahan karena adanya beban penyusutan tahun berjalan sebesar Rp1.669.932,00.

#### 5.3.1.4 Dana Cadangan

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak mempunyai saldo atas Dana Cadangan pada Tahun Anggaran 2020 dan 2021.

#### 5.3.1.5 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp10.264.422.391,00 dan Rp8.351.368.121,00. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 naik sebesar Rp1.913.054.270,00 atau 22,91% dari total Aset Lainnya Tahun 2020. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh adanya penambahan pada aset tidak berwujud. Saldo Aset Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain serta Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.144 Ringkasan Aset Lainnya**

| Aset Lainnya                             | 31 Desember 2021<br>(Rp) | 31 Desember 2020<br>(Rp) |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Aset Tidak Berwujud                      | 7.958.172.770,11         | 5.385.856.330,11         |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | (3.653.676.285,11)       | (2.983.076.650,11)       |
| <b>Aset Tak Berwujud Neto</b>            | <b>4.304.496.485,00</b>  | <b>2.402.779.680,00</b>  |
| Aset Lain-lain                           | 19.297.918.798,00        | 17.916.176.793,00        |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain      | (13.337.992.892,00)      | (11.967.588.352,00)      |
| <b>Aset Lain-lain Neto</b>               | <b>5.959.925.906,00</b>  | <b>5.948.588.441,00</b>  |
| <b>Jumlah Aset Lainnya</b>               | <b>10.264.422.391,00</b> | <b>8.351.368.121,00</b>  |

##### 5.3.1.5.1 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp7.958.172.770,11 dan Rp5.385.856.330,11 merupakan aset dalam bentuk *software* dan dokumen kajian hasil penelitian maupun pendataan. Saldo untuk Aset Tidak Berwujud bertambah sebesar Rp2.572.316.440,00 atau



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

47,76% dari saldo per 31 Desember 2020 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.145 Rincian Aset Tidak Berwujud per SKPD**

| NO            | SKPD                                             | 31 Desember 2021<br>(Rp) | 31 Desember 2020<br>(Rp) |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1             | Dinas Pendidikan                                 | 1.086.956.680,11         | 272.681.680,11           |
| 2             | Dinas Kesehatan                                  | 285.006.000,00           | 273.106.000,00           |
| 3             | RSUD Hasan Basry Kandangan                       | 102.104.350,00           | 85.309.950,00            |
| 4             | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang              | 3.352.547.440,00         | 2.005.200.400,00         |
| 5             | Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH                 | 511.264.000,00           | 442.539.000,00           |
| 6             | Dinas Sosial                                     | 9.850.000,00             | 9.850.000,00             |
| 7             | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil             | 10.500.000,00            | 5.000.000,00             |
| 8             | Dinas Perhubungan                                | 10.000.000,00            | 10.000.000,00            |
| 9             | Dinas Komunikasi dan Informatika                 | 212.508.000,00           | 111.708.000,00           |
| 10            | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKP             | 14.630.000,00            | 14.630.000,00            |
| 11            | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                   | 190.759.000,00           | 190.759.000,00           |
| 12            | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata             | 111.825.000,00           | 14.850.000,00            |
| 13            | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                 | 349.067.000,00           | 349.067.000,00           |
| 14            | Dinas Perikanan                                  | 100.000.000,00           | 0,00                     |
| 15            | Dinas Perdagangan                                | 28.950.000,00            | 28.950.000,00            |
| 16            | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan          | 33.720.000,00            | 33.720.000,00            |
| 17            | Bagian Organisasi                                | 39.213.000,00            | 39.213.000,00            |
| 18            | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa                 | 57.400.000,00            | 57.400.000,00            |
| 19            | BAPPELITBANGDA                                   | 512.760.000,00           | 512.760.000,00           |
| 20            | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 754.602.300,00           | 744.602.300,00           |
| 21            | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM           | 184.510.000,00           | 184.510.000,00           |
| <b>Jumlah</b> |                                                  | <b>7.958.172.770,11</b>  | <b>5.385.856.330,11</b>  |

Berikut disajikan rincian jenis aset tidak berwujud pada masing-masing SKPD.

**Tabel 5.3.146 Daftar Rincian Jenis Aset Tidak Berwujud**

| NO | SKPD                       | Nama Barang                                        | Nilai<br>(Rp)  | Jumlah<br>(Rp)   |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 1  | Dinas Pendidikan           | Software                                           | 989.140.680,11 | 1.086.956.680,11 |
|    |                            | Microsoft Windows Server/Microsoft Office Standard | 97.816.000,00  |                  |
| 2  | Dinas Kesehatan            | Masterplan Rumah Sakit Daha Sejahtera              | 273.106.000,00 | 285.006.000,00   |
|    |                            | Software                                           | 11.900.000,00  |                  |
| 3  | RSUD Hasan Basry Kandangan | Software/Aplikasi                                  | 34.798.500,00  | 102.104.350,00   |
|    |                            | Lisensi windows                                    | 16.794.400,00  |                  |
|    |                            | Aplikasi Mobile Android ROKET                      | 50.511.450,00  |                  |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| NO | SKPD                                 | Nama Barang                                  | Nilai (Rp)     | Jumlah (Rp)      |
|----|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------------|
| 4  | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  | Masterplan RDTRK                             | 585.946.900,00 | 3.352.547.440,00 |
|    |                                      | Dokumen UPL UKL Pembangunan Drainase         | 618.248.000,00 |                  |
|    |                                      | Dokumen UPL UKL Perkuatan tebing             | 247.176.300,00 |                  |
|    |                                      | Dokumen UKL-UPL Jembatan                     | 93.260.000,00  |                  |
|    |                                      | Dokumen survey JIJ                           | 759.220.740,00 |                  |
|    |                                      | Dokumen RISPAM                               | 97.865.000,00  |                  |
|    |                                      | Desain e-PAKSI                               | 99.825.000,00  |                  |
|    |                                      | DED saluran drainase perkotaan Kandangan     | 267.800.000,00 |                  |
|    |                                      | Desain teknil sipil air                      | 50.000.000,00  |                  |
|    |                                      | Masterplan drainase                          | 225.014.000,00 |                  |
|    |                                      | Masterplan air minum                         | 239.699.000,00 |                  |
|    |                                      | RAD AMPL Kab. HSS                            | 68.492.500,00  |                  |
| 5  | Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH     | AreGIS                                       | 49.713.000,00  | 511.264.000,00   |
|    |                                      | Pendataan RTH                                | 182.175.000,00 |                  |
|    |                                      | Pendataan PJU                                | 210.651.000,00 |                  |
|    |                                      | Kajian Pemukiman                             | 68.725.000,00  |                  |
| 6  | Dinas Sosial                         | Aplikasi Pengelolaan Data PMKS-PSKS          | 9.850.000,00   | 9.850.000,00     |
| 7  | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Software antivirus                           | 10.500.000,00  | 10.500.000,00    |
| 8  | Dinas Perhubungan                    | Aplikasi SIM-PKB                             | 10.000.000,00  | 10.000.000,00    |
| 9  | Dinas Komunikasi dan Informatika     | Software Video Editing                       | 13.500.000,00  | 212.508.000,00   |
|    |                                      | Software pusat data, windows                 | 100.800.000,00 |                  |
|    |                                      | Aplikasi e-commerce                          | 98.208.000,00  |                  |
| 10 | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKP | Software Sistem Informasi                    | 14.630.000,00  | 14.630.000,00    |
| 11 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP       | Software                                     | 39.330.500,00  | 190.759.000,00   |
|    |                                      | Software Perijinan                           | 50.598.500,00  |                  |
|    |                                      | Software Pelayanan Perijinan                 | 100.830.000,00 |                  |
| 12 | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata | Aplikasi Sipandu wisata                      | 14.850.000,00  | 111.825.000,00   |
|    |                                      | Grand design wisata air panas Tanuhi         | 96.975.000,00  |                  |
| 13 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan     | Software                                     | 35.460.000,00  | 349.067.000,00   |
|    |                                      | Software Website Sistem Manajemen Lingkungan | 13.770.000,00  |                  |
|    |                                      | E-BOOK/ DIGITAL LIBRARY                      | 299.837.000,00 |                  |
| 14 | Dinas Perikanan                      | Masterplan Pengembangan Ikan Gabus           | 100.000.000,00 | 100.000.000,00   |
| 15 | Dinas Perdagangan                    | Designer Aplikasi                            | 15.950.000,00  | 28.950.000,00    |
|    |                                      | Aplikasi Sidodol dan Sihapok                 | 13.000.000,00  |                  |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| NO            | SKPD                          | Nama Barang                                         | Nilai (Rp)     | Jumlah (Rp)             |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 16            | Bagian Pengadaan Barang/Jasa  | Database Hasil-hasil Pembangunan                    | 48.400.000,00  | 57.400.000,00           |
|               |                               | Software windows                                    | 9.000.000,00   |                         |
| 17            | Bagian Protokol dan Kehumasan | Hosting (masternet.web) Sistem Informasi Protokoler | 28.720.000,00  | 33.720.000,00           |
|               |                               | Aplikasi Sistem Informasi                           | 5.000.000,00   |                         |
| 18            | Bagian Organisasi             | Aplikasi SAKIP                                      | 39.213.000,00  | 39.213.000,00           |
| 19            | BAPPELITBANGDA                | Database Sistem Informasi SDA dan LH                | 98.125.000,00  | 512.760.000,00          |
|               |                               | Software                                            | 366.375.000,00 |                         |
|               |                               | Database Profil Geologi Sumber Daya Mineral         | 48.260.000,00  |                         |
| 20            | BPKPD                         | Window, Software, Oracle Web                        | 374.269.300,00 | 754.602.300,00          |
|               |                               | Software                                            | 162.633.000,00 |                         |
|               |                               | Modul                                               | 7.250.000,00   |                         |
|               |                               | Aplikasi BPHTB Online                               | 200.450.000,00 |                         |
|               |                               | Aplikasi kertas kerja BMD online                    | 10.000.000,00  |                         |
| 21            | BKPSDM                        | Software Kepegawaian                                | 184.510.000,00 | 184.510.000,00          |
| <b>Jumlah</b> |                               |                                                     |                | <b>7.958.172.770,11</b> |

Adapun mutasi aset tidak berwujud selama TA 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3.147 Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud**

| Uraian                                    | Jumlah (Rp)             |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Saldo Awal Per 1 Januari 2021             | 5.385.856.330,11        |
| Penambahan Aset Lainnya - ATB Tahun 2021  | 2.572.316.440,00        |
| Pengurangan Aset Lainnya - ATB Tahun 2021 | 0,00                    |
| <b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2021</b>   | <b>7.958.172.770,11</b> |

**A. Penambahan Aset Tidak Berwujud**

Penambahan aset tidak berwujud selama TA 2021 sebesar Rp2.572.316.440,00 berasal dari:

1. Belanja modal pada LRA sebesar Rp112.000.000,00 yang langsung menambah nilai asetnya dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.148 Rincian Belanja Modal Aset Tidak Berwujud per SKPD**

| No            | Nama SKPD                        | Nilai (Rp)            |
|---------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1             | Dinas Kesehatan                  | 11.900.000,00         |
| 2             | Dinas Komunikasi dan Informatika | 100.100.000,00        |
| <b>Jumlah</b> |                                  | <b>112.000.000,00</b> |

2. Reklasifikasi dari aset tetap sebesar Rp2.341.591.440,00 pada beberapa SKPD sebagai berikut:



**Tabel 5.3.149 Rincian Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud**

| No.           | SKPD                                 | Dari KIB                    | Nilai (Rp)              | Keterangan                                                         |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1             | Dinas Pendidikan                     | KIB B (Peralatan dan Mesin) | 814.275.000,00          | Lihat pada tabel 5.3.145                                           |
| 2             | RSUD H. Hasan Basry                  | KIB B (Peralatan dan Mesin) | 16.794.400,00           | Lisensi windows                                                    |
| 3             | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  | KIB D (JIJ)                 | 1.297.347.040,00        | Lihat pada Tabel 5.3.146                                           |
| 4             | Dinas Kependudukan dan Catpil        | KIB B (Peralatan dan Mesin) | 5.500.000,00            | Software antivirus                                                 |
| 5             | Dinas Kominfo                        | KIB B (Peralatan dan Mesin) | 700.000,00              | Software windows                                                   |
| 6             | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata | KIB E (Aset Tetap Lainnya)  | 96.975.000,00           | Aset dalam renovasi ( <i>grand design</i> wisata air panas Tanuhi) |
| 7             | Dinas Perikanan                      | KIB D (JIJ)                 | 100.000.000,00          | Masterplan pengembangan ikan gabus                                 |
| 8             | BPKPD                                | KIB B (Peralatan dan Mesin) | 10.000.000,00           | Aplikasi kertas kerja pengelolaan BMD                              |
| <b>Jumlah</b> |                                      |                             | <b>2.341.591.440,00</b> |                                                                    |

- Pada Dinas Pendidikan, reklasifikasi dari peralatan dan mesin ke aset tidak berwujud berupa *software* terdapat pada beberapa sekolah sebagai berikut:

**Tabel 5.3.150 Reklasifikasi dari KIB B ke ATB per Sekolah**

| No.           | Sekolah                | Nilai (Rp)            | Keterangan                         |
|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1             | SDN Kadnagan Utara 2   | 116.325.000,00        | Pengadaan perangkat lunak/software |
| 2             | SDN Tambak Bitin 3     | 116.325.000,00        | Pengadaan perangkat lunak/software |
| 3             | SDN Bayanan 1          | 116.325.000,00        | Pengadaan perangkat lunak/software |
| 4             | SDN Sungai Raya Tengah | 116.325.000,00        | Pengadaan perangkat lunak/software |
| 5             | SMPN 3 Kandangan       | 116.325.000,00        | Pengadaan perangkat lunak/software |
| 6             | SMPN 1 Daha Utara      | 116.325.000,00        | Pengadaan perangkat lunak/software |
| 7             | SMPN 1 Sungai Raya     | 116.325.000,00        | Pengadaan perangkat lunak/software |
| <b>Jumlah</b> |                        | <b>814.275.000,00</b> |                                    |

- Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, reklasifikasi dari jalan, irigasi dan jaringan ke aset tidak berwujud dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.151 Rincian Reklasifikasi dari KIB D ke ATB**

| SKPD                 | Jenis       | Nilai (Rp)     | Keterangan                              |
|----------------------|-------------|----------------|-----------------------------------------|
| Dinas Pekerjaan Umum | Dok. Kajian | 383.223.500,00 | Survey kondisi jalan                    |
|                      |             | 93.260.000,00  | Dokumen UKL-UPL Jembatan                |
|                      |             | 200.450.000,00 | Jasa penyelidikan tanah di Daha Selatan |
|                      |             | 175.547.240,00 | Survey kondisi jembatan                 |
|                      |             | 97.865.000,00  | Jasa konsultasi reviu dokumen RISPAM    |
|                      |             | 172.894.900,00 | Dokumen desain penahan longsor          |
|                      |             | 74.281.400,00  | Dokumen UKL-UPL perkuatan tebing        |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| SKPD          | Jenis | Nilai (Rp)              | Keterangan                 |
|---------------|-------|-------------------------|----------------------------|
|               |       | 99.825.000,00           | Desain perencanaan e-PAKSI |
| <b>Jumlah</b> |       | <b>1.297.347.040,00</b> |                            |

3. Reklasifikasi dari non modal sebesar Rp118.725.000,00 yang terdapat pada:

- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp50.000.000,00 yaitu dari beban jasa berupa jasa konsultan desain Teknik sipil air; dan
- Dinas Perumahan Rakyat KPLH sebesar Rp68.725.000,00 yaitu beban jasa berupa dokumen kajian pemukiman terdampak bencana.

## B. Pengurangan Aset Tidak Berwujud

Tidak ada Pengurangan aset tidak berwujud selama tahun 2021.

### 5.3.1.5.1.1 Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Saldo akumulasi amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp3.653.676.285,11 dan Rp2.983.076.650,11 dengan rincian mutasi per SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.152 Rincian Mutasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per SKPD**

| NO | SKPD                                    | 31 Desember 2020 (Rp) | Penambahan (Rp)  | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 1  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan         | (242.793.400,11)      | (52.507.030,00)  | (295.300.430,11)      |
| 2  | Dinas Kesehatan                         | (56.897.083,00)       | (27.699.483,00)  | (84.596.566,00)       |
| 3  | RSUD Hasan Basry Kandangan              | (72.682.087,00)       | (14.147.708,00)  | (86.829.795,00)       |
| 4  | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang     | (437.738.962,00)      | (361.176.257,00) | (798.915.219,00)      |
| 5  | Dinas Perumahan Rakyat KPLH             | (176.817.483,00)      | (40.428.017,00)  | (217.245.500,00)      |
| 6  | Dinas Sosial                            | (9.850.000,00)        | 0,00             | (9.850.000,00)        |
| 7  | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil    | (2.777.777,00)        | (2.888.890,00)   | (5.666.667,00)        |
| 8  | Dinas Perhubungan                       | (3.888.890,00)        | (3.333.333,00)   | (7.222.223,00)        |
| 9  | Dinas Komunikasi dan Informatika        | (16.228.000,00)       | (35.536.001,00)  | (51.764.001,00)       |
| 10 | Dinas Tenaga Kerja, KUKP                | (14.630.000,00)       | 0,00             | (14.630.000,00)       |
| 11 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP          | (190.759.000,00)      | 0,00             | (190.759.000,00)      |
| 12 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata   | (5.362.500,00)        | (6.566.250,00)   | (11.928.750,00)       |
| 13 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan        | (297.233.666,00)      | (41.466.667,00)  | (338.700.333,00)      |
| 14 | Dinas Perikanan                         | 0,00                  | (4.000.000,00)   | (4.000.000,00)        |
| 15 | Dinas Perdagangan                       | (15.770.834,00)       | (9.206.944,00)   | (24.977.778,00)       |
| 16 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | (33.720.000,00)       | 0,00             | (33.720.000,00)       |
| 17 | Bagian Organisasi                       | (39.213.000,00)       | 0,00             | (39.213.000,00)       |
| 18 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa        | (50.650.000,00)       | (3.000.000,00)   | (53.650.000,00)       |
| 19 | BAPPELITBANGDA                          | (512.760.000,00)      | 0,00             | (512.760.000,00)      |
| 20 | BPKPD                                   | (618.793.968,00)      | (68.643.055,00)  | (687.437.023,00)      |



| NO            | SKPD   | 31 Desember 2020<br>(Rp)  | Penambahan<br>(Rp)      | 31 Desember 2021<br>(Rp)  |
|---------------|--------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 21            | BKPSDM | (184.510.000,00)          | 0,00                    | (184.510.000,00)          |
| <b>Jumlah</b> |        | <b>(2.983.076.650,11)</b> | <b>(670.599.635,00)</b> | <b>(3.653.676.285,11)</b> |

Penambahan amortisasi aset tidak berwujud selama Tahun 2021 dipengaruhi oleh beban amortisasi selama tahun 2021 sebesar Rp670.599.635,00.

#### 5.3.1.5.2 Aset Lain-lain

Aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya. Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp19.297.918.798,00 dan sebesar Rp17.916.176.793,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.153 Rincian Aset Lain-lain**

| Aset Lain-lain                             | 31 Desember 2021<br>(Rp) | 31 Desember 2020<br>(Rp) |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Aset Lain-lain yang Akan Dipindahtangankan | 15.265.288.194,00        | 15.265.288.194,00        |
| Aset Lain-lain Rusak Berat                 | 4.032.630.604,00         | 2.650.888.599,00         |
| <b>Jumlah</b>                              | <b>19.297.918.798,00</b> | <b>17.916.176.793,00</b> |

##### 5.3.1.5.2.1 Aset Lain-lain yang Akan Dipindahtangankan

Aset lain-lain yang akan dipindahtangankan merupakan aset tetap yang direklasifikasi ke Aset Lain-Lain berupa aset-aset yang pengadaannya ada di beberapa SKPD namun sampai dengan tanggal neraca belum dilakukan proses hibah ke Organisasi Kemasyarakatan.

Saldo aset lain-lain yang akan dipindahtangankan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp15.265.288.194,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.154 Rincian Aset Lain-lain yang Akan Dipindahtangankan**

| NO | SKPD                | 31 Desember 2021<br>(Rp) | 31 Desember 2020<br>(Rp) | Keterangan                                                        |
|----|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dinas Pendidikan    | 5.240.000,00             | 5.240.000,00             | Tanah urugan sekolah yang bukan milik Pemda                       |
| 2  | Dinas Pertanian     | 15.145.973.194,00        | 15.145.973.194,00        | Jalan Usaha Tani yang tanahnya bukan merupakan Tanah Milik Pemkab |
| 3  | Kecamatan Kalumpang | 114.075.000,00           | 114.075.000,00           | Pengurugan lapangan sepak bola yang bukan milik Pemda             |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| NO           | SKPD | 31 Desember 2021<br>(Rp) | 31 Desember 2020<br>(Rp) | Keterangan |
|--------------|------|--------------------------|--------------------------|------------|
| <b>TOTAL</b> |      | <b>15.265.288.194,00</b> | <b>15.265.288.194,00</b> |            |

#### 5.3.1.5.2.2 Aset Lain-lain Rusak Berat

Aset lain-lain rusak berat yaitu aset tetap yang telah diusulkan penghapusan dan tidak digunakan lagi untuk operasional karena tergolong kondisi rusak berat. Saldo aset lain-lain rusak berat per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp4.032.630.604,00 dan Rp2.650.888.599,00. Saldo aset lain-lain rusak berat naik sebesar Rp1.381.742.005,00 atau 52,12%. Aset ini dalam kondisi rusak berat dan dihentikan penggunaannya dalam menunjang tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.155 Rincian Aset Lain-lain Rusak Berat per SKPD**

| NO           | SKPD                        | 31 Desember 2021<br>(Rp) | 31 Desember 2020<br>(Rp) |
|--------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1            | Dinas Pendidikan            | 386.100.000,00           | 477.945.000,00           |
| 2            | Dinas Kesehatan             | 48.394.999,00            | 114.814.999,00           |
| 3            | RSUD H. Hasan Basry         | 1.338.907.005,00         | 0,00                     |
| 4            | Dinas Perumahan Rakyat KPLH | 185.000.000,00           | 0,00                     |
| 5            | Dinas Pertanian             | 1.999.193.600,00         | 1.974.093.600,00         |
| 6            | Bagian Umum                 | 75.035.000,00            | 75.035.000,00            |
| 7            | Kecamatan Loksado           | 0,00                     | 9.000.000,00             |
| <b>TOTAL</b> |                             | <b>4.032.630.604,00</b>  | <b>2.650.888.599,00</b>  |

Adapun mutasi Aset Lain-lain Rusak Berat selama TA 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3.156 Rincian Mutasi Aset Lain-lain Rusak Berat**

| Uraian                                            | Jumlah<br>(Rp)          |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Saldo Awal Per 1 Januari 2021                     | 2.650.888.599,00        |
| Penambahan Aset Lain-lain Rusak Berat Tahun 2021  | 1.549.007.005,00        |
| Pengurangan Aset Lain-lain Rusak Berat Tahun 2021 | (167.265.000,00)        |
| <b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2021</b>           | <b>4.032.630.604,00</b> |

#### A. Penambahan Aset Lain-lain Rusak Berat

Penambahan aset lain-lain rusak berat sebesar Rp1.549.007.005,00 selama tahun 2021, disebabkan oleh adanya reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.157 Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat**

| No | SKPD                        | Reklas Dari                 | Nilai<br>(Rp)    | Keterangan             |
|----|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|
| 1  | RSUD H. Hasan Basry         | KIB B (Peralatan dan Mesin) | 1.338.907.005,00 | Alat-alat kedokteran   |
| 2  | Dinas Perumahan rakyat KPLH | KIB B (Peralatan dan Mesin) | 185.000.000,00   | Truk pengangkut sampah |





| No            | SKPD            | Reklas Dari                | Nilai (Rp)              | Keterangan               |
|---------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 3             | Dinas Pertanian | KIB E (Aset Tetap Lainnya) | 25.100.000,00           | Ternak yang sudah dijual |
| <b>JUMLAH</b> |                 |                            | <b>1.549.007.005,00</b> |                          |

#### **B. Pengurangan Aset Lain-lain Rusak Berat**

Pengurangan Aset Lain-lain Rusak Berat sebesar Rp167.265.000,00 selama TA 2021 disebabkan karena adanya penghapusan atas barang-barang dengan kondisi rusak berat pada beberapa SKPD sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupa sepeda motor sebesar Rp91.845.000,00.
2. Dinas Kesehatan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupa sepeda motor sebesar Rp66.420.000,00.
3. Kecamatan Loksado dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupa sepeda motor sebesar Rp9.000.000,00.

##### **5.3.1.5.2.3 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain**

#### **1. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain yang Akan Dipindahtangankan**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp9.454.258.786,00.

#### **2. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat**

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Masa Manfaat dan Penyusutan Barang Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melakukan perhitungan penyusutan aset tetap, termasuk aset tetap yang telah diusulkan penghapusan dan dibukukan sebagai aset lain-lain rusak berat.

Saldo akumulasi penyusutan aset lain-lain rusak berat per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp3.883.734.106,00 dan Rp2.513.329.566,00. Saldo akumulasi penyusutan aset rusak berat selama Tahun 2021 naik sebesar Rp1.370.404.540,00 atau 54,53% dengan rincian mutasi per SKPD sebagai berikut:



**Tabel 5.3 .158 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat Per SKPD**

| NO           | SKPD                        | 31 Desember 2020<br>(Rp)  | Mutasi (Rp)               |                         | 31 Desember 2021<br>(Rp)  |
|--------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
|              |                             |                           | Penambahan                | Pengurangan             |                           |
| 1            | Dinas Pendidikan            | (477.945.000,00)          | 0,00                      | (91.845.000,00)         | (386.100.000,00)          |
| 2            | Dinas Kesehatan             | (91.362.618,00)           | 0,00                      | (51.639.048,00)         | (39.723.570,00)           |
| 3            | RSUD H. Hasan Basry         | 0,00                      | (1.337.888.588,00)        | 0,00                    | (1.337.888.588,00)        |
| 4            | Dinas Perumahan Rakyat KPLH | 0,00                      | (185.000.000,00)          | 0,00                    | (185.000.000,00)          |
| 5            | Dinas Pertanian             | (1.863.701.235,00)        | 0,00                      | 0,00                    | (1.863.701.235,00)        |
| 6            | Bagian Umum                 | (71.320.713,00)           | 0,00                      | 0,00                    | (71.320.713,00)           |
| 7            | Kecamatan Loksado           | (9.000.000,00)            | 0,00                      | (9.000.000,00)          | 0,00                      |
| <b>TOTAL</b> |                             | <b>(2.513.329.566,00)</b> | <b>(1.522.888.588,00)</b> | <b>(152.484.048,00)</b> | <b>(3.883.734.106,00)</b> |

Mutasi akumulasi penyusutan aset lain-lain rusak berat selama tahun 2021 dipengaruhi oleh:

- Mutasi yang mempengaruhi penambahan penyusutan aset rusak berat sebesar Rp1.522.888.588,00 berasal dari adanya reklasifikasi aset rusak berat dari aset tetap peralatan dan mesin.
- Mutasi yang mempengaruhi pengurangan penyusutan aset rusak berat sebesar Rp152.484.048,00 karena adanya aset rusak berat yang telah dilakukan penghapusan pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Kecamatan Loksado.

### 5.3.2 KEWAJIBAN

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp68.129.947.361,50 dan Rp74.326.063.069,00. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2021 turun sebesar Rp6.196.115.707,50 atau 8,34% dari saldo kewajiban Tahun 2020. Saldo kewajiban tersebut terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.159 Ringkasan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

| Kewajiban                | 31 Desember 2021<br>(Rp) | 31 Desember 2020<br>(Rp) |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kewajiban Jangka Pendek  | 68.129.947.361,50        | 74.326.063.069,00        |
| Kewajiban Jangka Panjang | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>Jumlah Kewajiban</b>  | <b>68.129.947.361,50</b> | <b>74.326.063.069,00</b> |

#### 5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun terhitung sejak tanggal 31 Desember 2021. Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp68.129.947.361,50 dan sebesar Rp74.326.063.069,00 dengan rincian sebagai



berikut:

**Tabel 5.3.160 Rincian Kewajiban Jangka Pendek**

| Kewajiban Jangka Pendek              | 31 Desember 2021<br>(Rp) | 31 Desember 2020<br>(Rp) |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 0,00                     | 12.427.956,00            |
| Pendapatan Diterima Dimuka           | 176.957.345,00           | 141.730.088,00           |
| Utang Belanja                        | 29.744.575.179,50        | 24.402.796.367,00        |
| Utang Jangka Pendek Lainnya          | 38.208.414.837,00        | 49.769.108.658,00        |
| <b>Jumlah Kewajiban</b>              | <b>68.129.947.361,50</b> | <b>74.326.063.069,00</b> |

#### 5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2021 merupakan bagian dari Kas yang menjadi hak (klaim) pihak ketiga. Saldo Utang PFK per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp12.427.956,00.

#### 5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah selisih penerimaan pembayaran dengan hak yang telah timbul pada Pemerintah Daerah. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp176.957.345,00 dan Rp141.730.088,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

**Tabel 5.3.161 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka**

| Pendapatan Diterima Dimuka        | 31 Desember 2020<br>(Rp) | Pengurangan<br>(Rp)   | Penambahan<br>(Rp)    | 31 Desember 2021<br>(Rp) |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Pajak Reklame                     | 96.355.088,00            | 96.355.088,00         | 103.232.345,00        | 103.232.345,00           |
| Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan | 6.000.000,00             | 6.000.000,00          | 6.000.000,00          | 6.000.000,00             |
| Retribusi Sewa ATM BLUD           | 39.375.000,00            | 20.475.000,00         | 48.825.000,00         | 67.725.000,00            |
| <b>Jumlah</b>                     | <b>141.730.088,00</b>    | <b>122.830.088,00</b> | <b>158.057.345,00</b> | <b>176.957.345,00</b>    |

- Pendapatan Diterima Dimuka atas Pajak Reklame yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dan penyetorannya melalui Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp103.232.345,00.
- Pendapatan Diterima Dimuka atas retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa sewa tanah dan bangunan oleh PT Telkomsel dengan periode sewa 21 Juli 2019 sampai dengan 21 Juli 2024. Pembayaran pada tahun 2021 adalah pembayaran untuk periode 17 Juli 2021 s.d 17 Juni 2022, dengan nilai sewa Rp1.000.000,00 per bulan.
- Terdapat pengurangan pendapatan diterima dimuka atas sewa atm pada RSUD H. Hasan Basry sebesar Rp20.475.000,00 yaitu pengurangan dari masa sewa atm BNI (periode sewa 1 Januari 2020 sampai dengan 31



Desember 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp56.700.000,00) sebesar Rp18.900.000,00 dan sudah selesainya masa sewa atm BRI (jangka waktu sewa 2 tahun periode 30 Januari 2019 sampai dengan 30 Januari 2021 dengan nilai kontrak Rp37.800.000,00) sebesar Rp1.575.000,00. Selain itu terdapat penambahan sewa atm Bank Kalsel sebesar Rp28.350.000,00 selama 3 tahun (periode sewa 1 Juli 2020 sampai dengan 1 Juli 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp56.700.000,00) dan perpanjangan sewa atm BRI sebesar Rp20.475.000,00 dengan jangka waktu 2 tahun (periode sewa 30 Januari 2021 sampai dengan 30 Januari 2023 dengan nilai kontrak Rp37.800.000,00).

### 5.3.2.1.3 Utang Belanja

Utang Belanja merupakan kewajiban yang telah timbul yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum diselesaikan pembayarannya. Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp29.744.575.179,50 dan Rp24.402.796.367,00 dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Utang Belanja Pegawai

Saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp593.251.671,00 dan sebesar Rp1.193.346.550,00. Utang belanja pegawai tahun 2021 merupakan utang belanja iuran jaminan Kesehatan IWP 1% dan BPJS 4% yang berasal dari belanja gaji dan belanja TPP serta utang insentif tenaga Kesehatan untuk penanganan Covid-19 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.162 Rincian Utang Belanja Pegawai per SKPD**

| No                      | SKPD                                | Jenis Utang                                             | 31 Desember 2020<br>(Rp) | Mutasi (Rp)             |                       | 31 Desember 2021<br>(Rp) |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                         |                                     |                                                         |                          | Pelunasan               | Penambahan            |                          |
| 1                       | Dinas Kesehatan                     | Iuran Jaminan Kesehatan ASN (IWP 4%)                    | 0,00                     | 0,00                    | 48.668.040,00         | 48.668.040,00            |
|                         |                                     | Insentif Tenaga Kesehatan Covid ASN                     | 0,00                     | 0,00                    | 521.964.291,00        | 521.964.291,00           |
| 2                       | Sekretariat DPRD                    | Gaji dan Tunjangan DPRD                                 | 878.346.550,00           | 878.346.550,00          | 0,00                  | 0,00                     |
|                         |                                     | Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD            | 315.000.000,00           | 315.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                     |
| 3                       | Kec. Daha Utara                     | Iuran Jaminan Kesehatan ASN (IWP 4% dari TPP)           | 0,00                     | 0,00                    | 876.712,00            | 876.712,00               |
| 4                       | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Iuran Jaminan Kesehatan ASN (BPJS 4% dari gaji)         | 0,00                     | 0,00                    | 6.118.408,00          | 6.118.408,00             |
| 5                       | Satuan Polisi Pamong Praja          | Iuran Jaminan Kesehatan ASN (BPJS 4% dari gaji)         | 0,00                     | 0,00                    | 9.553.804,00          | 9.553.804,00             |
| 6                       | Dinas Perikanan                     | Iuran Jaminan Kesehatan ASN (BPJS 4% dari gaji dan TPP) | 0,00                     | 0,00                    | 6.070.416,00          | 6.070.416,00             |
| <b>Jumlah Kewajiban</b> |                                     |                                                         | <b>1.193.346.550,00</b>  | <b>1.193.346.550,00</b> | <b>593.251.671,00</b> | <b>593.251.671,00</b>    |



## 2. Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp29.151.323.508,50 dan sebesar Rp23.209.449.817,00. Utang belanja barang dan jasa terdiri atas utang belanja pada puskesmas, blud, dan beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.163 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per SKPD**

| No                      | SKPD                     | 31 Desember 2020<br>(Rp) | Koreksi<br>(Rp)         | Mutasi (Rp)              |                          | 31 Desember 2021<br>(Rp) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                         |                          |                          |                         | Pelunasan                | Penambahan               |                          |
| 1                       | Dinas Kesehatan          | 6.572.285.784,00         | (132.482,00)            | 6.572.153.302,00         | 1.939.529.862,50         | 1.939.529.862,50         |
| 2                       | BLUD RSUD H. Hasan Basry | 11.159.854.325,00        | (124.602.510,00)        | 11.035.251.815,00        | 24.028.332.371,00        | 24.028.332.371,00        |
| 3                       | BLUD Puskesmas Kandungan | 93.871.500,00            | 0,00                    | 93.871.500,00            | 77.534.250,00            | 77.534.250,00            |
| 4                       | BLUD Puskesmas Negara    | 113.676.038,00           | 0,00                    | 113.676.038,00           | 108.995.025,00           | 108.995.025,00           |
| 5                       | BLUD RS Daha Sejahtera   | 4.949.497.370,00         | 1.500.000,00            | 4.950.997.370,00         | 2.996.932.000,00         | 2.996.932.000,00         |
| 6                       | BPKPD                    | 320.264.800,00           | 0,00                    | 320.264.800,00           | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>Jumlah Kewajiban</b> |                          | <b>23.209.449.817,00</b> | <b>(123.234.992,00)</b> | <b>23.086.214.825,00</b> | <b>29.151.323.508,50</b> | <b>29.151.323.508,50</b> |

### a. Dinas Kesehatan

Saldo utang belanja barang dan jasa pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp1.939.529.862,50 dan Rp6.572.285.784,00. Terdapat koreksi saldo awal yaitu lebih catat sebesar Rp132.482,00 pada utang jasa medis/pelayanan sebesar Rp132.480,00 karena nilai kalim yang disetujui oleh BPJS lebih kecil dari nilai yang diajukan (saldo awal) dan lebih catat sebesar Rp2,00 karena perbedaan pencatatan pada sistem aplikasi. Utang belanja TA 2020 sudah dibayarkan sepenuhnya oleh Dinas Kesehatan. Utang belanja per 31 Desember 2021 meliputi utang belanja sebagai berikut:

**Tabel 5.3.164 Rincian Utang Belanja pada Dinas Kesehatan**

| Uraian                                | 31 Desember 2020<br>(Rp) | Mutasi (Rp)         |                         |                         | 31 Desember 2021<br>(Rp) |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                       |                          | Koreksi             | Pelunasan               | Penambahan              |                          |
| Utang Jasa Medis/Pelayanan            | 71.622.000,00            | (132.480,00)        | 71.489.520,00           | 60.830.850,50           | 60.830.850,50            |
| Utang Makan/Minum Pasien              | 6.913.700,00             | 0,00                | 6.913.700,00            | 3.208.500,00            | 3.208.500,00             |
| Utang Insentif Tenaga Kesehatan Covid | 6.493.750.084,00         | (2,00)              | 6.493.750.082,00        | 1.306.428.575,00        | 1.306.428.575,00         |
| Jasa Pelayanan Dana Kapitasi          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                    | 569.061.937,00          | 569.061.937,00           |
| <b>Jumlah</b>                         | <b>6.572.285.784,00</b>  | <b>(132.482,00)</b> | <b>6.572.153.302,00</b> | <b>1.939.529.862,50</b> | <b>1.939.529.862,50</b>  |

### b. BLUD RSUD H. Hasan Basry

Saldo utang belanja pada BLUD RSUD Hasan Basry per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp24.028.332.371,00 dan Rp11.159.854.325,00. Utang belanja untuk tahun 2021 meliputi utang belanja obat-obatan pada



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

32 distributor, utang belanja alat kesehatan, utang belanja persediaan, utang belanja pemeliharaan, utang belanja perjalanan dinas dan utang belanja jasa layanan (Covid, BPJS dan Umum) dengan rincian mutasi sebagai berikut:

**Tabel 5.3.165 Rincian Utang Belanja RSUD H. Hasan Basry**

| RSUD BLUD H. Hasan Basry                                      | 31 Desember 2020 (Rp)    | Mutasi (Rp)             |                          |                          | 31 Desember 2021 (Rp)    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                               |                          | Koreksi                 | Pelunasan                | Penambahan               |                          |
| Utang Belanja Obat-obatan                                     | 2.105.579.912,00         | 0,00                    | 2.105.579.912,00         | 3.778.386.929,00         | 3.778.386.929,00         |
| Utang Belanja Alat Kesehatan                                  | 138.160.000,00           | 0,00                    | 138.160.000,00           | 87.840.000,00            | 87.840.000,00            |
| Utang Belanja Bahan-bahan Baku (untuk makan dan minum pasien) | 12.157.350,00            | 0,00                    | 12.157.350,00            | 12.175.194,00            | 12.175.194,00            |
| Utang Belanja Jasa Layanan                                    | 8.903.957.063,00         | (124.602.510,00)        | 8.779.354.553,00         | 20.080.924.024,00        | 20.080.924.024,00        |
| Utang Belanja Makan Minum rapat                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 5.300.000,00             | 5.300.000,00             |
| Utang Belanja Bahan Bakar dan Pelumas (BBM)                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 2.883.036,00             | 2.883.036,00             |
| Utang Belanja Honorarium Narasumber                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 28.000.000,00            | 28.000.000,00            |
| Utang Belanja Pemeliharaan                                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 20.796.028,00            | 20.796.028,00            |
| Utang Belanja Perjalanan Dinas                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 5.812.000,00             | 5.812.000,00             |
| Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin                       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 50.160,00                | 50.160,00                |
| Utang Belanja Bahan-bahan Lainnya                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 6.165.000,00             | 6.165.000,00             |
| <b>Jumlah</b>                                                 | <b>11.159.854.325,00</b> | <b>(124.602.510,00)</b> | <b>11.035.251.815,00</b> | <b>24.028.332.371,00</b> | <b>24.028.332.371,00</b> |

**c. Utang BLUD Puskesmas Kandangan**

Saldo utang belanja pada BLUD Puskesmas Kandangan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp77.534.250,00 dan Rp93.871.500,00. Utang tersebut merupakan utang jasa pelayanan kesehatan.

**Tabel 5.3.166 Rincian Utang BLUD Puskesmas Kandangan**

| BLUD Puskesmas Kandangan        | 31 Desember 2020 (Rp) | Mutasi (Rp)          |                      | 31 Desember 2021 (Rp) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                 |                       | Pelunasan            | Penambahan           |                       |
| Jasa Pelayanan Umum             | 2.766.000,00          | 2.766.000,00         | 4.200.000,00         | 4.200.000,00          |
| BPJS Rawat Inap dan Rawat Jalan | 5.418.000,00          | 5.418.000,00         | 1.791.000,00         | 1.791.000,00          |
| BPJS Kapitasi                   | 85.687.500,00         | 85.687.500,00        | 71.543.250,00        | 71.543.250,00         |
| <b>Jumlah</b>                   | <b>93.871.500,00</b>  | <b>93.871.500,00</b> | <b>77.534.250,00</b> | <b>77.534.250,00</b>  |

**d. Utang BLUD Puskesmas Negara**

Saldo utang belanja pada BLUD Puskesmas Negara per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp108.995.025,00 dan Rp113.676.038,00 dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 5.3.167 Rincian Utang Belanja Puskesmas Negara**

| BLUD Puskesmas Negara | 31 Desember 2020 (Rp) | Mutasi (Rp)           |                       | 31 Desember 2021 (Rp) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                       |                       | Pelunasan             | Penambahan            |                       |
| Jasa Pelayanan Umum   | 1.878.900,00          | 1.878.900,00          | 1.344.300,00          | 1.344.300,00          |
| BPJS Rawat Inap       | 23.250.000,00         | 23.250.000,00         | 19.560.000,00         | 19.560.000,00         |
| BPJS Rawat Jalan      | 3.102.000,00          | 3.102.000,00          | 2.012.400,00          | 2.012.400,00          |
| BPJS Kapitasi         | 85.445.138,00         | 85.445.138,00         | 86.078.325,00         | 86.078.325,00         |
| <b>Jumlah</b>         | <b>113.676.038,00</b> | <b>113.676.038,00</b> | <b>108.995.025,00</b> | <b>108.995.025,00</b> |

**e. Utang BLUD RS Daha Sejahtera**

Saldo utang belanja pada BLUD RS Daha Sejahtera per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp2.996.932.000,00 dan Rp4.949.497.370,00. Utang tersebut merupakan utang jasa pelayanan kesehatan.

**Tabel 5.3.168 Rincian Utang BLUD RS Daha Sejahtera**

| BLUD RS Daha Sejahtera | 31 Desember 2020 (Rp)   | Mutasi (Rp)         |                         |                         | 31 Desember 2021 (Rp)   |
|------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                        |                         | Koreksi             | Pelunasan               | Penambahan              |                         |
| Klaim Covid            | 4.704.133.500,00        | 1.500.000,00        | 4.705.633.500,00        | 2.753.348.000,00        | 2.753.348.000,00        |
| Klaim BPJS             | 227.999.300,00          | 0,00                | 227.999.300,00          | 243.584.000,00          | 243.584.000,00          |
| Retribusi Umum         | 17.364.570,00           | 0,00                | 17.364.570,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Jumlah</b>          | <b>4.949.497.370,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>4.950.997.370,00</b> | <b>2.996.932.000,00</b> | <b>2.996.932.000,00</b> |

**f. PPKD**

Saldo utang Belanja per 31 Desember 2021 dan 2020 pada PPKD sebesar Rp 0,00 dan sebesar Rp320.264.800,00.

Utang transfer bantuan keuangan kepada desa sebesar Rp320.264.800,00 merupakan dana desa tahap II (40%) tahun 2019 pada Desa Hamak Utara yang tidak disalurkan karena tidak adanya rekomendasi penyaluran dana oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Utang dana desa tersebut sudah ditransfer Kembali ke rekening Kas Negara pada tanggal 20 April 2021 melalui mekanisme pencairan SP2D pada pos anggaran belanja tidak terduga. Pembayaran utang ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/102/KUM/2021 tentang Penetapan Besaran Pengembalian Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2019.

**Tabel 5.1.169 Rincian Utang Belanja Transfer Dana Desa**

| Uraian                 | 31 Desember 2020 (Rp) | Mutasi (Rp)    |            | 31 Desember 2021 (Rp) |
|------------------------|-----------------------|----------------|------------|-----------------------|
|                        |                       | Pelunasan      | Penambahan |                       |
| Utang Belanja Transfer | 320.264.800,00        | 320.264.800,00 | 0,00       | 0,00                  |





PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| Uraian        | 31 Desember 2020<br>(Rp) | Mutasi (Rp)           |             | 31 Desember 2021<br>(Rp) |
|---------------|--------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|
|               |                          | Pelunasan             | Penambahan  |                          |
| <b>Jumlah</b> | <b>320.264.800,00</b>    | <b>320.264.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              |

#### 5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp38.208.414.837,00 dan Rp49.769.108.658,00. Saldo utang jangka pendek lainnya Tahun 2021 merupakan nilai lebih bayar tahun 2020 yang belum diselesaikan atas transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) dari Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.07/2021 tanggal 16 September 2021 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.170 Rincian Mutasi Utang Transfer pemerintah Pusat**

| Utang Jangka Pendek Lainnya | 31 Desember 2020<br>(Rp) | Mutasi (Rp)              |                          | 31 Desember 2021<br>(Rp) |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                             |                          | Pelunasan                | Penambahan               |                          |
| DBH PPh Ps 21,25/29         | 1.022.621.333,00         | 1.022.621.333,00         | 0,00                     | 0,00                     |
| DBH PBB Bagian Daerah       | 14.575.140.370,00        | 14.575.140.370,00        | 39.264.601,00            | 39.264.601,00            |
| DBH PBB Biaya Pemungutan    | 1.194.978.086,00         | 1.194.978.086,00         | 1.356.157,00             | 1.356.157,00             |
| DBH SD Minerba - Royalti    | 30.935.882.929,00        | 30.935.882.929,00        | 37.245.011.605,00        | 37.245.011.605,00        |
| DBH Iuran Tetap (Land-Rent) | 441.945.638,00           | 441.945.638,00           | 501.728.381,00           | 501.728.381,00           |
| DBH SDA Migas               | 1.598.540.302,00         | 1.598.540.302,00         | 251.734.700,00           | 251.734.700,00           |
| DBH SDA Kehutanan PSDH      | 0,00                     | 0,00                     | 11.625.373,00            | 11.625.373,00            |
| DBH SDA Perikanan           | 0,00                     | 0,00                     | 157.694.020,00           | 157.694.020,00           |
| <b>Jumlah</b>               | <b>49.769.108.658,00</b> | <b>49.769.108.658,00</b> | <b>38.208.414.837,00</b> | <b>38.208.414.837,00</b> |

#### 5.3.3 EKUITAS

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3.171 Rincian Ekuitas Dana**

| URAIAN                                                  | 2021<br>(Rp)         | 2020<br>(Rp)         |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| EKUITAS AWAL                                            | 3.411.000.311.989,37 | 3.279.100.874.054,66 |
| SURPLUS/DEFISIT - LO                                    | 57.680.611.386,92    | 87.031.638.224,93    |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR |                      |                      |





PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| URAIAN               | 2021<br>(Rp)                | 2020<br>(Rp)                |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Koreksi Ekuitas      | (1.804.247.454,41)          | 44.867.799.709,78           |
| <b>EKUITAS AKHIR</b> | <b>3.466.876.675.921,88</b> | <b>3.411.000.311.989,37</b> |

Surplus/(Defisit) - LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban ditambah dengan Defisit dari Kegiatan Non Operasional. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional.

Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar. Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.



#### 5.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

##### 5.4.1 PENDAPATAN

Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2021 dan 2020 sebagai berikut:

**Tabel 5.4.1 Ringkasan Pendapatan – LO**

| Pendapatan - LO                      | Realisasi (Rp)              |                             | Kenaikan /<br>(Penurunan)<br>(Rp) | %           |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|
|                                      | Tahun 2021                  | Tahun 2020                  |                                   |             |
| Pendapatan Asli Daerah               | 239.359.974.861,93          | 211.711.143.073,35          | 27.648.831.788,58                 | 13,06       |
| Pendapatan Transfer                  | 961.771.509.246,00          | 1.021.090.805.779,00        | (59.319.296.533,00)               | (5,81)      |
| Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 89.111.725.129,00           | 54.264.350.806,00           | 34.847.374.323,00                 | 64,22       |
| <b>Jumlah</b>                        | <b>1.290.243.209.236,93</b> | <b>1.287.066.299.658,35</b> | <b>3.176.909.578,58</b>           | <b>0,25</b> |

Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pos ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode TA 2021 dan TA 2020, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.4.2 Rincian Pendapatan Asli Daerah**

| Pendapatan Asli Daerah - LO                                  | Realisasi (Rp)            |                           | Kenaikan /<br>(Penurunan)<br>(Rp) | %            |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------|
|                                                              | Tahun 2021                | Tahun 2020                |                                   |              |
| Pendapatan Pajak daerah                                      | 13.592.034.964,86         | 12.018.222.450,00         | 1.573.812.514,86                  | 13,10        |
| Pendapatan Retribusi Daerah                                  | 6.776.465.761,00          | 6.462.892.699,00          | 313.573.062,00                    | 4,85         |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 6.974.111.716,16          | 5.252.524.957,78          | 1.721.586.758,38                  | 32,78        |
| Lain-lain PAD yang Sah                                       | 212.017.362.419,91        | 187.977.502.966,57        | 24.039.859.453,34                 | 12,79        |
| <b>Jumlah</b>                                                | <b>239.359.974.861,93</b> | <b>211.711.143.073,35</b> | <b>27.648.831.788,58</b>          | <b>13,06</b> |

Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2021 dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

##### 5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:



**Tabel 5.4.3 Rincian Pendapatan Pajak Daerah**

| Pendapatan Pajak Daerah                   | Realisasi (Rp)           |                          | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) | %            |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|
|                                           | Tahun 2021               | Tahun 2020               |                             |              |
| Pajak Hotel                               | 270.634.814,00           | 174.873.351,00           | 95.761.463,00               | 54,76        |
| Pajak Restoran                            | 2.270.484.557,00         | 1.865.524.883,00         | 404.959.674,00              | 21,71        |
| Pajak Hiburan                             | 3.230.000,00             | 17.130.000,00            | (13.900.000,00)             | (81,14)      |
| Pajak Reklame                             | 250.260.445,86           | 148.437.107,00           | 101.823.338,86              | 68,60        |
| Pajak Penerangan Jalan                    | 6.706.096.624,00         | 6.281.251.219,00         | 424.845.405,00              | 6,76         |
| Pajak Parkir                              | 17.832.750,00            | 11.377.100,00            | 6.455.650,00                | 56,74        |
| Pajak Air Tanah                           | 11.520.000,00            | 10.140.000,00            | 1.380.000,00                | 13,61        |
| Pajak Sarang Burung Walet - LO            | 31.056.966,00            | 5.471.250,00             | 25.585.716,00               | 467,64       |
| Mineral Bukan Logam dan Batuan            | 1.125.193.724,00         | 1.205.528.916,00         | (80.335.192,00)             | (6,66)       |
| PBB Perdesaan dan Perkotaan               | 1.321.136.959,00         | 1.318.780.275,00         | 2.356.684,00                | 0,18         |
| Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 1.584.588.125,00         | 979.708.349,00           | 604.879.776,00              | 61,74        |
| <b>Jumlah</b>                             | <b>13.592.034.964,86</b> | <b>12.018.222.450,00</b> | <b>1.573.812.514,86</b>     | <b>13,10</b> |

Pendapatan Pajak Daerah di LO sebesar Rp13.592.034.964,86 memiliki nilai yang berbeda dengan yang disajikan di LRA sebesar Rp13.543.126.921,00 yaitu lebih kecil sebesar Rp48.908.043,86. Selisih tersebut dipengaruhi oleh:

- Penambahan pajak reklame tahun 2021 sebesar Rp2.789.142,86 berupa pajak reklame Bank Kalsel yang sudah ditetapkan SKPD nya namun sampai dengan 31 Desember belum diterima pembayarannya. Dikurangi selisih pelunasan pendapatan diterima dimuka atas pajak reklame tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar Rp6.877.257,00 yang dipungut oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- Ditambah selisih pelunasan piutang PBB tahun 2020 (setelah dikurangi verifikasi atas piutang PBB) dan penambahan piutang PBB tahun 2021 sebesar Rp29.816.224,00 yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- Dikurangi selisih pelunasan piutang pajak penerangan jalan tahun 2020 dan penambahan piutang pajak penerangan jalan tahun 2021 sebesar Rp82.812.382,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

#### 5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil dan berhubungan dengan perijinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Realisasi Pendapatan Retribusi TA 2021 dan 2020 berdasarkan jenis retribusi adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

**Tabel 5.4.4 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah**

| Pendapatan Retribusi Daerah                     | Realisasi (Rp)          |                         | Kenaikan /<br>(Penurunan)<br>(Rp) | %           |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|
|                                                 | Tahun 2021              | Tahun 2020              |                                   |             |
| Retribusi Pelayanan Kesehatan                   | 752.480.000,00          | 444.891.164,00          | 307.588.836,00                    | 69,14       |
| Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan      | 362.705.000,00          | 411.865.000,00          | (49.160.000,00)                   | (11,94)     |
| Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum   | 354.462.500,00          | 225.400.000,00          | 129.062.500,00                    | 57,26       |
| Retribusi Pelayanan Pasar                       | 815.078.000,00          | 730.372.000,00          | 84.706.000,00                     | 11,60       |
| Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor          | 305.690.000,00          | 183.560.000,00          | 122.130.000,00                    | 66,53       |
| Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang             | 14.885.000,00           | 11.193.500,00           | 3.691.500,00                      | 32,98       |
| Retribusi Menara Telekomunikasi                 | 306.500.000,00          | 300.431.300,00          | 6.068.700,00                      | 2,02        |
| Retribusi Pemberian Surat Keterangan Kaca Gelap | 0,00                    | 18.125.000,00           | (18.125.000,00)                   | (100,00)    |
| Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah             | 528.006.240,00          | 448.343.920,00          | 79.662.320,00                     | 17,77       |
| Retribusi Pasar Grosir                          | 1.757.306.261,00        | 1.841.434.360,00        | (84.128.099,00)                   | (4,57)      |
| Retribusi Terminal                              | 12.949.000,00           | 31.090.000,00           | (18.141.000,00)                   | (58,35)     |
| Retribusi Tempat Khusus Parkir                  | 843.856.500,00          | 973.160.400,00          | (129.303.900,00)                  | (13,29)     |
| Retribusi Tempat Penginapan/Villa               | 175.350.000,00          | 121.700.000,00          | 53.650.000,00                     | 44,08       |
| Retribusi Rumah Potong Hewan                    | 9.850.000,00            | 16.075.000,00           | (6.225.000,00)                    | (38,72)     |
| Retribusi Pelayanan Kepelabuhan                 | 17.842.000,00           | 13.100.000,00           | 4.742.000,00                      | 36,20       |
| Retribusi Tempat Rekreasi                       | 186.331.000,00          | 184.210.500,00          | 2.120.500,00                      | 1,15        |
| Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah       | 72.990.000,00           | 51.650.000,00           | 21.340.000,00                     | 41,32       |
| Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan             | 0,00                    | 1.500.000,00            | (1.500.000,00)                    | (100,00)    |
| Retribusi Izin Mendirikan Bangunan              | 258.994.260,00          | 454.490.555,00          | (195.496.295,00)                  | (43,01)     |
| Retribusi Izin Trayek                           | 1.190.000,00            | 300.000,00              | 890.000,00                        | 296,67      |
| <b>Jumlah</b>                                   | <b>6.776.465.761,00</b> | <b>6.462.892.699,00</b> | <b>313.573.062,00</b>             | <b>4,85</b> |

Pendapatan Retribusi Daerah – LO sebesar Rp6.776.465.761,00 memiliki nilai yang berbeda dengan yang disajikan di LRA sebesar Rp6.608.175.981,00 yaitu lebih besar Rp168.289.780,00. Selisih tersebut dipengaruhi oleh:

- Pelunasan piutang retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan tahun 2020 dikurangi koreksi lebih catat piutang tahun 2020 ditambah piutang tahun 2021 sebesar Rp18.048.400,00;
- Ditambah piutang atas kurang setor retribusi pasar los tahun 2021 (piutang retribusi pasar los) pada Dinas Perdagangan sebesar Rp1.542.000,00;
- Ditambah piutang retribusi menara telekomunikasi tahun 2021 pada Dinas Komuniaksi dan Informatika sebesar Rp3.065.000,00;
- Ditambah selisih pelunasan piutang retribusi pasar grosir/pertokoan tahun 2020 dan penambahan piutang tahun 2021 pada Dinas Perdagangan sebesar Rp145.634.380,00.



Pendapatan operasional dari hasil Retribusi Daerah berdasarkan SKPD telah dijelaskan pada bab mengenai Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.

#### 5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dalam bentuk pendapatan dividen dan hasil investasi atas Penyertaan pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan dividen diperoleh dari penyertaan modal pada Bank Kalsel dan KPN Swarga dengan kepemilikan saham minoritas yang dicatat berdasarkan metode biaya. Pendapatan hasil pengelolaan investasi pada TA 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.4.5 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Realisasi (Rp)          |                         | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) | %            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
|                                                              | Tahun 2021              | Tahun 2020              |                             |              |
| Bank BPD Kalsel                                              | 6.086.759.048,00        | 4.796.693.114,00        | 1.290.065.934,00            | 26,89        |
| KPN Swarga Kandangan                                         | 4.500.000,00            | 4.500.000,00            | 0,00                        | 0,00         |
| Bagian Laba atas Penyertaan Modal BUMD                       | 882.852.668,16          | 451.331.843,78          | 431.520.824,38              | 95,61        |
| <b>Jumlah</b>                                                | <b>6.974.111.716,16</b> | <b>5.252.524.957,78</b> | <b>1.721.586.758,38</b>     | <b>32,78</b> |

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di LO sebesar Rp6.974.111.716,16 memiliki nilai yang berbeda dengan disajikan pada LRA sebesar Rp6.091.259.048,00 yaitu lebih besar LO Rp882.852.668,16. Selisih tersebut merupakan bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada PDAM Tirta Dharma Kandangan (berdasarkan laporan keuangan *Audited*).

#### 5.4.1.1.4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya

Pendapatan asli daerah lainnya merupakan Pendapatan Asli Daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang realisasinya untuk periode TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.4.6 Rincian Pendapatan Asli Daerah Lainnya**

| Pendapatan Asli Daerah Lainnya                       | Realisasi (Rp)     |                    | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) | %       |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
|                                                      | Tahun 2021         | Tahun 2020         |                             |         |
| Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan            | 250.364.337,00     | 350.758.020,00     | (100.393.683,00)            | (28,62) |
| Penerimaan Jasa Giro                                 | 5.814.298.197,46   | 6.001.824.256,00   | (187.526.058,54)            | (3,12)  |
| Pendapatan Bunga Deposito                            | 4.847.028.371,93   | 7.483.240.655,71   | (2.636.212.283,78)          | (35,23) |
| Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 38.314.166,95      | 46.849.368,00      | (8.535.201,05)              | (18,22) |
| Pendapatan Denda Pajak Daerah                        | 41.485.797,00      | 22.491.788,20      | 18.994.008,80               | 84,45   |
| Pendapatan Denda Retribusi Daerah                    | 47.205.000,00      | 16.154.272,00      | 31.050.728,00               | 192,21  |
| Pendapatan Dari Pengembalian                         | 1.186.473.874,78   | 1.669.977.411,66   | (483.503.536,88)            | (28,95) |
| Pendapatan BLUD                                      | 191.049.246.397,79 | 163.325.709.820,00 | 27.723.536.577,79           | 16,97   |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| Pendapatan Asli Daerah Lainnya | Realisasi (Rp)            |                           | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) | %            |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|
|                                | Tahun 2021                | Tahun 2020                |                             |              |
| Lain-lain PAD yang Sah Lainnya | 0,00                      | 9.084.000,00              | (9.084.000,00)              | (100,00)     |
| Pendapatan Dana Kapitasi JKN   | 8.742.946.277,00          | 9.051.413.375,00          | (308.467.098,00)            | (3,41)       |
| <b>Jumlah</b>                  | <b>212.017.362.419,91</b> | <b>187.977.502.966,57</b> | <b>24.039.859.453,34</b>    | <b>12,79</b> |

Pendapatan Lain-lain PAD yang sah pada LO sebesar Rp212.017.362.419,91 memiliki nilai yang berbeda dengan yang disajikan di LRA sebesar Rp221.455.372.616,62 yaitu lebih kecil Rp9.438.010.196,71. Selisih tersebut dipengaruhi oleh:

- Penerimaan atas piutang dari angsuran/cicilan penjualan pompa air pada Dinas Pertanian sebesar Rp3.000.000,00;
- Ditambah penerimaan atas piutang bunga deposito (kurang setor bunga deposito periode Maret sampai dengan Desember) tahun 2020 sebesar Rp52.246.584,71;
- Ditambah selisih piutang BLUD RS dan BLUD Puskesmas tahun 2020 dan tahun 2021 ditambah dengan piutang BLUD RS dan BLUD Puskesmas tahun 2021 sebesar Rp9.311.763.612,00 ditambah dengan koreksi kurang catat piutang BLUD RS Daka Sejahtera tahun 2020 sebesar Rp3.000.000,00 dan selisih pendapatan diterima dimuka atas sewa atm tahun 2020 dan tahun 2021 pada BLUD RSUD Hasan Basry sebesar Rp28.350.000,00;
- Ditambah penerimaan atas pelunasan piutang pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir (pengembangan sapi) pada Dinas Pertanian sebesar Rp39.650.000,00.

#### 5.4.1.2 Pendapatan Transfer

Jumlah di bawah ini merupakan realisasi Pendapatan Transfer untuk periode TA 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.4.7 Rincian Pendapatan Transfer**

| Pendapatan Transfer                  | Realisasi (Rp)            |                             | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) | %             |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
|                                      | Tahun 2021                | Tahun 2020                  |                             |               |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 885.131.113.997,00        | 957.127.441.631,00          | (71.996.327.634,00)         | (7,52)        |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah     | 76.640.395.249,00         | 63.963.364.148,00           | 12.677.031.101,00           | 19,82         |
| <b>Jumlah</b>                        | <b>961.771.509.246,00</b> | <b>1.021.090.805.779,00</b> | <b>(59.319.296.533,00)</b>  | <b>(5,81)</b> |

Pendapatan transfer pemerintah terbagi atas 2 (dua) macam pendapatan transfer dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.4.8 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah**

| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat       | Realisasi (Rp)     |                    | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) | %      |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
|                                            | Tahun 2021         | Tahun 2020         |                             |        |
| Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan | 831.612.712.997,00 | 882.404.777.631,00 | (50.792.064.634,00)         | (5,76) |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat           | Realisasi (Rp)            |                           | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) | %             |
|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|
|                                                | Tahun 2021                | Tahun 2020                |                             |               |
| Transfer Antar Daerah Pemerintah Pusat Lainnya | 53.518.401.000,00         | 74.722.664.000,00         | (21.204.263.000,00)         | (28,38)       |
| <b>Jumlah</b>                                  | <b>885.131.113.997,00</b> | <b>957.127.441.631,00</b> | <b>(71.996.327.634,00)</b>  | <b>(7,52)</b> |

#### 5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan untuk periode TA 2021 dan 2020 terdiri atas penerimaan transfer sebagai berikut:

**Tabel 5.4.9 Rincian Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan**

| Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan    | Realisasi (Rp)            |                           | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) | %             |
|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|
|                                               | Tahun 2021                | Tahun 2020                |                             |               |
| Dana Bagi Hasil Pajak                         | 58.609.947.527,00         | 24.523.800.890,00         | 34.086.146.637,00           | 138,99        |
| Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam | 139.163.363.959,00        | 215.862.508.979,00        | (76.699.145.020,00)         | (35,53)       |
| Dana Alokasi Umum (DAU)                       | 474.753.627.000,00        | 482.100.383.000,00        | (7.346.756.000,00)          | (1,52)        |
| Dana Alokasi Khusus (DAK)                     | 159.085.774.511,00        | 159.918.084.762,00        | (832.310.251,00)            | (0,52)        |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>831.612.712.997,00</b> | <b>882.404.777.631,00</b> | <b>(50.792.064.634,00)</b>  | <b>(5,76)</b> |

#### 5.4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil

Pendapatan dana bagi hasil terdiri atas pendapatan transfer dana bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan rincian sebagai berikut:

##### a. Dana Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat terdiri atas Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPH), serta kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.4.10 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak**

| Dana Bagi Hasil Pajak                        | Realisasi (Rp)           |                          | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) | %             |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
|                                              | Tahun 2021               | Tahun 2020               |                             |               |
| Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan | 52.447.681.903,00        | 14.688.342.031,00        | 37.759.339.872,00           | 257,07        |
| Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan       | 6.162.265.000,00         | 9.835.447.159,00         | (3.673.182.159,00)          | (37,35)       |
| Dana Bagi Hasil dari Cukai Tembakau          | 624,00                   | 11.700,00                | (11.076,00)                 | (94,67)       |
| <b>Jumlah</b>                                | <b>58.609.947.527,00</b> | <b>24.523.800.890,00</b> | <b>34.086.146.637,00</b>    | <b>138,99</b> |

Pendapatan dana bagi hasil pajak pada LO sebesar Rp58.609.947.527,00 memiliki nilai yang sama dengan yang disajikan pada LRA. Belum ada PMK terkait kurang bayar sehingga nilai piutang



transfer pemerintah pusat masih sama dengan PMK No.25/PMK.07/2021.

#### b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri atas Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.4.11 Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak**

| Dana Bagi Hasil Bukan Pajak                     | Realisasi (Rp)            |                           | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) | %              |
|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|
|                                                 | Tahun 2021                | Tahun 2020                |                             |                |
| DBH - SDA Minyak Bumi                           | 68.554.300,00             | 538.646.182,00            | (470.091.882,00)            | (87,27)        |
| DBH - SDA Minerba - Landrent                    | 67.910.025,00             | 513.999.975,00            | (446.089.950,00)            | (86,79)        |
| DBH - SDA Minerba - Royalty                     | 137.227.649.277,00        | 213.621.865.033,00        | (76.394.215.756,00)         | (35,76)        |
| DBH - SDA Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan | 441.631.207,00            | 82.840.500,00             | 358.790.707,00              | 433,11         |
| DBH - SDA Perikanan                             | 1.357.619.150,00          | 1.105.157.289,00          | 252.461.861,00              | 22,84          |
| <b>Jumlah</b>                                   | <b>139.163.363.959,00</b> | <b>215.862.508.979,00</b> | <b>(76.699.145.020,00)</b>  | <b>(35,53)</b> |

Pendapatan dana bagi hasil pajak pada LO sebesar Rp139.163.363.959,00 memiliki nilai yang sama dengan yang disajikan pada LRA. Belum ada PMK terkait kurang bayar sehingga nilai piutang transfer pemerintah pusat masih sama dengan PMK No.25/PMK.07/2021.

#### 5.4.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Pendapatan operasional yang berasal dari alokasi DAU TA 2021 untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah diterima seluruhnya. Kenaikan/penurunan Dana Alokasi Umum tahun 2021 dan tahun 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.4.12 Rincian Dana Alokasi Umum (DAU)**

| Keterangan        | Realisasi (Rp)            |                           | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) | %             |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|
|                   | Tahun 2021                | Tahun 2020                |                             |               |
| Dana Alokasi Umum | 474.753.627.000,00        | 482.100.383.000,00        | (7.346.756.000,00)          | (1,52)        |
| <b>Jumlah</b>     | <b>474.753.627.000,00</b> | <b>482.100.383.000,00</b> | <b>(7.346.756.000,00)</b>   | <b>(1,52)</b> |

Pendapatan DAU – LO memiliki nilai yang sama dengan yang disajikan pada LRA.





#### 5.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pendapatan DAK terdiri atas:

**Tabel 5.4.13 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK)**

| Keterangan    | Realisasi (Rp)            |                           | Kenaikan /<br>(Penurunan)<br>(Rp) | %              |
|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|
|               | Tahun 2021                | Tahun 2020                |                                   |                |
| DAK Fisik     | 61.965.883.202,00         | 144.558.338.534,00        | (82.592.455.332,00)               | (57,13)        |
| Dak Non Fisik | 97.952.201.560,00         | 95.093.097.657,00         | 2.859.103.903,00                  | 3,01           |
| <b>Jumlah</b> | <b>159.918.084.762,00</b> | <b>239.651.436.191,00</b> | <b>(79.733.351.429,00)</b>        | <b>(33,27)</b> |

Pendapatan DAK secara akrual nilainya sama dengan pendapatan DAK berbasis kas yang disajikan pada LRA. Tidak terdapat hak Pemerintah Daerah atas alokasi DAK yang belum dibayar oleh Pemerintah Pusat.

Penjelasan lebih rinci mengenai alokasi DAK diuraikan dalam penjelasan mengenai Pendapatan DAK pada Laporan Realisasi Anggaran.

#### 5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya untuk periode TA 2021 terdiri dari penerimaan Dana Penyesuaian – Dana Intensif Daerah. Penerimaan dana penyesuaian untuk periode TA 2021 dan TA 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.4.14 Rincian Dana Penyesuaian**

| Keterangan             | Realisasi (Rp)           |                          | Kenaikan /<br>(Penurunan)<br>(Rp) | %              |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                        | Tahun 2021               | Tahun 2020               |                                   |                |
| Dana Penyesuaian - DID | 53.518.401.000,00        | 74.722.664.000,00        | (21.204.263.000,00)               | (28,38)        |
| <b>Jumlah</b>          | <b>53.518.401.000,00</b> | <b>74.722.664.000,00</b> | <b>(21.204.263.000,00)</b>        | <b>(28,38)</b> |

Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya pada LO memiliki nilai yang berbeda dengan yang disajikan pada LRA yaitu lebih kecil di LO sebesar Rp118.303.532.000,00. Nilai tersebut merupakan pendapatan transfer dana desa tahun 2021. Sesuai SE Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ menyatakan bahwa pendapatan dana desa dan belanja bantuan keuangan ke desa hanya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

#### 5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Penerimaan transfer antar daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi untuk periode TA 2021 serta perbandingannya dengan TA 2020 dapat dirinci sebagai berikut:



**Tabel 5.4.15 Rincian Transfer Pemerintah Antar Daerah**

| Transfer Pemerintah Provinsi                    | Realisasi (Rp)           |                          | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) | %            |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|
|                                                 | Tahun 2021               | Tahun 2020               |                             |              |
| Pajak Kendaraan Bermotor                        | 7.575.141.314,00         | 6.118.400.001,00         | 1.456.741.313,00            | 23,81        |
| Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor               | 8.304.696.618,00         | 7.174.650.379,00         | 1.130.046.239,00            | 15,75        |
| Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor            | 49.639.130.777,00        | 40.658.020.060,00        | 8.981.110.717,00            | 22,09        |
| Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan | 66.220.470,00            | 90.140.221,00            | (23.919.751,00)             | (26,54)      |
| Pajak Rokok                                     | 11.055.206.070,00        | 9.922.153.487,00         | 1.133.052.583,00            | 11,42        |
| <b>Jumlah</b>                                   | <b>76.640.395.249,00</b> | <b>63.963.364.148,00</b> | <b>12.677.031.101,00</b>    | <b>19,82</b> |

Saldo pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp76.640.395.249,00 memiliki nilai yang berbeda dengan yang disajikan pada LRA sebesar Rp68.817.570.282,00 yaitu lebih besar di LO Rp7.822.824.967,00. Selisih tersebut dipengaruhi oleh koreksi saldo awal sebesar Rp1.675.733.591,00 berupa kurang catat piutang bagi hasil pajak rokok bulan Desember tahun 2020 dan selisih piutang transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2021 dengan piutang Tahun 2020 yang dibayar di Tahun 2021 sebesar Rp9.498.558.558,00.

#### 5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk periode TA 2021 dan TA 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.4.16 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

| Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah                                      | Realisasi (Rp)           |                          | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) | %            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|
|                                                                           | Tahun 2021               | Tahun 2020               |                             |              |
| Pendapatan Hibah                                                          | 66.522.617.129,00        | 54.207.350.806,00        | 12.315.266.323,00           | 22,72        |
| Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | 22.589.108.000,00        | -                        | 22.589.108.000,00           | 0,00         |
| Pendapatan Lainnya                                                        | 0,00                     | 57.000.000,00            | (57.000.000,00)             | (100,00)     |
| <b>Jumlah</b>                                                             | <b>89.111.725.129,00</b> | <b>54.264.350.806,00</b> | <b>34.847.374.323,00</b>    | <b>64,22</b> |

#### 5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah untuk periode TA 2021 dan TA 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.4.17 Rincian Pendapatan Hibah – LO**

| Pendapatan Hibah                  | Realisasi (Rp)    |                   | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) | %     |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------|
|                                   | Tahun 2021        | Tahun 2020        |                             |       |
| Hibah dari Pemerintah Pusat - LO  | 46.030.535.861,00 | 26.262.428.655,00 | 19.768.107.206,00           | 75,27 |
| Hibah dari Pemerintah Daerah - LO | 10.536.177.618,00 | 0,00              | 10.536.177.618,00           | 0,00  |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| Pendapatan Hibah                                             | Realisasi (Rp)           |                          | Kenaikan /<br>(Penurunan)<br>(Rp) | %            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------|
|                                                              | Tahun 2021               | Tahun 2020               |                                   |              |
| Hibah dari Kelompok Masyarakat - LO                          | 9.893.308.750,00         | 2.635.328.100,00         | 7.257.980.650,00                  | 275,41       |
| Hibah dari Kelompok Perorangan - LO                          | 0,00                     | 85.287.750,00            | (85.287.750,00)                   | (100,00)     |
| Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri - LO | 62.594.900,00            | 711.101.700,00           | (648.506.800,00)                  | (91,20)      |
| Pendapatan Hibah Dana BOS                                    | -                        | 24.513.204.601,00        | (24.513.204.601,00)               | (100,00)     |
| <b>Jumlah</b>                                                | <b>66.522.617.129,00</b> | <b>54.207.350.806,00</b> | <b>12.315.266.323,00</b>          | <b>22,72</b> |

**a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat**

Pendapatan hibah dari pemerintah pusat tahun 2021 sebesar Rp46.030.535.861,00 terdiri atas penerimaan hibah pada beberapa SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.4.18 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah**

| No     | SKPD                        | Jenis                                      | Nilai (Rp)        | Keterangan                                                                                               | BAST                                |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1      | Dinas Pendidikan            | Aset tetap - Laptop (KIB B)                | 857.400.000,00    | Hibah bantuan peralatan pendidikan (peralatan TIK) dari KEMENDIKBUD untuk SMPN dan SDN                   | No. 1634/BAST-SMP/B2G.spt/BMD/2021  |
|        |                             | Aset tetap - Proyektor (KIB B)             | 45.550.000,00     |                                                                                                          | No. 15001/C3/KPANI/KP/2021          |
|        |                             | Aset tetap - Wireless router (KIB B)       | 11.920.000,00     |                                                                                                          |                                     |
|        |                             | Aset tetap - Konektor VHD dan HDMI (KIB B) | 1.806.000,00      |                                                                                                          |                                     |
| Jumlah |                             |                                            | 916.676.000,00    |                                                                                                          |                                     |
| 2      | Dinas Kesehatan             | Aset tetap - alat kesehatan (KIB B)        | 2.389.200,00      | Dari Kemenkes RI berupa KIT kebugaran                                                                    | KN.01.03/4/PPK/450/2021             |
|        |                             |                                            | 106.162.375,00    | Dari Kemenkes RI berupa Lansia KIT                                                                       | KN.02.04/6/PPK/2092/IX/2021         |
|        |                             |                                            | 79.458.720,00     | Dari Kemenkes RI berupa KIT UKS                                                                          | KN.02.04/PPK/2362/X/2021            |
|        |                             |                                            | 33.792.000,00     | Dari Kemenkes RI berupa Fridge-tag 2                                                                     | KN.02.02/4.3/7058.348/2021          |
|        |                             |                                            | 238.524.996,00    | Dari Kemenkes RI berupa B medical system, B medical RCW 8, Vaccine carrier, dan freezer indikator logtag | KN.02.02/4.3/348/2021               |
|        |                             |                                            | 230.807.016,00    | Dari Kemenkes RI berupa IVA KIT                                                                          | KN 02.02/4.3/6364.332/2021          |
|        |                             |                                            | 299.960.000,00    | Dari Kemenkes RI berupa alat USG                                                                         | KN 02.02/6/PPK/2361/X/2021          |
|        |                             | Aset tetap - bangunan kesehatan (KIB C)    | 15.146.911.120,00 | Dari Kemenkes RI berupa bangunan RS Daha Sejahtera                                                       | NO. KN.02.07/I.3/8617/2020          |
| Jumlah |                             |                                            | 16.138.005.427,00 |                                                                                                          |                                     |
| 3      | RSUD                        | Aset tetap alat kedokteran umum (KIB B)    | 18.440.000,00     | Dari BNPB                                                                                                | No. /BNPB/OJL/LP.01.03/03/2021      |
|        |                             | Aset tetap alat kedokteran umum (KIB B)    | 867.350.000,00    | Dari Kemenkes RI                                                                                         | 03/TIJ-GDN-MED/XII/2021             |
| Jumlah |                             |                                            | 885.790.000,00    |                                                                                                          |                                     |
| 4      | Dinas Perumahan Rakyat KPLH | Aset tetap bangunan rumah susun (KIB C)    | 18.981.205.508,00 | Dari Kementerian PUPR                                                                                    | No.473/PKS/DR/2021                  |
| 5      | BPBD                        | Aset tetap - trailer tangki air (KIB B)    | 164.500.000,00    | Dari BNPB                                                                                                | No: BA 97/D V/RT.03.03/03/2021      |
| 6      | Dinas Perhubungan           | Aset tetap kendaraan bus air (KIB B)       | 2.258.905.000,00  | Dari Kementerian Perhubungan                                                                             | BAST Pt.301/300/Satker-TPSD/II/2022 |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| No           | SKPD               | Jenis                                 | Nilai (Rp)               | Keterangan                   | BAST                         |
|--------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 7            | Dinas Perdagangan  | Aset tetap bangunan pertokoan (KIB C) | 5.847.863.000,00         | Dari Kementerian Perdagangan | No.BA 187/M-DAG/BAST/04/2021 |
| 8            | Sekretariat Daerah | Aset tetap tehmo gun (KIB B)          | 837.590.926,00           | Dari KPU                     |                              |
| <b>Total</b> |                    |                                       | <b>46.030.535.861,00</b> |                              |                              |

**b. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah – LO**

Pendapatan hibah dari pemerintah daerah sebesar Rp10.536.177.618,00 berupa pendapatan hibah pada beberapa SKPD yang menambah aset tetap dan persediaan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.4.19 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah – LO**

| No     | SKPD                | Jenis                                   | Nilai (Rp)        | Keterangan                                                                                                                                                                   | BAST                                                  |
|--------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1      | Dinas Pendidikan    | Aset tetap - buku (KIB E)               | 10.800.000,00     | Dari BTIKP Provinsi Kalimantan Selatan untuk SDN dan SMPN                                                                                                                    | No.425/010.BTIKP-PTIJP/DISDIKBUD/2021                 |
| 2      | Dinas Kesehatan     | Persediaan obat-obatan                  | 2.362.139.646,00  | Dari Kemenkes RI berupa KIT kebugaran, lansia kit, kit uks, fridge-tag 2, B medical system, B medical rcw 8, vaccine carrier, freezer indikator logtag, iva kit dan alat usg | KN.01.03/4/PPK/450/2021                               |
| 3      | RSUD H. Hasan Basry | Persediaan obat-obatan                  | 6.317.435.812,00  | Dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel                                                                                                                                         |                                                       |
|        |                     | Persediaan BAKHP                        | 605.990.000,00    | Dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel dan BPJS                                                                                                                                |                                                       |
|        |                     | Aset tetap alat kedokteran umum (KIB B) | 1.239.812.160,00  | Dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel                                                                                                                                         | No. 442.1/3264/IF/X/2021 dan No. 442.1/3418/IF/X/2021 |
| Jumlah |                     |                                         | 10.536.177.618,00 |                                                                                                                                                                              |                                                       |

**c. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan**

Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan sebesar Rp9.893.308.750,00 merupakan pendapatan hibah yang terdiri dari:

- Penerimaan hibah berupa hibah tanah komplek perumahan dari kelompok masyarakat yang terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebesar Rp9.839.350.000,00; dan
- Penerimaan hibah berupa uang dari kelompok masyarakat/perorangan berupa pungutan SP3 atas proyek fisik (galian c) yang langsung diterima Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp53.958.750,00.

**d. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri – LO**

Pendapatan hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam negeri



sebesar Rp62.594.900,00 terdiri atas pendapatan hibah sebagai berikut:

- Pendapatan hibah persediaan BAHKP pada RSUD H. Hasan Basry sebesar Rp9.729.100,00 dari BPJS berupa masker N95; dan mushaf Al-Qur'an sebesar Rp1.800.000,00 dari BAZNAS.
- Pendapatan hibah aset tetap peralatan dan mesin berupa perahu karet pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp50.000.000,00 dari BRI Cabang Kandangan.
- Pendapatan dari pengembalian dana hibah Dharma Wanita Persatuan sebesar Rp1.065.800,00 yang diterima oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

#### 5.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Penerimaan yang dikategorikan pada jenis pendapatan ini adalah penerimaan hibah berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah yang terdiri dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Berdasarkan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 971 – 7791 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, alokasi Dana BOS dianggarkan pada Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Pendapatan Hibah, Obyek Pendapatan Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Pendapatan Hibah Dana BOS. Pendapatan hibah dana BOS dianggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Pada tahun anggaran 2020 pendapatan hibah dana BOS disajikan pada akun pendapatan hibah dari pemerintah pusat. Sedangkan pada tahun anggaran 2021 pendapatan hibah dana BOS disajikan pada akun lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Tabel 5.4.20 Rincian Pendaptan Hibah Dana BOS**

| Pendapatan Hibah<br>Dana BOS - LO | Realisasi (Rp)           |             | Kenaikan /<br>(Penurunan)<br>(Rp) | %           |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                                   | Tahun 2021               | Tahun 2020  |                                   |             |
| SDN                               | 17.051.618.000,00        | 0,00        | 17.051.618.000,00                 | 0,00        |
| SMPN                              | 5.537.490.000,00         | 0,00        | 5.537.490.000,00                  | 0,00        |
| <b>Jumlah</b>                     | <b>22.589.108.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.589.108.000,00</b>          | <b>0,00</b> |

#### 5.4.2 BEBAN

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi beban TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

**Tabel 5.4.21 Rincian Beban**

| Beban                                        | Realisasi (Rp)              |                             | Kenaikan /<br>(Penurunan)<br>(Rp) | %           |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|
|                                              | Tahun 2021                  | Tahun 2020                  |                                   |             |
| Beban Pegawai                                | 479.110.625.219,00          | 468.467.674.563,00          | 10.642.950.656,00                 | 2,27        |
| Beban Barang dan Jasa                        | 455.947.853.658,24          | 395.450.842.075,44          | 60.497.011.582,80                 | 15,30       |
| Beban Hibah                                  | 25.458.597.908,00           | 38.939.997.523,00           | (13.481.399.615,00)               | (34,62)     |
| Beban Bantuan Sosial                         | 20.553.244.077,00           | 24.407.210.756,00           | (3.853.966.679,00)                | (15,79)     |
| Beban Penyisihan Piutang                     | 430.143.655,51              | 439.324.289,50              | (9.180.633,99)                    | (2,09)      |
| Beban Lain-lain                              | 3.155.378.986,69            | 4.729.540.375,59            | (1.574.161.388,90)                | (33,28)     |
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin         | 49.928.887.571,00           | 54.320.467.873,89           | (4.391.580.302,89)                | (8,08)      |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan         | 24.888.935.528,00           | 23.473.784.050,00           | 1.415.151.478,00                  | 6,03        |
| Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan | 101.908.770.776,57          | 101.800.047.059,00          | 108.723.717,57                    | 0,11        |
| Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya          | 1.669.832,00                | 0,00                        | 1.669.832,00                      | 0,00        |
| Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud         | 670.599.635,00              | 552.950.521,00              | 117.649.114,00                    | 21,28       |
| Beban Bagi Hasil                             | 2.628.865.000,00            | 2.288.000.000,00            | 340.865.000,00                    | 14,90       |
| Beban Bantuan Keuangan                       | 64.400.000.000,00           | 75.949.950.320,00           | (11.549.950.320,00)               | (15,21)     |
| <b>Jumlah Beban</b>                          | <b>1.229.083.571.847,01</b> | <b>1.190.819.789.406,42</b> | <b>38.263.782.440,59</b>          | <b>3,21</b> |

Rincian lebih lanjut mengenai pos-pos beban atau kegiatan operasi adalah sebagai berikut:

#### 5.4.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi terdiri atas beban sebagai berikut:

**Tabel 5.4.22 Rincian Beban Operasi**

| Beban                    | Realisasi (Rp)            |                           | Kenaikan /<br>(Penurunan)<br>(Rp) | %           |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|
|                          | Tahun 2021                | Tahun 2020                |                                   |             |
| Beban Pegawai            | 479.110.625.219,00        | 468.467.674.563,00        | 10.642.950.656,00                 | 2,27        |
| Beban Barang dan Jasa    | 455.947.853.658,24        | 395.450.842.075,44        | 60.497.011.582,80                 | 15,30       |
| Beban Hibah              | 25.458.597.908,00         | 38.939.997.523,00         | (13.481.399.615,00)               | (34,62)     |
| Beban Bantuan Sosial     | 20.553.244.077,00         | 24.407.210.756,00         | (3.853.966.679,00)                | (15,79)     |
| Beban Penyisihan Piutang | 430.143.655,51            | 439.324.289,50            | (9.180.633,99)                    | (2,09)      |
| Beban Lain-lain          | 3.155.378.986,69          | 4.729.540.375,59          | (1.574.161.388,90)                | (33,28)     |
| <b>Jumlah Beban</b>      | <b>984.655.843.504,44</b> | <b>932.434.589.582,53</b> | <b>52.221.253.921,91</b>          | <b>5,60</b> |

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian pos-pos beban pada beban operasi disajikan sebagai berikut:

##### 5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai terdiri atas beban sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

**Tabel 54.23 Rincian Beban Pegawai**

| Beban Pegawai - LO                                                       | Realisasi (Rp)            |                           | Kenaikan /<br>(Penurunan)<br>(Rp) | %           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|
|                                                                          | Tahun 2021                | Tahun 2020                |                                   |             |
| Beban Gaji dan Tunjangan                                                 | 282.109.474.945,00        | 352.864.739.776,00        | (70.755.264.831,00)               | (20,05)     |
| Beban Tambahan Penghasilan ASN                                           | 102.647.182.121,00        | 101.663.789.473,00        | 983.392.648,00                    | 0,97        |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 77.850.419.460,00         | 0,00                      | 77.850.419.460,00                 | 0,00        |
| Beban Gaji dan Tunjangan DPRD                                            | 15.442.132.876,00         | 4.692.465.432,00          | 10.749.667.444,00                 | 229,08      |
| Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH                                        | 259.830.385,00            | 0,00                      | 259.830.385,00                    | 0,00        |
| Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH                    | 801.585.432,00            | 0,00                      | 801.585.432,00                    | 0,00        |
| Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah                                   | 0,00                      | 575.069.855,00            | (575.069.855,00)                  | (100,00)    |
| Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah                               | 0,00                      | 317.530.777,00            | (317.530.777,00)                  | (100,00)    |
| Beban Pegawai Operasional BLUD                                           | 0,00                      | 4.826.685.000,00          | (4.826.685.000,00)                | (100,00)    |
| Beban Pegawai Dana BOS                                                   | 0,00                      | 3.527.394.250,00          | (3.527.394.250,00)                | (100,00)    |
| <b>Jumlah</b>                                                            | <b>479.110.625.219,00</b> | <b>468.467.674.563,00</b> | <b>10.642.950.656,00</b>          | <b>2,27</b> |

Beban pegawai pada LO sebesar Rp479.110.625.219,00 memiliki nilai yang berbeda dengan yang disajikan pada LRA sebesar Rp482.702.664.650,00, yaitu lebih kecil yang disajikan pada LO sebesar Rp3.592.039.431,00 karena dipengaruhi oleh:

1. Penambahan utang belanja pegawai tahun 2021 sebesar Rp593.251.671,00 yang terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp570.632.331,00; pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp6.118.408,00; pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp9.553.804,00; pada Dinas Perikanan sebesar Rp6.070.416,00; dan pada Kecamatan Daha Utara sebesar Rp876.712,00.
2. Penambahan reklasifikasi dari aset tetap gedung dan bangunan (KIB C) sebesar Rp2.300.000 yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.100.000,00 berupa biaya/honor pengadaan patok tanah; dan pada Kelurahan Kandangan Utara sebesar Rp1.200.000,00 berupa honor pekerjaan drainase untuk masyarakat.
3. Pengurangan yang berasal dari pelunasan utang belanja pegawai tahun 2020 sebesar Rp4.113.346.602,00 yang terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.920.000.052,00; dan pada Sekretariat DPRD sebesar Rp1.193.346.550,00.
4. Pengurangan yang berasal dari reklasifikasi ke aset tetap sebesar Rp74.244.500,00 yang terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

- Reklasifikasi ke aset tetap tanah (KIB A) pada Inspektorat Daerah sebesar Rp1.600.000,00 berupa honor penataan dan pemeliharaan lingkungan kantor;
- Reklasifikasi ke aset tetap peralatan dan mesin (KIB B) sebesar Rp26.915.000,00 yang terdapat pada beberapa SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.4.24 Rincian Reklasifikasi dari Beban Pegawai ke Peralatan dan Mesin**

| No            | SKPD                                    | Nilai (Rp)           | Keterangan                                                 |
|---------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| 1             | Dinas PPKBPPPA                          | 1.300.000,00         | Honor pengadaan kendaraan roda 2 dan laptop                |
| 2             | Dinas Kominfo                           | 8.550.000,00         | Honor pengadaan PC unit, printer, ups, kamera, dan brankas |
| 3             | Dinas Perdagangan                       | 7.700.000,00         | Honor pengadaan laptop dan lemari arsip                    |
| 4             | Bagian Kesejahteraan Rakyat             | 1.600.000,00         | Honorarium pengadaan laptop                                |
| 5             | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 1.950.000,00         | Honorarium pengadaan laptop dan scanner                    |
| 6             | Sekretariat DPRD                        | 1.500.000,00         | Honorarium PPK                                             |
| 7             | Kecamatan Sungai Raya                   | 650.000,00           | Honor pengadaan filing cabinet                             |
| 8             | Kecamatan Kandangan                     | 1.550.000,00         | Honor pengadaan genset                                     |
| 9             | Kecamatan Daha Utara                    | 500.000,00           | Honor pengadaan                                            |
| 10            | Inspektorat Daerah                      | 800.000,00           | Honor pengadaan                                            |
| 11            | BAPPELITBANGDA                          | 815.000,00           | Honor pengadaan                                            |
| <b>Jumlah</b> |                                         | <b>26.915.000,00</b> |                                                            |

- Reklasifikasi ke aset tetap gedung dan bangunan (KIB C) sebesar Rp43.979.500,00 yang terdapat pada beberapa SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.4.25 Rincian Reklasifikasi dari Beban Pegawai ke Gedung dan Bangunan**

| No | SKPD                       | Nilai (Rp)    | Keterangan                                                                                    |
|----|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dinas Peumahan Rakyat KPLH | 1.600.000,00  | Honor pengadaan rehab gedung kantor                                                           |
| 2  | Dinas Sosial               | 800.000,00    | honor rehab tembo makam pahlawan                                                              |
| 3  | Dinas PPKBPPPA             | 1.950.000,00  | Honor rehab gedung kantor                                                                     |
| 4  | Dinas Porapar              | 3.200.000,00  | Honorarium rehab pagar dan bangunan                                                           |
|    |                            | 4.900.000,00  | honorarium pemasangan paving block, pembuatan atap kolam air panas, rehab sarana objek wisata |
|    |                            | 800.000,00    | Honorarium sarana kawasan dermaga bamboo rafting                                              |
| 5  | Dinas Perdagangan          | 3.300.000,00  | Honor pengadaan rehab gedung pertokoan                                                        |
| 6  | Kecamatan Simpur           | 22.929.500,00 | Honor konsultan rehab gedung kantor                                                           |
| 7  | Kelurahan Jambu Hilir      | 1.600.000,00  | Honor pengadaan paving block, pagar dan taman                                                 |
| 8  | Kecamatan Kalumpang        | 500.000,00    | Honor PPK                                                                                     |





PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| No            | SKPD               | Nilai (Rp)           | Keterangan                |
|---------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| 9             | Inspektorat Daerah | 2.400.000,00         | Honor rehab gedung kantor |
| <b>Jumlah</b> |                    | <b>43.979.500,00</b> |                           |

- Reklasifikasi ke aset tetap jalan, irigasi dan jaringan (KIB D) sebesar Rp800.000,00 yang terdapat pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata berupa honorarium PPK-PPBJ konsultasi perencanaan pembangunan jalan dalam kawasan di bukit langara.
- Reklasifikasi ke aset tetap lainnya (KIB E) sebesar Rp950.000,00 yang terdapat pada Dinas Perpustakaan berupa honor pejabat pengadaan barang/jasa pengembangan bahan Pustaka.

#### 5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa tahun 2021 dan 2020 beserta kenaikan/penurunannya dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.4.26 Rincian Beban Barang dan Jasa**

| Beban Barang dan Jasa - SAP                                                | Realisasi (Rp)            |                           | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) | %            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|
|                                                                            | Tahun 2021                | Tahun 2020                |                             |              |
| Beban Persediaan                                                           | 185.307.576.810,74        | 46.872.523.742,05         | 138.435.053.068,69          | 295,34       |
| Beban Jasa                                                                 | 176.226.989.763,50        | 134.750.444.172,50        | 41.476.545.591,00           | 30,78        |
| Beban Pemeliharaan                                                         | 18.780.138.742,00         | 15.320.291.297,00         | 3.459.847.445,00            | 22,58        |
| Beban Perjalanan Dinas                                                     | 36.110.385.303,00         | 34.594.824.958,00         | 1.515.560.345,00            | 4,38         |
| Beban Uang/Barang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 4.675.405.720,00          | 702.258.680,00            | 3.973.147.040,00            | 565,77       |
| Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat        | 15.165.967.871,00         | 0,00                      | 15.165.967.871,00           | 0,00         |
| Beban Barang dan Jasa Dana BOS                                             | 19.681.389.448,00         | 15.433.889.497,00         | 4.247.499.951,00            | 27,52        |
| Beban Barang dan Jasa Operasional BLUD                                     | 0,00                      | 147.776.609.728,89        | (147.776.609.728,89)        | (100,00)     |
| <b>Jumlah</b>                                                              | <b>455.947.853.658,24</b> | <b>395.450.842.075,44</b> | <b>60.497.011.582,80</b>    | <b>15,30</b> |

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian pos-pos beban pada beban barang dan jasa adalah sebagai berikut:

##### a. Beban Persediaan

Beban persediaan tahun 2021 dan 2020 beserta kenaikan dan penurunannya disajikan sebagai berikut:



**Tabel 5.4.27 Rincian Beban Persediaan**

| Beban Persediaan             | Realisasi (Rp)            |                          | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) | %             |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
|                              | Tahun 2021                | Tahun 2020               |                             |               |
| Beban Barang Pakai Habis     | 185.268.800.810,74        | 37.442.844.340,52        | 147.825.956.470,22          | 394,80        |
| Beban Barang Tak Habis Pakai | 38.776.000,00             | 9.429.679.401,53         | (9.390.903.401,53)          | (99,59)       |
| <b>Jumlah</b>                | <b>185.307.576.810,74</b> | <b>46.872.523.742,05</b> | <b>138.435.053.068,69</b>   | <b>295,34</b> |

Beban persediaan secara akrual sebagaimana disajikan dalam LO sebesar Rp185.307.576.810,74 memiliki jumlah yang berbeda dengan belanja barang persediaan TA 2021 sebagaimana yang disajikan dalam LRA sebesar Rp190.727.194.536,00 yaitu selisih lebih sebesar Rp5.419.617.725,26 karena dipengaruhi oleh:

- Bertambahnya beban persediaan karena adanya selisih persediaan tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar Rp672.430.378,00.
- Bertambahnya beban persediaan karena adanya belanja persediaan yang berasal dari dana BTT sebesar Rp540.176.300,00 yang terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp539.276.300,00; pada Dinas Perumahan Rakyat KPLH sebesar Rp400.000,00; dan pada BPBD sebesar Rp500.000,00.
- Bertambahnya beban persediaan karena adanya penggunaan persediaan yang berasal dari hibah obat sebesar Rp7.950.014.456,00 yaitu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.333.570.504,00 dan pada BLUD RSUD H. Hasan Basry sebesar Rp6.616.443.952,00.
- Bertambahnya beban persediaan karena adanya reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp77.573.800,00 yang terdapat pada beberapa SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.4.28 Rincian Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Beban Persediaan**

| No | SKPD                             | Nilai (Rp)    | Nama Barang                                      |
|----|----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| 1  | Dinas Pendidikan                 | 2.420.000,00  | Bola lampu dan kaca bening                       |
|    |                                  | 4.475.100,00  | Alat dapur                                       |
| 2  | Dinas Kesehatan                  | 13.485.000,00 |                                                  |
| 3  | RSUD H. Hasan Basry              | 6.684.700,00  | Peralatan kedokteran habis pakai                 |
| 4  | Dinas Sosial                     | 2.591.000,00  | Peralatan rumah tangga                           |
| 5  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 11.110.000,00 | Masker, video kegiatan, bedak tabur, taplak meja |
| 6  | Dinas Pertanian                  | 23.250.000,00 | Pipa air UPTD Hariti                             |
| 7  | Dinas Perdagangan                | 1.728.000,00  | Alat pelatihan                                   |
| 8  | Sekretariat DPRD                 | 6.000.000,00  | Botol minum                                      |
| 9  | Kecamatan Loksado                | 1.630.000,00  | Keset dan pengharum ruangan                      |
| 10 | Kecamatan Daha Utara             | 3.400.000,00  | Sarung kursi                                     |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| No            | SKPD             | Nilai (Rp)           | Nama Barang          |
|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 11            | Badan Kesbangpol | 800.000,00           | Komputer dan printer |
| <b>Jumlah</b> |                  | <b>77.573.800,00</b> |                      |

- Berkurangnya beban persediaan karena adanya reklasifikasi ke aset tetap sebesar Rp1.295.203.290,00 yaitu reklasifikasi dari KIB B (peralatan dan mesin) sebesar Rp1.277.703.290,00 pada beberapa SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.4.29 Rincian Reklasifikasi dari Beban Persediaan ke Peralatan dan Mesin**

| No            | SKPD                             | Nilai (Rp)              | Keterangan                                                                         |
|---------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Dinas Kesehatan                  | 30.000.000,00           | Plang nama Pustu                                                                   |
| 2             | Dispera KPLH                     | 874.000.000,00          | Buldozer                                                                           |
|               |                                  | 45.800.000,00           | Pompa air, hand sprayer, thermo gun, chain saw dan paragnet                        |
|               |                                  | 174.857.350,00          | Trafo, lampu RGB, kontroller RGB, dan alat workshop                                |
|               |                                  | 7.300.000,00            | Mesin pemotong rumput                                                              |
| 3             | Dinas Kominfo                    | 6.375.000,00            | Papan nama pengawasan menara                                                       |
| 4             | Dinas Penanaman Modal dan PTSP   | 12.232.000,00           | Bunga plastik                                                                      |
| 5             | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 5.895.000,00            | Mesin vacum cleaner                                                                |
| 6             | Dinas Pertanian                  | 26.000.000,00           | Gorden                                                                             |
| 7             | Bagian Umum                      | 10.250.000,00           | Pengadaan keset dan karpet                                                         |
| 8             | Kecamatan Angkinang              | 1.650.000,00            | Vacum cleaner                                                                      |
| 9             | Kecamatan Padang Batung          | 3.200.000,00            | Karpet musholla                                                                    |
| 10            | Kelurahan Kandangan Utara        | 14.300.000,00           | Alat penyemprot, papan nama, meja kursi, tensi meter, timbangan dan ranjang pasien |
| 11            | Inspektorat Daerah               | 41.343.940,00           | Gorden                                                                             |
| 12            | Badan Kesbangpol                 | 24.500.000,00           | Pembelian selang pemadam kebakaran                                                 |
| <b>Jumlah</b> |                                  | <b>1.277.703.290,00</b> |                                                                                    |

dan reklasifikasi dari KIB C (gedung dan bangunan) sebesar Rp17.500.000,00 pada Kecamatan Daha Utara berupa penambahan daya listrik.

- Berkurangnya beban persediaan karena adanya persediaan yang usang/expired/kedaluwarsa sebesar Rp972.017.605,26 yaitu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp678.326.858,78, pada BLUD RSUD H. Hasan Basry sebesar Rp156.992.085,48, pada Dinas PPKBPPPA sebesar Rp82.478.600,00, dan pada BPKPD sebesar Rp54.220.061,00.
- Berkurangnya beban persediaan karena adanya selisih pelunasan utang



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

jasa pelayanan Kesehatan dan utang BLUD tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar Rp12.392.591.764,00.

**b. Beban Jasa**

Beban Jasa tahun 2021 dan 2020 beserta kenaikan/penurunannya dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.4.30 Rincian Beban Jasa**

| Beban Jasa                                                                               | Realisasi (Rp)            |                           | Kenaikan /<br>(Penurunan)<br>(Rp) | %            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------|
|                                                                                          | Tahun 2021                | Tahun 2020                |                                   |              |
| Beban Jasa Kantor                                                                        | 113.637.892.879,50        | 51.492.315.770,50         | 62.145.577.109,00                 | 120,69       |
| Beban Iuran Jaminan/Asuransi                                                             | 58.915.337.342,00         | 47.321.728.277,00         | 11.593.609.065,00                 | 24,50        |
| Beban Sewa                                                                               | 599.186.800,00            | 1.436.589.150,00          | (837.402.350,00)                  | (58,29)      |
| Beban Jasa Konsultansi                                                                   | 1.064.332.900,00          | 283.289.859,00            | 781.043.041,00                    | 275,70       |
| Beban Beasiswa Pendidikan PNS                                                            | 51.720.000,00             | 24.217.813,00             | 27.502.187,00                     | 113,56       |
| Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 1.832.519.842,00          | 930.987.500,00            | 901.532.342,00                    | 96,84        |
| Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi                       | 126.000.000,00            | 0,00                      | 126.000.000,00                    | 0,00         |
| Beban Honorarium PNS - LO                                                                | 0,00                      | 410.366.613,00            | (410.366.613,00)                  | (100,00)     |
| Beban Honorarium Non PNS - LO                                                            | 0,00                      | 17.406.183.149,00         | (17.406.183.149,00)               | (100,00)     |
| Beban Insentif Tenaga Medis Penanganan Covid-19                                          | 0,00                      | 15.444.766.041,00         | (15.444.766.041,00)               | (100,00)     |
| <b>Jumlah</b>                                                                            | <b>176.226.989.763,50</b> | <b>134.750.444.172,50</b> | <b>41.476.545.591,00</b>          | <b>30,78</b> |

Beban jasa secara akrual sebagaimana disajikan dalam LO sebesar Rp176.226.989.763,50 memiliki jumlah yang berbeda dengan belanja jasa TA 2021 sebagaimana yang disajikan dalam LRA sebesar Rp155.293.295.594,00 yaitu lebih besar sebesar Rp20.933.694.169,50 karena dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Bertambahnya beban jasa karena adanya selisih utang jasa pelayanan kesehatan dan BLUD tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp21.583.467.111,50.
- Bertambahnya beban jasa karena adanya belanja jasa yang berasal dari dana BTT sebesar Rp355.856.000,00 yaitu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp174.556.000,00, pada Dinas Perumahan Rakyat KPLH sebesar Rp4.800.000,00, dan pada BPBD sebesar Rp176.500.000,00.
- Bertambahnya beban jasa karena adanya reklasifikasi dari aset tetap sebesar Rp47.616.500,00 yaitu dari KIB C (gedung dan bangunan) sebesar Rp30.611.500,00 pada Dinas Pendidikan, dan dari KIB D (JIJ)



sebesar Rp17.005.000,00 pada Dinas PUTR.

- Berkurangnya beban jasa karena adanya reklasifikasi ke aset tetap sebesar Rp1.053.245.442,00 yaitu ke KIB A (tanah) sebesar Rp74.944.500,00, ke KIB B (peralatan dan mesin) sebesar Rp12.000.000,00, ke KIB C (gedung dan bangunan) sebesar Rp430.182.242,00, ke KIB D (JIJ) sebesar Rp10.336.700,00, ke KIB F (KDP) sebesar Rp407.057.000,00, dan ke aset tidak berwujud sebesar Rp118.725.000,00 pada beberapa SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.4.31 Rincian Reklasifikasi dari Beban Jasa ke Gedung dan Bangunan**

| No | SKPD                        | Reklas ke Aset Tetap | Nilai (Rp)     | Keterangan                                                                                                       |
|----|-----------------------------|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dinas Perumahan Rakyat KPLH | KIB A                | 47.460.500,00  | Jasa konsultasi dan pengawasan peningkatan TPU                                                                   |
| 2  | Dinas Sosial                | KIB A                | 5.839.000,00   | Jasa konsultan pengawasan dan honor pekerjaan pemasangan paving block                                            |
| 3  | Dinas Pertanian             | KIB A                | 9.875.000,00   | Jasa konsultan pengawasan pengurangan tanah                                                                      |
| 4  | Inspektorat Daerah          | KIB A                | 11.770.000,00  | Jasa konsultan perencanaan paving block                                                                          |
| 5  | Dinas PPKBPPPA              | KIB B                | 2.000.000,00   | Plang papan nama UPTD                                                                                            |
| 6  | Kecamatan Telaga Langsat    | KIB B                | 10.000.000,00  | Pembelian GPS                                                                                                    |
| 7  | Dinas Perumahan Rakyat KPLH | KIB C                | 55.398.000,00  | Jasa pengawasan pembnagunan tempat parkir, rehab lantai, teralis dan gedung kantor, dan pembangunan rumah kompos |
|    |                             |                      | 30.585.500,00  | Jasa perencanaan                                                                                                 |
| 8  | Dinas Porapar               | KIB C                | 47.085.000,00  | Jasa konsultasi perencanaan pengecatan kolam renngag dan apraisal                                                |
|    |                             |                      | 5.075.000,00   | Jasa pengawasan pengecatan kolam renang                                                                          |
|    |                             |                      | 99.750.000,00  | Jasa perencanaan sarana ruang kreatif                                                                            |
| 9  | Dinas Pertanian             | KIB C                | 150.481.442,00 | Jasa konsultan pengawasan pembangunan gedung kantor                                                              |
| 10 | Kelurahan Kandangan Utara   | KIB C                | 6.420.700,00   | Jasa konsultan rehab gedung PKK                                                                                  |
| 11 | BKPSDM                      | KIB C                | 17.984.600,00  | Jasa kons. Perencanaan rehab gedung 2                                                                            |
| 12 | Inspektorat Daerah          | KIB C                | 17.402.000,00  | Jasa Rehab gedung kantor                                                                                         |
| 13 | Dinas Perumahan Rakyat KPLH | KIB D                | 10.336.700,00  | Jasa perencanaan pemasangan paving block akses jalan TPS3R dan TPA Malutu                                        |
| 14 | Dinas Perumahan Rakyat KPLH | KIB F                | 34.550.000,00  | Perencanaan grand design hutan kota wahana sehati                                                                |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| No            | SKPD                                 | Reklas ke Aset Tetap | Nilai (Rp)              | Keterangan                                                                       |
|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 15            | Dinas Sosial                         | KIB F                | 94.968.000,00           | Jasa konsultan dann honor ruang pelayanan dan aula                               |
| 16            | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata | KIB F                | 87.750.000,00           | Perencanaan rehab stadion, kolam rennag, pagar, dan pos keamanan GOS             |
| 17            | Dinas Pertanian                      | KIB F                | 189.789.000,00          | Jasa konsultan pembuatan peta                                                    |
| 18            | Dinas PUTR                           | ATB                  | 50.000.000,00           | Jasa konsultansi perencanaan rekayasa jasa desain utk pekerjaan teknik sipil air |
| 19            | Dinas Perumahan Rakyat KPLH          | ATB                  | 68.725.000,00           | dokumen kajian penanganan pemukiman terdampak bencana                            |
| <b>Jumlah</b> |                                      |                      | <b>1.053.245.442,00</b> |                                                                                  |

**c. Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan tahun 2021 dan 2020 beserta kenaikan/penurunannya dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.4.32 Rincian Beban Pemeliharaan**

| Beban Pemeliharaan                 | Realisasi (Rp)           |                          | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) | %            |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|
|                                    | Tahun 2021               | Tahun 2020               |                             |              |
| Beban Perawatan Kendaraan Bermotor | 0,00                     | 4.205.303.051,00         | (4.205.303.051,00)          | (100,00)     |
| Beban Pemeliharaan                 | 18.780.138.742,00        | 11.114.988.246,00        | 7.665.150.496,00            | 68,96        |
| <b>Jumlah</b>                      | <b>18.780.138.742,00</b> | <b>15.320.291.297,00</b> | <b>3.459.847.445,00</b>     | <b>22,58</b> |

Beban pemeliharaan terdiri atas:

1. Beban pemeliharaan tanah sebesar Rp148.852.121,00;
2. Beban pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp1.841.349.513,00;
3. Beban pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp660.245.228,00;
4. Beban pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp15.937.960.880,00;
5. Beban pemeliharaan aset tetap lainnya sebesar Rp191.731.000,00.

Beban pemeliharaan pada LO sebesar Rp18.780.138.742,00 memiliki nilai yang berbeda dengan belanja pemeliharaan yang disajikan pada LRA sebesar Rp22.497.725.910,00 yaitu lebih kecil sebesar Rp3.717.587.168,00 karena dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

- Bertambahnya beban pemeliharaan karena adanya utang tahun 2021 sebesar Rp108.686.188,00 pada BLUD RSUD H. Hasan Basry;
- Bertambahnya beban pemeliharaan karena adanya belanja pemeliharaan dari dana BTT sebesar Rp7.719.200,00 pada Dinas Kesehatan;



- Berkurangnya beban pemeliharaan karena adanya reklasifikasi ke aset tetap tanah (KIB A) sebesar Rp508.003.200,00 pada beberapa SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.4.33 Rincian Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan ke Tanah**

| No            | SKPD                        | Nilai (Rp)            | Keterangan                               |
|---------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| 1             | Dinas Perumahan Rakyat KPLH | 248.463.200,00        | Peningkatan TPU di Desa Gambah Dalam     |
| 2             | Dinas Pertanian             | 99.750.000,00         | Pengurugann tanah halaman BPP Daha Utara |
| 3             | Inspektorat Daerah          | 159.790.000,00        | Pengadaan paving block                   |
| <b>Jumlah</b> |                             | <b>508.003.200,00</b> |                                          |

- Berkurangnya beban pemeliharaan karena adanya reklasifikasi ke aset tetap peralatan dan mesin (KIB B) sebesar Rp454.337.400,00 pada beberapa SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.4.34 Rincian Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan ke Peralatan dan Mesin**

| No            | SKPD                                 | Nilai (Rp)            | Keterangan                                                   |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1             | Dinas Kesehatan                      | 18.095.000,00         | <i>Hematology analyzer</i>                                   |
| 2             | Dispera KPLH                         | 259.250.000,00        | Buldozer; bak sampah, mesin sedot air, mesin pompa air       |
| 3             | Satpol PP                            | 3.944.500,00          | Lampu LED bar                                                |
| 4             | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 29.750.000,00         | Deco mobil bus                                               |
| 5             | Dinas Perhubungan                    | 24.937.000,00         | Repeter radio                                                |
| 6             | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata | 20.297.000,00         | mesin pemotong rumput, mesin penyemprot, hand sprayer, artco |
| 7             | Bagian Umum                          | 6.450.000,00          | Pembuatan podium                                             |
| 8             | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa     | 15.235.000,00         | Laptop                                                       |
| 9             | Kecamatan Angkinang                  | 15.000.000,00         | Kipas angin                                                  |
| 10            | Inspektorat Daerah                   | 61.378.900,00         | Meja dan meubelair                                           |
| <b>Jumlah</b> |                                      | <b>454.337.400,00</b> |                                                              |

- Berkurangnya beban pemeliharaan karena adanya reklasifikasi ke aset tetap gedung dan bangunan (KIB C) sebesar Rp2.661.906.956,00 pada beberapa SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.4.35 Rincian Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan ke Gedung dan Bangunan**

| No | SKPD                       | Nilai (Rp)     | Keterangan                                               |
|----|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | Dinas Kesehatan            | 104.950.000,00 | Renovasi dan pemasangan kanopi rumah dinas dan puskesmas |
| 2  | Dinas Peumahan Rakyat KPLH | 198.665.800,00 | Pemeliharaan RTH, bangunan rumah kompos                  |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| No            | SKPD                             | Nilai (Rp)              | Keterangan                                                                           |
|---------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                  |                         | dan TPS3R, perencanaan perbaikan lantai, dan pemasangan teralis depo pasar Kandangan |
| 3             | Dinas Sosial                     | 26.130.015,00           | Pemasangan instalasi listrik                                                         |
| 4             | Satuan Polisi Pamong Praja       | 25.902.000,00           | Pemeliharaan gedung kantor                                                           |
| 5             | Dinas Kependudukan dan Catpil    | 24.992.000,00           | Rehab gedung kantor                                                                  |
| 6             | Dinas Perhubungan                | 175.367.250,00          | (pemeliharaan gedung kantor dan konsultan pengawasan pembangunan musholla terminal)  |
| 7             | Dinas Porapar                    | 119.650.000,00          | Pengecatan kolam renang                                                              |
|               |                                  | 145.179.898,00          | Rehab pagar belakang cottage                                                         |
| 8             | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 10.000.000,00           | Rehab pintu kantor                                                                   |
| 9             | Dinas Pertanian                  | 937.175.500,00          | Pembangunan gedung kantor                                                            |
| 10            | Dinas Perdagangan                | 453.820.600,00          | Honor pengadaan rehab gedung pertokoan                                               |
| 11            | Bagian Umum                      | 43.842.000,00           | Pembuatan kanopi                                                                     |
| 12            | Kecamatan Simpur                 | 900.000,00              | Honor pemasangan paving block                                                        |
| 13            | Kelurahan Kandangan Barat        | 58.550.000,00           | Rehab gedung kantor                                                                  |
| 14            | Kelurahan Kandangan Utara        | 194.956.793,00          | Rehab gedung bulu tangkis                                                            |
| 15            | Kecamatan Daha Barat             | 20.000.000,00           | Rehab gedung kantor                                                                  |
| 16            | Inspektorat Daerah               | 121.825.100,00          | Rehab gedung kantor                                                                  |
| <b>Jumlah</b> |                                  | <b>2.661.906.956,00</b> |                                                                                      |

- Berkurangnya beban pemeliharaan karena adanya reklasifikasi ke aset tetap jalan, irigasi dan jaringan (KIB D) sebesar Rp160.045.000,00 pada beberapa SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.4.36 Rincian Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan ke JIJ**

| No            | SKPD                                 | Nilai (Rp)            | Keterangan                                               |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| 1             | Dinas Perumahan Rakyat KPLH          | 129.500.000,00        | Pemasangan paving block akses jalan TPS3R dan TPA Malutu |
| 2             | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata | 15.550.000,00         | Perbaikan sumur bor stadion 2 Desember                   |
| 3             | Kelurahan Kandangan Barat            | 9.995.000,00          | Jaringan listrik                                         |
| 4             | Kecamatan Daha Barat                 | 5.000.000,00          | Instalasi bak sampah                                     |
| <b>Jumlah</b> |                                      | <b>160.045.000,00</b> |                                                          |

- Berkurangnya beban pemeliharaan karena adanya reklasifikasi ke aset tetap lainnya (KIB E) sebesar Rp49.700.000,00.





#### d. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas tahun 2021 dan 2020 beserta kenaikan/penurunannya dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.4.37 Rincian Beban Perjalanan Dinas**

| Beban Perjalanan Dinas | Realisasi (Rp)           |                          | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) | %           |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|
|                        | Tahun 2021               | Tahun 2020               |                             |             |
| Beban Perjalanan Dinas | 36.110.385.303,00        | 34.594.824.958,00        | 1.515.560.345,00            | 4,38        |
| <b>Jumlah</b>          | <b>36.110.385.303,00</b> | <b>34.594.824.958,00</b> | <b>1.515.560.345,00</b>     | <b>4,38</b> |

Beban perjalanan dinas pada LO sebesar Rp36.110.385.303,00 memiliki nilai yang lebih besar dari belanja perjalanan dinas yang disajikan pada LRA sebesar Rp36.104.573.303,00 yaitu Rp5.812.000,00 yang disebabkan oleh adanya utang BLUD tahun 2021.

#### 5.4.2.1.3 Beban Hibah

Beban hibah merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas pemberian hibah pada TA 2021. Berikut disajikan rincian beban hibah beserta kenaikan/penurunannya:

**Tabel 5.4.38 Rincian Beban Hibah**

| Beban Hibah                                                                                                                                  | Realisasi (Rp)           |                          | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) | %              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|
|                                                                                                                                              | Tahun 2021               | Tahun 2020               |                             |                |
| Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya                                                                                            | 4.181.100.000,00         | 4.926.458.485,00         | (745.358.485,00)            | (15,13)        |
| Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 13.100.365.900,00        | 0,00                     | 13.100.365.900,00           | 0,00           |
| Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar                        | 3.110.068.538,00         | 0,00                     | 3.110.068.538,00            | 0,00           |
| Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan                                                        | 3.783.113.150,00         | 0,00                     | 3.783.113.150,00            | 0,00           |
| Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta                                                                                | 600.000.000,00           | 0,00                     | 600.000.000,00              | 0,00           |
| Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik                                                                                           | 683.950.320,00           | 0,00                     | 683.950.320,00              | 0,00           |
| Beban Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat                                                                                               | 0,00                     | 33.986.739.038,00        | (33.986.739.038,00)         | (100,00)       |
| Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                 | 0,00                     | 26.800.000,00            | (26.800.000,00)             | (100,00)       |
| <b>Jumlah</b>                                                                                                                                | <b>25.458.597.908,00</b> | <b>38.939.997.523,00</b> | <b>(13.481.399.615,00)</b>  | <b>(34,62)</b> |

Beban hibah yang disajikan dalam LO sebesar Rp25.458.597.908,00 memiliki jumlah yang sama dengan belanja hibah sebagaimana yang disajikan dalam LRA.



#### 5.4.2.1.4 Beban Bantuan Sosial

Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**Tabel 5.4.39 Rincian Beban Bantuan Sosial**

| Beban Bantuan Sosial                                                                                                          | Realisasi (Rp)           |                          | Kenaikan /<br>(Penurunan)<br>(Rp) | %              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                                                                                                               | Tahun 2021               | Tahun 2020               |                                   |                |
| Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu                                                                   | 3.432.810.000,00         | 0,00                     | 3.432.810.000,00                  | 0,00           |
| Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu                                                                 | 159.025.000,00           | 0,00                     | 159.025.000,00                    | 0,00           |
| Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga                                                                   | 12.503.342.077,00        | 0,00                     | 12.503.342.077,00                 | 0,00           |
| Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga                                                                 | 1.521.442.000,00         | 0,00                     | 1.521.442.000,00                  | 0,00           |
| Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat                                                      | 100.575.000,00           | 0,00                     | 100.575.000,00                    | 0,00           |
| Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) | 2.836.050.000,00         | 0,00                     | 2.836.050.000,00                  | 0,00           |
| Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat                                                                               | 0,00                     | 14.761.810.000,00        | (14.761.810.000,00)               | (100,00)       |
| Beban Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat                                                                                | 0,00                     | 9.645.400.756,00         | (9.645.400.756,00)                | (100,00)       |
| <b>Jumlah</b>                                                                                                                 | <b>20.553.244.077,00</b> | <b>24.407.210.756,00</b> | <b>(3.853.966.679,00)</b>         | <b>(15,79)</b> |

Beban bantuan sosial secara akrual sebagaimana disajikan dalam LO sebesar Rp20.553.244.077,00 memiliki jumlah yang berbeda dengan belanja bantuan sosial sebagaimana yang disajikan dalam LRA sebesar Rp17.600.518.000,00 yaitu lebih besar Rp2.952.726.077,00. Selisih tersebut merupakan penambahan beban bantuan yang berasal dari dana belanja tidak terduga (BTT) pada SKPD sebagai berikut:

- Dinas Sosial sebesar Rp2.708.226.077,00 yaitu bantuan sosial berupa uang untuk individu/keluarga untuk korban bencana alam, santunan biaya berobat, dan santunan kematian; dan
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp244.500.000,00 yaitu bantuan sosial berupa uang untuk keluarga korban terdampak banjir.

#### 5.4.2.1.5 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan penyisihan piutang tidak tertagih.



Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Beban Penyisihan Piutang TA 2021 terdiri atas:

**Tabel 5.4.40 Rincian Beban Penyisihan Piutang**

| Beban Penyisihan Piutang                        | Realisasi (Rp)        |                       | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) | %             |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
|                                                 | Tahun 2021            | Tahun 2020            |                             |               |
| Beban Penyisihan Piutang Pajak                  | 76.042.030,41         | 44.346.548,91         | 31.695.481,50               | 71,47         |
| Beban Penyisihan Piutang Retribusi              | 262.070.017,50        | 256.505.637,50        | 5.564.380,00                | 2,17          |
| Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah | 92.031.607,60         | 138.472.103,09        | (46.440.495,49)             | (33,54)       |
| <b>Jumlah</b>                                   | <b>430.143.655,51</b> | <b>439.324.289,50</b> | <b>(9.180.633,99)</b>       | <b>(2,09)</b> |

1. Beban penyisihan piutang pajak merupakan beban penyisihan untuk piutang PBB sebesar Rp76.042.030,41.
2. Beban penyisihan piutang retribusi sebesar Rp262.070.017,50 terdiri atas:
  - Beban penyisihan piutang retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp408.870,00 yang terdapat pada Dinas Kesehatan.
  - Beban penyisihan piutang retribusi menara telekomunikasi sebesar Rp15.325,00 yang terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - Beban penyisihan piutang retribusi pelayanan pasar grosir sebesar Rp261.645.822,50 yang terdapat pada Dinas Perdagangan.
3. Beban penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah sebesar Rp92.031.607,60 terdiri atas:
  - Beban penyisihan piutang BLUD pada RSUD H. Hasan Basry sebesar Rp72.052.238,40;
  - Beban penyisihan piutang BLUD pada RS Daha Sejahtera sebesar Rp19.784.674,20;
  - Beban penyisihan piutang BLUD pada Puskesmas Kandangan sebesar Rp14.925,00;
  - Beban penyisihan piutang BLUD pada Puskesmas Negara sebesar Rp179.770,00.

#### 5.4.2.1.6 Beban Lain-lain

Beban lain-lain selama tahun 2021 terdiri atas beban sebagai berikut:

**Tabel 5.4.41 Rincian Beban Lain-lain**

| Beban Lain-lain                 | Realisasi (Rp) |               | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) | %       |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------|
|                                 | Tahun 2021     | Tahun 2020    |                             |         |
| Beban Penurunan Nilai Investasi | 38.911.313,43  | 64.805.787,84 | (25.894.474,41)             | (39,96) |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| Beban Lain-lain     | Realisasi (Rp)          |                         | Kenaikan /<br>(Penurunan)<br>(Rp) | %              |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                     | Tahun 2021              | Tahun 2020              |                                   |                |
| Beban Lain-lain     | 3.116.467.673,26        | 4.664.734.587,75        | (1.548.266.914,49)                | (33,19)        |
| <b>Jumlah Beban</b> | <b>3.155.378.986,69</b> | <b>4.729.540.375,59</b> | <b>(1.574.161.388,90)</b>         | <b>(33,28)</b> |

1. Terdapat beban penurunan nilai investasi sebesar Rp38.911.313,43 yang merupakan pencatatan bagian rugi penyertaan modal berdasarkan laporan keuangan *Audited* tahun 2021 pada BPR HSS.
2. Terdapat beban lain-lain sebesar Rp3.116.467.673,26 yang terdiri dari:
  - Beban lain-lain dari dana belanja tidak terduga (BTT) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp186.014.964,00 berupa pengembalian dana hibah BNPB;
  - Barang-barang ekstrakompatibel yang berasal dari reklas aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp1.862.300.223,00 (lihat juga penjelasannya pada Bab Neraca dalam laporan ini);
  - Persediaan yang menjadi usang/*expired*/kedaluwarsa sebesar Rp1.068.152.486,26 yang terdapat pada 5 (lima) SKPD berupa persediaan obat-obatan kedaluwarsa pada Dinas Kesehatan sebesar Rp678.621.739,78; pada BLUD RSUD H. Hasan Basry sebesar Rp156.992.085,48; dan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp82.478.600,00 serta persediaan cetak blanko/karcis untuk tahun 2021 pada BPKPD sebesar Rp54.220.061,00, dan persediaan buku register dan blanko pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp95.840.000,00.

#### 5.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2021 merupakan beban penyusutan tahun berjalan aset tetap dan beban amortisasi aset tak berwujud yang terdiri atas:

**Tabel 5.4.42 Rincian Beban Penyusutan/Amortisasi**

| Beban Penyusutan dan Amortisasi              | Realisasi (Rp)            |                           | Kenaikan /<br>(Penurunan)<br>(Rp) | %             |
|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------|
|                                              | Tahun 2021                | Tahun 2020                |                                   |               |
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin         | 49.928.887.571,00         | 54.320.467.873,89         | (4.391.580.302,89)                | (8,08)        |
| Beban Penyusutan Bangunan dan Gedung         | 24.888.935.528,00         | 23.473.784.050,00         | 1.415.151.478,00                  | 6,03          |
| Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan | 101.908.770.776,57        | 101.800.047.059,00        | 108.723.717,57                    | 0,11          |
| Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya          | 1.669.832,00              | 0,00                      | 1.669.832,00                      | 0,00          |
| Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud         | 670.599.635,00            | 552.950.521,00            | 117.649.114,00                    | 21,28         |
| <b>Jumlah</b>                                | <b>177.398.863.342,57</b> | <b>180.147.249.503,89</b> | <b>(2.748.386.161,32)</b>         | <b>(1,53)</b> |

Perhitungan beban penyusutan diberlakukan mulai TA 2015 berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Masa Manfaat dan Penyusutan Barang Milik Daerah. Dalam Peraturan Bupati tentang Penyusutan Aset



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

Tetap tersebut diatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Metode penyusutan yang diterapkan adalah garis lurus untuk semua jenis aset tetap.
2. Nilai aset tetap yang dapat disusutkan diperhitungkan berdasarkan nilai perolehan aset tetap pada akhir tahun tanpa nilai residu.
3. Untuk perhitungan penyusutan, dihitung secara bulanan yaitu pada periode bulan saat perolehan aset tetap.

Adapun rincian beban penyusutan per SKPD untuk masing-masing KIB adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.4.43 Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap per SKPD**

| No | SKPD                                    | Beban Penyusutan (Rp) |                     |                            |                    | Jumlah (Rp)       |
|----|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
|    |                                         | Peralatan dan Mesin   | Gedung dan Bangunan | Jalan Irigasi dan Jaringan | Aset Tetap Lainnya |                   |
| 1  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan         | 7.159.768.787,00      | 6.092.571.505,00    | 20.897.056,00              | 1.669.832,00       | 13.274.907.180,00 |
| 2  | Dinas Kesehatan                         | 6.080.196.946,00      | 3.017.392.748,00    | 143.716.854,00             | 0,00               | 9.241.306.548,00  |
| 3  | RSUD Hasan Basry Kandungan              | 19.333.501.412,00     | 3.835.261.523,00    | 1.734.203.751,00           | 0,00               | 24.902.966.686,00 |
| 4  | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang     | 973.011.500,00        | 1.081.103.867,00    | 92.159.028.373,57          | 0,00               | 94.213.143.740,57 |
| 5  | Dinas Perumahan Rakyat KPLH             | 3.829.380.516,00      | 991.874.090,00      | 6.759.138.439,00           | 0,00               | 11.580.393.045,00 |
| 6  | Satuan Polisi Pamong Praja              | 499.603.417,00        | 31.058.718,00       | 0,00                       | 0,00               | 530.662.135,00    |
| 7  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah     | 36.654.761,00         | 0,00                | 0,00                       | 0,00               | 36.654.761,00     |
| 8  | Dinas Sosial                            | 132.696.043,00        | 208.522.378,00      | 2.632.379,00               | 0,00               | 343.850.800,00    |
| 9  | Dinas Ketahanan Pangan                  | 100.009.084,00        | 38.208.647,00       | 90.416,00                  | 0,00               | 138.308.147,00    |
| 10 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 210.230.803,00        | 10.805.850,00       | 765.525,00                 | 0,00               | 221.802.178,00    |
| 11 | Dinas Pemberdayaan Masy. Desa           | 106.628.586,00        | 12.736.586,00       | 0,00                       | 0,00               | 119.365.172,00    |
| 12 | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PPPA   | 394.192.478,00        | 117.241.546,00      | 1.364.542,00               | 0,00               | 512.798.566,00    |
| 13 | Dinas Perhubungan                       | 1.098.280.910,00      | 178.488.019,00      | 368.551.192,00             | 0,00               | 1.645.320.121,00  |
| 14 | Dinas Komunikasi dan Informatika        | 1.069.634.788,00      | 30.241.978,00       | 3.362.226,00               | 0,00               | 1.103.238.992,00  |
| 15 | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKP    | 180.074.453,00        | 132.222.108,00      | 2.874.601,00               | 0,00               | 315.171.162,00    |
| 16 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP          | 248.258.831,00        | 49.912.911,00       | 1.063.238,00               | 0,00               | 299.234.980,00    |
| 17 | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata    | 328.871.765,00        | 2.190.182.401,00    | 25.963.981,00              | 0,00               | 2.545.018.147,00  |
| 18 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan        | 256.524.426,00        | 95.426.834,00       | 2.128.986,00               | 0,00               | 354.080.246,00    |
| 19 | Dinas Perikanan                         | 227.811.018,00        | 118.052.831,00      | 87.165.780,00              | 0,00               | 433.029.629,00    |
| 20 | Dinas Pertanian                         | 594.655.264,00        | 630.194.305,00      | 384.872.758,00             | 0,00               | 1.609.722.327,00  |
| 21 | Dinas Perdagangan                       | 402.228.867,00        | 3.176.008.935,00    | 27.083.600,00              | 0,00               | 3.605.321.402,00  |
| 22 | Sekretariat Daerah                      | 79.599.204,00         | 76.072.545,00       | 0,00                       | 0,00               | 155.671.749,00    |
| 23 | Bagian Hukum                            | 47.476.976,00         | 0,00                | 0,00                       | 0,00               | 47.476.976,00     |
| 24 | Bagian Pemerintahan                     | 90.081.430,00         | 10.053.759,00       | 0,00                       | 0,00               | 100.135.189,00    |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| No                  | SKPD                                    | Beban Penyusutan (Rp)    |                          |                            |                     | Jumlah (Rp)               |
|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|
|                     |                                         | Peralatan dan Mesin      | Gedung dan Bangunan      | Jalan Irigasi dan Jaringan | Aset Tetap Lainnya  |                           |
| 25                  | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 191.627.952,00           | 752.000,00               | 0,00                       | 0,00                | 192.379.952,00            |
| 26                  | Bagian Kesejahteraan Rakyat             | 35.302.421,00            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                | 35.302.421,00             |
| 27                  | Bagian Organisasi                       | 34.590.497,00            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                | 34.590.497,00             |
| 28                  | Bagian Umum                             | 2.334.175.624,00         | 802.136.037,00           | 26.449.685,00              | 0,00                | 3.162.761.346,00          |
| 29                  | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa        | 152.833.711,00           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                | 152.833.711,00            |
| 30                  | Bagian Perekonomian dan Pembangunan     | 52.131.690,00            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                | 52.131.690,00             |
| 31                  | Inspektorat Daerah                      | 155.331.229,00           | 42.533.404,00            | 4.077.250,00               | 0,00                | 201.941.883,00            |
| 32                  | BAPPELITBANGDA                          | 38.826.323,00            | 0,00                     | 1.684.517,00               | 0,00                | 40.510.840,00             |
| 33                  | BPKPD                                   | 804.715.690,00           | 300.013.927,00           | 9.008.684,00               | 0,00                | 1.113.738.301,00          |
| 34                  | BKPSDM                                  | 341.350.042,00           | 36.383.708,00            | 564.583,00                 | 0,00                | 378.298.333,00            |
| 35                  | Sekretariat DPRD                        | 633.351.751,00           | 102.093.292,00           | 2.425.282,00               | 0,00                | 737.870.325,00            |
| 36                  | Kecamatan Sungai Raya                   | 79.667.324,00            | 40.922.243,00            | 487.500,00                 | 0,00                | 121.077.067,00            |
| 37                  | Kecamatan Padang Batung                 | 109.605.306,00           | 118.505.077,00           | 1.018.910,00               | 0,00                | 229.129.293,00            |
| 38                  | Kecamatan Telaga Langsat                | 94.963.416,00            | 50.891.970,00            | 231.247,00                 | 0,00                | 146.086.633,00            |
| 39                  | Kecamatan Angkinang                     | 75.671.180,00            | 111.139.312,00           | 0,00                       | 0,00                | 186.810.492,00            |
| 40                  | Kecamatan Kandangan                     | 168.451.574,00           | 145.121.017,00           | 1.597.352,00               | 0,00                | 315.169.943,00            |
| 41                  | Kelurahan Kandangan Kota                | 56.082.398,00            | 19.632.840,00            | 0,00                       | 0,00                | 75.715.238,00             |
| 42                  | Kelurahan Kandangan Barat               | 64.501.325,00            | 8.914.282,00             | 646.339,00                 | 0,00                | 74.061.946,00             |
| 43                  | Kelurahan Kandangan Utara               | 51.457.465,00            | 20.864.116,00            | 91.458,00                  | 0,00                | 72.413.039,00             |
| 44                  | Kelurahan Jambu Hilir                   | 94.703.918,00            | 8.203.871,00             | 183.750,00                 | 0,00                | 103.091.539,00            |
| 45                  | Kecamatan Simpur                        | 95.570.929,00            | 98.432.070,00            | 3.457.932,00               | 0,00                | 197.460.931,00            |
| 46                  | Kecamatan Daha Selatan                  | 135.733.851,00           | 508.709.391,00           | 259.800,00                 | 0,00                | 644.703.042,00            |
| 47                  | Kecamatan Daha Utara                    | 131.909.209,00           | 123.930.989,00           | 0,00                       | 0,00                | 255.840.198,00            |
| 48                  | Kecamatan Kalumpang                     | 154.953.892,00           | 88.709.798,00            | 40.000,00                  | 0,00                | 243.703.690,00            |
| 49                  | Kecamatan Loksado                       | 84.976.730,00            | 47.331.678,00            | 109.091,00                 | 0,00                | 132.417.499,00            |
| 50                  | Kecamatan Daha Barat                    | 107.335.624,00           | 70.759.200,00            | 732.201,00                 | 0,00                | 178.827.025,00            |
| 51                  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik       | 169.694.235,00           | 19.321.222,00            | 130.801.498,00             | 0,00                | 319.816.955,00            |
| <b>Jumlah Beban</b> |                                         | <b>49.928.887.571,00</b> | <b>24.888.935.528,00</b> | <b>101.908.770.776,57</b>  | <b>1.669.832,00</b> | <b>176.728.263.707,57</b> |

Beban penyusutan aset tetap seluruhnya dipengaruhi oleh beban penyusutan aset tetap tahun berjalan.

**Tabel 5.4.44 Rincian Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud per SKPD**

| No. | SKPD             | Beban Amortisasi (Rp) |
|-----|------------------|-----------------------|
| 1   | Dinas Pendidikan | 52.507.030,00         |
| 2   | Dinas Kesehatan  | 27.699.483,00         |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| No.           | SKPD                                             | Beban Amortisasi (Rp) |
|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| 3             | RSUD Hasan Basry                                 | 14.147.708,00         |
| 4             | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang              | 361.176.257,00        |
| 5             | Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH                 | 40.428.017,00         |
| 6             | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil          | 2.888.890,00          |
| 7             | Dinas Perhubungan                                | 3.333.333,00          |
| 8             | Dinas Komunikasi dan Informatika                 | 35.536.001,00         |
| 9             | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata            | 6.566.250,00          |
| 10            | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                 | 41.466.667,00         |
| 11            | Dinas Perikanan                                  | 4.000.000,00          |
| 12            | Dinas Perdagangan                                | 9.206.944,00          |
| 13            | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa                 | 3.000.000,00          |
| 14            | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 68.643.055,00         |
| <b>Jumlah</b> |                                                  | <b>670.599.635,00</b> |

Beban amortisasi aset tak berwujud seluruhnya dipengaruhi oleh beban amortisasi tahun 2021.

#### 5.4.2.3 Beban Transfer

Beban transfer terdiri atas beban transfer bagi hasil pendapatan dan bantuan keuangan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.4.45 Rincian Beban Transfer**

| Beban Transfer                  | Realisasi (Rp)           |                          | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) | %              |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|
|                                 | Tahun 2021               | Tahun 2020               |                             |                |
| Beban Transfer Bagi Hasil       | 2.628.865.000,00         | 2.288.000.000,00         | 340.865.000,00              | 14,90          |
| Beban Transfer Bantuan Keuangan | 64.400.000.000,00        | 75.949.950.320,00        | (11.549.950.320,00)         | (15,21)        |
| <b>Jumlah Beban</b>             | <b>67.028.865.000,00</b> | <b>78.237.950.320,00</b> | <b>(11.209.085.320,00)</b>  | <b>(14,33)</b> |

##### 5.4.2.3.1 Beban Transfer Bagi Hasil

Beban transfer bagi hasil terdiri atas beban transfer bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi kepada desa dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.46 Rincian Beban Transfer Bagi Hasil**

| Beban Transfer                             | Realisasi (Rp)          |                         | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) | %            |
|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
|                                            | Tahun 2021              | Tahun 2020              |                             |              |
| Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah     | 1.528.865.000,00        | 1.274.000.000,00        | 254.865.000,00              | 20,01        |
| Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah | 1.100.000.000,00        | 1.014.000.000,00        | 86.000.000,00               | 8,48         |
| <b>Jumlah Beban</b>                        | <b>2.628.865.000,00</b> | <b>2.288.000.000,00</b> | <b>340.865.000,00</b>       | <b>14,90</b> |



#### 5.4.2.3.2 Beban Transfer Bantuan Keuangan

Beban transfer bantuan keuangan berupa beban transfer alokasi dana desa.

**Tabel 5.4.47 Rincian Beban Bantuan Keuangan**

| Beban Transfer                                        | Realisasi (Rp)           |                          | Kenaikan /<br>(Penurunan)<br>(Rp) | %              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                                       | Tahun 2021               | Tahun 2020               |                                   |                |
| Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa               | 64.400.000.000,00        | 75.266.000.000,00        | (10.866.000.000,00)               | (14,44)        |
| Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | 0,00                     | 683.950.320,00           | (683.950.320,00)                  | (100,00)       |
| <b>Jumlah Beban</b>                                   | <b>64.400.000.000,00</b> | <b>75.949.950.320,00</b> | <b>(11.549.950.320,00)</b>        | <b>(15,21)</b> |

Beban transfer bantuan keuangan ke desa secara akrual sebagaimana disajikan dalam LO memiliki jumlah yang berbeda dengan belanja transfer TA 2021 sebagaimana yang disajikan dalam LRA sebesar jumlah dana desa yang telah disalurkan tahun 2021 yaitu Rp118.303.532.000,00.

#### 5.4.3 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Defisit dari kegiatan non operasional untuk Tahun 2021 dan 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.4.48 Kegiatan Non Operasional – LO**

| Kegiatan Non Operasional                                    | Realisasi (Rp)            |                           | Kenaikan /<br>(Penurunan)<br>(Rp) | %              |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                                             | Tahun 2021                | Tahun 2020                |                                   |                |
| Surplus dari Kegiatan Non Operasional - LO                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                              | 0,00           |
| Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO | 3.749.026.003,00          | 9.214.872.027,00          | (5.465.846.024,00)                | (59,32)        |
| <b>Surplus/Defisit dari Keg. Non Operasional</b>            | <b>(3.749.026.003,00)</b> | <b>(9.214.872.027,00)</b> | <b>5.465.846.024,00</b>           | <b>(59,32)</b> |

##### 5.4.3.1 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO

Defisit penjualan/pertukaran/pelepasan aset non lancar TA 2021 sebesar Rp3.479.026.003,00 merupakan jumlah nilai buku atas penghapusan aset tetap berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang penghapusan aset tetap SKPD dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.4.49 Rincian Defisit Penghapusan Aset Non Lancar**

| Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar | Realisasi (Rp)   |                  | Kenaikan /<br>(Penurunan)<br>(Rp) | %        |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|----------|
|                                                        | Tahun 2021       | Tahun 2020       |                                   |          |
| Peralatan dan Mesin                                    | 281.232.733,00   | 193.936.547,00   | 87.296.186,00                     | 45,01    |
| Gedung dan Bangunan                                    | 327.409.917,00   | 2.307.798.972,00 | (1.980.389.055,00)                | (85,81)  |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan                            | 2.855.602.401,00 | 120.393.147,00   | 2.735.209.254,00                  | 2.271,90 |
| Aset Tetap Lainnya                                     | 0,00             | 6.547.631.655,00 | (6.547.631.655,00)                | (100,00) |
| Aset Lainnya                                           | 14.780.952,00    | 45.111.706,00    | (30.330.754,00)                   | (67,23)  |





PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| Defisit<br>Penjualan/Pertukaran/Pele-<br>pasan Aset Non Lancar | Realisasi (Rp)   |                  | Kenaikan /<br>(Penurunan)<br>(Rp) | %       |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|---------|
|                                                                | Tahun 2021       | Tahun 2020       |                                   |         |
| Jumlah                                                         | 3.479.026.003,00 | 9.214.872.027,00 | (5.735.846.024,00)                | (62,25) |

- a. Defisit penghapusan aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp281.232.733,00 merupakan nilai buku atas penghapusan aset pada beberapa SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.4.50 Daftar Nilai Buku Penghapusan Peralatan dan Mesin per SKPD**

| No | SKPD                                 | Nama Barang                                        | Nilai Aset Tetap (Rp) | Nilai Penyusutan (Rp) | Nilai Buku (Rp) |
|----|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1  | Dinas Kesehatan                      | Sepeda motor dan printer                           | 42.724.750,00         | 37.324.750,00         | 5.400.000,00    |
| 2  | RSUD Hasan Basry                     | Sepeda motor                                       | 80.000.000,00         | 80.000.000,00         | 0,00            |
| 3  | Dinas Pekerjaan Umum dan TR          | Sepeda motor, filling cabinet dan printer          | 30.575.000,00         | 30.575.000,00         | 0,00            |
| 4  | Dinas Perumahan Rakyat KPLH          | Alat angkutan darat bermotor, alat peraga, printer | 487.088.324,00        | 473.157.172,00        | 13.931.152,00   |
| 5  | Dinas Sosial                         | Printer                                            | 2.656.000,00          | 2.656.000,00          | 0,00            |
| 6  | Dinas Ketahanan Pangan               | Lemari arsip dan printer                           | 6.619.200,00          | 6.619.200,00          | 0,00            |
| 7  | Dinas Kependudukan dan Catpil        | Sepeda motor dan printer                           | 36.467.500,00         | 36.467.500,00         | 0,00            |
| 8  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa   | Sepeda motor                                       | 24.410.000,00         | 24.410.000,00         | 0,00            |
| 9  | Dinas PPKBPPPA                       | Scanner, printer dan brankas                       | 13.580.000,00         | 13.580.000,00         | 0,00            |
| 10 | Dinas Perhubungan                    | Printer dan filling kabinet                        | 3.180.000,00          | 3.180.000,00          | 0,00            |
| 11 | Dinas Tenaga Kerja KUKP              | Printer dan mesin ketik                            | 4.510.000,00          | 4.510.000,00          | 0,00            |
| 12 | Dinas Penanaman Modal PTSP           | Sepeda motor dan printer                           | 18.165.000,00         | 17.872.813,00         | 292.187,00      |
| 13 | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata | Sepeda motor                                       | 28.000.000,00         | 28.000.000,00         | 0,00            |
| 14 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan     | Printer                                            | 8.695.000,00          | 8.343.438,00          | 351.562,00      |
| 15 | Dinas Pertanian                      | Sepeda motor                                       | 39.475.000,00         | 39.475.000,00         | 0,00            |
| 16 | Bagian Hukum                         | Mesin ketik                                        | 2.382.900,00          | 2.382.900,00          | 0,00            |
| 17 | Bagian Pemerintahan                  | Sepeda motor                                       | 13.000.000,00         | 13.000.000,00         | 0,00            |
| 18 | Bagian Protokol dan Kopim            | Sepeda motor                                       | 9.000.000,00          | 9.000.000,00          | 0,00            |
| 19 | Bagian Kesejahteraan Rakyat          | Printer                                            | 811.000,00            | 811.000,00            | 0,00            |
| 20 | Bagian Umum                          | Sepeda motor                                       | 20.000.000,00         | 20.000.000,00         | 0,00            |
| 21 | Bagian Perekonomian                  | Sepeda motor                                       | 11.625.000,00         | 11.625.000,00         | 0,00            |
| 22 | BAPPELITBANGDA                       | Printer dan peralatan mesin karena kebakaran       | 1.248.482.330,00      | 988.269.081,00        | 260.213.249,00  |
| 23 | BPKPD                                | Sepeda motor, printer, tong air                    | 83.412.200,00         | 83.078.867,00         | 333.333,00      |
| 24 | BKPSDM                               | Printer                                            | 4.429.000,00          | 4.429.000,00          | 0,00            |
| 25 | Kecamatan Padang Batung              | Sepeda motor dan genset                            | 7.350.000,00          | 7.350.000,00          | 0,00            |
| 26 | Kecamatan Telaga Langsat             | Perkakas bengkel listrik dan printer               | 4.750.000,00          | 4.208.333,00          | 541.667,00      |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| No            | SKPD                      | Nama Barang              | Nilai Aset Tetap (Rp)   | Nilai Penyusutan (Rp)   | Nilai Buku (Rp)       |
|---------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 27            | Kecamatan Angkinang       | Sepeda motor dan printer | 13.283.700,00           | 13.114.117,00           | 169.583,00            |
| 28            | Kelurahan Kandangan Utara | Printer dan mesin ketik  | 4.128.700,00            | 4.128.700,00            | 0,00                  |
| 29            | Kecamatan Daha Barat      | Sepeda motor             | 35.554.000,00           | 35.554.000,00           | 0,00                  |
| 30            | Badan Kesbangpol          | Printer                  | 1.500.000,00            | 1.500.000,00            | 0,00                  |
| <b>Jumlah</b> |                           |                          | <b>2.285.854.604,00</b> | <b>2.004.621.871,00</b> | <b>281.232.733,00</b> |

- b. Defisit penghapusan aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp327.409.917,00 berupa nilai buku atas penghapusan bangunan puskesmas pembantu Bangkau dan Muning Baru pada Dinas Pendidikan dengan nilai aset sebesar Rp355.444.100,00 dan nilai penyusutan sebesar Rp28.034.183,00.
- c. Defisit penghapusan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.855.602.401,00 berupa nilai buku atas penghapusan saluran drainase (trotoar) dan jalan nasional arteri pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan nilai aset sebesar Rp20.384.076.537,00 dan nilai penyusutan sebesar Rp17.528.474.136,00.
- d. Defisit penghapusan Aset Lainnya sebesar Rp14.780.952,00 berupa nilai buku atas penghapusan aset rusak berat sepeda motor pada Dinas Kesehatan dengan nilai aset sebesar Rp66.420.000,00 dan nilai penyusutan sebesar Rp51.639.048,00.

#### 5.4.4 POS LUAR BIASA

Saldo pos luar biasa terdiri atas pendapatan luar biasa dikurangi beban luar biasa. Tidak ada saldo yang menjadi pendapatan luar biasa maupun beban luar biasa selama tahun 2021.

#### 5.4.5 SURPLUS/DEFISIT

Surplus – LO TA 2021 berasal dari pos-pos pendapatan dikurangi pos-pos beban ditambah pos-pos dari kegiatan non operasional dan pos-pos luar biasa.

**Tabel 5.3.51 Rincian Surplus/Defisit – LO**

| Surplus/(Defisit) - LO                      | Realisasi (Rp)           |                          | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) | %              |
|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|
|                                             | Tahun 2021               | Tahun 2020               |                             |                |
| Pendapatan - LO                             | 1.290.243.209.236,93     | 1.287.066.299.658,35     | 3.176.909.578,58            | 0,25           |
| Beban - LO                                  | 1.229.083.571.847,01     | 1.190.819.789.406,42     | 38.263.782.440,59           | 3,21           |
| Surplus dari Kegiatan Operasi               | 61.159.637.389,92        | 96.246.510.251,93        | (35.086.872.862,01)         | (36,46)        |
| Surplus/(Defisit) dari Keg. Non Operasional | (3.479.026.003,00)       | (9.214.872.027,00)       | 5.735.846.024,00            | (62,25)        |
| Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                        | 0,00           |
| <b>Surplus - LO</b>                         | <b>57.680.611.386,92</b> | <b>87.031.638.224,93</b> | <b>(29.351.026.838,01)</b>  | <b>(33,72)</b> |



## 5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi aliran penerimaan dan pengeluaran kas yang meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris.

Penyajian Laporan Arus Kas didasarkan pada transaksi Kas Daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah, serta kas yang dikelola oleh BLUD dan JKN.

**Tabel 5.5.1 Ringkasan Laporan Arus Kas**

| Uraian                                            | 31 Desember 2021<br>(Rp)   | 31 Desember 2020<br>(Rp)  |
|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasi            | 182.481.522.867,62         | 229.320.335.838,11        |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi          | (260.671.048.727,16)       | (202.248.028.805,27)      |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan          | 0,00                       | 19.454.000,00             |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris        | (12.427.956,00)            | 5.324.638,00              |
| <b>Kenaikan/ (Penurunan) Kas</b>                  | <b>(78.201.953.815,54)</b> | <b>27.097.085.670,84</b>  |
| Saldo Awal Kas Daerah, BLUD, JKN, dan BOS         | 302.365.102.234,28         | 275.268.016.563,44        |
| <b>Saldo Akhir Kas Daerah, BLUD, JKN, dan BOS</b> | <b>224.163.148.418,74</b>  | <b>302.365.102.234,28</b> |
| <b>Saldo Akhir Kas</b>                            | <b>224.163.148.418,74</b>  | <b>302.365.102.234,28</b> |

### 5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan TA 2021 sebesar dan TA 2020 sebesar Rp182.481.522.867,62 dan Rp229.320.335.838,11. Arus kas bersih aktivitas operasi tersebut merupakan selisih antara arus kas masuk dengan arus kas keluar, yang terdiri dari:

**Tabel 5.5.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**

| Arus Kas dari Aktivitas Operasi | 31 Desember 2021<br>(Rp)  | 31 Desember 2020<br>(Rp)  |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Arus Masuk Kas                  | 1.342.344.116.148,62      | 1.353.468.377.199,86      |
| Arus Keluar Kas                 | 1.159.862.593.281,00      | 1.124.148.041.361,75      |
| <b>Jumlah Arus Kas Bersih</b>   | <b>182.481.522.867,62</b> | <b>229.320.335.838,11</b> |

#### 5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 5.5.3 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi**

| Arus Masuk Kas                                               | 31 Desember 2021<br>(Rp)    | 31 Desember 2020<br>(Rp)    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Penerimaan Pajak Daerah                                      | 13.543.126.921,00           | 12.046.129.929,00           |
| Penerimaan Retribusi Daerah                                  | 6.608.175.981,00            | 8.461.009.994,00            |
| Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 6.091.259.048,00            | 4.801.193.114,00            |
| Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah                            | 221.205.205.369,62          | 176.765.666.456,86          |
| Penerimaan Dana Bagi Hasil                                   | 197.773.311.486,00          | 222.382.834.194,00          |
| Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)                           | 474.753.627.000,00          | 482.100.383.000,00          |
| Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik                   | 71.332.731.438,00           | 61.965.883.202,00           |
| Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik               | 87.753.043.073,00           | 97.952.201.560,00           |
| Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)                        | 53.518.401.000,00           | 74.722.664.000,00           |
| Penerimaan Dana Desa                                         | 118.303.532.000,00          | 117.434.196.000,00          |
| Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak                       | 68.817.570.282,00           | 70.261.383.049,00           |
| Penerimaan Hibah                                             | 55.024.550,00               | 61.628.100,00               |
| Penerimaan Pendapatan Lainnya                                | 22.589.108.000,00           | 24.513.204.601,00           |
| <b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>                                 | <b>1.342.344.116.148,62</b> | <b>1.353.468.377.199,86</b> |

Pos-pos arus masuk kas dari aktivitas operasi merupakan penerimaan Kas Daerah, BLUD, JKN, dan BOS sehingga mempunyai basis pengakuan yang sama dengan pengakuan pendapatan pada LRA. Namun, jika dibandingkan dengan LRA TA 2021, terdapat perbedaan antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.342.344.116.148,62 dengan jumlah pendapatan pada LRA sebesar Rp1.342.594.283.395,62 atau terdapat selisih sebesar Rp250.167.247,00. Selisih tersebut disebabkan terdapat perbedaan penyajian hasil penjualan atas aset yang tidak dipisahkan yaitu pendapatan dari penjualan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp215.687.247,00; penjualan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp28.980.000,00; dan penjualan aset tetap lainnya sebesar Rp5.500.000,00 yakni pada LRA disajikan sebagai pendapatan sedangkan pada LAK disajikan sebagai arus masuk kas dari aktivitas investasi.

#### 5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus keluar kas dari aktivitas operasi dipergunakan untuk pengeluaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan bantuan keuangan, serta belanja tidak terduga, juga termasuk pengeluaran untuk pembayaran transfer bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.4 Rincian Arus Keluar Kas**

| Arus Keluar Kas    | 31 Desember 2021<br>(Rp) | 31 Desember 2020<br>(Rp) |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pembayaran Pegawai | 482.702.664.650,00       | 468.226.677.267,00       |
| Pembayaran Barang  | 444.359.498.382,00       | 385.945.661.462,75       |
| Pembayaran Hibah   | 25.458.597.908,00        | 27.917.073.003,00        |



| Arus Keluar Kas                 | 31 Desember 2021<br>(Rp)    | 31 Desember 2020<br>(Rp)    |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Pembayaran Bantuan Sosial       | 17.600.518.000,00           | 24.221.010.756,00           |
| Pembayaran Tak Terduga          | 4.408.917.341,00            | 22.165.472.553,00           |
| Pembayaran Bagi Hasil Pajak     | 1.528.865.000,00            | 1.274.000.000,00            |
| Pembayaran Bagi Hasil Retribusi | 1.100.000.000,00            | 1.014.000.000,00            |
| Pembayaran Bantuan Keuangan     | 182.703.532.000,00          | 193.384.146.320,00          |
| <b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>   | <b>1.159.862.593.281,00</b> | <b>1.124.148.041.361,75</b> |

Pos-pos arus keluar kas dari aktivitas operasi merupakan pengeluaran Kas Daerah, BLUD, JKN, dan BOS sehingga mempunyai basis pengakuan yang sama dengan pengakuan belanja operasi pada LRA. Namun, jika dibandingkan dengan LRA TA 2021, terdapat perbedaan antara jumlah arus keluar kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.159.862.593.281,00 dengan jumlah belanja operasi pada LRA sebesar Rp970.121.278.940,00 atau terdapat selisih Rp189.741.314.341,00. Selisih tersebut adalah belanja tidak terduga sebesar Rp4.408.917.341,00 dan belanja transfer sebesar Rp185.332.397.000,00 pada LRA yang bukan merupakan belanja operasi namun dalam LAK disajikan sebagai arus keluar kas dari aktivitas operasi.

#### 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Saldo arus kas dari aktivitas investasi TA 2021 sebesar Rp260.671.048.727,16 dan TA 2020 sebesar Rp202.248.028.805,27. Arus kas bersih dari aktivitas investasi terdiri atas selisih arus masuk dan arus kas keluar, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.5 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi**

| Arus Kas dari Aktivitas Investasi | 31 Desember 2021<br>(Rp)    | 31 Desember 2020<br>(Rp)    |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Arus Masuk Kas                    | 250.167.247,00              | 351.508.020,00              |
| Arus Keluar Kas                   | 260.921.215.974,16          | 202.599.536.825,27          |
| <b>Jumlah Arus Kas Bersih</b>     | <b>(260.671.048.727,16)</b> | <b>(202.248.028.805,27)</b> |

##### 5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus masuk kas dari aktivitas investasi berasal dari penerimaan yang bersumber dari aset tetap. Arus masuk kas dari aktivitas investasi berasal dari penjualan peralatan mesin, jalan, irigasi dan jaringan. Pada LRA pendapatan tersebut disajikan pada pos Lain-lain PAD yang Sah.



**Tabel 5.5.6 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi**

| Arus Masuk Kas                        | 31 Desember 2021<br>(Rp) | 31 Desember 2020<br>(Rp) |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Penjualan Peralatan dan Mesin         | 215.687.247,00           | 35.752.455,00            |
| Penjualan Bangunan dan Gedung         | 0,00                     | 263.795.565,00           |
| Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan | 28.980.000,00            | 51.960.000,00            |
| Penjualan Aset Tetap Lainnya          | 5.500.000,00             | 0,00                     |
| <b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>          | <b>250.167.247,00</b>    | <b>351.508.020,00</b>    |

Pos-pos arus masuk kas dari aktivitas investasi TA 2021 terdiri dari:

1. Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp215.687.247,00 yaitu hasil penjualan lelang Peralatan dan Mesin berupa penjualan kendaraan dinas, genset dan peralatan elektronik. Lelang dilakukan selama 2 tahap, tahap pertama sesuai dengan SK Bupati Nomor 188.45/77/KUM/2021 tentang Penetapan Pemenang Lelang Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Melalui Lelang Umum Tahap I Tahun 2021, dan tahap kedua sesuai dengan SK Bupati Nomor 188.45/319/KUM/2021 tentang Penetapan Pemenang Lelang Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Melalui Lelang Umum Tahap II Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.7 Rincian Penjualan Hasil Lelang Peralatan dan Mesin**

| No.           | Nama Barang                   | Jumlah<br>(Unit) | Harga Lelang<br>(Rp)  |
|---------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|
| 1             | Kendaraan bermotor roda empat | 2                | 58.512.800,00         |
| 2             | Kendaraan bermotor roda tiga  | 15               | 20.809.999,00         |
| 3             | Kendaraan bermotor roda dua   | 60               | 129.739.248,00        |
| 4             | Genset                        | 2                | 755.000,00            |
| 5             | Peralatan cetak dan scan      | 78               | 1.926.000,00          |
| 6             | Peralatan kantor              | 19               | 2.800.000,00          |
| 7             | Alat elektronik               | 2                | 1.150.000,00          |
| <b>Jumlah</b> |                               |                  | <b>215.693.047,00</b> |

Terdapat perbedaan jumlah harga lelang pada SK Penetapan Pemenang Lelang dengan yang diterima di Kasda sebesar Rp5.800,00 yang merupakan biaya setor/transfer dari KPKNL (transfer dilakukan sebanyak 2 kali dengan biaya 1 kali transfer sebesar Rp2.900,00).

2. Penjualan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp28.980.000,00 berupa biaya kompensasi pembongkaran trotoar dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 5.5.8 Rincian Pembongkaran Trotoar**

| No.          | Surat Keputusan Sekretaris Daerah | Jenis Barang             | Lokasi/Alamat                        | Panjang    | Biaya Ganti Rugi (Rp) |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------|
| 1            | Nomor 23 Tahun 2021               | Trotoar/Saluran Drainase | Jl. A.Yani Km.1                      | 9 meter    | 8.100.000,00          |
| 2            | Nomor 23 Tahun 2021               | Trotoar/Saluran Drainase | Jl. Pemuda No. 2                     | 6,20 meter | 5.580.000,00          |
| 3            | Nomor 24 Tahun 2021               | Trotoar/Saluran Drainase | Jl. Jend Sudirman Hamalau            | 2 meter    | 1.800.000,00          |
| 4            | Nomor 24 Tahun 2021               | Trotoar/Saluran Drainase | Jl. Jend Sudirman Simp.4 Tibung Raya | 8 meter    | 7.200.000,00          |
| 5            | Nomor 24 Tahun 2021               | Trotoar/Saluran Drainase | Jl. Jend. A. Yani Simp 5             | 6 meter    | 5.400.000,00          |
| 6            | Nomor 30 Tahun 2021               | Trotoar/Saluran Drainase | Jl. Jend. Sudirman RT.01             | 1 meter    | 900.000,00            |
| <b>Total</b> |                                   |                          |                                      |            | <b>28.980.000,00</b>  |

3. Penjualan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.500.000,00 berupa hasil penjualan hewan ternak sapi yang dikembangbiakkan sebanyak 2 ekor karena hewan ternak tersebut sakit.

#### 5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus keluar kas dari aktivitas investasi merupakan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.9 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi**

| Arus Keluar Kas                      | 31 Desember 2021 (Rp)     | 31 Desember 2020 (Rp)     |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Perolehan Tanah                      | 1.563.402.500,00          | 5.665.753.150,00          |
| Perolehan Peralatan dan Mesin        | 55.907.592.945,00         | 46.653.731.769,00         |
| Perolehan Bangunan dan Gedung        | 108.565.226.735,16        | 57.811.004.588,92         |
| Perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan | 93.351.134.994,00         | 90.023.175.380,35         |
| Perolehan Aset Tetap Lainnya         | 1.533.858.800,00          | 2.338.663.937,00          |
| Perolehan Aset Lainnya               | 0,00                      | 107.208.000,00            |
| <b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>        | <b>260.921.215.974,16</b> | <b>202.599.536.825,27</b> |

Arus keluar kas dari aktivitas investasi memiliki nilai yang sama dengan realisasi belanja modal pada LRA yaitu sebesar Rp260.921.215.974,16.

#### 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan/pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka pembiayaan atau pemberian pinjaman. Tidak terdapat saldo pada arus kas bersih dari aktivitas investasi baik yang berasal dari arus masuk maupun arus kas keluar.

**Tabel 5.5.10 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan**

| Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Arus Masuk Kas                               | 0,00                  | 19.454.000,00         |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Arus Keluar Kas                              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Jumlah Arus Kas Bersih</b>                | <b>0,00</b>           | <b>19.454.000,00</b>  |

#### 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris merupakan aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris yang disajikan dalam laporan arus kas merupakan arus kas pada kas daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan bagian kas daerah yang dikelola oleh BLUD dan JKN.

**Tabel 5.5.11 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris**

| Arus Kas dari Aktivitas Transitoris | 31 Desember 2021 (Rp)  | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Arus Masuk Kas                      | 81.763.928.390,00      | 109.920.783.970,10    |
| Arus Keluar Kas                     | 81.776.356.346,00      | 109.915.459.332,10    |
| <b>Jumlah Arus Kas Bersih</b>       | <b>(12.427.956,00)</b> | <b>5.324.638,00</b>   |

##### 5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris terdiri dari rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.6.12 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris**

| Arus Masuk Kas                                                   | 31 Desember 2021 (Rp)    | 31 Desember 2020 (Rp)     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)                        | 70.837.737.347,00        | 59.602.495.610,10         |
| - IWP 19.623.519.250,00                                          |                          |                           |
| - Taperum 64.260.000,00                                          |                          |                           |
| - Pajak Penghasilan 23.883.655.505,00                            |                          |                           |
| - PPN 27.266.302.592,00                                          |                          |                           |
| Pertanggungjawaban Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan: | 9.708.485.924,00         | 28.229.114.583,00         |
| - UP 3.931.728.254,00                                            |                          |                           |
| - TU 5.776.757.670,00                                            |                          |                           |
| Pengembalian Sisa Kas di Bend. Pengeluaran TA 2019               | 1.217.705.119,00         | 22.089.173.777,00         |
| - setoran sisa UP 488.271.746,00                                 |                          |                           |
| - setoran sisa TU 729.433.373,00                                 |                          |                           |
| <b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>                                     | <b>81.763.928.390,00</b> | <b>109.920.783.970,10</b> |

##### 5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris terdiri dari rincian sebagai berikut:





**Tabel 5.5.13 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris**

| Arus Keluar Kas                                          | 31 Desember 2021<br>(Rp) | 31 Desember 2020<br>(Rp)  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)               | 70.850.165.303,00        | 59.597.170.972,10         |
| - IWP 19.623.519.250,00                                  |                          |                           |
| - Taperum 64.260.000,00                                  |                          |                           |
| - Pajak Penghasilan 23.883.655.505,00                    |                          |                           |
| - PPN 27.266.302.592,00                                  |                          |                           |
| - Utang PFK TA 2020 12.427.956,00                        |                          |                           |
| Penempatan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan: | 10.926.191.043,00        | 50.318.288.360,00         |
| - UP 4.420.000.000,00                                    |                          |                           |
| - TU 6.506.191.043,00                                    |                          |                           |
| <b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>                            | <b>81.776.356.346,00</b> | <b>109.915.459.332,10</b> |

#### 5.5.5 Kenaikan/(Penurunan Kas)

Kenaikan atau penurunan kas adalah jumlah semua arus kas bersih dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.14 Rincian Kenaikan/(Penurunan) Kas**

| Uraian                                     | 31 Desember 2021<br>(Rp)   | 31 Desember 2020<br>(Rp) |
|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasi     | 182.481.522.867,62         | 229.320.335.838,11       |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi   | (260.671.048.727,16)       | (202.248.028.805,27)     |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan   | 0,00                       | 19.454.000,00            |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris | (12.427.956,00)            | 5.324.638,00             |
| <b>Jumlah Kenaikan/(Penurunan) Kas</b>     | <b>(78.201.953.815,54)</b> | <b>27.097.085.670,84</b> |

#### 5.5.6 Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas adalah saldo akhir pada Kas Daerah, Kas BLUD, Kas Dana JKN, dan Kas Dana BOS yang memiliki nilai yang sama dengan SiLPA pada LRA. Perhitungan saldo akhir kas adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.5.15 Rincian Saldo Akhir Kas**

| Uraian                                     | 31 Desember 2021<br>(Rp)  | 31 Desember 2020<br>(Rp)  |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Saldo Awal Kas Daerah, BLUD, JKN, dan BOS  | 302.365.102.234,28        | 275.268.016.563,44        |
| Kenaikan/(Penurunan) Kas                   | (78.201.953.815,54)       | 27.097.085.670,84         |
| Saldo Akhir Kas Daerah, BLUD, JKN, dan BOS | 224.163.148.418,74        | 302.365.102.234,28        |
| <b>Jumlah Saldo Akhir Kas</b>              | <b>224.163.148.418,74</b> | <b>302.365.102.234,28</b> |

Saldo akhir kas pada LAK tahun 2021 mempunyai nilai yang sama dengan SiLPA yang disajikan pada LRA sebesar Rp224.163.148.418,74.



## 5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas TA 2021 dibandingkan dengan TA 2020. Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.466.876.675.921,88 berasal dari saldo awal Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.411.000.311.989,37 ditambah surplus TA 2021 sebesar Rp57.680.611.386,92 ditambah koreksi ekuitas TA 2021 sebesar Rp1.804.247.454,41.

**Tabel 5.6.1 Laporan Perubahan Ekuitas**

| URAIAN                                                  | 2021                        | 2020                        |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| EKUITAS AWAL                                            | 3.411.000.311.989,37        | 3.279.100.874.054,66        |
| SURPLUS/DEFISIT - LO                                    | 57.680.611.386,92           | 87.031.638.224,93           |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR |                             |                             |
| Koreksi Nilai Persediaan                                | 0,00                        | 0,00                        |
| Selisih Revaluasi Aset Tetap                            | 0,00                        | 0,00                        |
| Koreksi Ekuitas Lainnya                                 | (1.804.247.454,41)          | 44.867.799.709,78           |
| <b>EKUITAS AKHIR</b>                                    | <b>3.466.876.675.921,88</b> | <b>3.411.000.311.989,37</b> |

### 5.6.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas awal tahun 2021 sebesar Rp3.411.000.311.989,37 berasal dari saldo ekuitas per 31 Desember 2020. Saldo ekuitas per 31 Desember 2020 berasal dari ekuitas awal sebesar Rp3.279.100.874.054,66 ditambah surplus – LO tahun 2020 sebesar Rp87.031.638.224,93 ditambah koreksi ekuitas tahun 2020 sebesar Rp44.867.799.709,78.

1. Ekuitas awal TA 2020 berasal dari saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2019.
2. Surplus/(Defisit) – LO TA 2020 berasal dari pendapatan – LO dikurangi Beban TA 2020 (lihat juga Laporan Operasional untuk tahun 2020).
3. Koreksi ekuitas tahun 2020 sebesar Rp44.867.799.709,78 berasal dari koreksi penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

**Tabel 5.6.2 Rincian Koreksi Ekuitas TA 2020**

| Koreksi yang menambah Ekuitas TA 2020                                                                                   | (Rp)             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Penyesuaian atas koreksi saldo awal kurang catat bagian laba penyertaan modal pada PDAM (pembulatan desimal tahun 2020) | 0,25             |
| Penyesuaian atas pelunasan penyisihan piutang retribusi menara                                                          | 15.325,00        |
| Penyesuaian atas penyisihan piutang DPM LUEP                                                                            | 1.000.000,00     |
| Penyesuaian atas penyisihan piutang retribusi pasar grosir                                                              | 63.720.050,00    |
| Penyesuaian atas penyisihan investasi non permanen                                                                      | 13.950.000,00    |
| Penyesuaian atas penyisihan piutang retribusi pelayanan kesehatan                                                       | 11.558.954,00    |
| Penyesuaian atas penyisihan piutang PBB                                                                                 | 997.617,80       |
| Penyesuaian atas penyisihan piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Hand Traktor                               | 1.500.000,00     |
| Penyesuaian atas penyisihan piutang BLUD                                                                                | 1.689.399.550,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| Koreksi yang menambah Ekuitas TA 2020                                                                          | (Rp)                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Penyesuaian atas mutasi kurang (keluar) akumulasi penyusutan aset tetap antar SKPD                             | 7.064.960.322,00          |
| Penyesuaian atas pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap karena kapitalisasi                               | 15.819.576.106,00         |
| Penyesuaian atas pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap karena dihibahkan                                 | 396.286,00                |
| Penyesuaian atas penilaian aset tetap Tanah yang bernilai nol                                                  | 1.002.130.550,00          |
| Penyesuaian atas pengakuan aset tetap Peralatan dan Mesin                                                      | 11.300.000,00             |
| Penyesuaian atas mutasi tambah (masuk) aset tetap antar SKPD                                                   | 52.240.771.549,00         |
| Penyesuaian atas koreksi saldo awal lebih catat utang jasa pelayanan kesehatan                                 | 28.170.000,00             |
| Penyesuaian atas pelunasan utang dana bagi hasil Pemerintah Pusat (lebih bayar PMK No.113 Tahun 2021)          | 70.382.242.754,00         |
| Penyesuaian atas koreksi piutang Transfer Pemerintah Pusat (kurang bayar PMK No.25 Tahun 2021)                 | 173.948.159,00            |
| Penyesuaian atas koreksi saldo awal kurang catat piutang transfer Pemerintah Provinsi (Pajak Rokok tahun 2020) | 3.289.246.746,00          |
| Penyesuaian atas pengurangan reklasifikasi antar KIB akumulasi penyusutan aset tetap karena perubahan regulasi | 4.607.082.716,00          |
| <b>Jumlah</b>                                                                                                  | <b>156.401.966.685,05</b> |
| Koreksi yang mengurangi Ekuitas TA 2020                                                                        | (Rp)                      |
| Penyesuaian atas koreksi saldo awal lebih catat bagian laba penyertaan modal pada BPR (LK audited 2020)        | 22.016,85                 |
| Penyesuaian atas koreksi saldo awal lebih catat penyertaan modal pada BPR (pembulatan desimal tahun 2020)      | 0,42                      |
| Penyesuaian atas mutasi tambah (masuk) akumulasi penyusutan aset tetap antar SKPD                              | 7.064.960.322,00          |
| Penyesuaian atas mutasi kurang (keluar) aset tetap antar SKPD                                                  | 52.240.771.549,00         |
| Penyesuaian atas koreksi saldo awal lebih catat piutang retribusi pelayanan kesehatan tahun 2020               | 46.950.000,00             |
| Penyesuaian atas koreksi utang dana bagi hasil Pemerintah Pusat (lebih bayar PMK No. 113 Tahun 2021)           | 49.769.108.658,00         |
| Penyesuaian atas pelunasan piutang Transfer Pemerintah Pusat (kurang bayar PMK No. 113 Tahun 2021)             | 1.460.005.175,00          |
| Penyesuaian atas koreksi saldo awal utang belanja pegawai anggota DPRD                                         | 952.349.254,00            |
| <b>Jumlah</b>                                                                                                  | <b>111.534.166.975,27</b> |
| <b>Jumlah Koreksi Ekuitas TA 2020</b>                                                                          | <b>44.867.799.709,78</b>  |

### 5.6.2 SURPLUS/(DEFISIT) – LO TA 2021

Surplus – LO TA 2021 sebesar Rp57.680.611.386,92 berasal dari pendapatan - LO dikurangi beban - LO TA 2021. Mengenai hal tersebut, lihat juga penjelasan atas Laporan Operasional.

### 5.6.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN MENDASAR

Koreksi ekuitas berupa koreksi yang menambah maupun mengurangi selama TA 2021. Koreksi ekuitas tersebut terdiri atas:

**Tabel 5.4.3 Rincian Koreksi Ekuitas TA 2021**

| Koreksi yang menambah Ekuitas TA 2021                      | (Rp)           |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Penyesuaian atas penyisihan piutang PBB                    | 9.635.175,90   |
| Penyesuaian atas penyisihan piutang retribusi pasar grosir | 108.674.600,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

| <b>Koreksi yang menambah Ekuitas TA 2021</b>                                                                                 | <b>(Rp)</b>               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Penyesuaian atas penyisihan piutang retribusi pelayanan kesehatan                                                            | 331.760,00                |
| Penyesuaian atas penyisihan piutang BLUD                                                                                     | 163.112.049,69            |
| Penyesuaian atas penyisihan piutang hasil pengelolaan dana bergulir                                                          | 39.650.000,00             |
| Penyesuaian atas penyisihan piutang penjualan angsuran/cicilan                                                               | 3.000.000,00              |
| Penyesuaian atas pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap karena kapitalisasi                                             | 949.504.790,00            |
| Penyesuaian atas aset tetap yang baru ditemukan (inventarisasi aset)                                                         | 1.739.232.000,00          |
| Penyesuaian atas koreksi saldo awal lebih catat utang jasa pelayanan kesehatan tahun 2020                                    | 132.482,00                |
| Penyesuaian atas koreksi saldo awal lebih catat utang BLUD tahun 2020                                                        | 124.602.510,00            |
| Penyesuaian atas koreksi saldo awal kurang catat piutang transfer Pemerintah Provinsi (Pajak Rokok Desember 2020)            | 1.675.733.591,00          |
| Penyesuaian atas koreksi saldo awal kurang catat piutang BLUD                                                                | 3.000.000,00              |
| Penyesuaian atas koreksi utang dana bagi hasil Pemerintah Pusat (lebih bayar yang sudah diselesaikan PMK No. 129 Tahun 2021) | 49.769.108.658,00         |
| <b>Jumlah</b>                                                                                                                | <b>54.585.717.616,59</b>  |
| <b>Koreksi yang mengurangi Ekuitas TA 2021</b>                                                                               | <b>(Rp)</b>               |
| Penyesuaian atas koreksi saldo awal lebih catat piutang retribusi pelayanan kesehatan tahun 2020                             | 2.626.400,00              |
| Penyesuaian atas koreksi saldo awal kurang catat utang BLUD tahun 2020                                                       | 1.500.000,00              |
| Penyesuaian atas koreksi piutang Transfer Pemerintah Pusat (kurang bayar yang sudah diselesaikan PMK No.129 Tahun 2021)      | 18.177.423.834,00         |
| Penyesuaian atas koreksi utang Transfer Pemerintah Pusat (lebih bayar PMK No.129 Tahun 2021)                                 | 38.208.414.837,00         |
| <b>Jumlah</b>                                                                                                                | <b>56.389.965.071,00</b>  |
| <b>Jumlah Koreksi Ekuitas TA 2021</b>                                                                                        | <b>(1.804.247.454,41)</b> |

Saldo koreksi ekuitas lainnya dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bertambahnya koreksi ekuitas lainnya karena adanya penyisihan piutang tahun sebelumnya sebesar Rp324.403.585,59 yang terdiri atas:
- Koreksi penyisihan piutang PBB sebesar Rp9.635.175,90 terdiri atas koreksi penyisihan piutang PBB sebesar Rp1.084.144.654,90 dikurangi koreksi ekuitas penyisihan piutang PBB karena penghapusan sebesar Rp1.074.509.479;
  - Koreksi penyisihan piutang retribusi pasar grosir sebesar Rp108.674.600,00;
  - Koreksi penyisihan piutang retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp331.760,00;
  - Koreksi penyisihan piutang BLUD sebesar Rp163.112.049,69, terdiri atas koreksi ekuitas penyisihan piutang BLUD RS. H. Hasan Basry sebesar Rp142.681.724,19, BLUD Puskesmas Kandangan sebesar Rp45.150,00, BLUD Puskesmas Negara sebesar Rp143.850,00, dan BLUD RS Daha Sejahtera sebesar Rp20.241.325,50;



- Koreksi atas penyisihan piutang hasil pengelolaan dana bergulir sebesar Rp39.650.000,00; dan
- Koreksi penyisihan piutang angsuran/cicilan penjualan sebesar Rp3.000.000,00.
- b. Bertambahnya koreksi ekuitas lainya karena adanya akumulasi penyusutan aset tetap karena kapitalisasi ke aset induk sebesar Rp949.504.790,00 yaitu kapitalisasi aset tetap gedung bangunan pada beberapa SKPD sebagai berikut:
  - Dinas Pendidikan sebesar Rp905.383.952,00;
  - Dinas Kesehatan sebesar Rp1.079.000,00;
  - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp20.826.882,00;
  - Kelurahan Kandangan Utara sebesar Rp1.436.667,00; dan
  - Kelurahan Kandangan Barat sebesar Rp20.778.289,00.
- c. Bertambahnya koreksi ekuitas lainnya karena adanya aset tetap yang baru ditemukan kemudian diinventarisasi ke KIB sebesar Rp1.739.232.000,00, yang terdapat pada SKPD sebagai berikut:
  - Dinas Kesehatan sebesar Rp70.000.000,00 berupa mobil ambulans yang dicatat pada aset tetap peralatan dan mesin (KIB B);
  - Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp1.150.000.000,00 berupa mobil pemadam kebakaran (truk R6 dan R3 Viar) dan tosa yang dicatat pada aset tetap peralatan dan mesin (KIB B); dan
  - Sekretariat Daerah sebesar Rp519.232.000,00 berupa tanah yang dicatat pada aset tetap tanah (KIB A).
- d. Bertambahnya koreksi ekuitas lainnya karena adanya koreksi saldo awal utang sebesar Rp49.893.843.650,00 yang terdapat pada SKPD sebagai berikut:
  - Dinas Kesehatan sebesar Rp132.482,00 berupa koreksi lebih catat utang pelayanan medis tahun 2020 sebesar Rp132.480,00 (nilai klaim yg disetujui oleh BPJS) dan Rp2,00 selisih pembulatan dari sistem aplikasi dengan manual; dan
  - RSUD H. Hasan Basry sebesar Rp124.602.510,00 berupa koreksi lebih catat utang BLUD jasa pelayanan medis Covid.
  - BPKPD sebesar Rp49.769.108.658,00 berupa koreksi lebih catat utang dana transfer pemerintah pusat yang sebelumnya dicatat berdasarkan PMK Nomor 25/PMK.07/2021.
- e. Bertambahnya koreksi ekuitas lainnya karena adanya koreksi saldo awal piutang sebesar Rp1.678.733.591,00 yang terdapat pada SKPD sebagai berikut:



- Rumah Sakit Daha Sejahtera sebesar Rp3.000.000,00 berupa koreksi saldo kurang catat piutang BLUD atas klaim Covid dari BPJS; dan
- BPKPD sebesar Rp1.675.733.591,00 berupa koreksi kurang catat piutang transfer antar daerah bagi hasil pajak rokok bulan Desember tahun 2020.
- f. Berkurangnya koreksi ekuitas lainnya karena adanya lebih catat piutang sebesar Rp18.180.050.234,00 yang terdapat pada SKPD sebagai berikut:
  - Dinas Kesehatan sebesar Rp2.626.400,00 berupa koreksi lebih catat saldo awal piutang retribusi pelayanan kesehatan (BJS RITP Puskesmas) tahun 2020 karena verifikasi nilai disetujui oleh BPJS.
  - BPKPD sebesar Rp18.177.423.834,00 berupa koreksi lebih catat saldo awal piutang dana transfer pemerintah pusat yang sebelumnya dicatat berdasarkan PMK Nomor 25/PMK.07/2021.
- g. Berkurangnya koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp1.500.000,00 berupa koreksi kurang catat utang BLUD atas klaim covid pada RS Daha Sejahtera.
- h. Berkurangnya koreksi ekuitas lainnya karena adanya utang lebih bayar dana transfer pemerintah pusat tahun 2020 yang belum diselesaikan sesuai PMK Nomor 129/PMK.07/2021 tanggal 16 September sebesar Rp38.208.414.837,00.

#### **5.6.4 EKUITAS AKHIR**

Jumlah Ekuitas Akhir per 31 Desember 2021 merupakan Ekuitas Awal sebesar Rp3.411.000.311.989,37 ditambah surplus sebesar Rp57.680.611.386,92 ditambah koreksi ekuitas sebesar Rp1.804.247.454,41 sama dengan ekuitas akhir sebesar Rp3.466.876.675.921,88.



## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI –INFORMASI NON KEUANGAN DAN KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA**

#### **6.1 PERATURAN TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Dengan telah diterbitkannya beberapa peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, maka Pemerintah Daerah harus menyusun Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah termasuk di dalamnya Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2010. Seiring dengan berjalannya waktu maka Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi, yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menyusun draf dimaksud dan pada akhir tahun 2011 lalu ditetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 0177 Tahun 2011 tentang Sistem Prosedur Kebijakan Akuntansi dan juga Peraturan Bupati tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Nomor 0176 Tahun 2011 pada Tanggal 26 Desember 2011.

Pada Tahun 2016 Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah direvisi kembali sebagai tindak lanjut atas temuan BPK dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan No. 91 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selain itu pada tahun 2016 diterbitkan juga Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan No. 50 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pada Tahun 2020 Kebijakan Akuntansi direvisi kembali sebagai tindak lanjut atas temuan BPK dan penyesuaian atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Masa Manfaat dan Penyusutan Barang Milik Daerah.

Pada tanggal 16 Desember 2020 ditetapkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/394/KUM/2020 tentang Penghapusan Penyertaan Modal Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil pada Neraca Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan





Nomor 188.44/097/KUM/2017 tentang Pembubaran Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil dan Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## **6.2 PERATURAN TERKAIT PERUBAHAN SOTK (STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA)**

Perubahan SOTK di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilakukan untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyebutkan bahwa “Pelaksanaan pemetaan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan” (Ketentuan Penutup Pasal 124).

Perubahan SOTK ini tidak bisa lepas dari perkembangan organisasi yang memang menuntut untuk adanya perubahan menyangkut berubahnya struktur organisasi, nomenklatur, dan tupoksi. Latar belakang perubahan SOTK di Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3).

Susunan Organisasi SKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri atas: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, 19 Dinas, 5 Badan, 11 Kecamatan, dan 4 Kelurahan. Terkait dengan adanya perubahan SOTK di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa adanya pemisahan, penggabungan, peleburan, dan pemekaran dari beberapa dinas, kantor dan badan, diantaranya:

1. Adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dulunya tergabung dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Beberapa dinas dan badan yang berubah nama diantaranya:
  - a. Dinas Pendidikan menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
  - b. Badan Keuangan Daerah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
  - c. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

## **6.3 KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA**

### **6.3.1 Peraturan Gubernur tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Triwulan IV Tahun 2021**

Alokasi dana bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Air Permukaan (PAP), serta Pajak Rokok ditetapkan untuk periode tiga bulan (Triwulan) melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan, Alokasi dana bagi hasil pajak-pajak tersebut untuk Triwulan IV (periode Oktober sampai dengan Desember 2021) ditetapkan setelah tanggal neraca dengan rincian sebagai berikut:





**Tabel 6.3.1 Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Triwulan IV  
Tahun 2021**

| Uraian                             | Bagi Hasil Pajak | Alokasi<br>(Rp)          | Peraturan Gubernur<br>Kalsel (Pergub) |
|------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Alokasi Triwulan IV TA<br>2021     | PKB              | 2.158.754.580,00         | Nomor 012 Tahun 2021                  |
| Alokasi Triwulan IV TA<br>2021     | BBNKB            | 2.353.242.353,00         | Nomor 012 Tahun 2021                  |
| Alokasi Triwulan IV TA<br>2021     | PBBKB            | 14.873.709.607,00        | Nomor 013 Tahun 2021                  |
| Alokasi Triwulan IV TA<br>2021     | PAP              | 20.498.449,00            | Nomor 014 Tahun 2021                  |
| Alokasi Oktober -<br>November 2021 | Pajak Rokok      | 2.324.424.452,00         | Nomor 011 Tahun 2021                  |
| <b>J U M L A H</b>                 |                  | <b>21.730.629.441,00</b> |                                       |



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Berdasarkan penjelasan pada Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara teknis telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Pelaporan Pelaksanaan Anggaran pada Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berusaha melaksanakan secara konsisten peraturan perundang-undangan dalam bidang keuangan untuk memenuhi amanat pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Namun tidak dapat dihindari terdapat permasalahan-permasalahan yang mengikutinya, diantaranya yaitu kesiapan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan proses penyesuaian dan stabilisasi sistem keuangan yang berbeda-beda terutama dengan diberlakukan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual mulai tahun 2015.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai selatan Tahun Anggaran 2021 ini disusun untuk memberikan informasi lebih komperhensif dan informatif untuk menerjemahkan poin-poin dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, semoga dapat bermanfaat untuk pengguna Laporan Keuangan sebagai salah satu bahan pertimbangan pengambilan keputusan/kebijakan dan sebagai alat ukur kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara keseluruhan serta sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun-tahun berikutnya.

Semoga Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang selalu meridhoi setiap langkah kita bersama dan senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya demi kepentingan Bangsa, Negara serta Daerah.

Kandangan, Mei 2022



**ACHMAD FIKRY**